

**BUKU LAPORAN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
(IKPLHD)
KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT karena atas izin dan kemurahannya, dapat terselesaikan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Banda Aceh Tahun 2018 yang merupakan laporan tentang gambaran kinerja daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

IKPLHD disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Informasi ini juga untuk memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

IKPLHD tidak hanya menyajikan gambaran status atau kondisi lingkungan hidup tetapi juga menyajikan informasi tentang perubahan penduduk dengan kualitas dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya, yang merupakan tekanan terhadap lingkungan. Dimana dengan keterbatasan lingkungan dan teknologi, tekanan tersebut harus tetap dikendalikan sehingga tidak menimbulkan bencana. Upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan program untuk pengendalian dan penanganan dampak lingkungan yang terjadi, menjadi respon penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Dukungan dan peran serta masyarakat termasuk para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam merespon hal tersebut juga menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup.

Pemerintah Kota Banda Aceh menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu / memfasilitasi penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Banda Aceh Tahun 2018 sehingga bermanfaat bagi *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan.

Saran serta masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi laporan IKPLHD sebagai bahan pembelajaran dalam menetapkan kebijakan dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Banda Aceh.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Banda Aceh, April 2019



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG.....	I-1
2. KARAKTERISTIK DAN KEADAAN UMUM DAERAH.....	I-3
2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	I-3
2.2. Topografi Kemiringan Lahan	I-4
2.3. Ketinggian Tempat	I-5
2.4. Geomorfologi.....	I-6
2.5. Geologi.....	I-6
2.6. Hidrologi	I-7
2.7. Klimatologi.....	I-9
2.8. Fungsi Lahan dan Kawasan Bencana	I-10
2.9. Pengguna Lahan	I-10
2.10. Potensi Pengembangan Wilayah	I-13
2.11. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	I-13
2.12. Rencana Pengembangan Pusat Kota Lama Banda Aceh	I-17
2.13. Wilayah Rawan Bencana	I-19
2.14. Demografi dan Aspek Kesejahteraan Masyarakat	I-23
2.15. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	I-24
2.16. Pertumbuhan PDRB	I-24
2.17. Laju Inflasi.....	I-32
2.18. PDRB per Kapita.....	I-33
2.19. Kemiskinan.....	I-34
2.20. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	I-39
2.21. Fokus Kesejahteraan Masyarakat	I-40

2.22.	Angka Usia Harapan Hidup -----	I-40
2.23.	Cakupan Desa Siaga Bencana Aktif-----	I-41
2.24.	Kesehatan-----	I-42
2.25.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup-----	I-42
2.26.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup -----	I-43
2.27.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk -----	I-43
2.28.	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk -----	I-44
2.29.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk-----	I-45
2.30.	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk -----	I-45
2.31.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit TBC-----	I-46
2.32.	Tingkat Kematian Karena Tuberculosis (per 100.000) -----	I-47
2.33.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD -----	I-47
2.34.	Penderita Diare yang Ditangani -----	I-49
2.35.	Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasit Incidence) -----	I-49
2.36.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin-----	I-49
3.	KUALITAS FISIK DAN PENATAAN RUANG -----	I-50
3.1.	Proporsi Panjang Lahan dalam Kondisi Baik -----	I-50
3.2.	Persentase Rumah tinggal Bersanitasi-----	I-51
3.3.	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik -----	I-53
3.4.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum -----	I-55
3.5.	Persentase Areal Kawasan Kumuh-----	I-58
3.6.	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk -----	I-60
3.7.	Penataan Ruang -----	I-60
3.8.	Rasio RTH Per satuan Wilayah -----	I-60
3.9.	Rasio Bangunan Ber IMB per Satuan Bangunan -----	I-61
3.10.	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya -----	I-62
3.11.	Ketaatan Terhadap RTRW-----	I-63
3.12.	Kawasan Pemukiman dan Bencana Kebakaran -----	I-63
3.13.	Rasio Rumah Layak Huni -----	I-63
3.14.	Persentase Pemukiman yang Tertata -----	I-64
3.15.	Persentase Lingkungan Pemukiman kumuh -----	I-65
3.16.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota -----	I-66
3.17.	Tingkat Waktu Tenggang Daerah Layanan WMK -----	I-67
3.18.	Persentase Penegakan Perda -----	I-68
3.19.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Desa yang Baik-----	I-69

3.20.	Cakupan Sarana Perkantoran Mukim yang Baik -----	I-71
4.	SOSIAL, EKONOMI DAN PERLINDUNGAN ANAK-----	I-73
4.1.	Sosial -----	I-73
4.2.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial -----	I-74
4.3.	Jumlah PMKS yang mendapat Pembinaan -----	I-74
4.4.	Persentase Bantuan Melalui Program Pemberdayaan Sosial ----	I-75
4.5.	Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial -----	I-75
4.6.	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental-----	I-76
4.7.	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar -----	I-76
4.8.	Bidang Tenaga Kerja-----	I-76
4.9.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun -----	I-76
4.10.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan -----	I-77
4.11.	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan -----	I-77
4.12.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 -----	I-77
4.13.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-----	I-78
4.14.	Persentase Partisipasi Perempuan di Pemerintahan(%) -----	I-79
4.15.	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga-----	I-79
4.16.	Kota Layak Anak-----	I-80
4.17.	Perluasan Jaringan Khususnya Untuk Panti /Pusat Rehabilitasi	I-80
4.18.	Cakupan Penegakan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak--	I-81
4.19.	Penyelesaian Kasus Melalui Litigasi dan Non Litigasi -----	I-81
5.	KETERSEDIAAN PANGAN, ENERGI DAN KUALITAS LINGKUNGAN --	I-82
5.1.	Bidang Pangan -----	I-82
5.2.	Ketersediaan Pangan Utama -----	I-82
5.3.	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih-----	I-83
5.4.	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik -----	I-84
5.5.	Bidang Lingkungan Hidup -----	I-84
5.5.1.	Timbunan Sampah Yang Ditangani -----	I-84
5.5.2.	Pencemaran Status Mutu Air -----	I-85
5.5.3.	Cakupan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL-----	I-87
5.5.4.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk	I-88
5.5.5.	IPLT Gampong Jawa -----	I-89
5.5.6.	Pemanfaatan Gas Metana TPA Gampong Jawa -----	I-90
5.5.7.	Pengelolaan RTH -----	I-91
5.5.8.	Pencemaran Tingkat Kebisingan -----	I-94

5.5.9.	Meraih Adipura -----	I-95
5.6.	Persentase Penerangan Jalan Umum -----	I-97
5.7.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa -----	I-98
5.8.	Pertanian dan Ketersediaan Pangan -----	I-98
5.8.1.	Produktivitas Padi Per Hektar -----	I-98
5.8.2.	Cakupan Bina Kelompok Tani-----	I-99
5.8.3.	Peternakan-----	I-99
5.8.4.	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya-----	I-101
5.8.5.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan -----	I-101
5.8.6.	Energi dan Sumber Daya Mineral -----	I-102
5.8.7.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik-----	I-102
5.8.8.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik -----	I-103
6.	PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN PERINDUSTRIAN -----	I-103
6.1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum-----	I-103
6.2.	Rasio Ijin Trayek -----	I-104
6.3.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum -----	I-105
6.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis -----	I-106
6.5.	Persentase Layanan Angkutan Darat -----	I-106
6.6.	Pemasangan Rambu-Rambu -----	I-107
6.7.	Perparkiran -----	I-109
6.8.	Bidang Komunikasi dan Informatika -----	I-109
6.9.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong di Tingkat Kecamatan-----	I-109
6.10.	Perindustrian -----	I-110
6.10.1.	Jumlah IKM Yang Mendapatkan Bantuan Perbankan-----	I-110
6.10.2.	Jumlah Ikimyang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi	I-111
6.10.3.	Jumlah Produk yang Menunjang Program OVOP -----	I-112
6.10.4.	Jumlah Pasar Yang Sudah Berfungsi Secara Optimal -----	I-113
6.10.5.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang -----	I-115
6.10.6.	Jenis, Kelas, dan Jumlah Restourant-----	I-115
6.10.7.	Jenis, Kelas dan Jumlah Hotel dan Penginapan-----	I-116
7.	PEMERINTAHAN,INVESTASI DAN ASPEK DAYA SAING-----	I-118
7.1.	Fokus Penunjang Urusan -----	I-118
7.2.	Perencanaan Pembangunan-----	I-118
7.2.1.	Tersedianyan Dokumen Perencanaan RPJP,RPJM, RKPK ---	I-118

7.3.	Keuangan -----	I-118
7.3.1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan -----	I-118
7.3.2.	Persentase SILPA -----	I-119
7.3.3.	Persentase SILPA terhadap APBD -----	I-119
7.3.4.	Persentase Belanja Pendidikan -----	I-120
7.3.5.	Persentase Belanja Kesehatan -----	I-120
7.3.6.	Persentase Belanja Langsung dan Tak Langsung -----	I-120
7.3.7.	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa -----	I-121
7.3.8.	Pendapatan APBD -----	I-122
7.3.9.	Pengawasan -----	I-122
7.4.	Pemerintahan Umum -----	I-123
7.4.1.	Nilai SAKIP Pemerintahan Kota -----	I-123
7.4.2.	Pembangunan Zona Integritas -----	I-124
7.4.3.	Kapabilitas APIP -----	I-124
7.4.4.	Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur -----	I-125
7.4.5.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk ---	I-125
7.4.6.	Jumlah Linmas Per Jumlah Penduduk -----	I-126
7.4.7.	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Gampong -----	I-127
7.5.	Fokus Iklim Berinvestasi -----	I-128
7.5.1.	Angka Kriminalitas -----	I-128
7.5.2.	Jumlah Demonstrasi -----	I-129
7.5.3.	Lama Proses Perizinan -----	I-129
7.5.4.	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha -----	I-130
7.5.5.	Pengenaan Pajak Daerah -----	I-131
7.5.6.	Pembinaan Pengawasan -----	I-132
7.5.7.	Sumber Daya Manusia -----	I-132
7.5.8.	Rasio Ketergantungan -----	I-132
7.6.	Aspek Daya Saing Daerah -----	I-133
7.6.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah -----	I-133
7.6.2.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita -----	I-133
7.6.3.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur -----	I-134
7.6.4.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan -----	I-134
7.6.5.	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum --	I-134
7.6.6.	Jumlah Orang yang melalui Dermaga/Terminal Per Tahun	I-135

BAB II. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.1. Pencemaran Air -----	II-3
2.2. Pencemaran Udara -----	II-4
2.3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) -----	II-5
BAB III. ANALISIS STATE, PRESSURE AND RESPONSE	
3.1. Kualitas Air -----	III-1
3.1.1. Hasil Analisa State, Perssure and Response Pencemaran Air Di Kota Banda Aceh -----	III-1
3.1.1.1. Analisis State -----	III-1
3.1.1.2. Analisis pressure-----	III-28
3.1.1.3. Analisis Response-----	III-29
3.2. Kualitas Udara -----	III-31
3.2.1. Hasil Analisa State, Pressure and Response Pencemaran Udara Di Kota Banda Aceh-----	III-31
3.2.1.1. Analisis State -----	III-31
3.2.1.2. Analisis Perssure-----	III-42
3.2.1.3. Analisis Response-----	III-42
3.3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) -----	III-43
3.3.1. Hasil Analisa State, Pressure and Response Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh -----	III-43
3.3.1.1. Analisa State -----	III-43
3.3.1.2. Analisa Pressure -----	III-46
3.3.1.3. Analisa Response -----	III-47
BAB IV. INOVASI DAERAH	
A. Rehabilitasi Lingkungan -----	IV-3
B. Pengawasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan-----	IV-8
C. Peran Serta Masyarakat -----	IV-9
D. Kelembagaan -----	IV-11
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Pencemaran Air -----	V-2
4.2. Pencemaran Udara-----	V-3
4.3. Ruang Terbuka Hijau-----	V-5
DAFTAR PUSTAKA -----	V-7

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh -----	I-3
1.2. Nama Sungai dan Luas Daerah Alirannya di Kota Banda Aceh -----	I-8
1.3. Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2017-----	I-9
1.4. Penggunaan Lahan Eksiting di Lahan Terbangun Tahun 2017-----	I-11
1.5. Penggunaan Lahan Eksiting di Lahan Belum Terbangun Tahun 2017-----	I-11
1.6. Rencana Pusat – Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh-----	I-15
1.7. Indikator kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017-----	I-23
1.8. PDRB Tahun 2012-2016 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 -----	I-26
1.9. PDRB Tahun 2012-2016 atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 -----	I-27
1.10. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB-----	I-28
1.11. Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku -----	I-30
1.12. Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2013 s.d 2017 -----	I-32
1.13. PDRB perkapita Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan-----	I-33
1.14. Penduduk Miskin Kota Banda Aceh 2013-2017-----	I-39
1.15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2013-2017 -----	I-40
1.16. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2013 – 2017 -----	I-44
1.17. Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk Tahun 2013 – 2017 -----	I-44
1.18. Perkembangan Rasio Dokter Per-SatuanPenduduk 2013 – 2017 -----	I-45
1.19. Data Sebaran Kasus DBD Tahun 2013-2017-----	I-48
1.20. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin Tahun 2013-2017 -----	I-49
1.21. Data Perbandingan Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status-----	I-50
1.22. Data Status Kondisi Jalan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012-2016-----	I-50
1.23. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Banda AcehTahun 2013 – 2017 -----	I-52
1.24. Data Kondisi Drainase Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016-----	I-53
1.25. Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase-----	I-55
1.26. Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016 -----	I-58
1.27. Tabel Lokasi Tempat Pemakaman Umum dibawah Pengelolaan DLHK3-----	I-60
1.28. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2013 – 2017 ---	I-61
1.29. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2013 – 2017 -----	I-62

1.30. Tabel Jumlah ruang Publik yang tersedia -----	I-62
1.31. Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2012 – 2016-----	I-63
1.32. Tabel Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016 -----	I-64
1.33. Persentase Luas Pemukiman Tertata -----	I-64
1.34. Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016 -----	I-65
1.35. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Banda Aceh -----	I-67
1.36. Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan -----	I-67
1.37. Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2012 – 2016-----	I-68
1.38. Tabel Persentase Penegakan Perda Tahun 2012-2016 Kabupaten Kota -----	I-68
1.39. Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Desa yang Baik-----	I-70
1.40. Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik-----	I-72
1.41. Daftar Penyandang Masalah Sosial di Kota Banda Aceh -----	I-73
1.42. Jangkauan PKH Dan Jumlah Bantuan Tahun 2013-2016 -----	I-74
1.43. Tabel Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama ----	I-75
1.44. Tabel Jumlah Penyelesaian Perselisihan Tahun 2012-2016 -----	I-76
1.45. Tabel Pencari Kerja yang Ditempatkan -----	I-77
1.46. Tabel tingkat Pendidikan di Kota Banda Aceh-----	I-78
1.47. Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017---	I-79
1.48. Tabel Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) -----	I-79
1.49. Tabel indikator KLH yang dicapai tahun 2012-2016-----	I-80
1.50. Tabel Mitra P2TP2A -----	I-80
1.51. Tabel Ketersediaan Pangan Utama -----	I-83
1.52. Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih -----	I-83
1.53. Tabel Realisasi Persentase Cakupan Pelayanan Sampah Periode 2012-2016	I-84
1.54. Data Sumber Pencemaran Air Tahun 2016 -----	I-86
1.55. Tingkat Pencemaran Air Sungai Krueng Aceh Tahun 2016 -----	I-86
1.56. Tingkat Pencemaran Air Sungai Krueng Daroy Tahun 2016 -----	I-87
1.57. Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL -----	I-87
1.58. Tabel Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk-----	I-88
1.59. Tabel Volume Tinja dibuang ke IPLT -----	I-90
1.60. Tabel Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau -----	I-91
1.61. Tabel Pemeliharaan dan Penanganan RTH-----	I-92
1.62. Tabel Pencemaran Tingkat Kebisingan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	I-94

1.63. Tabel Jenis dan Sumber Pencemaran Udara -----	I-94
1.64. Total Penghargaan Adipura di Kota Banda Aceh-----	I-97
1.65. Persentase Penerangan Jalan Umum di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017	I-97
1.66. Tabel Luas Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi -----	I-98
1.67. Tabel Rumus Cakupan Bina Kelompok Pertanian -----	I-99
1.68. Tabel Data Potensi Ternak Tahun 2012-2017-----	I-100
1.69. Tabel Rumus Produksi Ikan-----	I-101
1.70. Tabel Rumus Cakupan Binaan Kelompok Nelayan -----	I-102
1.71. Tabel Penggunaan Energi Listrik -----	I-102
1.72. Rasio Ketersediaan Daya Listrik -----	I-103
1.73. Tabel Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016-----	I-103
1.74. Tabel jumlah Penumpang dan Angkutan Umum Darat Tahun 2012-2016----	I-104
1.75. Tabel Rasio Izin Trayek Kota Banda AcehTahun 2012 – 2016 -----	I-104
1.76. Tabel Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016 -----	I-105
1.77. Tabel Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2013 – 2017-----	I-106
1.78. Tabel Persentase Angkutan Darattahun 2012-2016 -----	I-106
1.79. Persentase Pemasangan Rambu Tahun 2013 – 2017 -----	I-106
1.80. Kondisi Perpustakaan Di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017 -----	I-107
1.81. Perpustakaan Kendaraan Bermotor Di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016---	I-108
1.82. Tabel terminal angkutan penumpang/barangdi Kota Banda Aceh -----	I-108
1.83. Tabel angkutan umum yang melayani wilayah Jaringan Jalan Tahun 2012-2016 -----	I-109
1.84. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong di tingkat Kecamatan -----	I-110
1.85. Tabel Data Perkembangan Industri Kecil Kota Banda Aceh-----	I-110
1.86. Tabel Perkembangan Industri Kecil dan Menengah -----	I-111
1.87. Nama Pasar di Kota Banda Aceh -----	I-114
1.88. Jumlah Perusahaan Asuransi -----	I-115
1.89. Tabel Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran -----	I-115
1.90. kelas dan Jumlah Penginapan/HotelKota Banda Aceh -----	I-117
1.91. Tabel Persentase SILPA Kota Banda Aceh-----	I-119

1.92. Tabel Persentase SILPA Terhadap APBD -----	I-119
1.93. Tabel Persentase Belanja Pendidikan -----	I-120
1.94. Tabel Persentase Belanja Kesehatan -----	I-120
1.95. Tabel Persentase Belanja Langsung -----	I-120
1.96. Tabel Persentase Belanja Tidak Langsung -----	I-121
1.97. Tabel Persentase Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa -----	I-121
1.98. Tabel Penetapan APBD-----	I-122
1.99. Jumlah Temuan BPK, Inspektorat Aceh dan Inspektorat Kota Banda Aceh -----	I-122
1.100. Tabel hasil Evaluasi SAKIP -----	I-123
1.101. Tabel SKPD yang mendapat predikat WBK -----	I-124
1.102. Level Kapabilitas APIP -----	I-124
1.103. Jumlah Pegawai dan Tingkat Kompetensi Aparatur Pengawasan -----	I-125
1.104. Tabel Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2012-2016 Kota -----	I-126
1.105. Rasio Jumlah Linmas Kota Banda Aceh Per 10.000 Penduduk Tahun 2012 – 2016 -----	I-127
1.106. Rasio Jumlah Siskamling Per Kecamatan Tahun 2012 s.d 2016-----	I-127
1.107. Tabel Angka Kriminalitas di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2016 -----	I-128
1.108. Kasus Narkoba di Kota Banda Aceh -----	I-128
1.109. Tabel Jumlah Demonstrasi -----	I-129
1.110. Lama Proses Perizinan Kota Banda Aceh -----	I-130
1.111. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Investasi -----	I-130
1.112. Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah -----	I-131
1.113. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan serta Jumlah Objek Pemeriksaan -----	I-132
1.114. Tabel Tingkat Ketergantungan -----	I-132
1.115. Rasio panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh-----	I-134
1.116. Tabel Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2012-2016-----	I-135
1.117. Jumlah orang/ barang melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun 2012-2016-----	I-135
2.1. Data Sumber Pencemaran Air Tahun 2016 -----	II-3
2.2. Tingkat Pencemaran Air Sungai Krueng Aceh Tahun 2016 -----	II-3
2.3. Tingkat Pencemaran Air Sungai Krueng Daroy Tahun 2016-----	II-3

2.4.	Penggunaan Energi Listrik -----	II-6
3.1.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016 -----	III-43
3.2.	Luas dan Komponen RTH Kota Banda Aceh Tahun 2016-----	III-44
3.3.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau -----	III-57
3.4.	Tabel Pemeliharaan dan Penanganan RTH-----	II-57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1. Letak Geografis Kota Banda Aceh -----	I-3
1.2. Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh -----	I-4
1.3. Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh-----	I-5
1.4. Kondisi Geologi Kota Banda Aceh-----	I-7
1.5. Peta Hidrologi Kota Banda Aceh -----	I-8
1.6. Peta Penggunaan Lahan eksisting Kota Banda Aceh Tahun 2015 -----	I-2
1.7. Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh -----	I-15
1.8. Kawasan Pengembangan Kawasan Masjid Raya Baiturrahman-----	I-17
1.9. Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah -----	I-18
1.10. Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong -----	I-19
1.11. Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh-----	I-20
1.12. Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh-----	I-21
1.13. Peta Bahaya DBD Kota Banda Aceh-----	I-21
1.14. Peta Bahaya Gempa Kota Banda Aceh-----	I-22
1.15. Peta Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh -----	I-22
1.16. Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk Tahun 2004-2016 -----	I-23
1.17. Piramida penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2015-----	I-24
1.18. Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2011-2016-----	I-25
1.19. Grafik Laju Inflasi tahun 2012-2016 -----	I-32
1.20. PDB Perkapita Banda Aceh Tahun 2012-2016 -----	I-34
1.21. Angka Harapan Hidup di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016 -----	I-41
1.22. Perkembangan AKB Banda Aceh, Aceh, dan Nasional Tahun 2012 – 2016 ---	I-42
1.23. Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk Tahun 2012-2016 -----	I-46
1.24. Data Kasus Kematian Akihat DBD tahun 2012-2016-----	I-48
1.25. Grafik Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun Anggaran 2012-2016 -----	I-51
1.26. Grafik Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi Tahun 2012 – 2016 -----	I-52
1.27. Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh -----	I-54
1.28. Grafik Perkembangan Kondisi Main Drain Kota Banda Aceh 2012 – 2016----	I-54
1.29. Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis PDAM Tirta Daroy -----	I-56

1.30. Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029 -----	I-57
1.31. Grafik Jumlah Bangunan ber IMB Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016-----	I-62
1.32. Gambar Penyelesaian Kasus -----	I-81
1.33. Grafik Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2012 – 2016 -----	I-83
1.34. Keadaan sampah di Kota Banda Aceh -----	I-85
1.35. Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Penanaman Pohon Tahun 2015-2016	I-93
1.36. Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Lokasi Taman yang Dipelihara Tahun 2015-2016 -----	I-93
1.37. Keadaan Adipura di Kota Banda Aceh-----	I-96
1.38. Grafik Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi Tahun 2012-2016-----	I-112
1.39. Jumlah Produk yang menunjang OVOP di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016-----	I-113
1.40. Pengeluaran Perkapita per bulan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional pada Tahun 2012-2016 -----	I-133
2.1. Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kota Banda Aceh -----	II-6
3.1. Profil Parameter Fisik dan Biologi DAS Kr. Aceh-----	III-2
3.2. Profil Kandungan Logam Berat dan Parameter Kimia DAS Kr. Aceh -----	III-3
3.3. Profil TDS dan TSS Air Sungai Kr. Aceh -----	III-4
3.4. Profil BOD dan COD Air Sungai Kr.Aceh -----	III-5
3.5. Profil DO dan Total Phosphat Air Sungai Kr. Aceh -----	III-6
3.6. Profil Nitrat dan Nitrit Air Sungai Kr. Aceh -----	III-7
3.7. Profil Khlorida dan Sulfat Air Sungai Kr. Aceh -----	III-8
3.8. Profil DHL dan H ₂ S Air Sungai Kr. Aceh -----	III-9
3.9. Profil Ion Pb dan Ion Fe pada Air Sungai Kr. Aceh -----	III-10
3.10. Profil Ion Mn dan Ion Cd pada Air Kr. Aceh -----	III-11
3.11. Profil Kandungan Deterjen dan Minyak dan Lemak pada Air Sungai Kr. Aceh -----	III-12
3.12. Profil Kandungan E-Coli dan Total Coliform pada Air Sungai Kr. Aceh -----	III-12
3.13. Profil Kandungan Logam Berat dan Parameter Kimia DAS Kr.Daroy -----	III-13
3.14. Profil Parameter Fisik dan Biologi DAS Kr. Daroy -----	III-14
3.15. Profil temperatur dan PH Air Sungai Kr. Daroy -----	III-15

3.16. Profil TDS dan TSS Air Sungai Kr. Daroy -----	III-15
3.17. Profil BOD dan COD DAS Kr. Daroy -----	III-16
3.18. Profil DO dan Phosphat Air Sungai Kr. Daroy -----	III-17
3.19. Profil Nitrat dan Nitrit Air Sungai Kr. Daroy -----	III-18
3.20. Profil Khlorida dan Sulfat Air Sungai Kr. Daroy -----	III-19
3.21. Profil DHL dan H ₂ S Air Sungai Kr. Daroy -----	III-20
3.22. Profil Ion Pb dn Ion Fe pada Air Kr. Daroy -----	III-20
3.23. Profil Ion Mn dan Ion Cd Pada Air Kr. Daroy -----	III-21
3.24. Profil Kandungan Deterjen dan Minyak Lemak pada Air Sungai Kr. Daroy ---	III-22
3.25. Profil Kandungan E-Coli dan Total Coliform pada Air Sungai Kr. Daroy -----	III-23
3.26. Profil Kandungan Logam Berat dan Parameter Kimia DAS Krueng Lueng Paga -----	III-24
3.27. Profil Parameter Fisik dan Biologi DAS Kr. Doy -----	III-25
3.28. Profil Kandungan Logam Berat dan Parameter Kimia DAS Kr. Doy -----	III-25
3.29. Profil Parameter fisik dan Biologi DAS Sungai di Banda Aceh -----	III-26
3.30. Profil Kandungan Logam Berat dan Parameter Kimia DAS Sungai di Banda Aceh-----	III-27
3.31. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Udara dengan Parameter Karbon Monoksida (CO) pada Kawasan Transportasi -----	III-32
3.32. Hasil Uji Laboratorim Kualitas Udara dengan Parameter Sulfur Dioksida (SO ₂) pada Kawasan Transportasi -----	III-33
3.33. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Udara dengan Parameter Nitrogen Dioksida (NO ₂) pada Kawasan Transportasi -----	III-33
3.34. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Udara dengan Parameter Carbon Monoksida (CO) pada Kawasan Transportasi -----	III-34
3.35. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Udara dengan Parameter Sulfur Dioksida (SO ₂) pada Kawasan Industri -----	III-35
3.36. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Udara dengan Parameter Nitrogen Oksida (NO ₂) pada Kawasan Industri -----	III-36
3.37. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Udara dengan Parameter Karbon Monksida (CO) pada Kawasan Perkantoran -----	III-37
3.38. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Udara dengan Parameter Sulfur Dioksida (SO ₂) pada Kawasan Perkantoran -----	III-38

3.39. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Udara dengan Parameter Nitrogen Oksida (NO ₂) pada Kawasan Perkantoran -----	III-38
3.40. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Udara dengan Parameter Karbon Monksida (CO) pada Kawasan Pemukiman -----	III-40
3.41. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Udara dengan Parameter Sulfur Dioksida (SO ₂) pada Kawasan Pemukiman -----	III-40
3.42. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Udara dengan Parameter Nitrogen Oksida (NO ₂) pada Kawasan Pemukiman -----	III-41
3.43. Peta Potensi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Banda Aceh -----	III-48
3.44. Taman Kota Di Banda Aceh -----	III-49
3.45. Taman Kota di Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala -----	III-50
3.46. Kondisi Jalur Hijau di Beberapa Ruas Jalan Kota Banda Aceh -----	III-51
3.47. RTH Jalur Hijau Sempadan Sungai di Kota Banda Aceh -----	III-52
3.48. RTH Jalur Hijau Sempadan Pantai di Kota Banda Aceh -----	III-53
3.49. RTH Lapangan Olahraga di Kota Banda Aceh -----	III-53
3.50. Beberapa RTH Pemakaman di Kota Banda Aceh -----	III-55
3.51. Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Penanaman Pohon Tahun 2015-2016 -----	III-58
3.53. Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Lokasi Taman yang dipelihara Pada Tahun 2015-2016 -----	III-59
4.1. Ruang Terbuka Hijau -----	IV-6
4.2. Dukungan Masyarakat oleh Mahasiswa Unsyiah dalam Menanam Mangrove -----	IV-7
4.3. RTH Publik Taman Putroe Phang Kota Banda Aceh -----	IV-7
4.4. Sosialisasi Program Adiwiyata -----	IV-10

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan memperhatikan kualitas dan kapasitas lingkungan hidup melalui ketersediaan data sehingga dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Rio de Janeiro pada tahun 1992, tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan [*The United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED)] telah menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup, dengan menggarisbawahi bahwa diperlukannya kemampuan pemerintahan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup yang informatif.

Road map strategi pengelolaan lingkungan hidup Indonesia lebih diarahkan kepada: peningkatan produktivitas sumberdaya; penganekaragaman hasil produksi; perbaikan tata ruang; dan peningkatan fungsi konservasi. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat diperoleh apabila dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang memadai karena hal ini merupakan azas kunci bagi pencapaian pertumbuhan sosial dan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, pada Agenda 21 Indonesia, strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan melibatkan: 1) pelayanan masyarakat; 2) pengelolaan limbah; 3) pengelolaan sumberdaya tanah; dan 4) pengelolaan sumberdaya alam (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997).

Sementara itu dalam Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (UUD 1945, pasal 28F).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya yang meliputi keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Dalam konteks pembangunan di Kota Banda Aceh saat ini dan pada masa mendatang, terdapat tiga permasalahan lingkungan hidup yang menjadi fokus perhatian akibat akselerasi pembangunan yang terjadi yang menjadikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup itu terabaikan. Ketiga permasalahan lingkungan hidup itu ialah: 1) tingginya laju kerusakan lingkungan hutan serta tuntutan konversi lahan dan adanya degradasi kualitas lingkungan, termasuk alih fungsi lahan yang kurang memperhatikan aspek-aspek ekologis, sehingga berakibat pada peningkatan luasan lahan yang perlu dikonservasi; 2) kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai dari sumbernya atau lemahnya praktek 3R, yaitu: *reused, reduced and recycled*); dan 3) kondisi kualitas lingkungan khususnya air badan air di wilayah Kota Banda Aceh yang masih belum memenuhi baku mutu. Berdasarkan pada ketiga kondisi di atas saat ini dipandang perlu untuk segera mendapatkan perhatian secara serius dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Dengan demikian ketiga permasalahan di atas juga merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dijadikan program atau kebijakan prioritas pembangunan Kota Banda Aceh dalam rangka melaksanakan perbaikan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup guna menyajikan kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengantisipasi keandalan lingkungan hidup hingga masa mendatang.

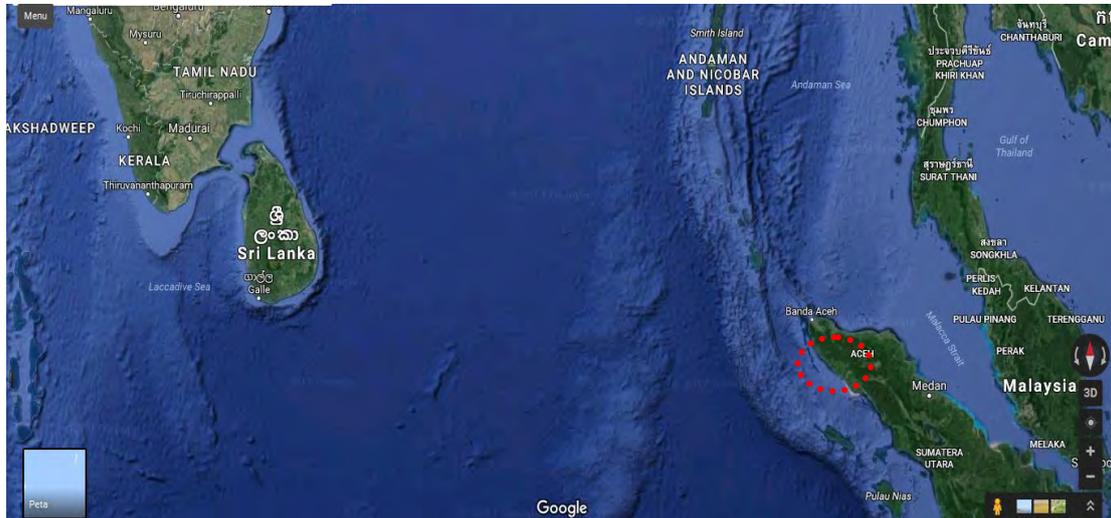
Merujuk pada permasalahan-permasalahan di atas, maka Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan dan mewujudkan akuntabilitas publik. Informasi tersebut harus menggambarkan keadaan/kondisi lingkungan hidup, penyebab dan dampak permasalahannya, serta respon pemerintah daerah dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup tersebut.

Buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Banda Aceh Tahun 2018 disusun sebagai langkah awal dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Banda Aceh tentang penyediaan informasi lingkungan hidup. Tujuan utamanya adalah untuk menilai, menentukan prioritas permasalahan, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup serta menerapkan pembangunan secara berkelanjutan.

2. KARAKTERISTIK DAN KEADAAN UMUM DAERAH

2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat.



Sumber : www.google.com/maps

Gambar 1.1

Letak geografis Kota Banda Aceh

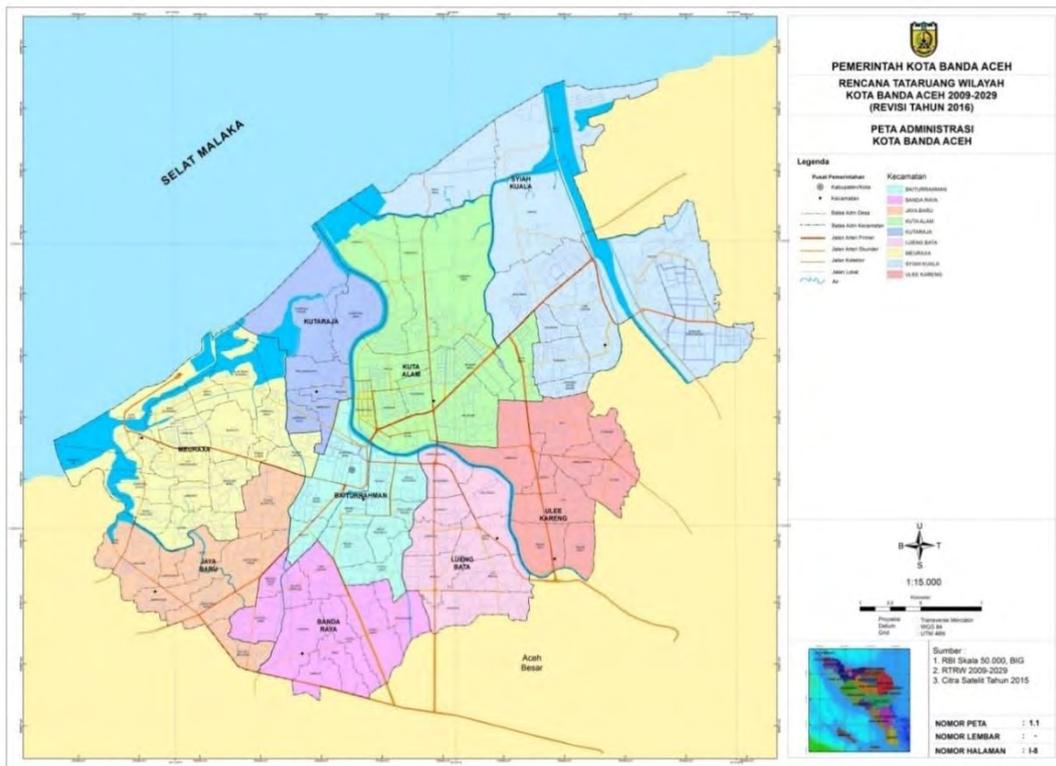
Letak geografis Kota Banda Aceh berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT, yang terdiri dari 9 kecamatan, 90 gampong. Berdasarkan hasil digitasi GIS Citra Satelit pada Tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh adalah 59,002 km², dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas	
		(Km ²)	Persentase
1.	Kec. Meuraxa	7,26	11,38%
2.	Kec. Baiturrahman	4,54	7,40%
3.	Kec. Kuta Alam	10,05	16,38%
4.	Kec. Syiah Kuala	14,24	23,21%
5.	Kec. Ulee Kareng	6,15	10,02%
6.	Kec. Banda Raya	4,79	7,81%
7.	Kec. Kuta Raja	5,21	8,49%
8.	Kec. Lueng Bata	5,34	8,70%
9.	Kec. Jaya Baru	3,78	6,16%
JUMLAH		59,002	100,00%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 1.2

Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh

Adapun batas-batas administrasi wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Timur : Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Sebelah Selatan : Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Sebelah Barat : Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

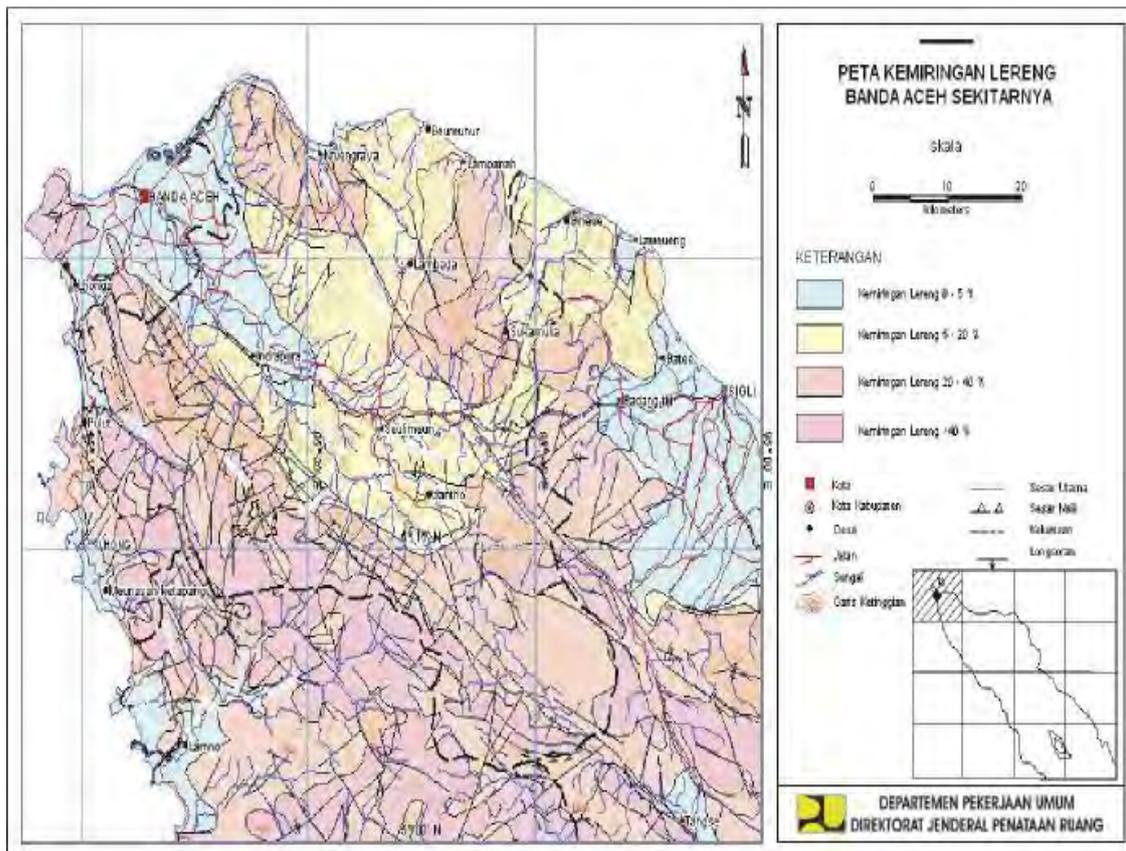
2.2. Topografi Kemiringan Lahan

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara -0,45 m sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2 - 8%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian Utara atau pesisir pantai.

2.3. Ketinggian Tempat

Dalam lingkup makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 5 meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut.

Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah Timur dan Selatan kota, kadang-kadang tergenang dan tergenang terus-menerus seperti pada kawasan rawa-rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian di bawah permukaan laut baik pada saat pasang maupun surut air laut. Lebih jelasnya gambaran kondisi topografi kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh Sekitarnya berikut ini.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 1.3

Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh

2.4. Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam.

Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi dataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa.

Daerah dataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistim marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/koluvial dari daerah sekitarnya.

2.5. Geologi

Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (*Semangko Fault*). Oleh karenanya daerah yang terlntasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor.

Kota Banda Aceh terletak diantara dua patahan (sebelah timur – utara dan sebelah barat – selatan kota). Berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia berjarak ± 130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap Tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, berumur holosen hingga Pra-Tersier, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu :

- Alluvium
- Batuan Kwartir (sedimen dan volkanik)
- Batuan Tersier (sedimen dan volkanik)
- Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergeser sekitar 11 cm/tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Kondisi Geologi Kota Banda Aceh sebagaimana ditunjukkan Gambar1.4,

menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukannya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota. Sehingga sesungguhnya Banda Aceh adalah suatu daratan hasil ambalasan sejak Pilosen, membentuk suatu Graben, sehingga dataran Banda Aceh ini merupakan batuan sedimen yang berpengaruh kuat apabila terjadi gempa di sekitarnya.



*Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 1.4

Kondisi Geologi Kota Banda Aceh

2.6. Hidrologi

Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku, kegiatan perikanan, dan sebagainya. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru, yang juga mencakup Kecamatan Lueng Bata, Ulee Kareng, Banda Raya, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Nama Sungai dan luas daerah alirannya di Kota Banda Aceh berikut ini :

Tabel 1.2

Nama Sungai dan Luas Daerah Alirannya di Kota Banda Aceh

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Krueng Aceh	723,60
2	Krueng Daroy	3,60
3	Krueng Doy	2,00
4	Krueng Neng	4,10
5	Krueng Lueng Paga	26,33
6	Krueng Tanjong	2,25
7	Krueng Titi Panjang	1,60
8	Krueng Kon Keumeh	3,27
9	Krueng Geunasen	1,25

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Untuk lebih jelasnya mengenai Peta Hidrologi di Kota Banda Aceh dapat di lihat pada Gambar. 1.5, Peta Hidrologi Kota Banda Aceh berikut ini.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 1.5

Peta Hidrologi Kota Banda Aceh

2.7. Klimatologi

Berdasarkan data klimatologi untuk wilayah Kota Banda Aceh yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi Blang Bintang menunjukkan bahwa dari tahun 2012 sampai dengan 2018, suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 26,6°C hingga 26,7°C, atau suhu rata-rata udara 27°C, dan tekanan (minibar) antara 1009,5–1010,7.

Curah hujan kota Banda Aceh terbesar pada tahun 2017 terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 259mm dan terkecil terjadi pada bulan April sebesar 15 mm. Jumlah curah hujan ini selama tahun 2017 yaitu sebesar 1.146 mm, dengan rata-rata per bulannya sebesar 95,5 mm/bulan. Sementara itu kelembaban udara rata-rata per bulan dalam satu tahun yaitu 82,0%.

Bulan kering ditandai dengan jumlah curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah jumlah curah hujan di atas 100 mm. Menurut Schmidt dan Ferguson, untuk menentukan tipe iklim adalah dengan menghitung angka perbandingan antara rata-rata bulan kering (BK) dengan bulan basah (BB) dikali 100%. Dari hasil perbandingan didapatkan nilai Q sebesar 0,25 berarti tipe iklim pada Kota Banda Aceh termasuk iklim tipe B (iklim Basah). Lebih jelasnya mengenai kondisi iklim ini dapat dilihat pada Tabel. 2.3 Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2017

Tabel 1.3

Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2017

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Suhu (°C)	Kelembaban (%)
1.	Januari	259	-	25,7	87,0
2.	Februari	73	-	26,3	82,0
3.	Maret	113	-	26,2	85,0
4.	April	15	-	26,6	85,0
5.	Mei	135	-	27,5	81,0
6.	Juni	23	-	27,7	76,0
7.	Juli	31	-	28,3	70,0
8.	Agustus	47	-	27,1	77,0
9.	September	127	-	26,6	84,0
10.	Oktober	40	-	26,6	81,0
11.	November	147	-	26,1	89,0
12.	Desember	136	-	26,0	87,0
Jumlah		1146	-	-	-
Rata-rata		95,5	-	26,7	82,0

Sumber : Stasiun Klimatologi BMKG Indrapuri Tahun 2017

2.8. Fungsi Lahan dan Kawasan Bencana

2.9. Penggunaan Lahan

Berdasarkan kondisi saat ini, kecenderungan perkembangan kota Banda Aceh lebih mengarah pada bagian timur dan bagian selatan kota. Di bagian timur, berada di wilayah Ulee Kareeng dan sekitarnya. Kawasan Ulee Kareeng, saat ini telah didominasi oleh aktivitas perdagangan dan jasa dan aktivitas permukiman. Kawasan Ulee Kareeng semakin berkembang akibat adanya pergeseran atau perembetan perkembangan fisik kota dikarenakan kawasan ini tidak ikut terkena dampak bencana tsunami. Ditambah dengan lokasinya yang tidak jauh dari kawasan pusat pendidikan yakni Kopelma Darussalam (IAIN, dan Unsyiah) dan Lampoh Keudee (Universitas Abulyatama), kemudian menarik aktivitas lain seperti permukiman yang terlihat dari tingginya alih fungsi lahan dari ex-persawahan menjadi permukiman – permukiman baru. Sedangkan untuk bagian selatan, perkembangan fisik kota sebagian bahkan telah merembet hingga ke wilayah kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dikarenakan secara administratif, wilayah yang mengalami perkembangan berbatasan langsung dengan kabupaten Aceh Besar. Adapun perkembangan dibagian selatan ini meliputi sebagian wilayah kecamatan Baiturrahman (Neusu) dan kecamatan Banda Raya (Lamlagang, Lhong Raya, Lampeuot), dan wilayah Batoh dan Lamdom.

Penggunaan lahan eksisting di Kota Banda Aceh yang dilakukan analisis berdasarkan Citra Satelit Resolusi Tinggi edisi Februari tahun 2015, secara umum pola penggunaan lahan dikelompokkan dengan klasifikasi kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun.

Pemanfaatan kawasan terbangun antara lain kawasan perumahan, perdagangan & jasa, perkantoran, perikanan, pelabuhan, area cagar budaya, lapangan olah raga, ruang terbuka non hijau, peruntukan lainnya (peruntukan militer, peruntukan keamanan dan keselamatan, peruntukan peribadatan, peruntukan kesehatan, peruntukan pendidikan, peruntukan transportasi, peruntukan PLTD, peruntukan pasar, peruntukan museum, peruntukan olah raga, peruntukan tempat pembuangan akhir), dan pemanfaatan area jalan. Berdasarkan digitasi dari Citra Satelit Tahun 2015 yaitu dengan luas wilayah kota seluas 5.900,20 Hektar, bahwa penggunaan lahan kawasan yang sudah terbangun dengan luas area seluas 3.137, 12 Hektar atau 53,17 % dari luas wilayah kota, dominasi pemanfaatan eksisting lahan terbangun yaitu pemanfaatan kawasan perumahan, pemanfaatan peruntukan lainnya serta pemanfaatan area infrastruktur jalan.

Tabel 1.4

Penggunaan Lahan Eksiting –Lahan Terbangun di Kota Banda Aceh Tahun 2017

No	Penggunaan Lahan	Luas	
		Hektar	%
1	Perumahan	1915.94	32.45
2	Perdagangan dan Jasa	637.01	10.79
3	Perkantoran	108.51	1.84
4	Kawasan Perikanan	79.15	1.34
5	Kawasan Pelabuhan	10.2	0.17
6	Cagar Budaya	9.01	0.15
7	Lapangan Olah Raga	-	-
8	Ruang Terbuka Non Hijau	44.02	0.75
9	Peruntukan Lainnya	340.2	5.76
10	Jalan	351.8	5.96
	Total	3495.84	59.21

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2017

Tabel 1.5

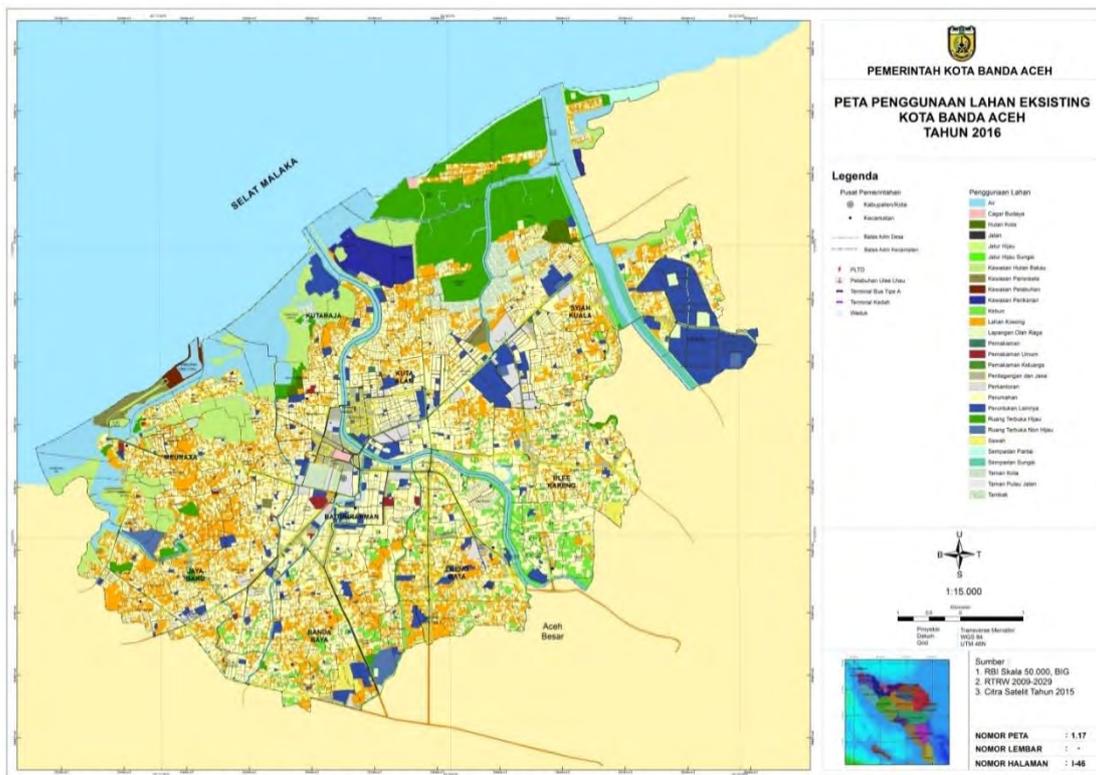
Penggunaan Lahan Eksiting –Lahan Belum Terbangun di KotaBanda Aceh Tahun 2017

No	Penggunaan Lahan	Luas	
		Hektar	%
1	Air/Sungai	475.56	-
2	Hutan Kota	28.60	-
3	Jalur Hijau Jalan	-	-
4	Jalur Hijau Sungai	-	-
5	Kawasan Hutan Bakau	-	-
6	Kawasan Pariwisata	61.07	-
7	Kebun	-	-
8	Lahan Terbuka Produktif	-	-
9	Pemukaman	-	-
10	Ruang Terbuka Hijau	637.01	-
11	Sawah	37,6	-
12	Sempadan Pantai	209.05	-
13	Sempadan Sungai	107.48	-
14	Taman Kota	14.97	-
15	Taman Pulau Jalan	-	-
16	Tambak	42.38	-
	Total	1613.72	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Sedangkan kawasan belum terbangun pemanfaatannya antara lain area Air/Sungai, RTH (hutan kota dan taman kota, RTH lainnya), Sempadan pantai, Sempadan sungai, Jalur hijau sungai, Jalur hijau jalan, Taman pulau jalan, Kebun masyarakat, Lahan kosong masyarakat, Lahan pemakaman, Sawah, Tambak, Hutan Bakau dan Kawasan wisata. Area yang belum terbangun di wilayah Kota Banda Aceh dengan luasan 1613,72 Hektar dari luas wilayah kota, area yang belum terbangun didominasi oleh area lahan terbuka produktif, area air/sungai serta ruang terbuka hijau. Penggunaan lahan kawasan belum terbangun dapat dilihat pada Tabel 1.5. Berdasarkan analisis pemanfaatan lahan eksisting area terbangun dan area belum terbangun di Kota Banda Aceh dengan menggunakan Citra Satelit keluaran Februari tahun 2015, bahwa area terbangun mencapai 53,17 % dan lahan belum terbangun 46,83 % dari luas wilayah kota, hal tersebut menunjukkan bahwa kecendrungan pembangunan fisik di wilayah Kota Banda Aceh semakin pesat setiap tahunnya, oleh karena itu proses perkembangan fisik wilayah kota perlu diantisipasi terhadap daya dukung dan daya tampung terhadap proses pemanfaatan lahan serta perlu diantisipasi ketersediaan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan untuk keseimbangan ekosistem lingkungan di wilayah Kota Banda Aceh.

Pemanfaatan lahan eksisting Kota Banda Aceh Tahun 2015 dapat dilihat pada pada Gambar 1.6.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 1.6

Peta Penggunaan Lahan eksisting Kota Banda Aceh Tahun 2015

2.10. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Sistem Perkotaan Nasional, Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana yang dikemukakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, yang disusun berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007. Namun seiring dengan isu penataan ruang yang mendasari perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Banda Aceh 20 tahun ke depan, maka hirarki Kota Banda Aceh diusulkan untuk dipromosikan dan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Penetapan Kota Banda Aceh sebagai PKN ini juga sejalan dengan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang serta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Aceh Tahun 2013-2033.

Beberapa faktor yang mendasari penetapan sebagai PKN tersebut adalah :

- (1) Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh;
- (2) Kota Banda Aceh sebagai pintu gerbang provinsi dari segi transportasi darat, laut dan udara;
- (3) Fungsi Kota Banda Aceh sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pusat keagamaan;
- (4) Dukungan nilai historis yang terdapat di Kota Banda Aceh untuk pengembangan kegiatan pariwisata.

2.11. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Rencana sistem pusat pelayanan dimaksudkan untuk memperjelas hirarki kota sesuai dengan struktur kota yang ditetapkan sehingga diperoleh suatu sistem pemanfaatan ruang yang optimal untuk setiap bagian kota. Dalam realitanya, pengembangan sistem pusat pelayanan akan mempermudah masyarakat kota untuk mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan.

Pembagian sistem pusat pelayanan dilakukan atas dasar pertimbangan berikut:

1. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, pusat keagamaan
2. Penetapan Kota Banda Aceh sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Rencana Sistem Perkotaan Nasional
3. Jangkauan pelayanan secara fungsional
4. Aksesibilitas antar kawasan dan antar wilayah
5. Kelengkapan dan pemusatan sarana dan prasarana
6. Efisiensi pemanfaatan lahan

Dalam pengembangan ke depannya, Kota Banda Aceh direncanakan dikembangkan dalam 4 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu :

1. WP Pusat Kota Lama

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam dan Kuta Raja, berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan regional dan pemerintahan. Fungsi ini didukung oleh kegiatan jasa komersial, perbankan, perkantoran, pelayanan umum dan sosial, kawasan permukiman perkotaan, industri kecil/kerajinan, pusat kebudayaan dan Islamic Center. WP ini juga berfungsi sebagai pusat pelayanan tujuan wisata budaya dan agama bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Banda Aceh. Pusat WP ditetapkan di Kawasan Pasar Aceh dan Peunayong

2. WP Pusat Kota Baru

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Banda Raya dan Lueng Bata, merupakan pengembangan wilayah kota ke arah bagian Selatan, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan olah raga (sport centre), terminal AKAP dan AKDP, perdagangan dan jasa serta pergudangan. Pusat WP ditetapkan di Batoh dan Lamdom.

3. WP Keutapang

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Meuraxa dan Jaya Baru, merupakan pengembangan wilayah kota ke arah bagian Barat. WP ini difungsikan sebagai pusat kegiatan pelabuhan dan wisata, yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, dan sebagainya. Pusat WP ditetapkan di Keutapang.

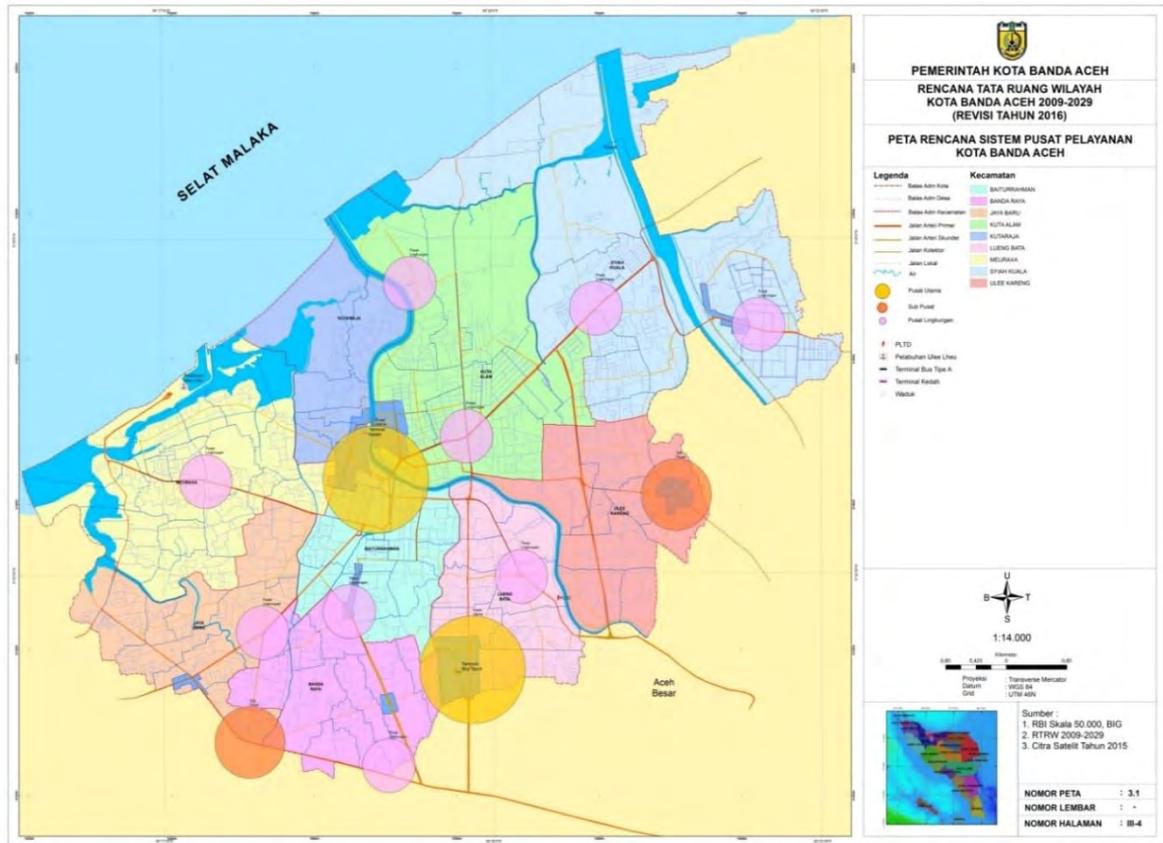
4. WP Ulee Kareng

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng, merupakan pengembangan wilayah kota ke bagian Timur, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial kota seperti halnya pendidikan, kesehatan dan kegiatan lain yang komplementer dengan kedua kegiatan tersebut. Pusat WP ditetapkan di Ulee Kareng.

Ke-4 Wilayah Pengembangan tersebut menjadi dasar dalam menentukan Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh 20 tahun depan, dimana direncanakan 2 Pusat Kota dan 2 Sub Pusat Kota, yaitu :

1. Pusat Kota Lama Pasar Aceh – Peunayong
2. Pusat Kota Baru Batoh/Lamdom
3. Sub Pusat Kota Keutapang
4. Sub Pusat Kota Ulee Kareng

Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat pelayanan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 1.7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh dan Tabel 1.6 Rencana Pusat – pusat Pelayanan Kota Banda Aceh berikut ini.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 1.7

Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

Tabel 1.6

Rencana Pusat – Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

No	Pusat Pelayanan / Subpusat Pelayanan/ Unit Lingkungan	Fungsi	Skala Pelayanan
A.	Pusat Kota		
1.	Peunayong / Kampung Baru (Pusat Kota Lama)	Pusat pemerintahan Kota Banda Aceh; Perdagangan dan Jasa Perkantoran	Regional & Kota
2.	Batoh/Lamdom (Pusat Kota Baru)	Pusat pemerintahan / perkantoran yang baru; Pusat perdagangan dan jasa; serta Permukiman	Regional Regional & Kota

B.	Sub Pusat Kota		
1.	Keutapang	Perdagangan dan Jasa Permukiman	Regional dan Lokal
2.	Ulee Kareng	Perdagangan dan jasa Permukiman	Kota dan lokal
C.	Pusat Lingkungan		
1.	Lampulo	Pelabuhan ikan Galangan kapal Industri pengolahan ikan Perumahan nelayan	Regional & Kota
2.	Jambo Tape	Pusat Pemerintahan ProvAceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) Perdagangan dan jasa	Regional Kota dan Lokal
3.	Neusu	Perdagangan dan jasa Permukiman	Kota dan lokal
4.	Kopelma Darussalam	Pendidikan Perdagangan dan jasa	Regional Kota dan lokal
5.	Jeulingke	Pusat Pemerintahan ProvAceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) Perdagangan dan jasa Permukiman	Regional Kota dan Lokal
6.	Lueng Bata	Perdagangan dan jasa Permukiman	Kota dan lokal
7.	Mibo	Pusat Pemerintahan dan Perkantoran Kota Banda Aceh Perdagangan dan jasa Permukiman	Kota dan Lokal
8.	Blang Oi	Perdagangan dan jasa Permukiman Perikanan Pelabuhan Wisata	Kota dan lokal Regional dan Lokal
9.	Lamteumen	Perkantoran Perdagangan dan jasa Permukiman	Regional, Kota dan lokal

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

2.12. Rencana Pengembangan Kawasan Pusat Kota Lama Kota Banda Aceh

Rencana pengembangan kawasan pusat kota lama Kota Banda Aceh, bertujuan untuk meningkatkan nilai *heritage* kawasan Pusat Kota Lama, sehingga meningkatkan nilai historis Kota Banda Aceh. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian dalam rencana ini adalah:

1. Pengembangan Kawasan Masjid Raya Baiturrahman

Pengembangan Kawasan Masjid Raya Baiturrahman bertujuan untuk meningkatkan nilai historis dan memberikan citra baru terhadap *landmark* Provinsi Aceh, sehingga kawasan ini dapat terpadu sebagai kawasan *heritage* dengan kawasan komersial Kota Banda Aceh yang memiliki nilai yang tinggi terhadap fungsi dan citra kawasan. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan terhadap pengembangan kawasan ini adalah peningkatan *landmark* Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh serta mendukung penataan kawasan *water front city*, dimana Sungai Krueng Aceh dan jembatan Pante Pirak menjadi salah satu gerbang masuk ke kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Adapun luas kawasan yang akan digunakan untuk area pengembangan Masjid Raya Baiturrahman ini adalah sekitar 12,08 Ha, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1.8 Kawasan Pengembangan Kawasan Masjid Raya Baiturrahman



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 1.8

Kawasan Pengembangan Kawasan Masjid Raya Baiturrahman

2. Pengembangan Kawasan CBD Peunayong

Rencana Pengembangan Kawasan CBD Peunayong terdiri atas dua rencana pengembangan; (1) Pengembangan Kawasan Terminal Keudah, yang terintegrasi dengan zona komersial; dan (2) Pengembangan Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah-Peunayong. Pengembangan kawasan ini adalah untuk me-revitalisasi kawasan Pusat Kota Lama kawasan Peunayong.

3. Pengembangan Kawasan Terminal Keudah

Pengembangan Kawasan Terminal Keudah bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik di Kota Banda Aceh, meningkatkan akses dan kenyamanan publik terhadap transportasi publik. Rencana pengembangan kawasan ini mengadaptasikan konsep *mix-use building*, dimana Kawasan Terminal Keudah akan diarahkan untuk menjadi kawasan *one-stop shopping*, sehingga kawasan ini mampu untuk menjadi titik transit bagi pengguna angkutan umum. Kawasan ini juga akan diarahkan untuk memiliki ruang parkir yang luas dan terintegrasi dengan sisi Barat (Jl. Tentara Pelajar) sebagai pintu masuk dan sisi Timur (Jl. Cut Mutia) sebagai pintu keluar. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pengembangan kawasan ini dapat dilihat pada Gambar 1.9. Rencana Pengembangan *Central Bussiness District* (CBD) Keudah berikut ini



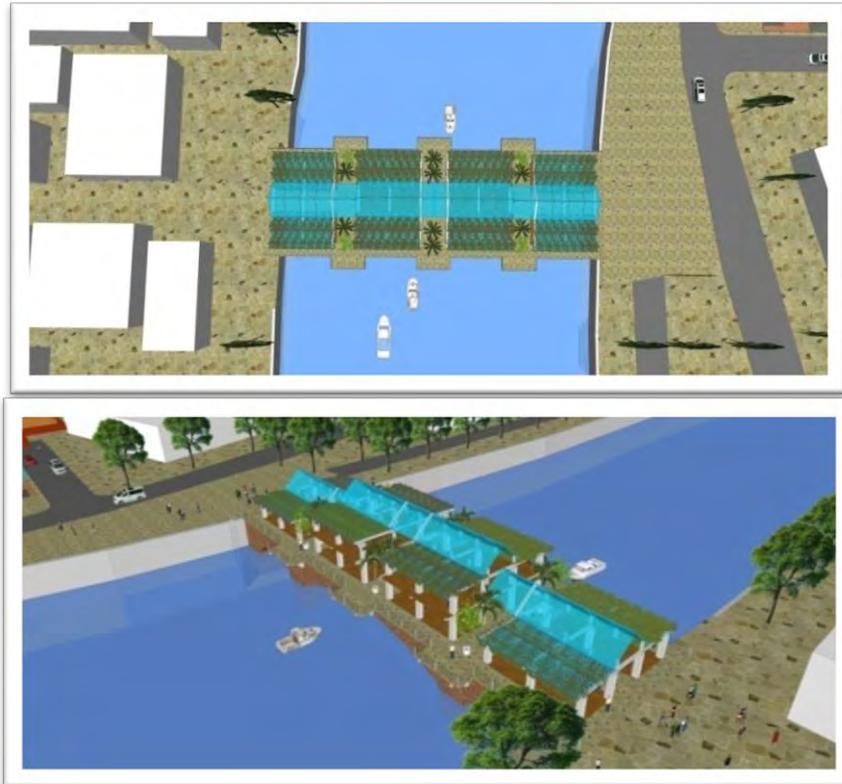
Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 1.9

Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah

4. Rencana Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah-Peunayong

Jembatan penyebrangan pedesttrian Keudah-Peunayong direncanakan selain fungsinya sebagai jembatan penyebrangan pedestrian, juga akan memiliki fungsi sebagai daya tarik antara Peunayong dan Keudah, jembatan ini diarahkan untuk dapat menciptakan ruang publik yang terpadu dengan kawasan perdagangan dan jasa (dengan spesialisasi kuliner; restoran, warung kopi, dan cafe). Konsep rencana pengembangan ini dapat dilihat pada Gambar 1.10 Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong berikut ini ;



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 1.10

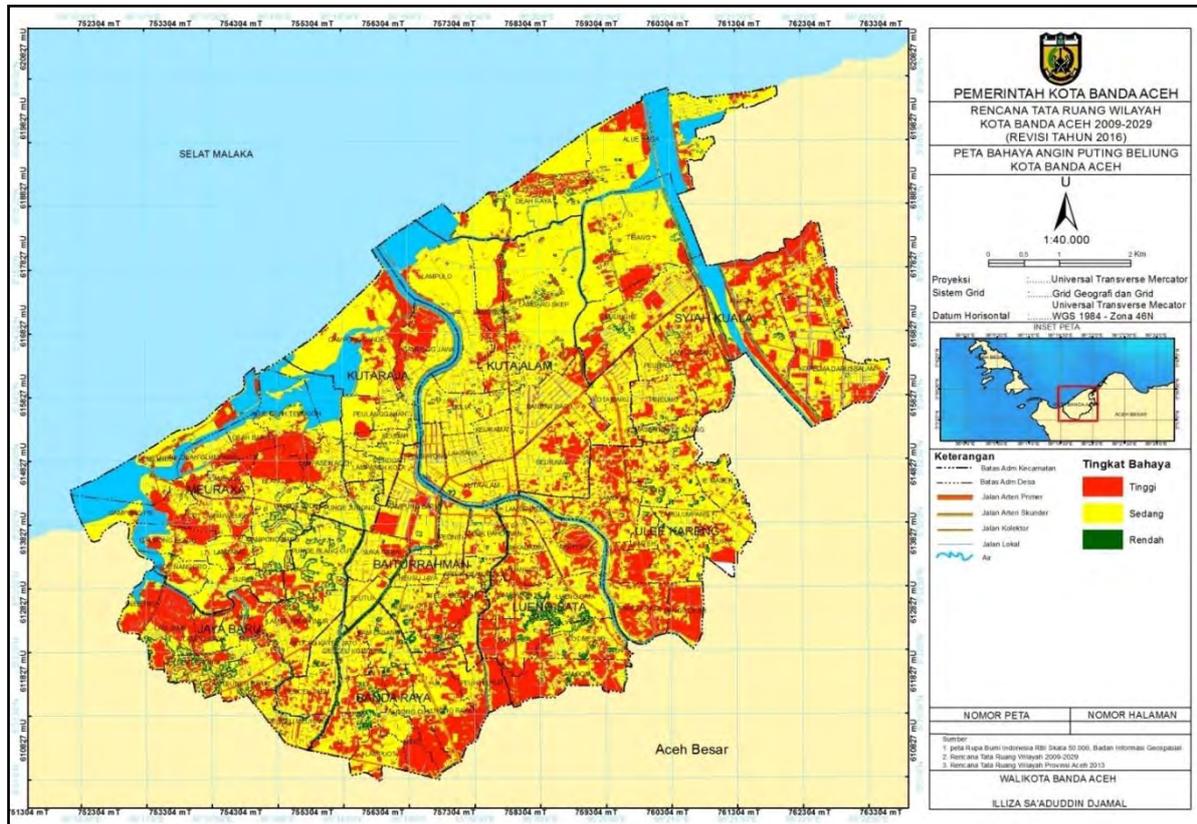
Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong

2.13. Wilayah Rawan Bencana

Kota Banda Aceh dalam dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki indeks resiko bencana tinggi dengan skor 167, adapun ancaman bencana di Kota Banda Aceh antara lain:

1. Rawan bencana angin puting beliung
2. Rawan bencana banjir
3. Rawan bencana penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
4. Rawan bencana gempa dan
5. Rawan bencana tsunami

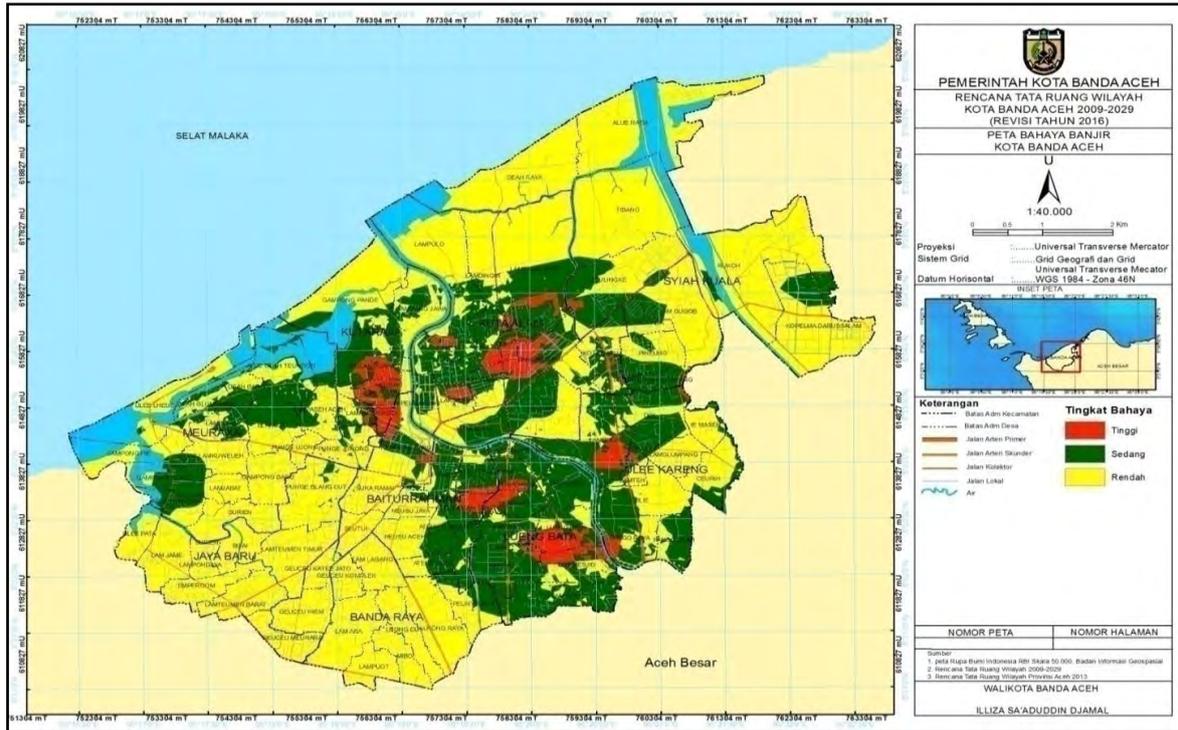
Kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan Banda Aceh ke depan baik dari segi penetapan struktur ruang dan pola ruang, maupun dalam menentukan pengaturan bangunan (*building code*) dan manajemen mitigasi bencana. Berikut adalah gambar yang menerangkan peta rawan bencana di Kota Banda Aceh.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 1.11

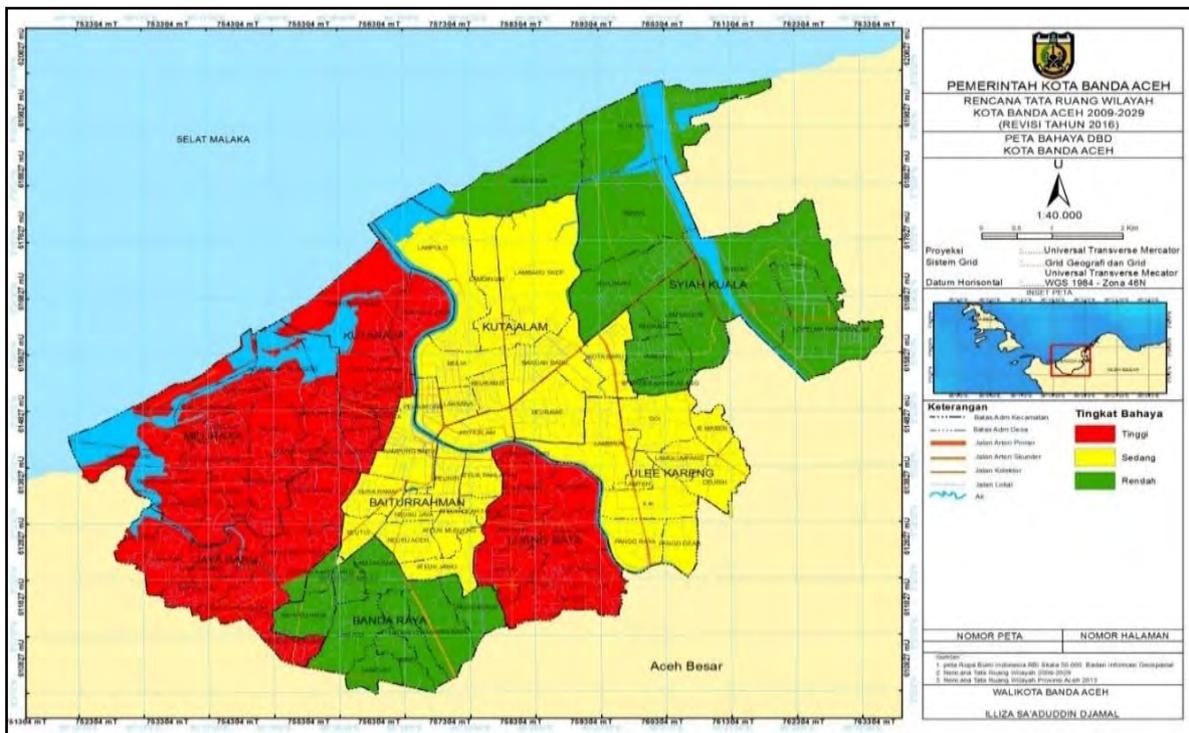
Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh



sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 1.12

Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 1.13

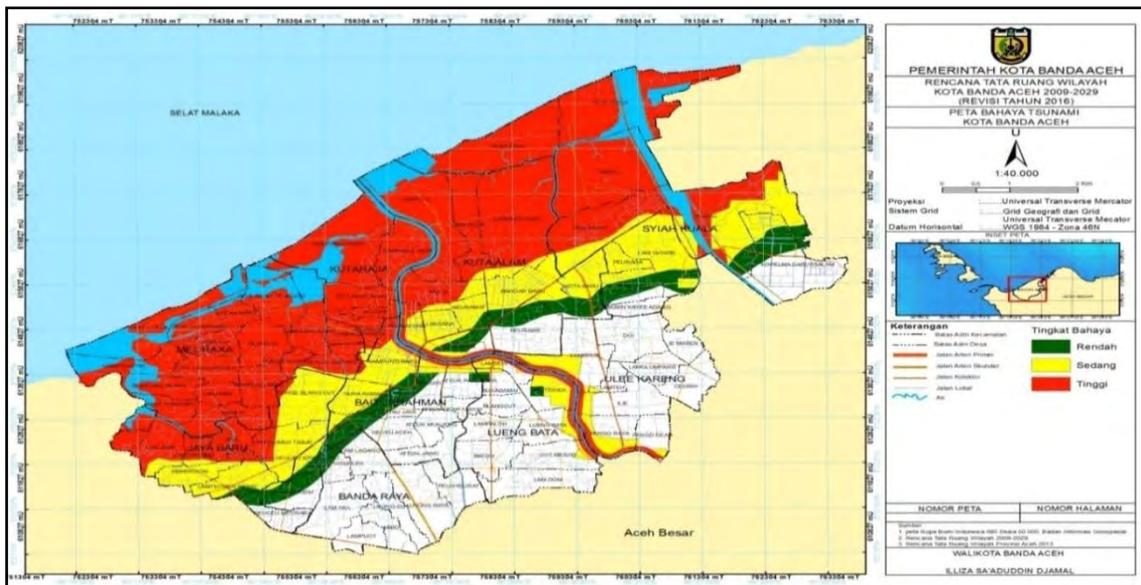
Peta Bahaya DBD Kota Banda Aceh



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 1.14

Peta Bahaya Gempa Kota Banda Aceh



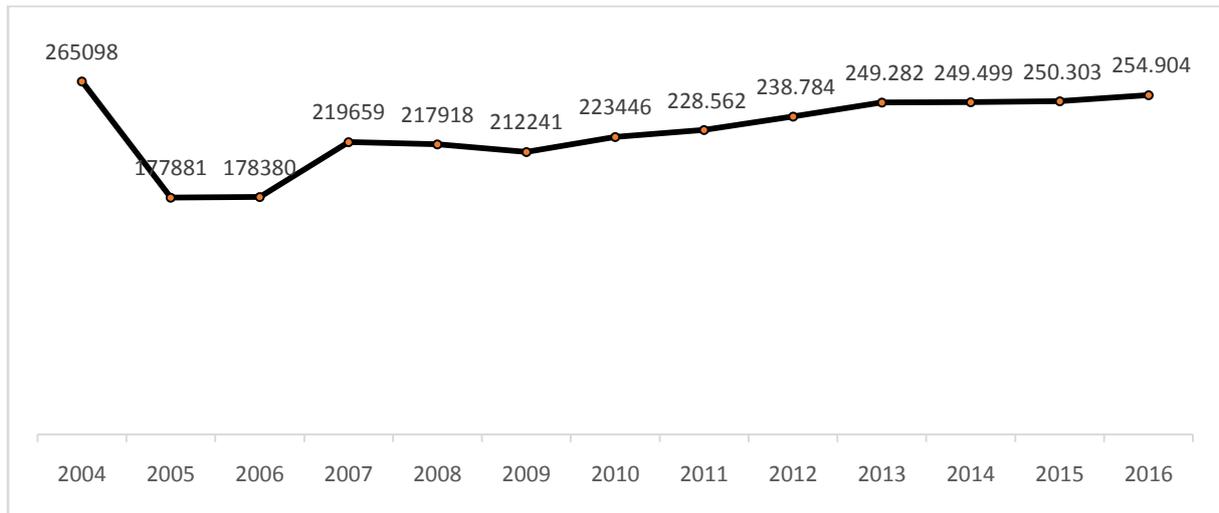
Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 1.15

Peta Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh

2.14. Demografi dan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pasca bencana Gempa dan Tsunami di Tahun 2004, jumlah penduduk dari 265.098 jiwa di Tahun 2004 menurun 87.217 jiwa sehingga menjadi 177.881 jiwa di Tahun 2005, akan tetapi perlahan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh hampir mendekati pra bencana Gempa dan Tsunami, yakni 259.913 jiwa pada Tahun 2017.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Gambar 1.16

Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2004-2016

Penduduk Kota Banda Aceh pada Tahun 2015 terdiri dari 128.962 jiwa penduduk laki-laki dan 121.321 jiwa penduduk perempuan, dengan pertumbuhan penduduk 0,32% dari tahun sebelumnya. Berikut ini adalah Tabel 1.7 Indikator kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2013-2015

Tabel 1.7

Indikator kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

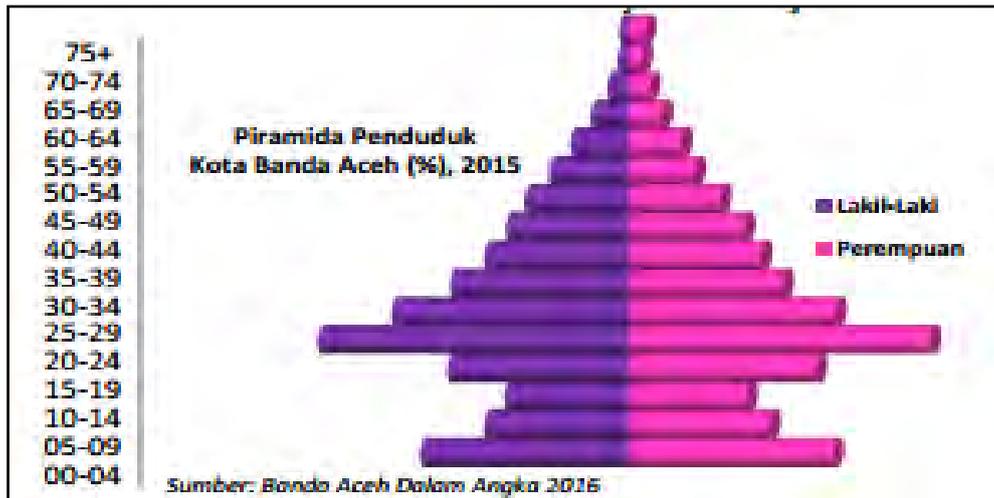
Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2018
Jumlah	Jiwa	238.784	249.282	249.499	250.303	254.904	259.913
Pertumbuhan	%	4.47	4.40	0.08	0.32	1.84	-
Kepadatan	Jiwa/km	3.892	4.063	4.066	4.079	4.154	4.236
Sex Ratio	%	106.01	106.11	106.18	106.31	105.74	-

Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016

Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.236 jiwa per km². Angka ini diperkirakan akan terus meningkat mengingat penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk usia

muda. Kecamatan terpadat adalah Baiturrahman (8.088 jiwa per km²) sedangkan kecamatan Kuta Raja (2.565 jiwa per km²) memiliki kepadatan penduduk terkecil.

Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.905 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.475 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.098 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.17



Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016

Gambar 1.17

Piramida penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2015

2.15. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

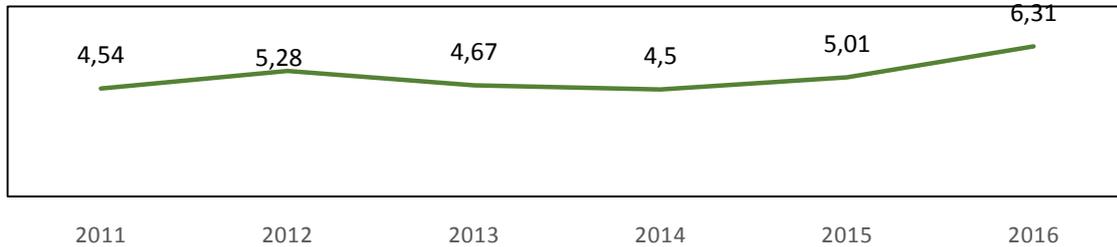
2.16. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kota Banda Aceh sebagai kesatuan ekonomi yang menyeluruh dapat digambarkan dengan PDRB. Setelah sempat mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Kota Banda Aceh pada Tahun 2015 mulai membaik atau meningkat 0,51 persen dibandingkan Tahun 2014, hal ini ditunjang dengan adanya geliat pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sektor konstruksi, yang tumbuh sebesar 0.45 poin dan real estate 0.51poin. Dan hal ini juga yang mendasari pertumbuhan PDRB menjadi 6,31 Persen di tahun 2016.

Meningkatnya nilai PDRB menunjukkan peningkatan kinerja perekonomian, begitu pula sebaliknya. Perekonomian Kota Banda Aceh terus meningkat dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selama lima tahun terakhir.

PDRB ADHB secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp 845.57 milyar per tahun selama kurun waktu 2010-2016. Pada tahun 2015 PDRB meningkat sebesar Rp 1,09 triliun dari Rp 13,64 triliun pada tahun 2014 dan di tahun 2016 meningkat sebesar Rp. 1,3 Trilyun dari

Rp.14,48 triliun di tahun 2015. Kenaikan ini tertinggi selama 4 tahun terakhir (tahun 2015) disebabkan adanya pelaksanaan proyek konstruksi tahun jamak (multiyears) dengan nilai kontrak besar.



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016

Gambar 1.18

Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2011-2016

Selama lima tahun terakhir, ekonomi Kota Banda Aceh terus tumbuh meski dengan laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Setelah mencapai laju pertumbuhan 5,33 persen di tahun 2012, ekonomi Kota Banda Aceh sempat mengalami perlambatan di tahun 2013 dan 2014. Ekonomi Kota Banda Aceh kemudian mengalami percepatan di tahun 2015 yang berlanjut hingga tahun 2016. Hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan 6,31 persen di tahun 2016.

Kota Banda Aceh sebagai pusat ibukota Provinsi Aceh menjadi tempat beraktivitas pemerintahan Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, serta berbagai instansi vertikal. Sehingga tidak mengherankan bila struktur ekonomi Kota Banda Aceh hingga tahun 2015 masih didominasi oleh sektor jasa yakni kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kedua kategori tersebut memiliki peranan yang besar hingga 42,22 persen terhadap pembentukan PDRB (masing-masing 21,86 persen dan 20,36 persen), meski peranan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung berkurang dari tahun ke tahun selama empat tahun terakhir.

Sektor konstruksi menjadi kategori yang mengalami pertumbuhan terbesar mencapai 40,96 persen. Pengerjaan beberapa proyek infrastruktur berskala besar seperti penyelesaian Pembangunan Landscape dan Infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman, Proyek Pelebaran Jembatan Lamnyong dan Krueng Cut serta Proyek Pembangunan Banda Aceh Madani Education Center menjadi kegiatan ekonomi penyumbang nilai tambah yang besar sekaligus meningkatkan percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh secara keseluruhan.

Tabel 1.8

Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2015 Kota Banda Aceh

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	115843,2	3,99	118948,4	2,68	123626,9	3,93	128549,5	3,98	128550,5	-
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0	0	0,00	0
3.	Industri Pengolahan	241926,1	5,69	254139,0	5,05	263261,8	3,59	268244	2,71	290764,3	-
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	38164,4	5,50	40952,5	7,31	40802,1	-0,37	51470	15,92	55029,20	-
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9843,8	9,60	10615,1	7,84	11492,7	8,27	12827	12,84	13485,1	-
6.	Konstruksi	874894,3	-0,84	874192,1	-0,08	1000391,6	14,44	1408789	40,96	959615,8	-
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2559857,3	4,40	2672562,1	4,40	2763488,9	3,40	2814397	1,84	2933498,2	-
8.	Transportasi dan Pergudangan	1782819,3	1,37	1807892,5	1,41	1833657,4	1,43	1717796	-4,92	1757196,8	-
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	296942,3	9,65	326888,8	10,08	358122,2	9,55	400.264,4	7,81	463636,7	-
10.	Informasi dan Komunikasi	1030141,2	5,31	1093525,3	6,15	1112387,4	1,72	1105546,2	1,02	130418,5	-
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	322832,4	12,76	311750,4	-3,43	320492,1	2,80	339224,8	5,84	357925,4	-
12.	Real Estate	638269,6	8,39	692403,3	8,48	752913,4	8,74	838247,5	10,06	953265,6	-
13.	Jasa Perusahaan	254111,0	6,28	270352,6	6,39	279812,4	3,50	310573	9,05	323968,2	-
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2229707,5	5,98	2363106,5	5,98	2504665,2	5,99	2646798,4	5,67	2962550,4	-
15.	Jasa Pendidikan	624101,7	5,26	660937,6	5,90	693918,9	4,99	761390,9	7,40	824337,6	-
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	384899,8	7,09	415021,1	7,83	448064,3	7,96	485843,7	8,92	522854,3	-
17.	Jasa lainnya	192874,6	6,18	205760,1	6,68	218826,8	6,35	238331	6,96	262020,2	-
	PDRB	1151159722,8,55	4,67	12119047,3	4,5	12725924,1	5,01	13528294,8	6,31	13940316,5	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh 2017

Terdapat empat sektor yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2016 yakni sektor konstruksi (40,96 persen); Pengadaan Listrik dan Gas (15,92 persen); Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (12,84 persen); serta Real Estate (10,06 persen). Sedangkan Transportasi dan Pergudangan menjadi satu-satunya kategori yang mengalami kontraksi/kemunduran pada tahun 2016 sebesar -4,92 persen.

Tabel 1.9

Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Tahun 2015 Kota Banda Aceh

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	126329,3	1,01	135264,6	0,99	142201,5	0,96	154320,8	0,98	160081,9	
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,0		0,0		0,0		0	0	0	0
3.	Industri Pengolahan	262640,8	2,09	283696,6	2,08	299660,1	2,03	317841,2	2,01	375763,7	
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	32502,3	0,26	35781,5	0,26	36657,9	0,25	47.729,5	0,30		
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10440,7	0,08	11639,5	0,09	13898,8	0,09	18900,1	0,12	21375,0	
6.	Konstruksi	958082,6	7,62	960238,1	7,04	1103743,6	7,49	1579485,3	10	1094651,6	
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2827199,8	22,50	3059382,8	22,42	3223290,0	21,86	3375398,8	21,36	3615352,7	
8.	Transportasi dan Pergudangan	1948671,9	15,51	2072370,4	15,18	2116684,7	14,36	1783937,7	11,29	1779691,3	
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	331148,8	2,63	382551,5	2,80	432808,4	2,94	538249,8	3,41	675797,3	
10.	Informasi dan Komunikasi	942579,2	7,50	999810,2	7,33	1073443,1	7,28	957384,4	6,06	972007,0	
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	389608,8	3,10	395006,6	2,89	423800,0	2,87	459951,1	2,91		
12.	Real Estate	700447,4	5,57	830077,6	6,08	970979,0	6,59	1081187,3	6,84	1289289,1	
13.	Jasa Perusahaan	288493,0	2,30	321106,6	2,35	338943,9	2,30	373078,6	2,36	403150,5	
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2456331,4	19,54	2730681,1	20,01	3001088,0	20,36	3332436,1	21,09	3866531,3	
15.	Jasa Pendidikan	659443,4	5,25	715857,0	5,25	777814,8	5,28	922468,1	5,84	1043561,4	
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	432781,4	3,44	488777,1	3,58	540726,2	3,67	580124,4	3,67	634540,7	
17.	Jasa lainnya	201303,2	1,60	205760,1	1,65	246129,5	1,67	279334	1,77	313068,2	
	PDRB	15115972,8,5	100	12119047,3	100	12725924,1	100	15.801.791,3	100	16808137,4	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh 2017

Tabel 1.10

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Banda Aceh

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		HB (%)	HK (%)								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,01	3,99	0,99	2,68	0,96	3,93	0,98	3,98	-	0,95
2.	Pertambangan dan Penggalian		0,00		0,00		0,00	0	0	-	0
3.	Industri Pengolahan	2,09	5,69	2,08	5,05	2,03	3,59	2,01	2,71	-	6,32
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,26	5,50	0,26	7,31	0,25	-0,37	0,30	15,92	-	6,91
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	9,60	0,09	7,84	0,09	8,27	0,12	12,84	-	5,13
6.	Konstruksi	7,62	-0,84	7,04	-0,08	7,49	14,44	10	40,96	-	-31,88
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,50	4,40	22,42	4,40	21,86	3,40	21,36	1,84	-	4,23
8.	Transportasi dan Pergudangan	15,51	1,37	15,18	1,41	14,36	1,43	11,29	-4,92	-	2,41
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,63	9,65	2,80	10,08	2,94	9,55	3,41	7,81	-	15,84
10.	Informasi dan Komunikasi	7,50	5,31	7,33	6,15	7,28	1,72	6,06	1,02	-	2,25
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,10	12,76	2,89	-3,43	2,87	2,80	2,91	5,84	-	5,60
12.	Real Estate	5,57	8,39	6,08	8,48	6,59	8,74	6,84	10,06	-	13,72
13.	Jasa Perusahaan	2,30	6,28	2,35	6,39	2,30	3,50	2,36	9,05	-	4,31
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19,54	5,98	20,01	5,98	20,36	5,99	21,09	5,67	-	11,51
15.	Jasa Pendidikan	5,25	5,26	5,25	5,90	5,28	4,99	5,84	7,40	-	8,98
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,44	7,09	3,58	7,83	3,67	7,96	3,67	8,92	-	9,17
17.	Jasa lainnya	1,60	6,18	1,65	6,68	1,67	6,35	1,77	6,96	-	9,17
	PDRB	100	4,67	100	4,5	100	5,01	100	6,31	-	3,04

Sumber: Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh 2017

Dari keempat kategori dengan laju pertumbuhan dua digit tersebut, hanya sektor Konstruksi yang mampu memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi di atas 1 persen. Dengan kontribusi atas laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,22 poin, kategori ini telah menyumbang lebih dari separuh laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh (6,31 persen).

Bila dibandingkan untuk setiap lapangan usaha/sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 pada masing-masing lapangan usaha ada yang meningkat namun ada juga yang mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2014. Peningkatan laju pertumbuhan terbesar dialami sektor Konstruksi. Sektor ini mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 14,44 persen di banding tahun 2014. Dan di tahun 2016 sektor ini juga menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi kenaikan PDRB. Terdapat empat kategori yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2016 yakni Konstruksi (40,96 persen); Pengadaan Listrik dan Gas (15,92 persen); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (12,84 persen); serta Real Estate (10,06 persen). Sedangkan Transportasi dan Pergudangan menjadi satu-satunya kategori yang mengalami kontraksi/kemunduran pada tahun 2016 sebesar -4,92 persen.

Dari keempat kategori dengan laju pertumbuhan dua digit tersebut, hanya kategori Konstruksi yang mampu memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi di atas 1 persen. Dengan kontribusi atas laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,22 poin, kategori ini telah menyumbang lebih dari separuh laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh (6,31 persen).

Sebaliknya, meskipun Industri Pengolahan hanya tumbuh 2,71 persen namun kategori tersebut memberikan kontribusi yang sama (sebesar 0,06 poin) atas laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh bila dibandingkan dengan kategori Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh hingga 15,92 persen.

Untuk Distribusi PDRB berdasarkan pengeluaran dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pembangunan proyek konstruksi besar di Kota Banda Aceh seperti pembangunan mesjid raya, perluasan jembatan lamnyong dan fly over menjadi salah satu kontributor terbesar PDRB pada tahun-tahun terakhir ini (2015-2016). Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto menjadi salah satu kontributor terbesar PDRB 40,70 persen.

Ditahun 2016 peningkatan PDRB juga dipengaruhi oleh Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Walikota Provinsi Aceh tahun 2017 menyebabkan semaraknya kampanye pada tahun sebelumnya yakni di tahun 2016. Pengeluaran partai politik yang meningkat tersebut menyebabkan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga non profit

yang melayani rumah tangga (LNPRT) sedikit meningkat kontribusinya menjadi 1,32 dari tahun sebelumnya 1,27 persen.

Tabel 1.11

Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut
Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) Menurut Pengeluaran, 2012-2016

Komponen	2012		2013		2014		2015*		2016**	
	HB (%)	HK (%)								
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	57,17	3,64	58,43	3,87	60,03	4,02	60,21	3,91	59,16	4,27
a. Makanan, Minuman & Rokok	18,11	3,26	18,25	2,98	18,71	3,18	18,76	3,70	18,97	4,29
b. Pakaian & Alas Kaki	2,59	4,07	2,68	3,74	2,72	3,07	2,71	3,07	2,72	4,14
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggara an Rumah Tangga/	9,36	3,54	9,80	4,47	10,33	3,61	10,85	6,03	10,79	6,86
d. Kesehatan & Pendidikan	4,05	5,45	4,10	5,22	4,16	5,58	4,24	5,58	4,17	3,41
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	16,94	2,61	17,31	3,80	17,49	4,72	17,00	2,57	15,70	2,12
f. Hotel & Restoran	3,03	1,15	3,05	2,67	3,15	3,02	3,11	3,02	3,18	7,66
g. Lainnya	3,07	11,78	3,23	6,79	3,45	5,45	3,54	5,45	3,63	6,28
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,07	4,99	1,13	9,50	1,40	24,67	1,27	(4,87)	1,32	9,42

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	59,01	7,76	65,24	4,74	62,62	4,73	61,42	1,81	48,29	(9,99)
Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,98	0,16	26,05	-0,08	25,49	(0,32)	29,10	20,39	40,70	42,20
a. Bangunan/	22,53	-0,94	22,58	-0,57	21,97	(0,39)	24,79	18,95	36,29	49,44
b. Non-Bangunan	3,46	7,64	3,46	2,96	3,52	0,09	4,31	29,06	4,41	2,23
Perubahan Inventori	3,74	764,94	0,05	- 98,51	(0,00)	(100,50)	(0,05)	21.933,33	0,01	(114,97)
Ekspor	37,98	4,33	40,02	9,86	40,61	10,07	39,98	7,53	37,16	2,66
Dikurangi Impor	84,94	7,51	90,91	0,84	90,15	6,22	91,94	7,87	86,65	3,89
PDRB	100	5,33	100	4,67	100	4,50	100	5,01	100	6,31

Sumber: Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh 2016

Kenaikan kontribusi juga dialami komponen Perubahan Inventori dimana menjadi positif 0,01 persen setelah tahun sebelumnya negatif 0,05 persen serta Net Ekspor dimana meningkat dari negatif 51,96 persen menjadi negatif 49,49 persen.

Tetapi pengeluaran pemerintah selain belanja modal juga mengalami pembatasan anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Kombinasi hal tersebut dan rendahnya serapan anggaran menyebabkan kontribusi komponen pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan PDRB hanya sebesar 48,29 persen. Kontribusi ini sangat menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 60-an persen dimana tahun 2015 sebesar 61,42 persen. Penurunan kontribusi juga dialami komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang turun menjadi 59,16 persen dari tahun sebelumnya yaitu 60,21 persen.

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga sehingga dapat memberikan pengertian yang salah akan perkembangan perekonomian. Untuk itu agar dapat melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010. Nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2016 telah mencapai sebesar Rp 13,53 triliun, naik sebesar 803,13 milyar dari tahun 2015.

Dari tahun 2012 sampai dengan 2016 Banda Aceh merupakan Kab/ Kota kedua terbesar penyumbang PDRB di Prov. Aceh dibawah Kab Aceh Utara yang merupakan kabupaten

penghasil migas terbesar di Provinsi Aceh dan diperkirakan Kota Banda Aceh memiliki peluang menjadi penyumbang PDRB di Aceh dimasa yang akan datang dengan berakhirnya periode migas.

2.17. Laju Inflasi

Laju inflasi kota Banda Aceh menurut data terakhir yang diperoleh (tahun 2015) mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2014 dan 2013), hal ini menunjukkan bahwa kejutan/shock yang disebabkan faktor-faktor penyebab inflasi tahun sebelumnya sudah dapat diredam oleh pelaku usaha dan masyarakat. Perhitungan inflasi sejak tahun 2014 menggunakan tahun dasar hasil SBH 2012 dimana tahun-tahun sebelumnya menggunakan tahun dasar hasil SBH 2007.

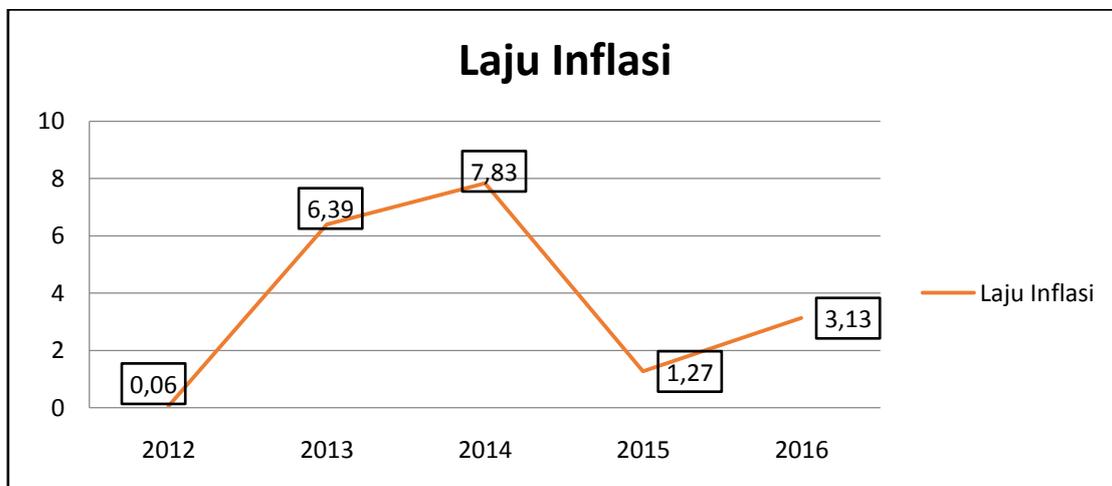
Laju inflasi tahunan di Kota Banda Aceh tahun 2015 merupakan perubahan IHK antara bulan Desember 2015 terhadap bulan Desember 2014 sebesar 1,27 persen. Angka ini juga masih lebih kecil dari inflasi nasional yang mencapai 1,53 persen. Laju Inflasi dari tahun 2012 sampai 2014 menunjukkan kenaikan namun tahun 2015 turun sebesar 1,27 persen dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 3.13 persen yang disebabkan oleh kenaikan di kelompok bahan makanan. Laju Inflasi kota Banda Aceh dari tahun 2012-2016 ditunjukkan grafik 2.19 berikut :

Tabel 1.12

Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2013 s.d 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	3	4	5	6	7
Inflasi	6,39	7,83	1,27	3,13	4,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh



Gambar 1.19

Grafik Laju Inflasi tahun 2012-2016

Untuk pulau Sumatera di tahun 2014 dan 2015 laju inflasi kota Banda Aceh merupakan salah satu dari 6 kota yang memiliki laju inflasi dibawah 1,53 %. Untuk tahun 2016 di Provinsi Aceh inflasi kota Banda Aceh lebih baik dari pada Lhokseumawe (5,6 %) dan Meulaboh (3,77%) Untuk Sumatera Inflasi Banda Aceh 2016 masuk ke peringkat 7.

2.18. PDRB Perkapita

PDRB perkapita sering digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu daerah. Untuk perbandingan antar waktu PDRB Perkapita atas Dasar Harga Konstan (ADHK) lebih tepat. Dari tahun 2012-2016 terlihat kenaikan tingkat PDRB ADHK sehingga mencapai angka 53,07 di tahun 2016. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh yang meningkat dari tahun ke tahun.

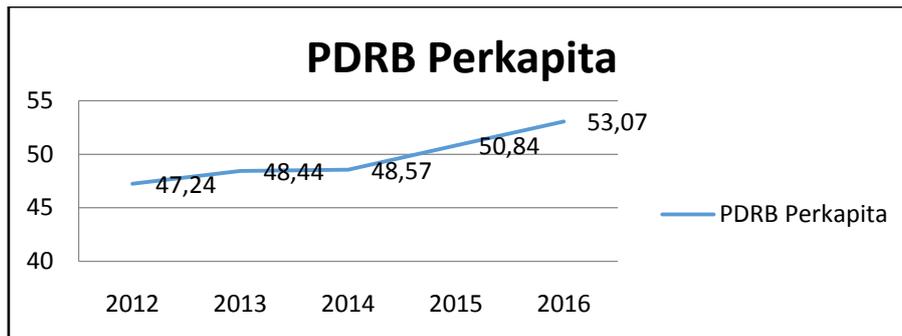
PDRB per kapita Kota Banda Aceh ADHK tercatat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga konstan sudah mencapai 53,07 juta rupiah bila dibandingkan pencapaian 47,24 juta rupiah di tahun 2012. Kenaikan 5,83 juta rupiah selama periode 5 tahun tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan rata-rata 1,16 juta rupiah PDRB perkapita setiap tahunnya.

PDRB per kapita Kota Banda Aceh sebesar 61,99 juta rupiah di tahun 2016 jauh di atas rata-rata Provinsi Aceh sebesar 26,93 juta rupiah. Pun bila dilakukan perbandingan dengankota/kabupaten lain di provinsi ini. Yang terdekat, PDRB per kapita Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Nagan Raya masing-masing baru mencapai 39,60 juta rupiah dan 39,07 juta rupiah.

Tabel 1.13

PDRB perkapita Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan

Tahun	PDRB Perkapita
2012	47,24
2013	48,44
2014	48,57
2015	50,84
2016	53,07



Gambar 1.20

PDB Perkapita Banda Aceh Tahun 2012-2016

2.19. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang melingkupi banyak faktor termasuk ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Arti kemiskinan lebih dari sekedar rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari indikator kesejahteraan terukur seperti garis kemiskinan, namun berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Mengingat multidimensionalnya permasalahan kemiskinan, penanganannya memerlukan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu. Dalam hal ini, perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin" yang ditetapkan misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin.

Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita". Dengan menggunakan definisi ini, penduduk miskin di suatu negara kaya dapat dikategorikan sebagai penduduk sejahtera di negara berkembang seperti Indonesia. (Ravallion, 1998 : 26).

Selain itu, juga dikenal terminologi kemiskinan lain seperti kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam "Suyanto (1995:59) mendefinisikan bahwa "Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab

dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang sehingga ia tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Dalam hal ini, faktor-faktor adat dan budaya justru menyebabkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini seperti yang dialami oleh suku terasing yang terikat dengan tradisi sosio-kultural seperti suku Badui, suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan lain-lain.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Penyebab kemiskinan di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka pengangguran
2. Kurangnya lapangan pekerjaan
3. Pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak bisa mengikuti pertumbuhan angkatan kerja
4. Lapangan pekerjaan yang kurang variatif
5. Tidak berkembangnya sektor bisnis berbasis inovasi sehingga terjadi kekurangan lapangan pekerjaan yang bisa mengakomodasi tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus berbasis inovasi seperti teknologi informasi,
6. Migrasi tenaga kerja dari luar daerah, terutama tenaga kerja dengan keahlian rendah
7. Kurangnya keahlian tenaga kerja
8. Golongan disabilitas dan rawan yang tidak memiliki penanggung
9. Banyaknya tanggungan bagi kepala keluarga
10. Harga properti yang makin tinggi
11. Korban bencana alam terutama bencana gempa dan tsunami 2004 yang belum berdaya hingga saat ini
12. Kualitas infrastruktur yang tidak baik
13. Penyakit dan kesehatan yang buruk
14. Diskriminasi profesi bagi penyandang cacat dan kelompok rawan

15. Rendahnya minat entrepreneurship
16. Tidak adanya pemberdayaan bagi kelompok pekerja berpendapatan rendah, seperti pemulung, pedagang kaki lima, nelayan dan lain-lain.
17. Kemiskinan kultural yang muncul akibat budaya yang tidak produktif seperti kebiasaan merokok, kebiasaan menghabiskan waktu, narkoba dan lain-lain.

Untuk mengurangi kemiskinan di Kota Banda Aceh, maka pemerintah perlu menyusun prioritas kebijakan dan rencana aksi. Penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh bisa dilakukan dengan berpegang pada 5 (lima) prinsip utama, yaitu:

1. Memperbaiki program perlindungan sosial;
2. Peningkatan akses pelayanan dasar;
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;
4. Pembangunan yang inklusif.
5. Kebijakan percepatan pertumbuhan lapangan kerja.

Prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Prioritas peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor.
Upaya penurunan penduduk miskin dapat dicapai melalui perbaikan dan peningkatan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran secara berkesinambungan, diperlukan pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih adil serta berkesinambungan didorong oleh sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, pertumbuhan yang utamanya digerakkan oleh sektor riil, ekspor dan investasi harus meningkat.
2. Prioritas meningkatkan kualitas tenaga kerja
Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan/keahlian melalui pendidikan formal, seperti pendidikan kejuruan (vocational school) dan non formal seperti pelatihan keterampilan (vocational training) sehingga pencari kerja memiliki daya saing dalam mendapatkan pekerjaan. Salah satu langkah strategis yang harus diambil adalah dengan merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja serta mengurangi angka pengangguran.
3. Prioritas menyusun kebijakan penguatan sektor riil
Sektor riil merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah, agar sektor riil sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi tetap dapat berkembang dengan baik perlu dibuat kebijakan-kebijakan tepat sasaran. Kebijakan penguatan sektor riil utamanya harus difokuskan untuk memajukan sektor-sektor yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan utama penduduk miskin, seperti sektor jasa pendidikan, pemerintahan, kesehatan,

kemasyarakatan dan perorangan, sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, serta sektor bangunan dan konstruksi.

4. Prioritas memperkuat ekonomi kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang menekankan pada keadilan dalam penguasaan sumberdaya ekonomi, proses produksi dan konsumsi. Dalam ekonomi kerakyatan kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran individu. Dilaksanakan dengan benar-benar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program-program operasional yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan, ekonomi kerakyatan ini dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi.

5. Prioritas membangun kerjasama dalam bidang agrikultur

Kebutuhan terhadap bahan pangan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh semua manusia. Mengingat keterbatasan kemampuan dalam bidang Agrikultur, dukungan dari daerah sekitarnya dalam bidang tersebut menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dengan tujuan mengendalikan harga bahan pokok di pasaran, kerjasama dalam bidang agrikultur dengan daerah tetangga perlu dilakukan. Bentuk kerjasama yang perlu dilakukan adalah mendorong daerah tetangga yang memiliki potensi agrikultur untuk mengembangkan industri agrikultur, sehingga dapat dijadikan sebagai pemasok utama bahan pangan. Selain itu, secara luas kerjasama ini juga dapat mendukung pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja.

6. Prioritas peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas. Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan. Pendidikan dan kesehatan sangat penting sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial. Dengan kondisi kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk masih relative rendah, upaya untuk memperbaiki kualitas dan akses penduduk terhadap pendidikan dan kesehatan harus dipercepat untuk mencapai kualitas manusia yang sejahtera dan berdaya saing.

7. Prioritas memperbaiki program perlindungan sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan sistem jaminan sosial. Bantuan sosial diberikan kepada mereka yang sangat rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut, cacat, lanjut usia, atau mereka yang hidup di daerah terpencil.

8. Prioritas penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Upaya penegakan hukum secara konsisten sangat penting untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Perilaku korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta rusaknya moral bangsa yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat luas. Birokrasi yang seharusnya adalah dinamisator pembangunan dan mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pada kenyataannya sarat dengan masalah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), birokrasi masih dianggap lemah dan tidak profesional dan seringkali dilihat sebagai penghambat pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu reformasi birokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi perlu menjadi prioritas.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
5. Mensinergikan kegiatan anggaran program sektor dan daerah yang diarahkan langsung kepada kelompok masyarakat miskin
6. Meningkatkan kapasitas pemerintah Kecamatan dan Gampong/Desa melalui forum Musrenbang, forum SKPD dan forum publik lainnya
7. Mengembangkan forum publik untuk monev dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Dalam rangka percepatan penanggulangan permasalahan kemiskinan, pemerintah Kota Banda Aceh perlu melakukan beberapa kebijakan, di antaranya:

1. Meningkatkan kualitas dan akurasi database angka kemiskinan
2. Meningkatkan kualitas kebijakan dan program serta kegiatan yang pro poor dan pro job.
3. Mengkoordinasi perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
4. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi serta memfasilitasi lintas pelaku serta menyebarluaskan informasi penanggulangan kemiskinan di lembaga atau dinas terkait.
5. Melakukan evaluasi dan monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
6. Mengalokasikan dana setiap tahun melalui pendampingan PNPM

7. Malahirkan kebijakan percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan berbasis inovasi dan teknologi seperti teknologi informasi, energi terbarukan, *research and development* (R&D) dan lain-lain.

Tabel 1.14

Penduduk Miskin Kota Banda Aceh 2012-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	19,42	19,42	19,30	18,80	19,23
2	Nasional	11,37	11,25	11,22	10,70	-
3	Provinsi Aceh	17,60	18,05	17,08	16,43	-
4	Banda Aceh	8,03	7,78	7,72	7,41	7,44
5	Penduduk Miskin (%)	8,03	7,78	7,72	7,41	7,44
6	Garis Kemiskinan (Rp.)	493.588	500.768	523.444	541,732	572295

Sumber data: BPS Pusat, BPS Propinsi Aceh dan BPS Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh lebih rendah dari pada Propinsi Aceh dan Nasional. Lebih lanjut, untuk Tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh jauh lebih rendah dari pada Propinsi Aceh.

Tingkat kemiskinan Propinsi Aceh sendiri masih yang jauh lebih buruk daripada nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Propinsi Aceh merupakan salah satu Propinsi dengan tingkat kemiskinan terburuk di Indonesia.

2.20. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Dengan kata lain, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM dapat digunakan sebagai data strategis untuk mengukur kinerja Pemerintah. Di Indonesia, IPM juga merupakan salah satu faktor penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM digunakan dengan mengukur 3 dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Ada 4 indikator yang digunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

IPM juga dapat digunakan untuk memperbandingkan kualitas pembangunan manusia lintas daerah dan tingkat administrasi.

IPM Kota Banda Aceh dibandingkan dengan Propinsi Aceh dan nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 1.15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2012-2016

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	IPM nasional	68,31	68,9	69,55	70,18	-
2	IPM Propinsi Aceh	68,30	68,81	69,45	70,00	-
3	Index Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh	81,84	82,22	83,25	83,73	83,95
4	Pertumbuhan IPM	0,66	0,77	1,03	0,48	-

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka dan BPS Pusat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa IPM Kota Banda Aceh telah melewati IPM Aceh dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup di Kota Banda Aceh telah lebih baik dari Aceh dan Indonesia. Sementara itu, IPM Propinsi Aceh masih dibawah IPM nasional. Selain itu, IPM Kota Banda Aceh juga menunjukkan kecenderungan terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Banda aceh terus membaik seiring waktu.

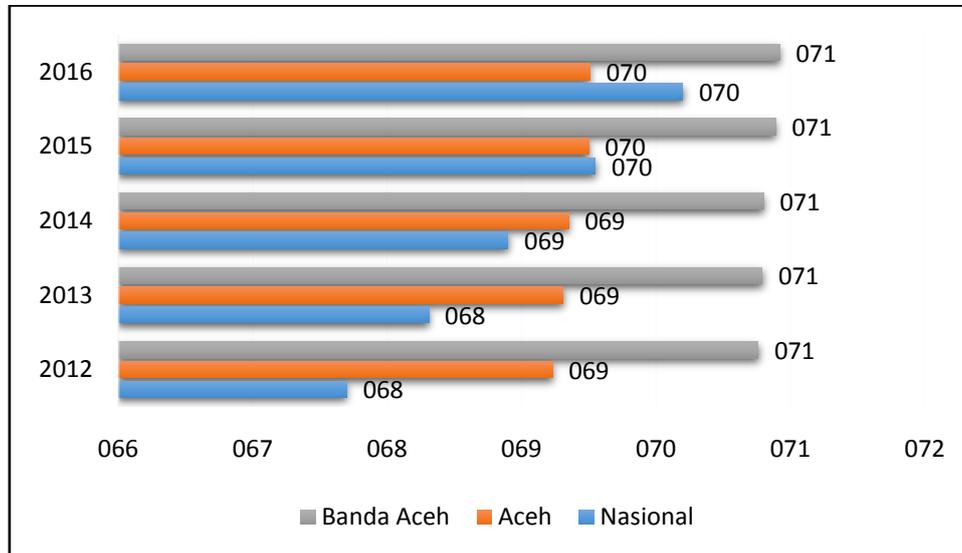
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Propinsi Aceh masih dibawah nasional. Kesenjangan IPM antara Banda Aceh dan Propinsi Aceh menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pembangunan manusia antara Kota Banda Aceh dan kabupaten lainnya di Propinsi Aceh. Kesenjangan ini adalah salah satu pemicu tingginya migrasi penduduk terutama tenaga kerja ke Kota Banda Aceh.

2.21. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.22. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Usia harapan hidup di Kota Banda Aceh secara konstan mengalami peningkatan dari 70,76 tahun 2012 menjadi 70,92 tahun 2016. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan penduduk Kota Banda Aceh sudah membaik. Namun pencapaian tersebut tidak sampai mengurangi program-program peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga AHH tersebut tetap terjaga dan meningkat.

Dibandingkan harapan hidup provinsi Aceh dan Nasional posisi AHH Banda Aceh juga jauh lebih baik. Grafik berikut menggambarkan perkembangan AHH Banda Aceh, Aceh, dan Nasional tahun 2012 – 2015.



Sumber BPS Banda Aceh dan BPS Aceh

Gambar 1.21

Angka Harapan Hidup di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

2.23. Cakupan Desa Siaga Bencana Aktif

Gampong Siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), kejadian bencana, kecelakaan, dan lain-lain, dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong royong.

Pengembangan Gampong Siaga mencakup upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat Gampong, menyiap-siagakan masyarakat menghadapi masalah-masalah kesehatan, memandirikan masyarakat dalam mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Suatu gampong dinamakan gampong siaga bila mempunyai 8 indikator yaitu :

1. Adanya Forum Masyarakat Gampong
2. Adanya Fasilitas Pelayanan kesehatan Dasar dan Sistem Rujukannya
3. Adanya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang dikembangkan
4. Adanya Sistem Pengamatan Penyakit (Surveillance) berbasis Masyarakat
5. Adanya Sistem Kesiapsiagaan bencana dan Kegawatdaruratan berbasis masyarakat

6. Adanya upaya menciptakan Lingkungan Sehat
7. Adanya Upaya mewujudkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
8. Adanya Upaya mewujudkan Kadarzi (Keluarga Sadar Gizi)

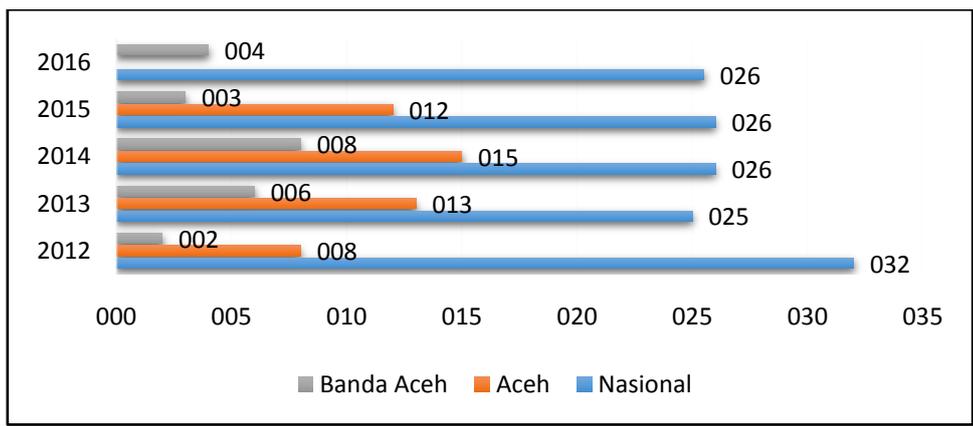
2.24. Kesehatan

2.25. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Salah satu indikator utama kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan naik turunnya angka kematian bayi, diantaranya :

- 1) masih ada ibu dengan penyakit penyerta yang ingin hamil tanpa direncanakan dengan baik;
- 2) masih rendahnya kepedulian dan keterampilan petugas dalam penatalaksanaan ibu hamil dan bayi;
- 3) kurangnya kepedulian keluarga terhadap ibu hamil dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perawatan bayi;
- 4) wanita usia subur (WUS) yang menderita Kurang Energi Kronis (KEK) dan anemia kurang mendapat perhatian sehingga saat hali akan menimbulkan risiko bagi janin yang dikandung.

Sampai dengan akhir tahun 2016 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh sebesar 4 per 1000 kelahiran hidup, meningkat dibandingkan kasus kematian bayi tahun 2015 dimana AKB sebesar 3 per 1000 kelahiran hidup. Ada banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan.



Sumber BPS, Profil Kesehatan Banda Aceh, dan Profil Kesehatan Aceh (Data AKB Provinsi Aceh Tahun 2016 tidak tersedia)

Gambar 1.22

Perkembangan AKB Banda Aceh, Aceh, dan Nasional Tahun 2012 – 2016

Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB.

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan angka kematian bayi di Kota Banda Aceh masih lebih rendah dibandingkan kematian bayi Aceh dan Nasional. Kecuali tahun 2014 angka kematian bayi di Kota Banda Aceh diatas angka kematian bayi Aceh dan Nasional.

2.26. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal merupakan pantauan terhadap kasus kematian bayi yang berumur kurang dari 1 bulan pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah bayi lahir hidup dikalikan 1000. Di kota banda aceh, angka kematian neonatal ini hanya terdapat 3 kasus/kejadian atau 0.07% saja. Umumnya dikarenakan faktor gizi, kurangnya pemeriksaan pada periode kehamilan, adanya komplikasi sehingga bayi lahir dengan berat badan rendah.

2.27. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia meliputi pelayanan rujukan yang berupa:

1. Pelayanan Kesehatan Dasar

Pada umumnya pelayanan dasar dilaksanakan di puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan Pelayanan lainnya di wilayah kerja puskesmas selain rumah sakit.

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pada umumnya dilaksanakan di rumah sakit. Pelayanan keperawatan diperlukan, baik dalam pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan.

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Pelayanan kesehatan dasar yang diterapkan di Indonesia memegang peranan penting dalam pemberian layanan kesehatan yang dapat menjangkau wilayah-wilayah pedesaan. Untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang terjangkau, maka sarana dan prasarana pelayanan kesehatan harus tersedia atau tersebar di setiap kecamatan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Kota Banda Aceh saat ini telah memiliki 11 puskesmas, 30 Poliklinik, 26 Puskesmas pembantu yang tersebar di 9 kecamatan dan 90 gampong.

Gambaran fasilitas kesehatan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.16

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2013 - 2017

Fasilitas Kesehatan	2013	2014	2015	2016	2017
Puskesmas	11	11	11	11	11
Poliklinik	1	33	30	30	-
Puskesmas Pembantu	26	26	26	26	27

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

2.28. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan dibidang pelayanan langsung seperti Rumah sakit, bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan secara terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian.

Pelayanan kesehatan rumah sakit di Kota Banda Aceh telah menunjukkan kinerja yang baik. Ketersediaan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta sudah tersebar dan mencukupi untuk pelayanan kesehatan rujukan. Dengan adanya program BPJS dan JKA pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat sudah memberikan pelayanan yang maksimal.

Tabel 1.17

Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2015

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rumah Sakit (Umum + Swasta)	15	14	14	14	14	13
Jumlah Penduduk	238.784	249.282	249.499	250.303	254.904	259.913
Rasio	1 : 15.919	1 : 17.806	1 : 17.821	1 : 17.879	1 : 18.207	1 : 19.993

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit masih memenuhi standar rasio rumah per-satuan penduduk. Idealnya satu rumah sakit melayani seratus ribu penduduk, sementara data diatas menunjukkan rata-rata rumah sakit melayani penduduk dibawah seratus ribu penduduk. Namun over capacity pelayanan dapat terjadi apabila banyaknya pasien dari luar wilayah Kota Banda Aceh yang dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh terutama rumah sakit pemerintah.

Ket :

- Provinsi 3 unit
- Pemko 1 unit
- TNI/Polri 2 unit
- Swasta 7 unit

2.29. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk adalah Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah (di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain) per 100.000 penduduk. Ketersediaan jumlah dokter memberikan gambaran pelayanan kesehatan dari sisi kuantitas tenaga medis terhadap masyarakat. Pola hidup yang semakin berubah terutama diperkotaan menjadikan masyarakat rentan terhadap gejala penyakit maupun keluhan kesehatan lainnya yang membutuhkan penanganan dokter. Kota Banda Aceh sebagai pusat pelayanan kesehatan di Provinsi Aceh memiliki beban besar dalam pelayanan kesehatan terutama penyediaan tenaga medis. Tabel berikut menggambarkan kondisi pelayanan dokter terhadap penduduk di Kota Banda Aceh.

Tabel 1.18

Perkembangan Rasio Dokter Per-SatuanPenduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Dokter (rumah sakit dan puskesmas)	675	687	165	129	662
JumlahPenduduk	249.282	249.499	250.303	254.904	259,913
Rasio/100.000 penduduk	1 : 369	1 : 363	1 : 1.516	1 : 1.976	1:392

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh

2.30. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Salah satu pengelompokan tenaga kesehatan adalah tenaga medis. Rasio tenaga medis persatuan penduduk Tahun 2012 s/d 2016 dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 1.23

Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk Tahun 2012-2016

Rasio tenaga medis di Puskesmas Kota Banda Aceh Tahun 2012 adalah 0.17 terjadi penurunan sampai dengan Tahun 2016, hal ini diakibatkan karena adanya penurunan jumlah tenaga medis yang melakukan pelayanan pada UPTD Puskesmas Kota Banda Aceh.

2.31. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC

Tuberkulosis (*Tuberculosis*, disingkat TBC) merupakan penyakit menular yang umum, dan dalam banyak kasus bersifat mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai strain mikobakteria, umumnya *Mycobacterium tuberculosis*. Tuberkulosis biasanya menyerang paru-paru, namun juga bisa berdampak pada bagian tubuh lainnya. Tuberkulosis menyebar melalui udara ketika seseorang dengan infeksi TB aktif batuk, bersin, atau menyebarkan butiran ludah mereka melalui udara. Bila Tuberkulosis tidak diobati maka lebih dari 50% orang yang terinfeksi bisa meninggal. Penemuan pasien bertujuan untuk mendapatkan pasien TB melalui serangkaian kegiatan dari mulai penjarangan terhadap terduga pasien TB, pemeriksaan fisik dan

laboratoris, menentukan klasifikasi penyakit serta tipe pasien TB, sehingga dapat dilakukan pengobatan agar sembuh dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain.

Indikator Program TB

Dalam menilai kemajuan atau keberhasilan program pengendalian TB digunakan beberapa indikator. Indikator utama program pengendalian TB secara Nasional ada 2, yaitu:

1) Cakupan Penemuan Kasus TB (*Case Notification Rate* = CNR)

Angka penemuan kasus TB (CNR) di Kota Banda Aceh dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan, dari capaian 127 per 100.000 penduduk menjadi 238 per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penjangkauan kasus TB di sarana pelayanan kesehatan dari sebelumnya dilakukan secara passif (sistem menunggu di layanan kesehatan) menjadi aktif (sistem mencari langsung ke masyarakat) didukung juga dengan fasilitas dan sumber daya manusia di sarana pelayanan kesehatan.

2) Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Treatment Success Rate* = TSR).

Success Rate Kota Banda Aceh pada tahun 2012 sampai 2016 capaian penanganan keberhasilan pengobatan dari 95% menjadi 98%. Ini menunjukkan target kesembuhan pasien sudah melebihi target nasional yaitu >80%. Tercapainya keberhasilan ini didukung oleh kepatuhan pengobatan pasien, selain itu penemuan pasien dilakukan dengan kegiatan aktif di puskesmas untuk memantau pasien melalui kegiatan BOK dan pemberian Makanan Tambahan pada pasien

2.32. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Tidak ditemukan kasus kematian dikarenakan penyakit tuberkulosis, hal ini terkait juga dengan tingginya angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) TB BTA+ yang mencapai 99,01%, selain karena ketersediaan obat pun ada dan mudah didapatkan, sisanya 0,9% belum menyelesaikan periode pengobatan atau belum dilaporkan.

2.33. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit demam berdarah *dengue* (DBD) adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk *aedes aegypti*. Penyakit DBD masih merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia.

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Banda Aceh bila dibandingkan pada tahun sebelumnya, sedikit mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 kasus DBD sebanyak 127 kasus sedangkan pada tahun 2016 terdapat 152 kasus yang dilaporkan. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya tingginya curah hujan sehingga banyak terjadi

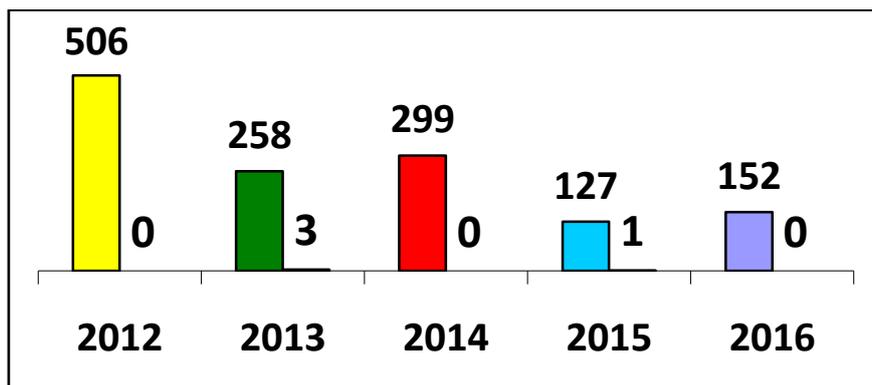
genangan air pada wadah atau tempat yang dapat menampung air hujan sebagai tempat perindukan nyamuk DBD di lingkungan luar sekitar rumah, faktor yang lainnya juga dapat dilihat dari tingkat pengetahuan, pemahaman dan kepedulian serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat yang masih rendah, bisa dikarenakan tidak mengetahui ataupun tidak mempunyai kesempatan untuk memantau tempat-tempat perindukan nyamuk DBD yang ada di dalam rumah, seperti ditempat penampungan air dispenser, kulkas, bak mandi, vas bunga, talang air yang tersumbat dan lain lain. Hal ini menjadi salah satu faktor berkembang biaknya nyamuk DBD secara cepat.

Tabel 1.19

Data Sebaran Kasus DBD Tahun 2012-2016

Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
Kuta Alam	36	41	19	31	13
Lueng Bata	14	23	17	14	-
Meuraxa	13	13	4	5	15
Syiah Kuala	55	29	11	24	13
Ulee Kareng	21	32	24	15	21
Banda Raya	25	48	8	13	25
Jaya Baru	21	32	27	22	37
Kuta Raja	9	20	0	12	-
Baiturrahman	64	47	17	16	37
Total	258	285	127	152	236

*Data Sebaran Kasus DBD, dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tahun 2012 s/d 2017



*Data Kasus dan Kematian akibat DBD tahun 2012 s/d 2016

Gambar 1.24

Data Kasus Kematian Akibat DBD tahun 2012-2016

Penanganan

Penanggulangan DBD yang masih sangat efektif adalah dengan melakukan Gerakan 3M Plus, yaitu Menguras, Menutup dan Mengubur serta Menghindari Gigitan Nyamuk. Pengasapan atau *fogging* hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedangkan jentik nyamuk DBD masih tetap bertahan hidup dan menjadi nyamuk dewasa setelah beberapa hari kemudian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pemberantasan tempat-tempat perindukan nyamuk DBD dengan cara Pemberdayaan Masyarakat melalui Kader JUMANTIK = Juru Pemantau Jentik.

2.34. Penderita Diare yang Ditangani

Persentase Diare ditemukan dan ditangani selama tahun 2016 mencapai 34,87% dari 3.653 kasus, jumlah ini adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS. angka tersebut merupakan angka yang mendapatkan penanganan lanjutan, lainnya dikarenakan umumnya penduduk melakukan pengobatan lanjutan di rumah, dan mengkonsumsi obat-obatan yang dijual bebas di apotik-apotik.

2.35. Angka Kesakitan Malaria (*Annual Parasit Incidence*)

Angka Kesakitan Malaria (*Annual Parasit Incidence*) hanya didapatkan 0.04% per 1.000 penduduk berisiko, meski terdapat 735 suspek malaria pada tahun 2016, kepastian dilakukan dengan pemeriksaan darah. Namun demikian, diperkirakan terdapat 23.828 penduduk berisiko.

2.36. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Ujung tombak pelayanan kesehatan dasar yang menyentuh masyarakat yaitu Puskesmas. Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin disarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru).

Tabel 1.20

Tabel Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Target	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2	Realisasi	100 %	76,62 %	13,57 %	8,96 %	100%

Sarana kesehatan strata dua dan tiga adalah balai kesehatan mata masyarakat, balai pengobatan penyakit paru, balai kesehatanindera masyarakat, balai besar kesehatan paru masyarakat, rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2012-2016. Berdasarkan tabel diatas, terjadi peningkatan pelayanan di FKTP yang digambarkan dengan menurunnya persentase rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

3. KUALITAS FISIK DAN PENATAAN RUANG

3.1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh mutlak diperlukan, mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan Kota Banda Aceh. Dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan bahwa jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang.

Tabel 1.21

Data Perbandingan Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status (Jalan Nasional, Provinsi dan Kota)

Status Jalan		
Nasional (Km)	Provinsi (Km)	Kota (Km)
1	2	3
18,083	40,24	707,343

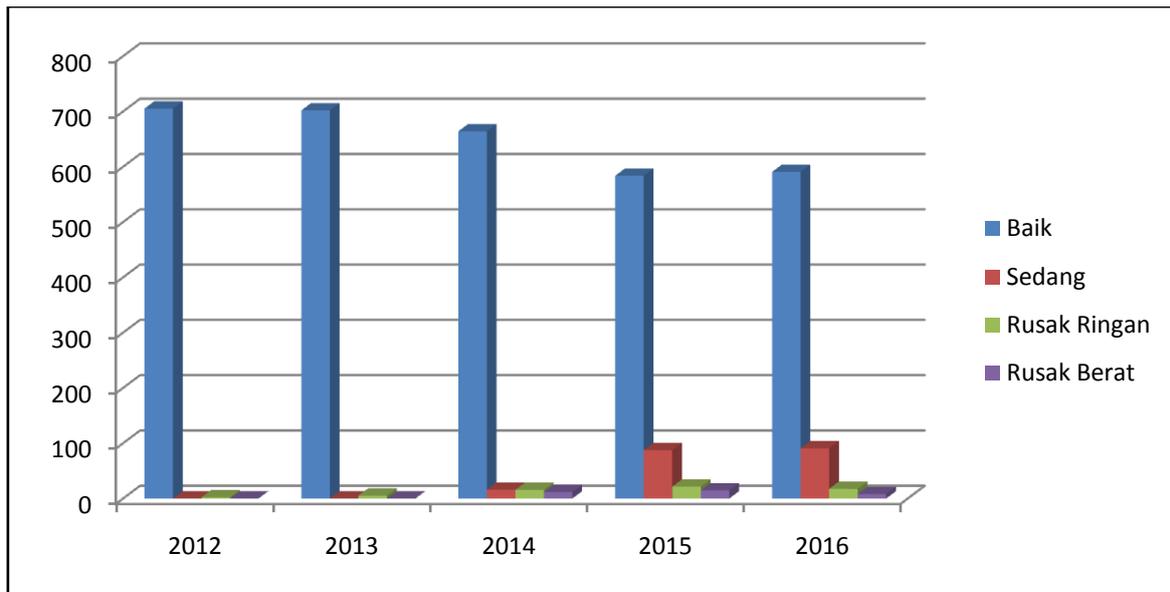
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh tahun 2017

Tabel 1.22

Data Status Kondisi Jalan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Panjang Jalan (km) (SK No. 221A Thn 2010)	Kondisi Ruas Jalan							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2012	707,343	705,221	99,70	-	0,00	2,122	0,30	-	0,00
2013	707,343	702,021	99,25	-	0,00	5,322	0,75	-	0,00
2014	707,343	664,073	93,88	15,828	2,24	15,642	2,21	11,801	1,67
2015	707,343	583,749	82,53	87,480	12,37	21,487	3,04	14,627	2,07
2016	707,343	590,773	83,52	90,894	12,850	17,542	2,48	8,134	1,15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh tahun 2017



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2017

Gambar 1.25

Grafik Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun Anggaran 2012-2016

Pertumbuhan sosial, ekonomi, dan pembangunan di kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan yang memperlancar, merangsang dan memacu aktifitas pembangunan. Hal ini terlihat dari pembangunan panjang jaringan jalan setiap tahunnya. Saat ini panjang jalan di Kota Banda Aceh \pm 707,343 km dengan kondisi baik 83,52%. sebagaimana terlihat pada tabel 2.52 dan gambar 2.38.

3.2. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sektor sanitasi yang mencakupi bidang air limbah, persampahan dan drainase merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam pengelolaan sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif untuk mencapai target layanan sektor sanitasi yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sanitasi maupun peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Pusat maupun Daerah.

Pengembangan sanitasi Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur serta pelayanan sanitasi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam rangka mencapai hal tersebut pemerintahan kota menyusun Struktur Organisasi Pemerintahan Kota (SOTK) dan ditetapkan dalam Qanun No.2 Tahun 2008. Pada tahun 2017 dilakukan revisi terhadap SOTK Tahun 2008 tersebut dan ditetapkan dalam Qanun Kota Banda

Aceh No. 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan SOTK tersebut, kegiatan sanitasi tersebar di berbagai dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/badan. Koordinasi mendalam antar dinas/SKPD perlu dilakukan untuk dapat melaksanakan pengembangan sanitasi secara terpadu dan berkesinambungan sebagai bentuk percepatan pembangunan sanitasi kota.

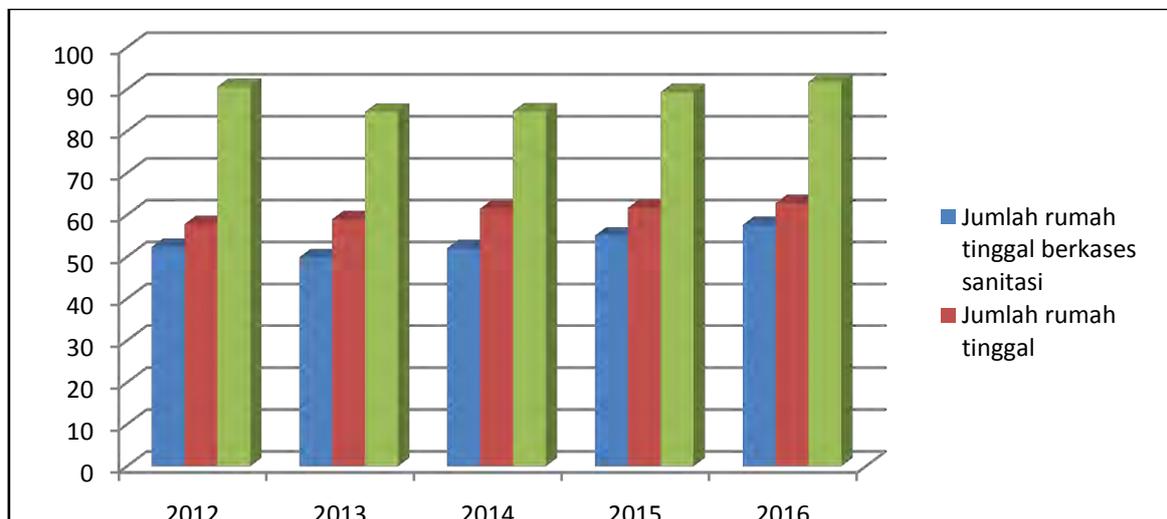
Sebagai gambaran terhadap jumlah rumah tinggal yang berakses sanitasi, bahwa pada tahun 2016 di Kota Banda Aceh terdapat sebanyak 57.687 unit atau sebesar 91.72%, jumlah rumah tinggal berakses sanitasi ini akan terus ditingkatkan sebanyak 0,03% per tahunnya, hingga mencapai 91,87% pada akhir tahun RPJM (Tahun 2016). lebih jelasnya rincian jumlah rumah tangga berakses sanitasi ini dapat dilihat pada tabel 2.53 dan gambar 2.39.

Tabel 1.23

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Banda Aceh Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	49.872	52.036	55.031	57.576	58.176
2.	Jumlah rumah tinggal	58.957	61.443	61.641	62.774	65.288
3.	Persentase	84.59%	84.69%	89.28%	91.72%	89.10%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Gambar 1.26

Grafik Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi Tahun 2012 - 2016

Dari gambar di atas untuk indikator persentase rumah tinggal bersanitasi, peningkatannya menunjukkan hasil yang positif.

3.3. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat

Tabel 1.24

Data Kondisi Drainase Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

Tahun	Panjang Total Drainase (km)		Kondisi Drainase							
	Makro	Mikro	Baik (km)		Sedang (km)		Rusak Ringan (km)		Rusak Berat (km)	
			Makro	Mikro	Makro	Mikro	Makro	Mikro	Makro	Mikro
2012	177,54	1348,94	149,64	1032,47	6,24	56,19	24,16	503,01	3,40	3,63
2013	179,33	1573,76	150,57	1204,32	6,14	54,58	23,82	495,89	3,36	3,68
2014	181,12	1798,59	151,80	1376,63	6,03	52,96	23,47	488,77	3,32	3,71
2015	182,93	2023,41	153,50	1548,71	5,90	50,52	23,29	481,75	3,29	3,82
2016	186,61	2248,24	154,59	1720,79	5,80	48,91	22,95	474,54	3,26	4,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh tahun 2017

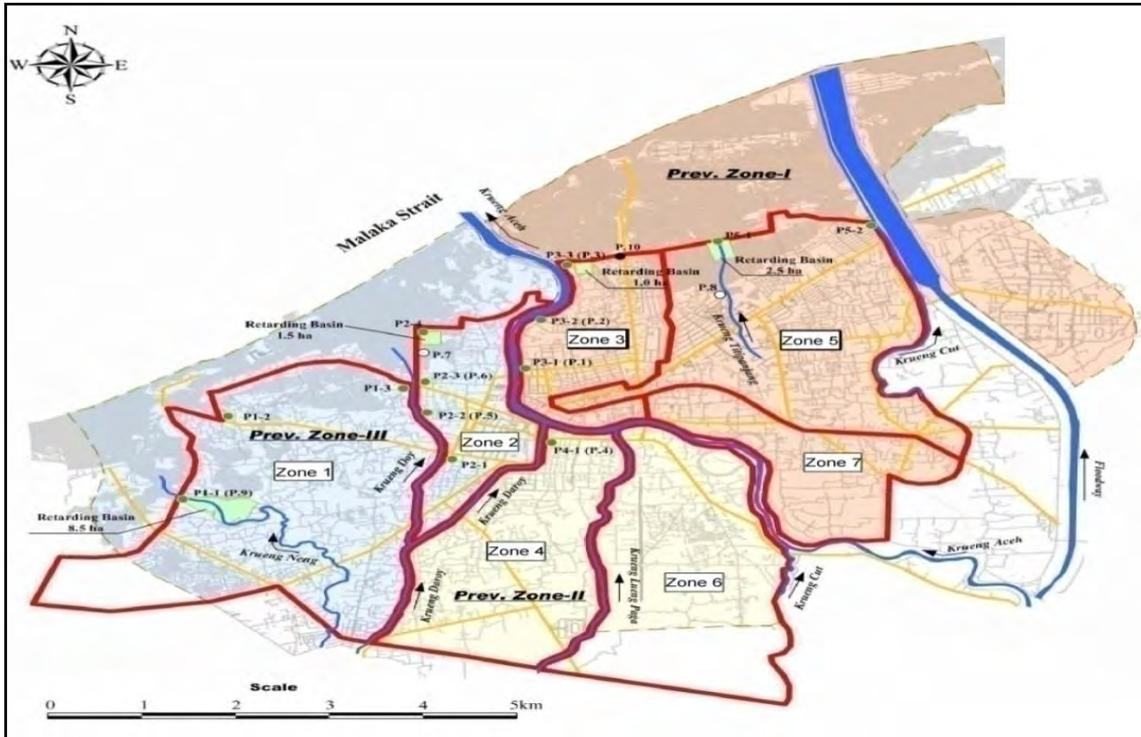
Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa pemeliharaan jaringan drainase merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan drainase kota agar dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Pengertian pemeliharaan adalah semua pekerjaan rutin dan berulang yang diperlukan untuk memelihara suatu fasilitas sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi maksimal sesuai dengan perencanaan.

Kota Banda Aceh termasuk salah satu kota pantai, dengan topografi yang berada pada elevasi 0,80 meter di atas permukaan air laut. Secara hidrolis Kota Banda Aceh menerima banjir kiriman, banjir genangan dan banjir pasang air laut,berhubung kondisi topografi yang relatif datar maka banjir ini tidak dapat dibuang dengan gravitasi.

Untuk itu dalam perencanaan drainase terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan perlu pertimbangan seperti: pendangkalan saluran (sedimentasi),limbah,sampah dan pasang surut air laut,dan pada tempat-tempat tertentu seperti pada pertemuan drainase dengan badan air (*receiving waters*) khususnya di dekat pantai perlu direncanakan bangunan kolam pengumpul yang dilengkapi dengan pumping station karena aliran secara gravitasi sudah tidak mungkin dilakukan secara optimal.

Pada tahun 2005 melalui Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir Kota Banda Aceh dan Pengaman Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Aceh melaksanakan SID Drainase Induk Kota

Banda Aceh dan melakukan Review Master Plan Drainase Banda Aceh dengan membagi wilayah pengaliran air menjadi 8 zona drainase seluas 4.706 Ha, sebagaimana terlihat pada gambar 1.27.

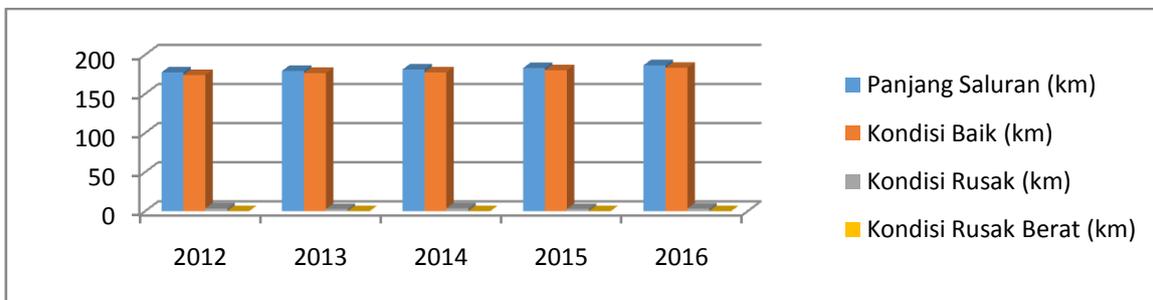


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2017

Gambar 1.27

Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh

Panjang saluran drainase khususnya drainase utama (main drain) di Kota Banda Aceh pada tahun 2016 adalah ± 186,61 km, dengan rincian kondisi baik sepanjang 183.35 km dan kondisi rusak sepanjang 3.26 km. Adapun rincian target pencapaian kondisi main drain dalam keadaan baik dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 2.52 dan gambar 2.40.



*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2017

Gambar 1.28

Grafik Perkembangan Kondisi Main Drain Kota Banda Aceh 2012 – 2016

Tabel 1.25

Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	23.073	23.473	23.473	23.473	23.473
Panjang seluruh jalan kota (km)	707,343	707,343	707,343	707,343	707,343
Persentase	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

3.4. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

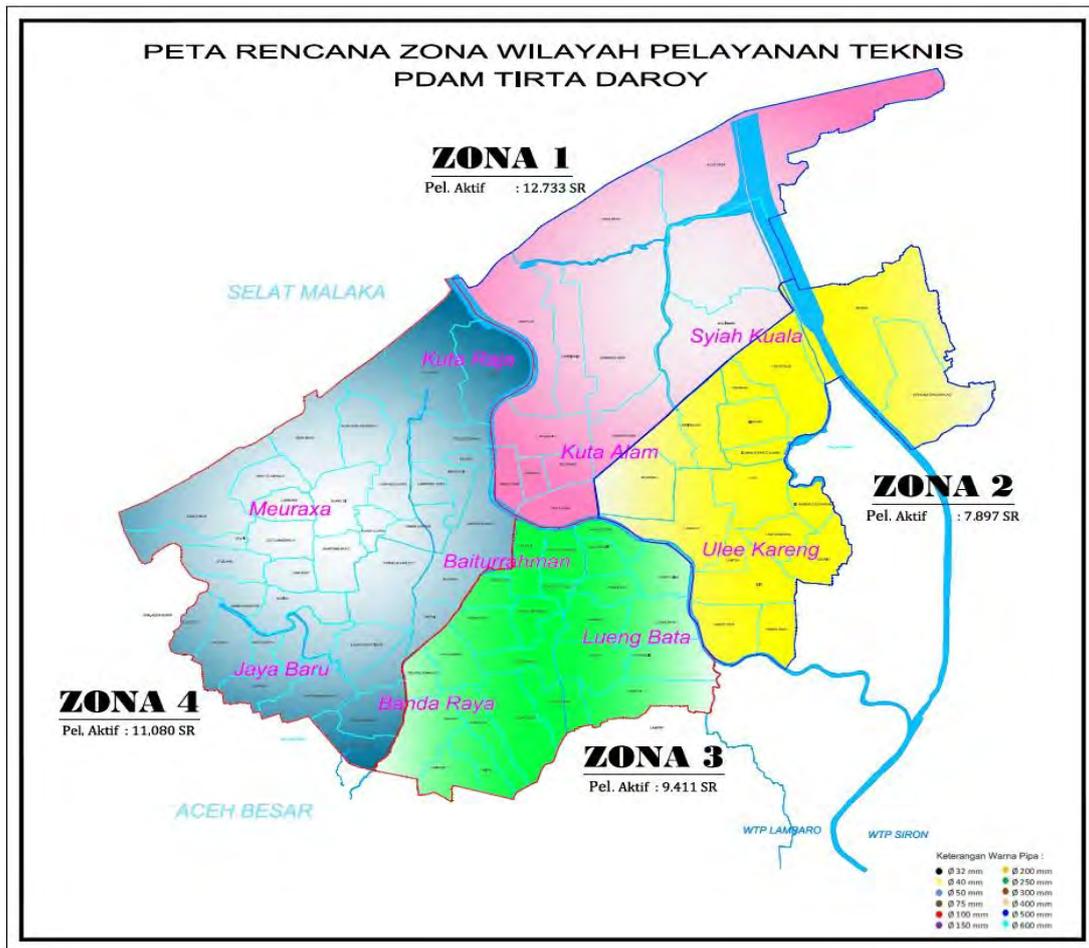
Kebutuhan akan air bersih saat ini meningkat dengan tajam sejalan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya air minum untuk hidup sehat. Dilain pihak kapasitas sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan air minum masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas produksi dan jaringan pipa distribusi air minum.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku, Kota Banda Aceh mempunyai potensi sumber air yang dapat di pergunakan, yaitu Sungai Krueng Aceh yang mempunyai debit minimal $10,38\text{m}^3/\text{detik}$ atau $0.000\text{liter}/\text{detik}$ pada musim kemarau panjang. Terdapat dua unit Instalasi Pengolahan Air Minum yang sampai saat ini beroperasi di Kota Banda Aceh, yaitu IPA Lambaro dengan kapasitas terpasang $435\text{liter}/\text{detik}$ dan IPASiron ber- kapasitas $60\text{liter}/\text{detik}$. Lokasi *intake* kedua IPA tersebut adalah di Sungai Krueng Aceh.

PDAM TirtaDaroy diharapkan telah mampu merehabilitasi dan membangun kembali seluruh sarana dan prasarana sistem penyediaan air bersih, berupa instalasi pengolahan, sistem distribusi dan sarana penunjangnya sampai dengan tahun 2029. Target pelayanan terhadap pelanggan PDAM Tirta Daroy sampai dengan tahun 2029 minimal mencapai 100%.

Untuk mendukung terlaksananya dengan baik system penyediaan air minum Kota Banda Aceh, system pendistribusian dan pola pelayanan air minum Kota Banda Aceh pun harus mengikuti pertumbuhan kepadatan kota yang terus meningkat yaitu salah satunya dengan membentuk Zona Distribusi untuk membagi blok pelayanan secara teknis perpipaan. Tujuan pembentukan Zona Distribusi, antara lain :

1. Standar Pelayanan 4 K dapat tercapai dan terlaksanan dengan baik;
2. Memudahkan dalam manajemen pengelolaan;
3. Memudahkan dalam manajemen pemeliharaan;
4. Meminimalisir tingginya tingkat kehilangan air (NRW).



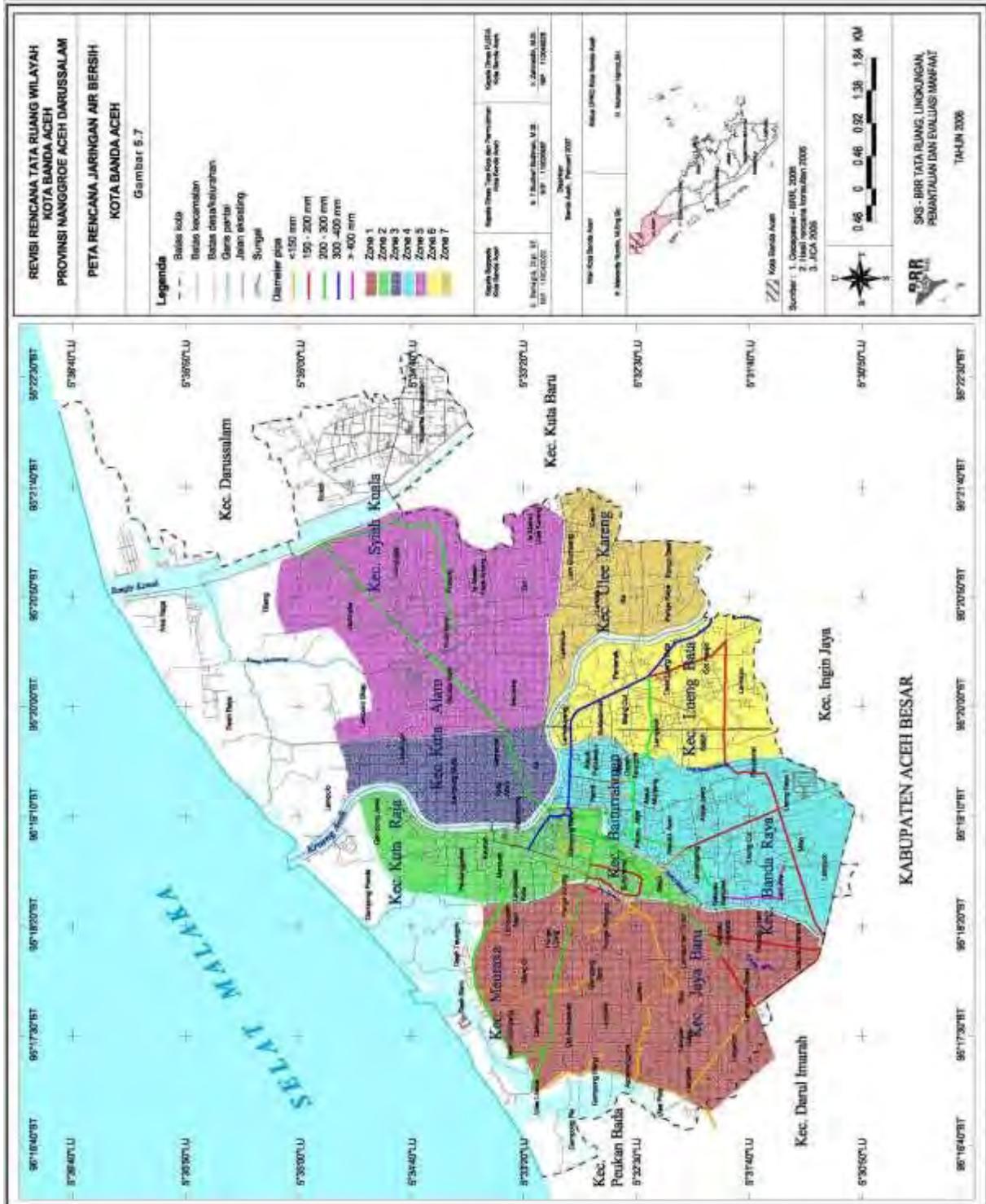
Sumber : PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 2017

Gambar 1.29

Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis PDAM Tirta Daroy

Sumber air yang digunakan oleh PDAM Tirta Daroy adalah dari Krueng Aceh, sungai terbesar yang membelah Kota Banda Aceh. Untuk menjaga adanya intrusi air laut ke dalam sungai Krueng Aceh telah terpasang unit bendung karet. Namun demikian, kondisi bendung karet saat ini dalam keadaan rusak dan membutuhkan perbaikan atau pembangunan unit yang baru. Saat ini pemerintah Kota Banda Aceh tengah merencanakan pembangunan bendung karet baru sehingga kualitas air baku dapat terjamin dengan optimal.

Berdasarkan data tahun 2008, pada tahun 2007 debit Sungai Krueng Aceh $177,88 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau dengan rata-rata per-bulan sebesar $14,82 \text{ m}^3/\text{detik}$, sehingga sungai Krueng Aceh sebagai sumber air baku yang potensial bagi penyediaan air bersih Kota Banda Aceh dan perlu dijaga dengan baik, karena air permukaan sangat rawan terhadap pengaruh pencemaran.



Gambar 1.30

Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029

Upaya-upaya untuk tetap menjaga kuantitas air dan kualitas air yang baik harus dilaksanakan dengan strategi yang jelas dan program kegiatan yang baik, antara lain dengan:

- Menjaga kualitas air baku agar tetap memenuhi daya dukungnya dengan melakukan monitoring secara rutin,

- Menindak tegas tanpa ada tawar menawar pada semua industri dan atau lainnya yang membuang limbah cairnya ke badan air sehingga kualitas mengalami penurunan,
- Melakukan pengamanan terhadap kawasan daerah pengaliran sungai, agar tetap menjadi daerah tangkapan air yang baik bagi Sungai Krueng Aceh.

Salah satu solusi yang bisa ditawarkan dalam masalah ini adalah pemanfaatan Sungai Sarah sebagai sumber air bersih untuk warga Kota Banda Aceh. Sungai Sarah lebih tepat untuk menjadi sumber air karena masih alami dan belum tercemar. Walau begitu pemerintah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar harus mengkomunikasikan hal ini dengan baik, karena sungai Sarah berada di wilayah Aceh Besar.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum disebutkan bahwa Setiap pelanggan air minum berhak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3.5. Persentase Areal Kawasan kumuh

Berdasarkan hasil Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Banda Aceh (RKPKP) di Tahun Anggaran 2015, titik lokasi kumuh bertambah dari 20 lokasi menjadi 22 lokasi, meskipun begitu, luas area permukiman kumuh mengalami penurunan dari 797 Ha menjadi 463 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa selain penanganan yang telah dilakukan selama ini di berbagai wilayah permukiman kumuh, perlu juga dilakukan upaya pencegahan agar tidak ada penambahan lokasi kumuh di Kota Banda Aceh sehingga di tahun 2019, target Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menurunkan hingga 0% daerah kumuh dapat terwujud.

Tabel 1.26

Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	553.06	553.06	797.56	462.73	462.73

Pada tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya telah melaksanakan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana daerah permukiman kumuh di 4 (empat) lokasi yang termasuk dalam tingkat kekumuhan sedang yaitu:

- Kawasan Lambaro Skep,
- Kawasan Alue Naga,
- Kawasan Deah Raya, dan
- Kawasan Tibang.

Kegiatan ini memakan dana sebesar Rp. 17.648.124.200,- yang didalamnya mencakup beberapa pekerjaan antara lain;

- pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 11,72 km,
- pembangunan dan peningkatan drainase sepanjang 5,74 km,
- pengadaan motor sampah sebanyak 5 unit, dan
- lampu jalan tenaga surya sebanyak 50 unit.

Pembangunan kawasan permukiman kumuh kita tekankan pada pembangunan sarana prasarana dasar permukiman seperti jalan, drainase, pengelolaan sampah dan lampu jalan. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kebutuhan dasar dari sarana prasarana permukiman merupakan hal utama terkait dengan kegiatan sehari-hari masyarakat, yaitu meningkatnya akses masyarakat dari kawasan permukiman ke pusat aktifitas perekonomian berupa pertokoan dan pasar

Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh yang memiliki populasi sekitar 250 juta jiwa juga tidak sepenuhnya terlepas dari permasalahan kantong-kantong kemiskinan ini. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan dan kesehatan yang dianggap sebagai bagian kota yang harus disingkirkan. Terbentuknya pemukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slump area* sering dilihat berpotensi menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena bisa menjadi sumber timbulnya berbagai masalah lingkungan, kesehatan, dan perilaku menyimpang, seperti kejahatan, serta sumber penyakit sosial lainnya.

Adapun manfaat terhadap lingkungan

1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan mengurangi kekumuhan
2. Mengurangi dampak pencemaran lingkungan
3. Mengurangi tingkat bahaya pada saat bencana
4. Mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi karena tidak tersedianya

3.6. Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Meskipun jumlah lokasi yang dipelihara setiap tahunnya sama namun pencapaian pemeliharannya relatif naik dan turun setiap tahun disebabkan karena adanya bertambahnya lokasi makam yang dipelihara sesaat karena adakegiatan penimbunan tanah makam dan pemagaran melalui dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh pada lokasi makam yang berada diluar dari pengelolaan DLHK3 yang jumlahnya berbeda-beda setiap tahunnya.

Tabel 1.27

Tabel Lokasi Tempat Pemakaman Umum di Kota Banda Aceh dibawah Pengelolaan DLHK3

No	Nama Pemakaman	Lokasi Gampong	Luas Lahan (M2)	Status Lahan
1	Kuburan Kota Baro	Kota Baru	6.650	Milik Gampong
2	Kuburan Keudah	Keudah	12.400	Milik Gampong
3	Kuburan Beurawe	Beurawe	1.400	Milik Gampong
4	Kuburan Beurawe Dalam	Beurawe	2.480	Milik Gampong
5	Kuburan Peulanggahan	Peulanggahan	4.600	Milik Gampong
6	Kuburan Mulia	Mulia	10.695	Milik Gampong
7	Kuburan Setui	Seutui	6.400	Milik Gampong
8	Kuburan/Makam Massal Kampung Pande	Pande	1.995	Milik Gampong
9	Kuburan Massal Ulee Lheu	Pie	7.300	Milik Pemko B. Aceh
10	Kuburan Taman Bahagia	Ateuk Pahlawan	8.700	Milik Gampong
11	Kuburan Lingke	Jeulingke	2.140	Milik Gampong
Jumlah Luas yang Dipelihara			64.760	

3.7. Penataan Ruang

3.8. Rasio Ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB

Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki Pemerintah Kota Banda Aceh dari Tahun 2012-2016, dapat dilihat pada Table1.28 sebagai berikut.

Tabel 1.28

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	1.258,80	1.258,80	1.258,80	1.258,80	1.258,80
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	769.74	804.67	809.6	809.67	637,01
3.	Luas wilayah	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (2:1)	12.54	13.10	13.20	13.20	10,79

Sumber: - RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2017

Target capaian Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 persen dari luas wilayah, yaitu 10 persen RTH private dan 20 persen RTH Publik. Adapun luas RTH publik Tahun 2016 yang ada di Kota Banda Aceh saat ini baru mencapai 13,20 % persen dari luas kota.

3.9. Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Jumlah bangunan di Kota Banda Aceh Tahun 2016 sebanyak 68.590 unit. Bangunan di Kota Banda Aceh yang terbangun sebelum tahun 2004 (sebelum terjadinya bencana Tsunami) tidak memiliki akurasi yang lengkap terhadap dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengingat banyak arsip IMB yang hilang pasca terjadinya tsunami. Pasca tsunami terjadinya pertumbuhan bangunan yang begitu pesat dari tahun ke tahun, bahkan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005 sampai dengan 2009 adanya pertumbuhan bangunan antara 2.000 unit sampai dengan 3.000 unit bangunan setiap tahunnya. Data bangunan yang memiliki IMB di Kota Banda Aceh, untuk bangunan yang telah terbangun sebelum tahun 2004 diprediksikan 50% memiliki IMB, sedangkan pasca tsunami pada saat rehab dan rekon pembangunan bangunan yang memiliki IMB sebanyak \pm 60% bangunan telah melakukan pengurusan IMB dari jumlah yang dibangun.

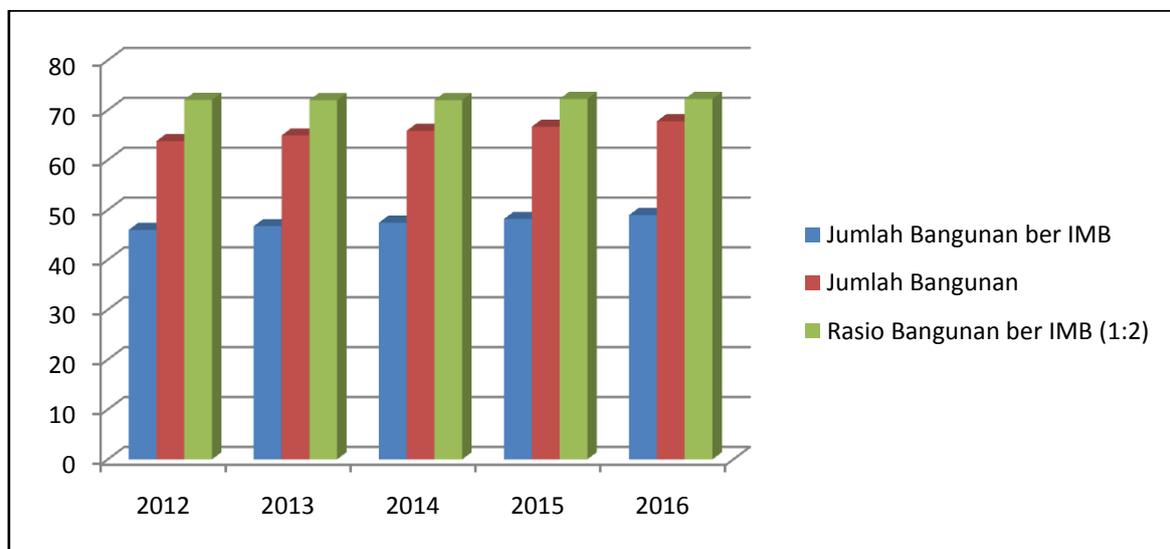
Analisis data bangunan yang memiliki IMB di Kota Banda Aceh, dikaji dengan perkiraan persentase pada bangunan yang terbangun sebelum tahun 2004 dan dikombinasikan dengan data bangunan yang mengurus IMB baik bangunan telah ada maupun bangunan yang dibangun baru dari tahun ke tahun. Rasio bangunan ber IMB di Kota Banda Aceh tersebut dapat dilihat pada tabel 1.29 dan gambar 1.31

Tabel 1.29

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	46.747	47.445	48.189	48.969	50.679
2.	Jumlah Bangunan	64.926	65.865	66.690	67.790	69.497
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	72	72,03	72,26	72,24	72,92

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banda Aceh



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Gambar 1.31

Grafik Jumlah Bangunan ber IMB Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

3.10. Ruang Publik yang Berubah peruntukannya

Tabel 1.30

Tabel Jumlah ruang Publik yang tersedia

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah ruang publik yg tersedia	1.258,80	1.258,80	1.258,80	1.258,80	1.258,80
2.	Ruang public yg berubah Fungsi (Ha)	0	0	0	0	0
3.	Ruang Publik yg berubah	0	0	0	0	0

	Peruntukannya (%)					
--	-------------------	--	--	--	--	--

Sumber: - RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029

3.11. Ketaatan Terhadap RTRW

Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan Penataan Ruang yang berpijak pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Qanun (Perda) Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam pengembangan Kota Banda Aceh yang mengacu pada Qanun tersebut seperti penyesuaian pemanfaatan lahan berdasarkan pola ruang dan struktur ruang yang ada dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh. Salah satu indikator ketaatan terhadap RTRW Kota adalah pelaksanaan pembangunan baik bangunan pemerintah, bangunan swasta, bangunan masyarakat yang dibangun sesuai dengan peruntukan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW Kota Banda Aceh.

Peningkatan pemahaman dalam implementasi penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi penataan ruang kepada setiap stakeholder, sehingga diprediksikan setiap tahunnya ditargetkan adanya peningkatan kesesuaian pembangunan dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan dan berimplikasi pada peningkatan rasio ketaatan terhadap RTRW.

Tabel 1.31

Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Realisasi RTRW	53,57	57,07	60,57	64,07	67,57
2	Rencana Peruntukan RTRW	100	100	100	100	100
3	Rasio (1/2)	0,54	0,57	0,61	0,64	0,68

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017

3.12. Kawasan Permukiman dan Bencana Kebakaran

3.13. Rasio Rumah Layak Huni

Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memenuhi perumahan layak huni makin besar seiring dengan meningkatnya jumlah pembangunan perumahan yang merupakan dampak dari meningkatnya jumlah penduduk. Dalam lingkungan perumahan sendiri harus terdapat fasilitas-fasilitas yang menunjang berkegiatan sehari-hari hal ini bertujuan untuk menjamin kelayakan perumahan yang dihuni sehingga dapat memberikan rasa nyaman, aman, tentram dan sejahtera bagi penghuninya. Peran tersebut telah sesuai dengan peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, dan katalisator. Dalam mewujudkan perumahan yang layak huni yang menjadi faktor pendukung antara lain adanya bantuan dari pemerintah berupa pembangunan secara fisik maupun pemberian penghargaan serta dukungan sumber daya manusia yang berkompeten

Tabel 1.32

Tabel Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Rumah	56.062	57.408	58.785	60.196	61.641
2	Jumlah Rumah Layak Huni	55.128	56.595	58.093	59.625	61.191
	Persentase	98,33	98,58	98,82	99,05	99,27

Pembangunan rumah layak huni diselenggarakan dengan sumber dana Otsus lewat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan jumlah yang tertangani 288 unit dan Sumber dana ZIS lewat Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menangani 185 unit sampai dengan tahun 2017. Jumlah proposal permohonan rumah layak huni yang masuk dari masyarakat dari tahun 2013 sampai dengan 2016 sebanyak 1194 proposal.

Kebutuhan jumlah rumah layak huni untuk kota banda aceh adalah 17375 unit dan kebutuhan rehab rumah 6.271 unit. Kondisi di lapangan masyarakat banyak yang tidak mempunyai tanah sehingga pemerintah tidak dapat memberikan bantuan rumah. Membangun perumahan bersubsidi untuk MBR bisa menjadi pilihan pemerintah kota Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat yang tidak mempunyai tanah.

3.14. Persentase Permukiman yang Tertata

Tabel 1.33

Persentase Luas Permukiman Tertata

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas Area Permukiman tertata (Ha)	1953,58	1953,58	1709,08	2043,91	2043,91
2	Luas Area Permukiman Keseluruhan (Ha)	2.506,64	2.506,64	2.506,64	2.506,64	2.506,64
	Persentase	77,94	77,94	68,18	81,53	81,53

Sumber: Dinas Perkim, PUPR

3.15. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Berdasarkan hasil Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Banda Aceh (RKPKP) di Tahun Anggaran 2015, titik lokasi kumuh bertambah dari 20 lokasi menjadi 22 lokasi, meskipun begitu, luas area permukiman kumuh mengalami penurunan dari 797 Ha menjadi 463 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa selain penanganan yang telah dilakukan selama ini di berbagai wilayah permukiman kumuh, perlu juga dilakukan upaya pencegahan agar tidak ada penambahan lokasi kumuh di Kota Banda Aceh sehingga di tahun 2019, target Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menurunkan hingga 0% daerah kumuh dapat terwujud.

Tabel 1.34

Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	553,06	553,06	797,56	462,73	462,73
2	Luas Wilayah (Ha)	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00
	Persentase	9,01	9,01	12,99	7,54	7,54

Pada tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya telah melaksanakan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana daerah permukiman kumuh di 4 (empat) lokasi yang termasuk dalam tingkat kekumuhan sedang yaitu

- Kawasan Lambaro Skep,
- Kawasan Alue Naga,
- Kawasan Deah Raya, dan
- Kawasan Tibang.

Pembangunan kawasan permukiman kumuh kita tekankan pada pembangunan sarana prasarana dasar permukiman seperti jalan, drainase, pengelolaan sampah dan lampu jalan.

Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kebutuhan dasar dari sarana prasarana permukiman merupakan hal utama terkait dengan kegiatan sehari-hari masyarakat, yaitu meningkatnya akses masyarakat dari kawasan permukiman ke pusat aktifitas perekonomian berupa pertokoan dan pasar.

Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh yang memiliki populasi sekitar 250 juta jiwa juga tidak sepenuhnya terlepas dari permasalahan kantong-kantong kemiskinan ini. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan dan kesehatan yang dianggap sebagai bagian kota yang harus disingkirkan. Terbentuknya pemukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slump area* sering dilihat berpotensi menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena bisa menjadi sumber timbulnya berbagai masalah lingkungan, kesehatan, dan perilaku menyimpang, seperti kejahatan, serta sumber penyakit sosial lainnya.

Adapun manfaat terhadap lingkungan

1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan mengurangi kekumuhan
2. Mengurangi dampak pencemaran lingkungan
3. Mengurangi tingkat bahaya pada saat bencana
4. Mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi karena tidak tersedianya drainase lingkungan yang layak

3.16. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain : pemukiman, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Rumus Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran yaitu:

$$\frac{\Sigma \text{Luas WMK (luas lingkaran)}}{\Sigma \text{luas potensi kebakaran}} \times 100 \%$$

$$\frac{6 \text{ WMK (7.5)}}{61,36} \times 100 \%$$

$$= 73,34 \%$$

Oleh Karena itu Kota Banda Aceh harus membentuk 2 (dua) WMK lagi untuk Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 100 %.

$$\frac{8 \text{ WMK (7.5)}}{61,36} \times 100 \%$$

$$= 97,78 \%$$

Tabel 1.35

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Banda Aceh

Tahun	Wilayah Manajemen Kebakaran (km ²)			Luas Kota Banda Aceh (km ²)	Persentase (%)
2012	7.5	3	Pos	61,36	36,66%
2013	7.5	4	Pos	61,36	48,89%
2014	7.5	4	Pos	61,36	48,89%
2015	7.5	5	Pos	61,36	61,11%
2016	7.5	6	Pos	61,36	73,34%

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh

3.17. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industry yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tabel 1.36
Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan

Tahun	Kasus di WMK Yg Tanggap 15 Menit	Kasus Kebakaran Dalam WMK	Persentase(%)
2012	84	84	100,00
2013	80	86	93,02
2014	70	89	78,65
2015	48	59	81,35
2016	58	67	86,56

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh

Tabel 1.37
Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Kebakaran	2012	2013	2014	2015	2016	Ket
1	Bangunan Perkantoran Pemerintah/Swasta	13	16	14	24	26	
2	Perumahan/pemukiman penduduk.	16	48	24	26	22	
3	Hutan/ ilalang/ semak bulukar	55	24	51	9	19	
	JUMLAH	84	86	89	59	67	

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh

3.18. Persentase Penegakan Perda

Penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk menjamin dan memastikan perda/qanun dan peraturan walikota tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda/qanun dan peraturan walikota, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. Penegakkan Perda/ Qanun Daerah dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.38

Tabel Persentase Penegakan Perda Tahun 2012-2016 Kabupaten Kota

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penyelesaian penegakan perda	375	964	757	1351	625
2.	Jumlah pelanggaran perda	464	1601	1435	1788	939
3.	Persentase penegakan perda	80,82%	60,21%	52,75%	75,56%	66,56%

Persentase penegakan perda yang terbesar terjadi Tahun 2012 sebesar 80,82% dan persentase terkecil terjadi tahun 2014 sebesar 52,75% dimana dari 1435 jumlah pelanggaran perda yang dapat diselesaikan sebanyak 757 penegakan perda. Pada Dari tabel diatas selama Tahun 2012-2016, Tahun 2016 terjadi penurunan kasus pelanggaran secara drastis dikarenakan penambahan anggota Satpol PP dan WH pada tahun 2015, akan tetapi tingkat penyelesaian Kasus masih sebesar 66,56 %.

3.19. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dan Pemerintahan Desa yang Baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik diperoleh dari perbandingan antara jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dengan jumlah seluruh pemerintahan desa dikali 100 %. Selama tahun 2012 s/d 2016 data cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.39

Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik

No	Kecamatan	Jumlah gampong	2012		2013		2014		2015		2016	
			jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5=4/3*100)$	(6)	$(7=6/3 *100)$	(8)	$(9=8/3*100)$	(10)	$(11=10/3 *100)$	(12)	$(13=12/3*100)$
1	Baiturrahman	10	3	30.00	3	30.00	6	60.00	10	100.00	10	100.00
2	Kuta Alam	11	4	36.36	4	36.36	6	54.55	10	90.91	10	90.91
3	Meuraxa	16	0	0.00	1	6.25	6	37.50	15	93.75	16	100.00
4	Syiah Kuala	10	2	20.00	3	30.00	5	50.00	8	80.00	9	90.00
5	Lueng Bata	9	1	11.11	2	22.22	7	77.78	9	100.00	9	100.00
6	Kutaraja	6	0	0.00	6	100.00	6	100.00	6	100.00	6	100.00
7	Banda Raya	10	2	20.00	6	60.00	8	80.00	9	90.00	10	100.00
8	Jaya Baru	9	1	11.11	2	22.22	5	55.56	7	77.78	8	88.89
9	Ulee Kareng	9	2	22.22	3	33.33	5	55.56	8	88.89	9	100.00
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	90	15	16.67	30	33.33	54	60.00	82	91.11	87	96.67

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik dari tahun 2012 sampai 2016. Pada tahun 2016 cakupannya mencapai 96,67%.

3.20. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik

Di Kota Banda Aceh terdapat 17 kemukiman. Sarana dan prasarana mukim dalam kota Banda Aceh masih sangat kurang, bahkan ada yang belum memiliki kantor mukim. Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik diperoleh dari perbandingan antara jumlah kantor mukim yang baik dengan jumlah seluruh mukim dikali 100 %. Selama tahun 2012 s/d 2016 data cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.40

Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik

No	Kecamatan	Jumlah mukim	2012		2013		2014		2015		2016	
			jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7=6/3 *100)	(8)	(9=8/3*100)	(10)	(11=10/3 *100)	(12)	(13=12/3*100)
1	Baiturrahman	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Kuta Alam	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
3	Meuraxa	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
4	Syiah Kuala	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Lueng Bata	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
6	Kutaraja	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	Banda Raya	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	Jaya Baru	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
9	Ulee Kareng	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	11.76	4	23.53

4. SOSIAL EKONOMI DAN PERLINDUNGAN ANAK

4.1 Sosial

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, maka penyelenggaraan pembangunan Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Pemisahan Dinas Sosial dengan Dinas Tenaga Kerja mengacu pada Qanun No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Stuktur Perangkat Daerah.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial meliputi kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) dan Pembinaan Pengembangan Kesejahteraan Sosial yang meliputi : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Jaminan Sosial Keluarga, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kepahlawanan Restorasi Sosial dan Penataan Lingkungan.

Kondisi Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Kota Banda Aceh Hasil Pendataan Tahun 2011 sampai dengantahun 2016.

Tabel 1.41

Daftar Penyandang Masalah Sosial di Kota Banda Aceh

No	JenisPermasalahanSosial	JumlahPenyandang	Keterangan
1.	Fakir Miskin	26.807	
2.	Anak Terlantar	29	
3.	Lanjut Usia Terlantar	96	
4.	Lanjut Usia	2390	
5.	Penyandang Cacat	468	
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	57	
7.	Penyakit Kronis	-	
8.	Gelandangan dan Pengemis	49	
9.	Wanita rawan Sosial Ekonomi Bekas	932	
10.	Narapidana	30	
11.	Keluarga Retan	1502	
12.	Keluarga yang tinggal dirumah tidak layak Huni.	166 137	
13.	Wanita Korban tindak Kekerasan	-	
14.	Anak Korban Tindak Kekerasan	38	
15.	AnakCacat	155	

4.2 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Kategorisasi terhadap PMKS mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang didalamnya terdapat 26 jenis PMKS. Sedangkan sifat pelayanan sosial yang diberikan selain rehabilitasi, juga menyampaikan bantuan sosial baik dalam bentuk uang maupun barang.

Secara nasional terdapat dukungan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial dalam bentuk Bantuan Tunai Bersyarat atau Conditional Cash Transfer (CCT) melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan pendampingan program ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Dalam jangka pendek bantuan sosial ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Tabel 1.42

Jangkauan PKH Dan Jumlah Bantuan Tahun 2013-2016

No	Tahun	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kpm	Jumlah Bantuan	Keterangan
1	2013	5	49	1.149	760.325.000	Lokasi Lama
2	2014	8	61	1.463	2.104.455.500	Lokasi Lama
3	2015	9	67	1.568	3.128.760.000	Pengembangan/Saturasi Melalui Apbnp
4	2016	9	82	2.527	3.752.440.689	Perluasan Tahun 2016

4.3 Jumlah PMKS yang Mendapat Pembinaan Dalam dan Luar Panti

Salah satu prasarana yang tersedia untuk penanganan dan rehabilitasi PMKS di Kota Banda Aceh adalah Rumah Singgah, sampai dengan tahun ini penanganan PMKS dalam panti telah melayani sejumlah 100 orang, sedangkan penanganan di luar panti yang berbentuk bantuan, pendampingan dan pemulangan sejumlah 117 orang.

4.4 Persentase Bantuan Melalui Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan gairah dan kemampuan mereka dalam membangun usaha bersama yang didasari tujuan dan tanggung jawab bersama, melalui program KUBE ini maka diharapkan terciptanya kemandirian masyarakat miskin dalam berusaha. Terkait program KUBE ini, maka jenis bantuan yang telah diberikan sebagai berikut :

Tabel 1.43

Tabel Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Program	Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Sumber Dana	Jumlah Pagu (Rp.)
Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin		APBK KOTA BANDA ACEH	712.000.000,-
	Bantuan untuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	30 KUBE	APBA DINAS SOSIAL ACEH	600.000.000,-
	Bantuan untuk KUBE Jasa(anggotanya merupakan khusus penerima PKH	8 KUBE JASA DAN E-WAROENG	APBN KEMENSOS RI DIRJEN Penanganan Fakir Miskin	240.000.000,-

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh

4.5 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Untuk penanganan korban bencana, Dinas Sosial lebih berperan pada proses penyediaan logistik dan permakanan selama proses tanggap darurat dan proses pengungsian. Bantuan terhadap korban bencana dilakukan melalui kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa dengan penerima manfaat sebanyak 31 KK yang pendanaannya dicover melalui APBK sebesar RP. 92.210.000 (2017). Sebagian besar penerima adalah korban bencana kebakaran dan banjir, mengacu pada kondisi kota Banda Aceh yang rawan terhadap ancaman bencana kebakaran dan banjir. Hal ini juga tertuang dalam dokumen kebencanaan kota Banda Aceh.

4.6 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Data tahun terakhir terdapat sejumlah 623 orang Penyandang Disabilitas dengan berbagai jenis kecacatan, umumnya adalah netra dan kecacatan fisik. Dari jumlah tersebut, 284 jiwa atau 46% penyandang disabilitas telah mendapatkan bantuan secara reguler, dengan rincian 178 jiwa mendapatkan bantuan melalui APBK, 68 jiwa dari APBA dan 38 jiwa dari APBN.

4.7 Fokus layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

4.8 Bidang Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Dengan bekerja, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sesuai kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki, selain itu bekerja juga melibatkan aspek sosial seperti aktualisasi diri, melakukan kontak sosial, serta pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu yang bersangkutan.

4.9 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Perselisihan hubungan industrial merupakan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha, dimana pekerja tidak mendapat hak-hak semestinya dari pengusaha. Jenis-jenis perselisihan hak ini antara lain terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja melalui peran serta Mediator dan Konsiliator. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh memiliki tenaga Mediator sebanyak 1 (satu) orang dan tenaga Konsiliator sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan konsiliator Provinsi Aceh diperbantukan di Kota Banda Aceh.

Tabel 1.44

Tabel Jumlah Penyelesaian Perselisihan Tahun 2012-2016

No	Jenis Kasus/Perkara Yang Masuk	Tahun																				Keterangan			
		2012				2013				2014				2015				2016				Jumlah			
		J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P
1	Perselisihan Hubungan Kerja	22	12	7	3	34	13	15	6	38	12	23	3	32	19	1	12	61	24	33	4	187	80	79	28

Keterangan :
M : Mediator
K : Konsiliator
P : Pengadilan PHI

Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial periode 2012 – 2016 sebanyak 187 kasus dengan rincian diselesaikan oleh Mediator sebanyak 80 kasus, diselesaikan oleh Konsiliator sebanyak 79 kasus dan diteruskan ke Pengadilan sebagai Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja sebanyak 28 Kasus.

4.10 Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja yang ditempatkan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.45

Tabel Pencari Kerja yang Ditempatkan

No	Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tenaga Kerja Terdaftar	503	124	213	366	85	376
2	Tenaga Kerja Ditempatkan	659	2004	1238	389	715	1155
	Persentase	76.33%	6.19%	17.21%	94%	11.89%	32.55%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penempatan tenaga kerja sangat berfluktuasi, hal ini tergantung pada factor tenaga kerja yang terdaftar dan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Tenaga kerja terdaftar akan banyak bila ada penerimaan PNS yang mempersyaratkan Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu AK 1). Sedangkan lowongan kerja yang tersedia tergantung pada pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja dan berhasil disalurkan oleh petugas antar kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

4.11 Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Selama kurun waktu 2012 – 2016, perselisihan antara Buruh dan Pengusaha dengan pemerintah di sebut dengan perselisihan kepentingan. Jumlah perselisihan kepentingan ini hanya terjadi pada tahun pada 2016 yang diselesaikan oleh Konsiliator. Perselisihan kepentingan ini meliputi ruang menyusui, dan safety keselamatan kerja. Perselisihan kepentingan ini timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian mengenai pembuatan, perubahan persyaratan kerja yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana setiap regulasi pemerintah harus diturunkan lebih detil dalam setiap perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dimana ketiga hal tersebut harus mendapat persetujuan Dinas Tenaga Kerja.

4.12 Rasio Lulusan S1/S2/S3

Berdasarkan profil perkembangan kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2015, Rasio lulusan S1, S2, dan S3 di Kota Banda Aceh adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1.46

Tabel tingkat Pendidikan di Kota Banda Aceh

Tingkat Pendidikan	Tahun 2018	Rasio
S1	29,818	87.74%
S2	3.848	11.29%
S3	416	1.22%
Jumlah	34,082	100%

Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2015

Dari tabel di atas, penduduk dengan tingkat pendidikan lulusan S1, S2, dan S3 di Banda Aceh Tahun adalah 34.082 orang. Mayoritas di antara mereka adalah lulusan S1 sebanyak 87.74%, sedangkan S2 11.29%, dan S3 hanya 1.22%.

4.13 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Banda Aceh secara resmi baru dimulai sejak dibentuknya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Di bidang pemberdayaan perempuan, upaya-upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan adalah melalui kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian perempuan dalam perempuan, antara lain :

- 1) tersedianya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrena;
- 2) pengajuan Draft Qanun Kota Ramah Gender;
- 3) memfasilitasi terbentuknya organisasi perempuan di tingkat masyarakat, yaitu Women Development Center (WDC) dan Balee Inong;
- 4) memfasilitasi terbentuknya Pokja PUG dan Tim Vocal Point;

Sementara itu, dibidang Keluarga Berencana (KB) lebih kepada bentuk pelayanan melalui pemberdayaan kader-kader KB dan penyelenggaraan pelayanan kepada keluarga dan program kontrasepsi , diantaranya :

- 1) pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KB dan Keluarga Sejahtera;
- 2) penyediaan alat-alat kontrasepsi

4.14 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)

Tabel 1.47

Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pegawai Negeri Sipil	6.077	5.922	5.798	4.418	4307
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Laki-laki	2.048	1.986	1.939	559	1523
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan	4.029	3.936	3.589	3.859	2882
Persentase	66,29	66,46	61,90	87,34	66,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sudah sangat baik, di Kota Banda Aceh malah lebih dominan pegawai perempuan daripada pegawai laki-laki. Belum ada ukuran jumlah ideal yang ditetapkan, karena ini masih mengacu pada kebutuhan di bidang-bidang dan sector pemerintahan. Hal ini juga dipengaruhi dengan pembentukan SOTK baru di Pemerintah Kota Banda Aceh pada akhir tahun 2016, sehingga harus dikaji kembali berapa jumlah ideal rasio kebutuhan pegawai laki-laki dan perempuan di Kota Banda Aceh. Sejalan ini upaya diarahkan kepada memberikan kesempatan yang sama untuk pengisian jabatan dan peningkatan kualitas diri.

4.15 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tabel 1.48

Tabel Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Perempuan	0	0	0,74	0,67	0,75
Anak	0	0	0,28	0,32	0,32

Sumber : P2TP2A Madani Kota Banda Aceh,

*ctt : P2TP2A baru terbentuk resmi sejak tahun 2014, data 2012 dan 2013 tidak ada

Penanganan yang terkoordinasi dan terinventarisir atas berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baru dilaksanakan pada tahun 2014, seiring dengan dibentuknya lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam perkembangannya, lembaga ini juga banyak terbantu dengan membangun system jejaring yang

baik dengan lembaga Balee Inong yang hingga akhir tahun 2016 telah terbentuk sebanyak 19 (Sembilan belas) balee inong.

Layanan yang diberikan meliputi layanan pengaduan, konsultasi, pendampingan hukum dan perlindungan dengan menyediakan Rumah Aman bagi korban kekerasan (baik itu perempuan dan atau anak) selama proses mediasi atas kasus tersebut hingga dapat diselesaikan dengan baik. Ada beberapa kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun banyak pula kasus yang harus di lanjutkan pendampingannya ke ranah hukum.

4.16 Kota Layak Anak

Pencapaian indikator Kota Layak Anak (KLA) masih terus digiatkan, karena membutuhkan upaya yang panjang, berkesinambungan dan kerjasama berbagai pihak. Sejauh ini upaya yang dilakukan baru sebatas sosialisasi dan advokasi kepada stakeholders untuk mendapatkan dukungan dan pemahaman yang sama, masih perlu inventarisasi yang menyeluruh terhadap program kegiatan di SKPD yang sudah mendukung tercapainya 31 indikator KLA.

Tabel 1.49

Tabel indikator KLA yang dicapai tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Indikator KLA yang dicapai	0	0	0	26	27	31

**pencapaian indikator KLA baru dimulai sejak 2015, tahun2 sebelumnya baru sebatas sosialisasi*

4.17 Perluasan Jaringan Khususnya Untuk Panti dan Pusat Rehabilitasi

Tahun 2016 jaringan kerja P2TP2A semakin luas karena sesuai kebutuhan korban /survivor yang memerlukan berbagai layanan. Kasus semakin beragam dan persoalan yang kompleks menuntut adanya pengembangan mitra. Saat ini P2TP2A mengembangkan kerjasama dengan Tabina, BNN Aceh, Panti Nirmala, Panti SOS, Panti Kinder Hut, dan lain-lain.

Tabel 1.50

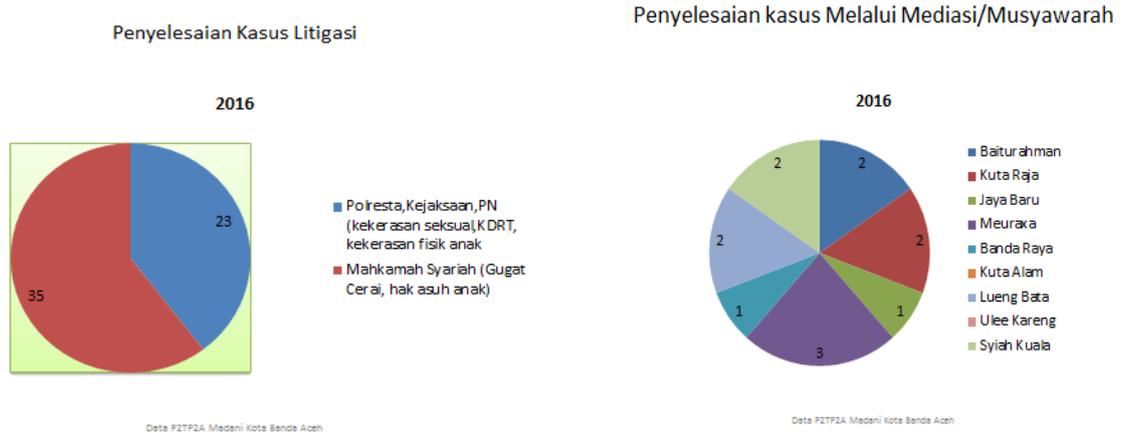
Tabel Mitra P2TP2A

No	Nama Yayasan	Jumlah anak dampingan P2TP2A
1	Yayasan Tabina	3 orang
2	Panti SOS	1 orang
3	Panti Kinder Hut	2 orang
4	Pasantren Mahad Al Ikhlas	1 orang
5	PKBM Putri Gina	4 orang

4.18 Cakupan Penegakan Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

4.19 Penyelesaian Kasus Melalui Litigasi dan Non Litigasi

Dalam menyelesaikan kasus Perdata, biasanya terdapat dua jalur yang dapat dilakukan bagi pihak yang bersengketa jalur litigasi dan non-litigasi. Yang dimaksud dengan Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di peradilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.



Gambar 1.32

Gambar Penyelesaian Kasus

Berdasarkan data diatas jumlah kasus yang diselesaikan secara litigasi baik di pengadilan negeri maupun mahkamah syariah sebanyak 58 atau 0.33% sedangkan non litigasi ada 13 atau 0.07% dari keseluruhan jumlah kasus. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kasus diselesaikan melalui pengadilan. Upaya pengadilan biasanya ditempuh untuk jenis kasus gugat cerai, KDRT berat (fisik), kekerasan seksual serta eksploitasi orang tua atau dewasa terhadap anak. Selain itu penyelesaian non litigasi juga mendorong perangkat gampong, tuha peat, Baleinong, PKK untuk berpartisipasi aktif sehingga mekanisme perlindungan berbasis komunitas dapat berjalan efektif. Untuk itu P2TP2A Madani melakukan audiensi dan asistensi ke 19 Gampong melalui Baleinong di sembilan kecamatan Kota Banda Aceh.

5 KETERERSEDIAAN PANGAN , ENERGI DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

5.1 Bidang Pangan

5.2 Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan Pangan Pokok di Kota Banda Aceh sangat terbatas, disebabkan karena jumlah lahan sangat sempit (71 Ha), ditambah dengan terjadinya konversi lahan menjadi peruntukan lain, disamping budidaya pertanian di kota hanya mengandalkan curah hujan, karena tidak tersedianya irigasi, dalam hal ini di kelompok masyarakat kita menyediakan pompa air untuk lahan pertanian tetapi belum maksimal. Produksi yang dihasilkan dari lahan yang tersedia sekarang diperkirakan hanya mampu hanya mampu untuk mencukupi konsumsi tiga hari makan. Untuk Mengatasi kebutuhan pangan pokok tersebut kita mengandalkan pasokan dari luar Kota Banda Aceh.

Untuk maksud tersebut kita menggalakan pola konsumsi melalui pengganekaragaman pangan (tidak mengandalkan beras). Upaya tersebut selama ini telah ditempuh melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui Lomba Cipta Menu B2SA dan Lomba Masak serba Ikan. Tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap keanekaragaman pangan. Dan untuk Mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan pangan (beras) saja, Disamping tujuan sosialisasi tersebut adalah dengan pemanfaatan pangan lokal dengan komposisi gizi, kalori yang seimbang.

Salah satu cara mengatasi keterbatasan lahan tersebut, upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan memanfaatkan lahan perkarangan seperti menanam tanaman hortikultura dan budidaya ikan air tawar di kolam terpal di halaman rumah penduduk.

Dalam mendukung program wisata halal Kota Banda Aceh perlu digalakkan tanaman organik (bebas Pestisida) namun untuk proram ini masyarakat belum membudaya kegiatan ini, padahal aktifitas tersebut dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga.selama ini kegiatan DP2KP belum mendapat alokasi anggaran dari APBK yang memadai.

Terkait program keamanan pangan perlu diupayakan dilakukan pengawasan yang lebih intens terhadap kontaminasi atau pencemaran pangan segar. Agar Makanan yang dikonsumsi masyarakat layak dan sehat. Untuk mendukung program pangan khususnya terkait ketahanan dan keamanan pangan perlu ada keterpaduan lintas sektor (Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Banda Aceh). Dalam hal ini perlu kerja sama dan dukungan alokasi Anggaran yang memadai.

Tabel 1.51

Tabel Ketersediaan Pangan Utama

Urusan	Rumus	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	159.363	162.550	165.801	169.118	172.822

5.3. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

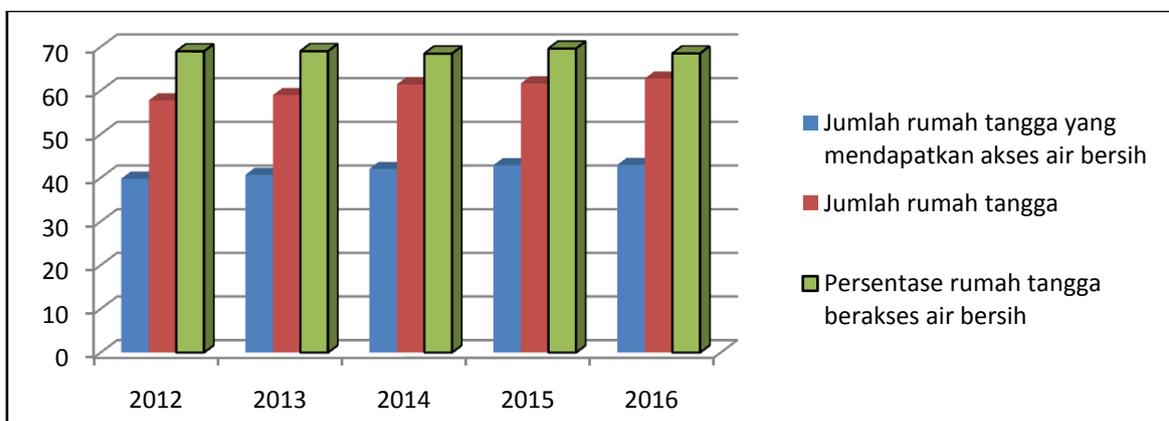
Tabel 1.52

Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih dan Jumlah Rumah Tangga Kota Banda Aceh Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses air Bersih	40.695	42.062	42.912	42.998	45.450
2	Jumlah rumah tangga	58.957	61.443	61.641	62.774	-
3	Persentase rumah tangga berakses air bersih (%)	69.02%	68.46%	69.62%	68.50%	-

Sumber: PT PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Jumlah rumah tangga Kota Banda Aceh pada tahun 2016 yang mendapat akses air bersih adalah sebanyak 42.998 rumah tangga jiwa atau sebesar 68.50%. Seiring dengan pengembangan jaringan dan peningkatan sistem pelanggan PDAM setiap tahunnya, maka diharapkan capaian target jumlah penduduk yang mendapatkan air bersih sesuai dengan tahun penetapan RPJM tahun 2012-2016 sebesar 80%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.161 dan gambar 2.56



Gambar 1.33

Grafik Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2012 – 2016

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa rumah tangga pengguna air bersih di Banda Aceh setiap tahun mengalami peningkatan. Ini berarti bahwa kesadaran masyarakat untuk menggunakan air bersih meningkat.

5.4. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Energi listrik di Kota Banda Aceh disediakan oleh PLN melalui pembangkit listrik yang terkoneksi ke system transmisi dan pembangkit listrik yang tidak terkoneksi ke system transmisi. Pembangkit listrik yang terkoneksi merupakan sambungan koneksi jaringan listrik dari Sumatera Utara. Sedangkan pembangkit listrik yang tidak terkoneksi terdapat dikecamatan Lueng Bata di kota Banda Aceh yang menggunakan energi diesel (PLTD).

5.5 Bidang Lingkungan hidup

5.5.1 Timbulan Sampah yang Ditangani

Pelayanan persampahan di Banda Aceh hingga tahun 2016 terdiri dari 2 sistem yaitu sistem "door to Door" dan sistem kontainer. Pelayanan Sistem "door to door" mencakup wilayah komersil dan perumahan; sedangkan pelayanan sistem kontainer mencakup wilayah gampong yang diletakkan pada jalan umum.

Berikut realisasi persentase cakupan pelayanan sampah periode 2012-2016:

Tabel 1.53

Tabel Realisasi Persentase Cakupan Pelayanan Sampah Periode 2012-2016

No	Persentase Penanganan Sampah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017 hingga april	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	% Target	78	84	87	89	91	93	93
2	% Realisasi	78	84	85	86	88	88	88

Dari jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebanyak 188 Ton/hari ditahun 2016 hanya berkisar sebanyak 165 % Ton/hari atau 88% yang terangkut ke TPA Gampong Jawa, sisanya 21 ton/hari atau 11% sampah daur ulang, 4 Ton/hari atau 2,1% pengomposan sampah daun/ranting pohon di ITF dan 7 Ton/hari atau 3,7 % sampah yang tidak terangkut pada

wilayah gampong. Ada 68 gampong Pelayanan penanganan sampah hingga ke lorong-lorong dan ada 22 gampong yang masing dilayani di jalan utama saja.



Gambar 1.34

Kedaaan sampah di Kota Banda Aceh

Sejak tahun 2014, sulitnya meningkatkan cakupan penanganan sampah dari target yang ditetapkan karena keterbatasan armada dalam memenuhi sistem door to door sedangkan sistem kontainer banyak penolakan warga terhadap lokasi yang ditetapkan kontainer di dalam gampong. Kedua hal tersebut penyebab sulitnya mencakup pelayanan hingga 93%. Namun jika dilita dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang maka Banda Aceh telah berhasil melampaui ketetapan SPM cakupan penanganan sampah yaitu 70%. Tingkat Keberhasilan Banda Aceh terhadap pencapaian SPM dalam penanganan sampah sebesar 126%.

5.5.2 Pencemaran Status Mutu Air

Pada tahun 2016, ada 176 sumber pencemaran air yang telah di pantau pengelolaannya. Sebagian besar terdiri dari hotel, rumah sakit, restoran, SPBU, bengkel/shoroom dan lain-lain.

Dari berbagai sumber pencemaran air yang telah dipantau, maka pada tahun 2016 pula dilakukan pengujian tingkat pencemaran air apada dua sungai yaitu sungai krueng aceh sebanyak 6 titik pantau dan sungai krung daroy sebanyak 6 titik pantau (Data penceamaran air 2016).

Tabel 1.54

Data Sumber Pencemaran Air Tahun 2016

No	Jenis Sumber	Jumlah	Satuan
1	Hotel	41	Buah
2	Rumah sakit/Klinik	47	Buah
3	Restauran/Rumah makan	15	Buah
4	SPBU	12	Buah
5	Showroom/Bengkel	26	Buah
6	Laundry	2	Buah
7	Doorsmer	3	Buah
8	Apotek/Obat-obatan	9	Buah
9	Industri	8	Buah
10	DLL	13	Buah
Jumlah		176	Buah

Kedua sungai tersebut sudah disimpulkan cemar berat, sehingga perlu ke depan dilakukan upaya pencegahan pencemaran air dititik-titik sumber pencemaran.

1. Sungai Krueng Aceh

Tabel 1.55

Tingkat Pencemaran Air Sungai Krueng Aceh Tahun 2016

No	Titik Pantau Pencemaran Air	Skor	Tingkat Pencemaran
1	Mutu Air Sungai Krueng Aceh Segmen Lambaro	-17	Cemar Sedang
2	Mutu Air Sungai Krueng Aceh Segmen Pango	-17	Cemar Sedang
3	Mutu Air Sungai Krueng Aceh Segmen Pante pirak	-48	Cemar Berat
4	Mutu Air Sungai Krueng Aceh Segmen Jembatan Simpang Surabaya	-43	Cemar Berat
5	Mutu Air Sungai Krueng Aceh Segmen Jembatan Peunayong	-41	Cemar Berat
6	Mutu Air Sungai Krueng Aceh Segmen Gampong Jawa	-42	Cemar Berat
Total Rata2 Mutu Air di Sungai Krueng Aceh		-31	CEMAR BERAT

2. Sungai Krueng Daroy

Tabel 1.56

Tingkat Pencemaran Air Sungai Krueng Daroy Tahun 2016

No	Titik Pantau Pencemaran Air	Skor	Tingkat Pencemaran
1	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen Geuce Komplek	-15	Cemar Sedang
2	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen Lamlagang	-23	Cemar Berat
3	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen Putroe Phang	-18	Cemar Sedang
4	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen Pendopo	-36	Cemar Berat
5	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen Peuniti	-25	Cemar Berat
6	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen POM	-27	Cemar Berat
Total Rata2 Mutu Air di Sungai Krueng Daroy		-36	Cemar Berat

5.5.3 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Analisa Mengenai Dampak Lingkungan berupa rekomendasi UKL-UPL dilihat dari target selama periode 2012-2017 pelaku usaha yang harus melaksanakan pembuatan dokumen UKL-UPL. Pemerintah Kota Banda Aceh Periode 2012-2017, dari 150 Pelaku Usaha yang ditarget, hingga Bulan Mei 2017 mencapai 128,6% yaitu 193 unit usaha yang melaksanakan pembuatan dokumen UKL-UPL. Peningkatan realisasi dari target yang dihasilkan disebabkan karena sudah mulai terintegrasinya dengan perizinan pelayanan terpadu satu pintu sehingga banyak pengusaha yang harus membuat dokumen UKL-UPL untuk mendapatkan rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh DLHK3.

Tabel 1.57

Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Kinerja	Perhitungan Indikator	Capaian dan Target	Kondisi Awal RPJMD	Capaian dan Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (dokumen lingkungan/UKL-lingkungan/UKL-	Jumlah perusahaan wajib Amdal (dokumen lingkungan) yang diawasi dibagi jumlah	Target 80% dari 150 Usaha wajib UKL-UPL	3% (4)	15% (22)	16% (24)	33% (50)	7% (10)	7% (10)	80% (120)

UPL)	perusahaan wajib Amdal (dokumen lingkungan) di kali 100	Capaian	3% (18)	15% (13)	16% (54)	33% (51)	7% (37)	7% (20) Hingga Mei 2017	128,6% (193)
------	---	---------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------------------------------	-------------------------------

5.5.4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan penduduk

Tabel 1.58

Tabel Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk

No	Indikator	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah daya tampung TPS (m ³) dibagi jumlah produksi sampah tiap penduduk (0,75 kg per orang/hari) dikali 100	46,88	46,89	46,90	46,91	46,92	46,93	46,93
			-	-	26,34	28,83	29,23	-	29,23

Note :Massa jenis sampah = 250 kg/m³

Daya Tampung TPS persatuan penduduk tergolong hanya mencapai 50% capaiannya dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena selain alokasi dana yang kecil untuk pembelian kontainer, juga sulitnya mendapatkan lokasi kontainer di dalam wilayah gampong. Target setiap tahunnya 227 kontainer berukuran 660 Liter yang harus disediakan namun pemerintah Kota Banda Aceh (DLHK3) hanya mampu mampu mengalokasikan 30-50 kontainer untuk ditempatkan jalan utama saja, sedangkan di dalam wilayah gampong terjadi penolakan karena kekhawatiran masyarakat dapat menimbulkan bau dilingkungan mereka tinggal.

Untuk kedepan, periode 2017-2022 pemerintah Kota Banda aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh menyusun strategi melalui kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya dengan metode/sistem *Waste collecting Point (WCP)*. Sistem WCP ini bersifat pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan cara membentuk kelompok-kelompok warga untuk memilah berbagai jenis sampah dan mengumpulkannya

pada satu titik. Sampah yang dapat didaur ulang akan mereka jual atau olah di gampong tersebut sedangkan sampah yang residu (tidak dapat di daur ulang) akan di buang ke TPA Blangbintang oleh Pemko Banda Aceh. Dengan sistem WCP mendapatkan pelayanan maksimal, lingkungan bersih dan nilai ekonomis dari hasil daur ulang sampah, sedangkan pemerintah juga berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah, target pengurangan sampah secara nasional terpenuhi, meningkatkan retribusi sampah, meningkatkan daya tampung TPS persatuan penduduk dan dapat mengurangi biaya beban pengangkutan sampah sebanyak 54% ke TPA Blangbintang.

5.5.5. IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) Gampong Jawa

DLHK3 saat ini mengelola 2 (dua) unit IPLT, instalasi yang pertama menggunakan teknologi kolam oksidasi (konvensional), hanya mengandalkan waktu tinggal dengan kapasitas 50 m³/hari. Saat bencana tsunami 2004, sempat hancur, namun sudah direhab kembali oleh JICA tahun 2005. Pada tahun pertama operasi, volume tinja yang dibuang mencapai 114 m³/hari sehingga melebihi kapasitas yang tersedia. Kondisi ini disebabkan pasca tsunami banyak sekali terdapat barak-barak pengungsian yang menampung ribuan pengungsi sehingga limbah tinja yang dihasilkan sangat banyak dan dibuang ke IPLT Gampong Jawa sehingga satu-satu IPLT yang ada di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar pada waktu itu dan hingga saat ini. Kondisi ini sempat terjadi selama beberapa tahun dan mulai berkurang saat para pengungsi meninggalkan barak mereka.

Tahun 2007 dibangun instalasi kedua oleh UNICEF yang berlokasi berdampingan dengan IPLT JICA dengan kapasitas 85 m³/hari. IPLT ini menerapkan kombinasi pengolahan secara anaerobik dan aerobik. Beberapa teknologi anaerobik yang digunakan antara lain: digester, sludge stabilization, baffle reactor dan anaerobic filter. Sementara teknologi aerobik yang digunakan adalah planted gravel filter, kolam dan bak pengering lumpur tinja. Saat ini IPLT melayani truk tinja rata-rata 8-10 trip atau setara dengan 24-30 m³/ hari terdiri dari truk yang dikelola DLHK3 dan truk swasta.

Pengelolaan IPLT Kota Banda Aceh dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh No.2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh bahwa pengelolaan IPLT berada di bawah Seksi Pengelolaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh.

Jumlah personil baik kepala seksi, staf maupun pekerja yang terlibat dalam pengelolaan IPLT sebanyak 9 (sembilan) orang, terdiri:

- a. Kepala Seksi : 1 orang
- b. Staf (PNS) : 2 orang
- c. Pekerja (Non PNS)
 - Supir truk tinja : 1 orang
 - Kernek truk tinja : 1 orang
 - Operator : 4 orang

Tabel 1.59

Tabel Volume Tinja dibuang ke IPLT

Tahun	Volume Tinja Dibuang ke IPLT					
	Truk DK3		Truk Swasta		Total	
	Trip	Volume	Trip	Volume	Trip	Volume
2012	1,172	2,594	450	1,761	1,622	4,355
2013	1,332	5,063	1,018	3,972	2,35	8,935
2014	1,055	4,22	505	2,02	1,56	6,24
2015	1,079	4,316	410	1,64	1,489	5,956
2016	1,121	4,484	203	812	1,324	5,296

5.5.6. Pemanfaatan Gas Metana dari TPA Gampong Jawa

TPA Kota Banda Aceh menerima sampah yang masuk setiap harinya sebesar 160 - 170 ton diperkirakan mampu menghasilkan gas metan dengan kapasitas 4.000 m³/hari bila pengumpulannya dilakukan secara optimal. Di tahun 2015 pemerintah kota Banda Aceh melalui DLHK3 telah melakukan upaya pengumpulan dan pemanfaatan gas metan di TPA dengan memasang 12 pipa pengumpul gas vertikal tambahan dimana sebelumnya sudah terpasang 6 pipa pengumpul, sehingga saat ini gas metan sudah dapat dikumpulkan dari 18 pipa pengumpul vertikal yang ada. Untuk tahap pertama DLHK3 telah mengumpulkas gas metan TPA dari 4 pipa pengumpul vertikal dan telah berhasil disalurkan melalui 2 unit compressor yang dihidupkan secara bergantian ke 23 rumah penduduk yang ada di sekitar TPA yaitu masyarakat Gampong Jawa. DK3 menargetkan pada tahun 2017 gas metan yang dihasilkan TPA Kota Banda Aceh dapat disalurkan ke 100 rumah warga Gp. Jawa sebagai salah satu bentuk kompensasi Pemerintah Kota Banda Aceh bagi masyarakat yang tinggal di dekat lokasi TPA.

Hal yang membedakan program pemulihan gas metan TPA yang dilakukan oleh Kota Banda Aceh dengan daerah lainnya adalah pengumpulan gas metan TPA Kota Banda Aceh dilakukan pada lahan TPA yang masih aktif dengan tetap memperhatikan faktor-faktor keamanan dan kemudahan operasional alat berat pada lahan urug.

Masyarakat Gp. Jawa penerima gas methan gratis dari TPA Kota Banda Aceh sangat senang dan merasakan manfaat yang cukup besar dari gas methan yang mereka terima. Bahkan salah seorang masyarakat mengatakan bahwa sejak adanya gas methan dari TPA, penggunaan elpiji 3 kg di rumahnya dapat dihemat dari 3 tabung/bulan menjadi hanya 1 tabung /bulan. Pemakaian elpiji masih dilakukan untuk mengantisipasi keperluan memasak pada saat jadwal distribusi harian dihentikan. Selama ini jadwal penyaluran gas methan dari TPA mulai pukul 08.00 s/d 12.000 dan 15.00 s/d 17.30.

Pemerintah Kota saat ini sedang mendorong masyarakat penerima manfaat gas methan gratis ini untuk memanfaatkan gas methan tidak hanya untuk kebutuhan memasak sehari-hari, tetapi juga untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga melalui kegiatan usaha rumah tangga (home industry) berbasis bahan bakar gas seperti usaha membuat nasi bungkus, membuat keripik, kacang goreng, dsb untuk dititipkan di warung-warung.

5.5.7. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Tabel 1.60

Tabel Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

No	Jenis RTH Publik	Luas (Ha) 2013	Luas (Ha) 2014	Luas (Ha) 2015	Luas (Ha) 2016	Luas (Ha) 2017
1	RTH Taman dan Jalur Hijau	568.6	580.7	584.10.00	584.10.00	-
2	RTH Hutan kota	25.96	27.54.00	29.93	29.93	28.60
3	RTH Makam	26.56.00	27.58.00	27.57.00	27.57.00	-
4	RTH Lapangan dan Stadion	55.31.00	60.34.00	60.24.00	60.24.00	-
5	RTH Tepian Air	92.52.00	107.97	107.97	107.97	-
Jumlah luasan RTH Total		768.95	804.13.00	809.81	809.81	845.04
Luas Kota Banda Aceh		6136.00.00	6136.00.00	6136.00.00	6136.00.00	6136.00.00
Presentase luas RTH terhadap Luas Kota Banda Aceh		12.53	13.11	13.2	13.2	10,79

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Bila dilihat capaian setiap tahunnya, maka penambahan luas RTH relatif mengalami peningkatan hanya pada. Peningkatan tersebut disertai dengan penambahan beberapa lokasi RTH seperti RTH Lambung, RTH Krueng Neng, RTH Ceurih, RTH Taman Hijau Lamjame dan RTH Gampong Pie.

Selain pencapaian luas, dibawah Dinas Lingkungan Hidup juga memelihara dan menangani pemeliharaan RTH publik dengan pencapaian di tahun 2016 sebagai berikut

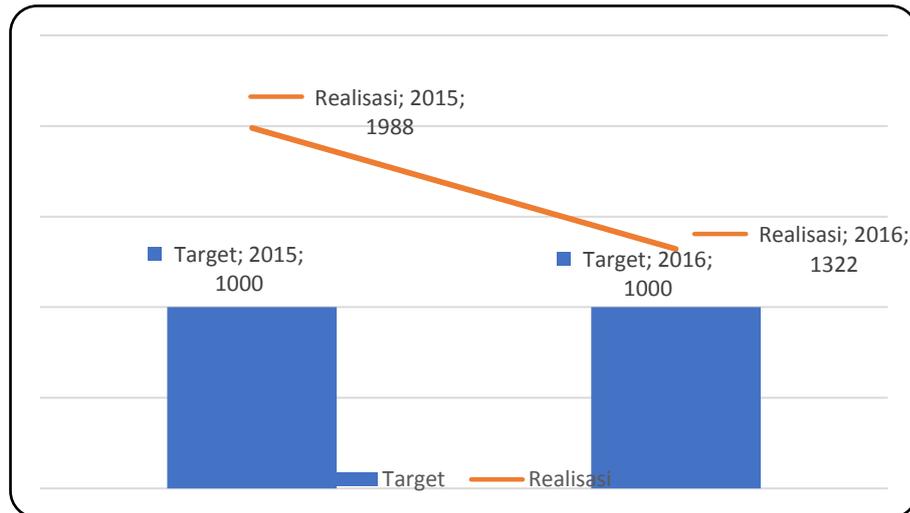
Tabel 1.61
Tabel Pemeliharaan dan Penanganan RTH

Sasaran	No	Indikator Kinerja			%
		Uraian	Target	Realisasi	
Bertambahnya areal Ruang terbuka hijau (RTH) yang hijau, bersih, indah dan nyaman di Kota Banda Aceh guna mendukung kepariwisataan	1	Jumlah pohon yang ditanam	1000 pohon/batang	1.322 pohon/batang	132,2
	2	Jumlah RTH yang terpelihara dengan baik	15 lokasi	22 lokasi	106,1

Penanaman Tanaman Hias dan Penghijauan tiap tahun dilakukan untuk meningkatkan keindahan dan menciptakan kota yang teduh. Tahun 2016, penanaman tanaman hias banyak ditanam di beberapa median jalan dan taman pulau jalan, sedangkan penanaman pohon banyak di lakukan di Hutan Kota BNI Tibang dan Gampong Beurawe (jenis pohon matoa) kerjasama dengan Geuchik Gampong Beurawe.

Pemeliharaan taman dan RTH lainnya menjadi prioritas dalam menentukan keberhasilan untuk menciptakan RTH yang bersih, indah dan nyaman. Pada tahun 2016, meningkatnya jumlah pemeliharaan taman sebanyak 15 lokasi yaitu : Taman Krueng Neng, RTH Lambung, Taman Gampong pie, Median Jl. Sultan Alaidin Mansursyah, Taman median Jalan Chik Ditiro, Taman Median Daud Beure'euh, Taman Median Jl. P. Nyak Makam dan taman median lainnya.

Penanaman pohon di tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan 1000 pohon, namun meningkat lebih dari dari target sebesar 322 pohon. Dari garfik di bawah ini menunjukkan perbandingan penanaman pohon 2015 dan 2016 mengalami penurunan aktivitas menanam disebabkan karena lahan tanam di RTH semakin berkurang. Tahun 2016, dapat memenuhi target karena ada inisiatif gampong untuk melakukan gerakan penanaman pohon sebanyak 1.000 batang.

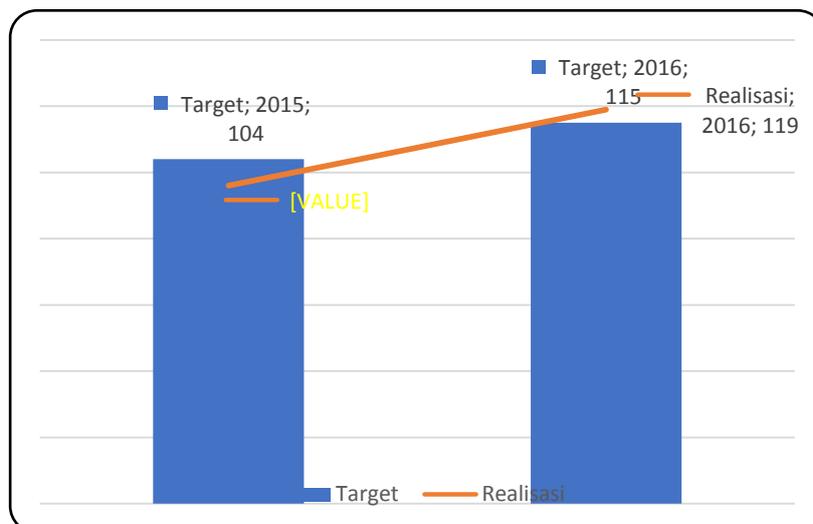


Gambar 1.35

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Penanaman Pohon Tahun 2015-2016

Lokasi Pemeliharaan Taman di Tahun 2016 meningkat 15 lokasi dari tahun sebelumnya (tahun 2015). Peningkatan itu disebabkan karena sebagian besar median jalan yang biasanya tidak dipelihara oleh Bidang Pertamanan dan Hutan, mulai 2016 telah dipelihara karena sudah dibangun taman median sebagai jalur hijau jalan yang telah ditanami tanaman hias.

Dari segi teknis, tingkat pemeliharaan setiap taman berbeda-beda kualitasnya karena jumlah pekerja masing-masing zona taman masih terbatas. Hal ini diprediksikan akan menjadi kendala yang besar karena di satu sisi Kota Banda Aceh ingin memperindah kota melalui memperbanyak pembangunan taman di setiap segmen jalur dan titik wisata namun di sisi lain tidak belum maksimalnya jumlah pekerja untuk melaksanakan pemeliharaan optimal.



Gambar 1.36

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Lokasi Taman yang Dipelihara Pada Tahun 2015-2016

5.5.8. Pencemaran Tingkat Kebisingan

Tabel 1.62

Tabel Pencemaran Tingkat Kebisingan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

1	2	3	4	Kondisi Kinerja Pada Awal			Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Rpjm
				Rpjm			2015	2016	2017	
				2012	2013	2014				
				5	6	7	8	9	10	11
7	Pencemaran Tingkat Kebisingan	jumlah usaha/kegiatan dan/atau lokasi/kawasan yang dianalisa tingkat kebisingan dibagi jumlah lokasi/kawasan yang diukur tingkat kebisingan dikali 100	Target	0%	17%	18%	21%	18%	18%	91%
			Capaian	0%	17%	18%	21%	18%	Sedang dalam progress pelaksanaan	91%

Pada Tahun 2015, Tingkat Kebisingan di uji dari sumber pencemaran udara pada sumber yang bergerak melalui kendaraan pada umumnya semua lokasi melampaui batas baku mutu sedangkan tingkat kebisingan pada sumber yang tidak bergerak melalui genset/pembangkit listrik semuanya kategori baik (di bawah baku mutu).

Tabel 1.63

Tabel Jenis dan Sumber Pencemaran Udara

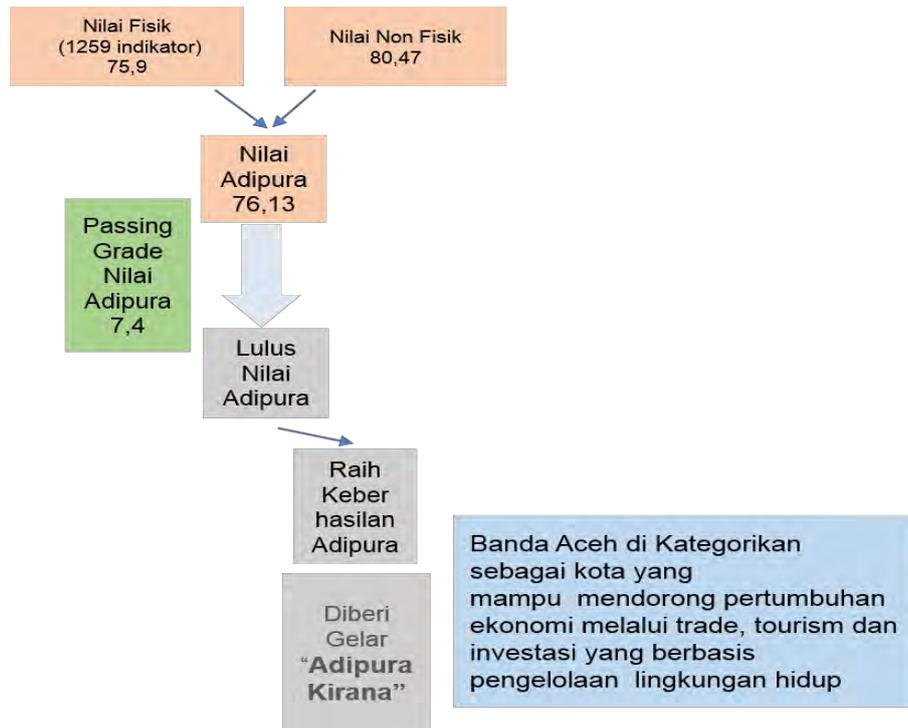
No	Jenis dan Sumber Pencemaran Udara	Tingkat Pencemaran Udara	
		Parameter (CO, SO2, NO2, Pb, TSP)	Parameter Tingkat Kebisingan
1	Pencemaran sumber bergerak melalui kendaraan		
	a. Kawasan Industri/Pusat Bisnis (5 Lokasi Uji)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Melampaui Baku Mutu (Tidak baik)

	b. Kawasan Perkantoran (5 Lokasi Uji)	Bawah Baku Mutu (Baik)	4 lokasi Melampui Baku Mutu (Tidak Baik) dan 1 Lokasi (Balaikota) di bawah baku mutu/ Baik
	c. Kawasan Permukiman (4 Lokasi Uji)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Melampui Baku Mutu (Tidak baik)
	d. Kawasan Transportasi (6 Lokasi Uji)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Melampui Baku Mutu (Tidak baik)
2	Pencemaran sumber tidak bergerak Melalui Genset /mesin pembangkit Listrik		
	a. Rumah Sakit (5 Lokasi)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Bawah Baku Mutu (Baik)
	b. Hotel (5 lokasi)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Bawah Baku Mutu (Baik)
	c. Pusat Perbelanjaan/Mall (2 lokasi)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Bawah Baku Mutu (Baik)
	d. SPBU (6 lokasi)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Bawah Baku Mutu (Baik)
	e. Restaurant (1 lokasi)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Bawah Baku Mutu (Baik)
	f. PLTD (1 lokasi)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Bawah Baku Mutu (Baik)

5.5.9. Meraih Adipura

Keberhasilan Adipura tidak terlepas dari kerjasam dari berbagai pihak/stakeholder yang menciptakan lingkungan bersih dan indah pada titik pantau Adipura yang telah ditentukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK). Pada Tahun 2016, ada 1259 indikator fisik penilaian yang mendapatkan nilai 75,9 (terlampir) dan kelengkapan non fisik 80,47 . Dari kedua penilaian tersebut sehingga didapatkan nilai adipura sebesar 76,13 dengan passing grade adipura yang telah ditetapkan sebesar 74. Selain lulus dari passing grade yang telah ditetapkan, penilaian TPA juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya meraih adipura. Nilai TPA Rata-rata 76,11 yang di raih oleh Kota Banda Aceh mencukupi nilai grade kelulusan TPA 76 yang telah ditetapkan oleh KLHK.

Nama Kota	Banda Aceh
Kabupaten / Kota	Kota Banda Aceh
Propinsi	ACEH
P1	77,34
PV1	74,46
Nilai Fisik Rata-rata	75,9
Non Fisik	80,47
Nilai Adipura 2015-2016	76,13
Nilai TPA Rata-rata	76,11



Gambar 1.37

Kedaaan Adipura di Kota Banda Aceh

Pada periode 2012-2017 ada 4 kali Pemerintah Kota Banda Aceh mendapatkan Adipura. Dari data menunjukkan keberhasilan dalam meraih adipura hampir setiap tahun di raih oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, hanya pada tahun 2015 tidak diraih karena di saat penilaian adipura lokasi TPA mendapatkan nilai rendah karena pembangunan akses/jalan dan pembangunan instalasi gas metana sehingga kondisi TPA sulit untuk dikondisikan.

Tabel 1.64

Total Penghargaan Adipura di Kota Banda Aceh

Kinerja	Perhitungan Indikator	Target/ca paian	Kondisi Awal Periode 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Kondisi Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meraih Adipura	Nilai Fisik dan Non Fisik Adipura	Target	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	7 kali Berhasil
		Capaian	Berhasil	Berhasil	Berhasil	-	Berhasil (Raih Adipura Kirana)	Berhasil	-	5 kali Berhasil

5.6 Persentase Penerangan Jalan Umum

Tabel 1.65

Persentase Penerangan Jalan Umum di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017

Kinerja	Perhitungan Indikator	Target/capaian	Kondisi Awal Periode 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kondisi Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Penerangan Jalan Umum	Panjang Jalan yang diterangi dibagi panjang jalan yang membutuhkan penerangan dikali 100	Target	60,43	61,74	63,05	64,35	65,66	65,66	65,66
		Capaian	60,43	67,38	68,91	72	78,55	78,55	78,55

Kegiatan penyediaan jasa penerangan jalan umum yaitu melakukan pemeliharaan dan pemasangan lampu sesuai kebutuhan penerangan, baik untuk jalan utama maupun jalan lingkungan Gampong sesuai permintaan masyarakat. Kebutuhan penerangan jalan dihitung berdasarkan panjang jalan utama dan jalan lingkungan Gampong yaitu 707.734 meter. Dengan asumsi bahwa kemampuan penerangan maksimal satu unit lampu sepanjang 100 meter. Rata-rata penerangan penambahan penerangan jalan sebesar 20.940 meter dengan lampu sejumlah 209 unit pertahun untuk mewujudkan penerangan jalan umum di Kota Banda Aceh yang optimal. Penambahan penerangan jalan tertinggi pada tahun 2016 dengan jumlah lampu 463

unit dengan berbagai jenis. Pemasangan Lampu jalan jenis LED dari Distamben Aceh dan dari APBK 2016 menjadi faktor utama peningkatan penerangan jalan pada tahun 2016, untuk tahun 2017 menggunakan data akhir bulan Mei tahun 2017.

5.7 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

5.8. Pertanian dan Ketersediaan Pangan

5.8.1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Berdasarkan data Statistik Banda Aceh dalam Angka luas Kota Banda Aceh adalah 61,3 Km² (61.300 Ha), sedangkan luas lahan pertanian (sawah) adalah 71 Ha (lahan produktif) yang tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Ulee Kareng, Syiah Kuala, Lueng Bata, Banda Raya dan Jaya Baru.

Data luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas padi di Kota Banda Aceh dalam lima tahun terakhir (Tahun 2012-2016) dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.66

Tabel Luas Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kota Banda Aceh

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Luas Tanam (Ha)	114	118	107	77,1	68,4
2	Luas Panen (Ha)	86	16	92	72,1	37,6
3	Produksi (Ton)	439	76	507	309	-
4	Produktivitas (Kw)	41,80	47,46	55,11	42,90	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Banda Aceh

Luas tanam padi di Kota Banda Aceh dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 terjadi fluktuasi hal ini terjadi karena tidak semua lahan melakukan penanaman 2 (dua) kali dalam setahun akibat tidak adanya aliran air irigasi. Lahan sawah di Kota Banda Aceh adalah tadah hujan.

Luas panen padi pada Tahun 2014 terjadi penurunan dibandingkan pada Tahun lainnya karena pada tahun tersebut terjadi kekeringan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap hasil produksi yang dihasilkan. Sedangkan angka Produktivitas di dapatkan dari pembagian produksi dengan luas panen padi.

Berdasarkan fakta di lapangan lahan pertanian (sawah) semakin berkurang. Hal ini diakibatkan pesatnya pembangunan sehingga menyebabkan konversi lahan pertanian ke peruntukan lainnya (Bangunan, Jalan dan lain-lain). Untuk mengatasi hal tersebut perlu terus dilakukan penyuluhan kepada masyarakat supaya mempertahankan lahan pertanian yang ada.

Disamping hal itu petani di Kota Banda Aceh adalah petani penggarap dimana kepemilikan lahan milik orang lain. Untuk ini apabila Pemerintah Kota tersedia anggaran untuk membebaskan lahan masyarakat tersebut guna diperuntukkan bagi masyarakat petani. Faktor lain yang menyebabkan kurang tertarik masyarakat (petani) menggunakan lahan yang ada yaitu tidak adanya irigasi guna mengairi sawah.

Untuk mengembangkan potensi pertanian yang ada di Kota Banda Aceh, salah satu upaya perlu terus dilakukan pembinaan/pelatihan bagi aparatur dan petani. Selain itu perlu juga mengoptimalkan lahan pekarangan masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman pangan (jagung, ubi dan lain-lain), Hortikultura (sayur, buah dan lain-lain) dan Biofarmaka (tanaman obat-obatan)

5.8.2. Cakupan Binaan Kelompok Tani

Tabel 1.67

Tabel Rumus Cakupan Bina Kelompok Pertanian

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS	2012	2013	2014	2015	2016	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Cakupan Bina Kelompok Pertanian/Peternakan	$\frac{\text{Jumlah Kelompok petani yang mendapatkan Bantuan pemerintah}}{\text{Jumlah kelompok tani}} \times 100\%$	1,1%	6,7%	11,1%	16,7%	33,3%	DKPP

Perkembangan kelompok binaan pertanian/peternak dari tahun 2012 sampai 2016 terjadi fluktuasi karena pembinaan terhadap kelompok pertanian/peternak dipengaruhi oleh permintaan masyarakat pada tingkat Musrenbang dan juga ketersediaan lahan pertanian/peternakan semakin berkurang serta ketersediaan dan terbatas. Permasalahannya dalam pembinaan kelompok pertanian/peternak yaitu kurangnya sarana dan prasarana.

5.8.3. Peternakan

Kawasan peternakan di Kota Banda Aceh lebih luas terutama di Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Lueng Bata dan Kecamatan Syiah Kuala. Pengembangan peternakan di Kota Banda Aceh sangat tergantung pada lahan yang tersedia, sedangkan lahan peternak di Kota Banda Aceh semakin menurun karena telah terjadi konversi lahan atau telah diperuntukkan untuk pembangunan lain.

Tabel 1.68

Tabel Data Potensi Ternak Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Jenis Ternak		
		Sapi/ Kerbau	Kambing/ Domba	Unggas
1.	2012	2.014	5.470	47.040
2.	2013	1.744	5.071	47.712
3.	2014	2.023	5.684	44.240
4.	2015	2.060	5.401	58.014
5.	2016	2.532	6.155	80.221
6.	2017	40	106	500

Dilihat dari tabel diatas bahwa populasi ternak semakin meningkat sedangkan kondisi lahan sangat terbatas. Umumnya pola peternakan di Kota Banda Aceh dikandangkan terutama terletak di kawasan Ulee Kareng, hal ini terbanu dengan adanya bantuan ternak dari pemerintah, angka kelahiran meningkat dan adanya program Upsus SIWAB dari pemerintah.

➤ Permasalahan

Kita ketahui bahwa Kota Banda Aceh bukan kawasan produsen ternak, lahan-lahan di Kota Banda Aceh sudah berubah fungsi sehingga lahan semakin lama semakin berkurang dan apabila populasi ternak di Kota Banda Aceh semakin meningkat maka akan terjadi pencemaran lingkungan, konflik sosial dan ternak-ternak berkeliaran dimana-dimana.

Hasil pengamatan kami sesuai dengan jumlah polulasi dan kondisi lahan yang tersedia saat ini bantuan ternak kepada masyarakat perlu dipertimbangkan/ dikurangi.

➤ Tingginya harga daging

Masalah tingginya harga daging bukan terjadi di Kota Banda Aceh saja akan tetapi telah meluas bahkan seluruh Indonesia. Salah satu tingginya harga daging karena permintaan sangat meningkat apalagi di Provinsi Aceh pada hari-hari besar Islam.

➤ Solusi

Salah satu solusi yang perlu dicari pemerintah adalah dicari kawasan-kawasan peternakan diluar Kota Banda Aceh, peningkatan upsus siwab dengan peningkatan angka kelahiran.

➤ Pengendalian kesmavet

Dari populasi yang ada pemerintah perlu melakukan pengendalian kesehatan masyarakat veteriner sehingga ternak-ternak yang ada di Kota Banda Aceh tidak terinfeksi dengan berbagai ancaman penyakit terutama penyakit zoonosis dan penyakit-penyakit ternak lainnya.

Program pemerintah perlu memberi bantuan yang bersifat alat-alat kesehatan hewan dan penambahan petugas kesehatan hewan yang profesional.

Lebih lanjut pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya untuk membangun destinasi makanan halal untuk menjamin ketenangan masyarakat Kota Banda Aceh. Dan kendala yang dihadapi saat ini belum tersedianya RPH dan RPU yang representatif di Kota Banda Aceh yang menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan.

➤ Saran

Dalam hal ini pemerintah perlu membangun Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang presentatif sesuai ketentuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di Kota Banda Aceh menuju destinasi makanan yang ASUH.

5.8.4. Produksi Perikanan-Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Kota Banda Aceh merupakan Sentra terbesarpendaratanikan yang terdapat di Provinsi Aceh.Hampirseluruh armada denganberbagaijeniskomoditiperikanandidaratkan, produksiperikanandaritahunketahuntelahterjadipeningkatan, halinisangatdidukungoleh armada danteknikpenangkapanikan yang diterapkanolehnelayan diKota Banda Aceh, selainitudukungandaripemerintahpusatdandaerahdalammemberantas *Illegal Fishing* telahberdampakpositifbagiusahaperikanantangkap, meningkatnyaketersediansumberdayaikandiperairanlaut Aceh.

Tabel 1.69

Tabel Rumus Produksi Ikan

Bidang Urusan/ Indikator	Rumus	2012	2013	2014	2015	2016	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Produksilkan	$\frac{\text{JumlahProduksilkan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$	88%	92%	93%	95%	98%	DKPP

Penerapan teknologiusahapenangkapanikan telahberhasilmeningkatkanproduksiperikanan di Kota Banda Aceh sehinggamembantunelayandalammeningkatnyatarafhidupmereka.

5.8.5. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Padatahun 2016 telahterjadipeningkatanpertumbuhankelompokperikanan, salahsatu factor keberhasilan disebabkanolehoptimalisasipendampingan yang dilaksanakaolehpetugasteknisdalammeningkatkankelembagaanprodutifitasusahakepada pelakuusahaperikanan, keberhasilantersebuttelahmemicuterjadinyaperubahanpolapikirpelakuusahaperikanan yang selamainiberusahasecara individualberalihberusahasecarakelompok.

Tabel 1.70

Tabel Rumus Cakupan Binaan Kelompok Nelayan

Bidang Urusan/Indikator	Rumus	2012	2013	2014	2015	2016	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yangmendapatkan Bantuan pemdatahan}}{\text{Jumlah Kelompok Nelayan}} \times 100\%$	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	DKPP

5.8.6. Energi dan Sumber Daya Mineral

5.8.7. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Tabel 1.71

Tabel Penggunaan Energi Listrik

No	Jenis Pelanggan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bisnis	6.902.691	6.860.089	7.955.041	8.880.630	8.909.586
2	Industri	561.728	491.740	492.661	574.496	556.851
3	Publik	3.289.409	3.250.253	3.460.887	4.631.603	3.430.270
4	Perumahan	16.501.961	16.251.289	16.156.566	18.081.471	17.803.612
5	Sosial	2.643.388	3.009.349	2.818.199	3.408.934	3.245.264
6	Layanan Khusus	632.158	1.340.574	81.358	10.974	20.582
	Total	30.531.335	31.203.291	30.964.712	35.588.108	33.966.165

Sumber : Dokumen PLN (Pemakaian KWH)

Energi listrik di Kota Banda Aceh disediakan oleh PLN melalui pembangkit listrik yang terkoneksi ke system transmisi dan pembangkit listrik yang tidak terkoneksi ke system transmisi. Pembangkit listrik yang terkoneksi merupakan sambungan koneksi jaringan listrik dari Sumatera Utara. Sedangkan pembangkit listrik yang tidak terkoneksi terdapat dikecamatan Lueng Bata di kota Banda Aceh yang menggunakan energi diesel (PLTD).

Sesuai dengan table diatas pada tahun 2012 sampai dengan 2016 total pemakaian KWH cenderung fluktuatif. Pemakaian tertinggi terjadi pada tahun 2015, hal ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan Kota Banda Aceh tertinggi pada tahun 2015 sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya relatif rendah.

5.8.8. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Tabel 1.72
Rasio Ketersediaan Daya Listrik

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Daya Listrik Terpasang	200.183.150	211.690.775	222.947.500	233.780.145	252.158.668
2	Jumlah Kebutuhan	200.183.150	211.690.775	222.947.500	233.780.145	252.158.668
3	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	100	100	100	100	100

Sumber : PLN

6 PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN PERINDUSTRIAN

6.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Tabel 1.73

Tabel Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penumpang Bis	941.921	1.007.855	799.785	1.125.428	826.426
2.	Jumlah penumpang ASDP	223.466	213.719	279.306	323.310	363.722
3.	Total Jumlah Penumpang	1.165.387	1.221.574	1.079.091	1.448.738	1.190.148

Dari Tabel 1.74 terlihat bahwa pertumbuhan jumlah penumpang angkutan umum di kota Banda Aceh tidak konsisten dari Tahun 2012 hingga Tahun 2017, peningkatan tertinggi terlihat pada Tahun 2015 hal ini disebabkan adanya lonjakan penumpang Bis yaitu sebesar 1.125.428 dari Tahun 2014 yang hanya berjumlah 799.785 orang. lonjakan ini dipicu adanya minat masyarakat untuk menggunakan alternatif transportasi bus untuk keluar daerah seperti Medan, dikarenakan adanya armada bus yang baru dengan fasilitas yang eksklusif. Jumlah penumpang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) relatif lebih stabil dan tidak terjadi lonjakan yang signifikan. Berikut ini adalah jumlah penumpang dan angkutan darat Tahun 2012 – 2016.

Dari tabel 1.74 terlihat bahwa jumlah penumpang pada Tahun 2016 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah penumpang Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) yaitu 564.373 orang dan jumlah penumpang Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) yaitu 262.053 orang, namun pada Tahun 2016 terjadi peningkatan

pada jumlah angkutan (AKDP) yaitu 789 angkutan dibandingkan pada Tahun 2012 sampai Tahun 2015 yang hanya berjumlah 456 angkutan, sebaliknya terjadi penurunan jumlah angkutan (AKAP) di Tahun 2016 yaitu 157 angkutan dibandingkan pada Tahun 2012 sampai Tahun 2015 yang angkanya naik yaitu 157 angkutan.

Tabel 1.74

Tabel jumlah Penumpang dan Angkutan Umum Darat Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		Jml Ang	Jml Pen	Jml Ang	Jml Pen	Jml Ang	Jml Pen	Jml Ang	Jml Pen	Jml Ang	Jml Pen
1	AKDP	456	605.324	456	655.106	456	752.823	456	788.224	789	564.373
2	AKAP	286	336.597	286	352.749	286	457.777	286	458.982	157	262.053
	Jumlah	742	941.921	742	1.007.855	742	1.210.600	742	1.247.206	946	826.426
	Jumlah ang/ pen X 100%	0,08%		0,08%		0,08%		0,08%		0,06%	

6.2 Rasio Ijin Trayek

Tabel 1.75

Tabel Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Izin Trayek perkotaan	358	358	243	243	243
2.	Izin Trayek perdesaan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Izin Trayek	654	114	42	39	41
4.	Jumlah penduduk	234.971	234.971	249.499	250.303	254.904
5.	Rasio Izin Trayek	0.15	0.15	0.097	0,097	0,095

Pada Tabel 1.76 terlihat Izin Trayek Perkotaan pada Tahun 2012 dan 2013 pertumbuhannya konstan yaitu 358 trayek, namun terjadi penurunan yang cukup jauh di tahun 2017 sampai dengan Tahun 2016 yaitu 42; 39 dan 41, hal ini disebabkan adanya penurunan minat masyarakat terhadap penggunaan sarana transportasi umum, meningkatnya jumlah kendaraan pribadi juga dipicu oleh kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan otomotif untuk membeli kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Solusinya adalah dengan menghadirkan sarana transportasi umum seperti bus Trans Koetardja dengan rute yang lebih luas serta ditunjang oleh bus kecil sebagai *feeder* atau bus transisi sehingga mampu menjangkau wilayah yang terdalam/ jauh dari jalan raya utama. Solusi lainnya adalah dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi (seperti kendaraan bermotor roda dua) bagi pelajar.

6.3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Tabel 1.76

Tabel Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Angkutan Umum	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jmlh	mlh KIR	%												
1	Mobil penumpang umum	572	264	46,15	545	273	50,09	121	257	106,2	80	91	56,88	95	71	37,37
2	Mobil bus	1,455	798	54,84	1,991	1022	51,33	1,046	1.740	83,17	1.050	1.651	78,62	1,187	1.756	73,97
3	Mobil barang	5,338	2868	53,72	6,781	3793	55,93	3,728	6.174	82,81	3.491	5.949	85,20	4.180	6.370	76,20
4	Kereta gandengan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kereta tempelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	7365	3930	53,36	9317	5088	54,61	4895	8171	83,46	4621	7691	83,22	5462	8197	75,04

Pada Tabel 1.77 terlihat persentase penurunan jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Banda Aceh terjadi di Tahun 2016 yaitu 37,237% dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yang persentasenya diatas 50%. Permasalahan yang muncul disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji KIR pada kendaraan bermotor serta banyaknya pemilik kendaraan yang melakukan uji KIR pada daerah lain. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat terhadap pentingnya melakukan uji KIR sesuai waktu yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan, strategi lainnya adalah melakukan operasi ketertiban angkutan umum/ razia bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Berdasarkan SOP Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, lamanya pelaksanaan Uji KIR adalah 60 menit untuk tiap kendaraan, namun pada di lapangan lamanya pengujian kelayakan KIR sangat bervariasi, dalam kondisi kendaraan yang normal, baik dan layak pengujian dapat dilakukan lebih cepat yaitu selama 15 menit, dengan perincian 5 menit pada saat pendaftaran dan 15 menit saat pemeriksaan kendaraan oleh alat pemeriksa.

6.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pada Tahun 2012 sampai Tahun 2016 jumlah pelabuhan ASDP berjumlah 1 (satu) unit yaitu berada di Kecamatan Meuraxa bernama Pelabuhan Ulee Lheue. Pelabuhan ini juga sebagai pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. Jumlah terminal bis adalah 3 (tiga) unit yaitu:

1. Terminal Penumpang Type A (Batoh)
2. Terminal Penumpang Type B (Lueng Bata)

3. Terminal Penumpang Type C (APK Keudah)

Tabel 1.77

Tabel Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Banda Aceh Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pelabuhan ASDP	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3
	Jumlah	4	4	4	4	4

6.5 Persentase Layanan Angkutan Darat

Tabel 1.78

Tabel Persentase Angkutan Darat tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Angkutan darat	742	742	742	742	946
2	Jumlah penumpang Angkutan Darat	941.921	1.007.855	1.210.600	1.247.206	826.426
3	Persentase (%)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06

Dari tabel diatas terlihat jumlah angkutan darat Tahun 2012 - 2016 pertumbuhannya konstan hal ini bertolak belakang dengan pertumbuhan jumlah penumpang yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2016, jumlah angkutan darat telah meningkat menjadi 946 unit, namun justru jumlah penumpang angkutan darat menurun menjadi 826.426 orang, hal inidisebabkan adanya penurunan minat masyarakat terhadap penggunaan sarana transportasi umum serta adanya kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

6.6 Pemasangan Rambu-rambu

Tabel 1.79

Persentase Pemasangan Rambu Kota Banda Aceh Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pemasangan Rambu	1848 Unit	1948 Unit	2016 Unit	2058 Unit	2104 Unit
2.	Jumlah Rambu yang seharusnya tersedia	1948 Unit	2048 Unit	2116 Unit	2058 Unit	-

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Persentase (%)	95	95	95	100	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dihitung berdasarkan Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) yang sudah ada dibagi dengan Jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) dikali dengan 100%. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas perlengkapan jalan bertambah dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dalam mempertahankan kondisi ini maka diperlukan perawatan/pemeliharaan, peremajaan dan pergantian fasilitas perlengkapan jalan secara berkesinambungan. Permasalahannya adalah keterbatasan dana, solusinya adalah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi.

6.7 Perparkiran

Tabel 1.80

Kondisi Perparkiran Di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017

No	Kegiatan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Penambahan lokasi baru	19 Titik	67 Titik	13 Titik	40 Titik	6
2	Pengendalian parkir	268 Titik	335 Titik	348 Titik	388 Titik	332
3	Kontrak juru parkir	268 Org	335 Org	348 Org	388 Org	332
4	Bad nama parkir	295 Bad	350 Bad	370 Bad	400 Bad	-
5	Penertiban juru parkir	252 Org	200 Org	300 Org	350 Org	-
6	Surat teguran juru parkir	60 Surat	63 Surat	51 Surat	65 Surat	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Beberapa faktor yang menjadi permasalahan di Bidang Perparkiran adalah:

1. Keterbatasan ruang parkir;
2. Cuaca hujan akan mengurangi jumlah parkir kendaraan;
3. Adanya pembangunan penggalian disisi badan jalan;
4. Adanya campur tangan pihak lain terhadap pengelolaan perparkiran.
5. Keberadaan Pedagang kaki lima Mengurangi ruang parkir.
6. Hari libur dan hari-hari besar mempengaruhi pendapatan.

Maka solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu:

1. Menambah jumlah titik baru sebagai potensi parkir, dengan adanya penambahan titik potensi parkir tersebut dapat meningkatkan jumlah PAD;
2. Melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dengan pihak lain terhadap pengelolaan parkir.
3. Menciptakan sistem perpajakan yang inovatif (*e-ticketing*, parkir berlangganan, gedung parkir, *basement* parkir dan sistem *barielgate*/parkir kawasan). Dengan adanya inovasi di bidang perpajakan ini maka diharapkan PAD akan meningkat karena dikelola dengan manajemen perpajakan yang profesional.

Tabel 1.81

Perparkiran Kendaraan Bermotor Di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

No	Kegiatan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Lokasi Parkir Kendaraan (Roda 2, 3 dan 4)	249 Titik	268 Titik	335 Titik	348 Titik	388 Titik
2	Jumlah Juru Parkir (Berdasarkan kontrak)	249 Org	268 Org	335 Org	348 Org	388 Org
3	Tarif Parkir					
	- Kend. R 2	Rp.500	Rp.1.000	Rp.1.000	Rp.1.000	Rp.1.000
	- Kend. R 4	Rp1.000	Rp.2.000	Rp.2.000	Rp.2.000	Rp.2.000
4	PAD Retribusi Perparkiran	2.523.498.000	2.857.569.000	3.468.891.000	3.418.456.000	3.481.944.000

Dari tabel diatas terlihat adanya peningkatan titik lokasi parkir kendaraan serta jumlah juru parkir (berdasarkan kontrak) setiap tahunnya, yaitu sebanyak 249 titik lokasi parkir di Tahun 2012 menjadi 388 titik di Tahun 2016, begitu pula dengan jumlah juru parkir yang hanya 249 orang di Tahun 2012 menjadi 388 orang di Tahun 2016.

Tabel 1.82

Tabel terminal angkutan penumpang/barangdi Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek kota Banda Aceh 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Terminal Penumpang Type-A	1	1	1	1	1
2	Terminal Penumpang AKDP Type-B	1	1	1	1	1
3	Terminal Penumpang Type-C	1	1	1	1	1
4	Terminal Barang (Mobar)	1	1	1	1	1
	Jumlah	4	4	4	4	4

Dari tabel diatas terlihat jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek kota Banda Aceh pada Tahun 2012-2016 adalah berjumlah 4 (empat) terminal, yaitu Terminal Penumpang Type-A; AKDP Type-B; Type-C dan Terminal Barang (Mobar). Permasalahan yang muncul pada terminal adalah kurangnya fasilitas bangunan dan sarana serta prasarana di terminal seperti ruang pengelola/ operasional kantor akibat kurangnya dana/ anggaran pada Pemerintah Kota Banda Aceh, solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Propinsi). Jumlah pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran Kota Banda Aceh sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 adalah sebanyak 1 buah yaitu Pelabuhan ASDP Ulee Lheue.

Tabel 1.83

Tabel angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota Banda Aceh 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	AKDP	456	456	456	456	789
2	AKAP	286	286	286	286	157
	Jumlah	742	742	742	742	946

Dari tabel diatas terlihat jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota Banda Aceh untuk AKDP dan AKAP Pada Tahun 2012-2015 jumlahnya relatif konstan yaitu berjumlah 742 unit. Kenaikan yang signifikan terjadi di Tahun 2016 yaitu 946 unit dengan jumlah AKDP adalah 798 unit dan AKAP turun menjadi 157 unit dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan ini disebabkan adanya perusahaan-perusahaan bus yang melakukan peremajaan pada armadanya, sehingga banyak bermunculan bus dengan fasilitas yang lebih eksklusif.

6.8 Bidang Komunikasi dan Informatika

6.9 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong di Tingkat kecamatan

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) ditargetkan di dalam SPM yaitu sebesar 50%, dihitung berdasarkan Jumlah KIG dibagi dengan Jumlah kecamatan yang ada pada kabupaten/kota dikali 100%. Capaian indikator SPM pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) dapat dilihat pada tabel 1.84.

Target ditetapkan masing-masing kecamatan adalah satu kelompok Informasi Gampong (KIG) sementara yang telah terbentuk dalam Wilayah Kota Banda Aceh sebanyak 20 (dua puluh) kelompok dari sembilan Kecamatan, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan sebesar 100% berada diatas nilai SPM yang telah ditetapkan.

Tabel 1.84

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)
di Tingkat Kecamatan

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Jumlah KIG	9	9	9	9	9
2	Jumlah Kecamatan	9	9	9	9	9
3	Rasio KIG	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bidang PIP Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Selain itu penerapan kebijakan yang disampaikan dalam KIG perlu didukung oleh semua stakeholder. Kebutuhan pengembangan website-website gampong dan tenaga IT di gampong sudah selaknyaknya di dukung oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

Saran dari permasalahan yang timbul yaitu harus adanya alokasi dana untuk kebijakan yang disampaikan dalam KIG salah satunya seperti perlu adanya web site gampong dimana butuh dana untuk sarana dan prasarana pendukung web tersebut.

6.10 Perindustrian

6.10.1 Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Perbankan

Perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan penambahan penduduk dan terbukanya informasi dari berbagai penjuru daerah. Berikut data Perkembangan Industri Kecil Kota Banda Aceh tahun 2012 – 2017.

Tabel 1.85

Tabel Data Perkembangan Industri Kecil Kota Banda Aceh

Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja (Org)	Nilai Investasi (Rp)	Nilai Produksi (Rp)	Nilai Tambah
2012	1.898	7088	53.280.480.000	234.760.960.000	181.480.760.000
2013	1.930	7.190	54.380.485.000	230.770.965.000	188.490.860.000
2014	2.020	7.450	54.360.885.000	227.350.000.000	189.570.000.000

2015	2.127	7.830	55.480.775.000	237.780.000.000	190.370.000.000
2016	2.248	8.100	57.630.385.000	239.580.000.000	194.470.000.000
2017	2.376	8.300	58.570.000.000	248.570.000.000	195.580.000.000

Sementara Perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Banda Aceh jika dilihat dari setiap sektor adalah sebagai berikut :

Tabel 1.86

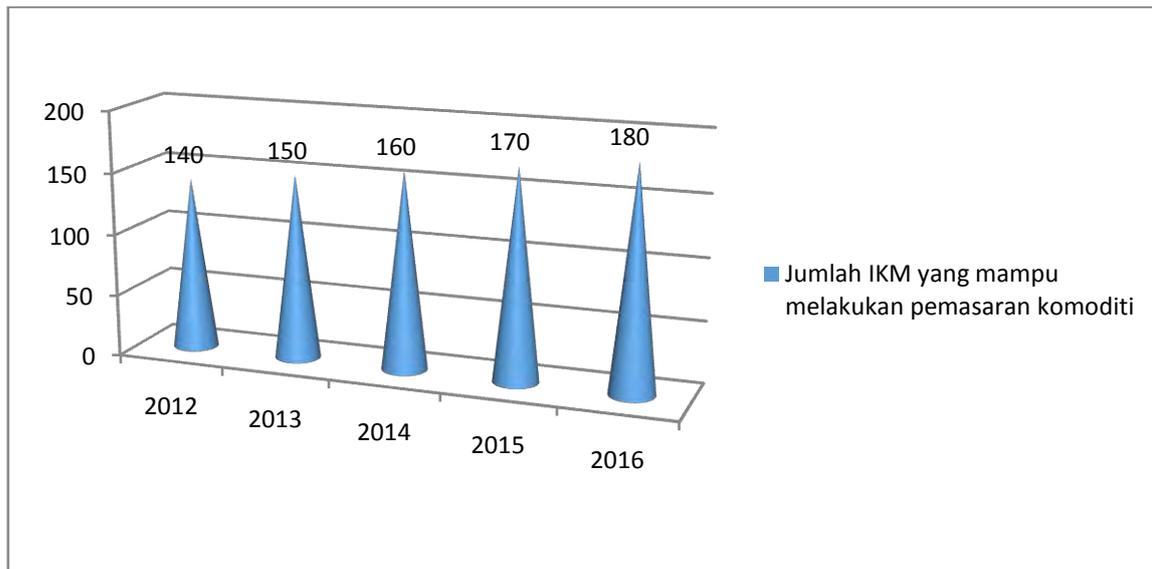
Tabel Perkembangan Industri Kecil dan Menengah

NO	Sektor	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sektor Pangan	580	585	595	645	669	695
2	Sektor Sandang	343	350	365	345	320	355
3	Sektor Kimia	423	430	446	492	495	527
4	Sektor Logam	239	245	265	291	394	413
5	Sektor Kerajinan Umum	313	320	349	354	370	386
	Jumlah	1.898	1.930	2.020	2.127	2.248	2.376

Pada tahun 2016, saat bidang Industri masih bergabung dalam Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, terdapat kegiatan sosialisasi kepada pelaksana IKM dan UKM untuk mendapatkan akses perbankan, namun sampai saat ini Pihak Bank maupun dari pelaksana IKM sendiri tidak pernah memberikan laporan mengenai IKM yang mendapatkan bantuan perbankan kepada Dinas Tenaga Kerja, dan hal ini akan menjadi perhatian dari Pemerintah sendiri untuk melakukan koordinasi dengan pihak Bank dalam rangka sama-sama melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

6.10.2 Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi

Industri di Kota Banda Aceh sangat bervariasi dan terdiri dari berbagai macam komoditas. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan pemasaran komoditi yang disebabkan keaktifan para IKM dalam menjalin kerjasama dan membuka jaringan usaha sesama IKM. Peningkatan pemasaran yang paling tinggi dan efektif adalah secara online melalui sosial media, Peningkatan wawasan IKM dalam menemukan pasar yang cocok dan membangun kreatifitas untuk variasi produk, sehingga produk dan komoditas IKM semakin diterima ditengah tengah masyarakat, selain adanya peran pemerintah dalam memasarkan produk perajin baik melalui event pameran, pelatihan maupun media massa (grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi)



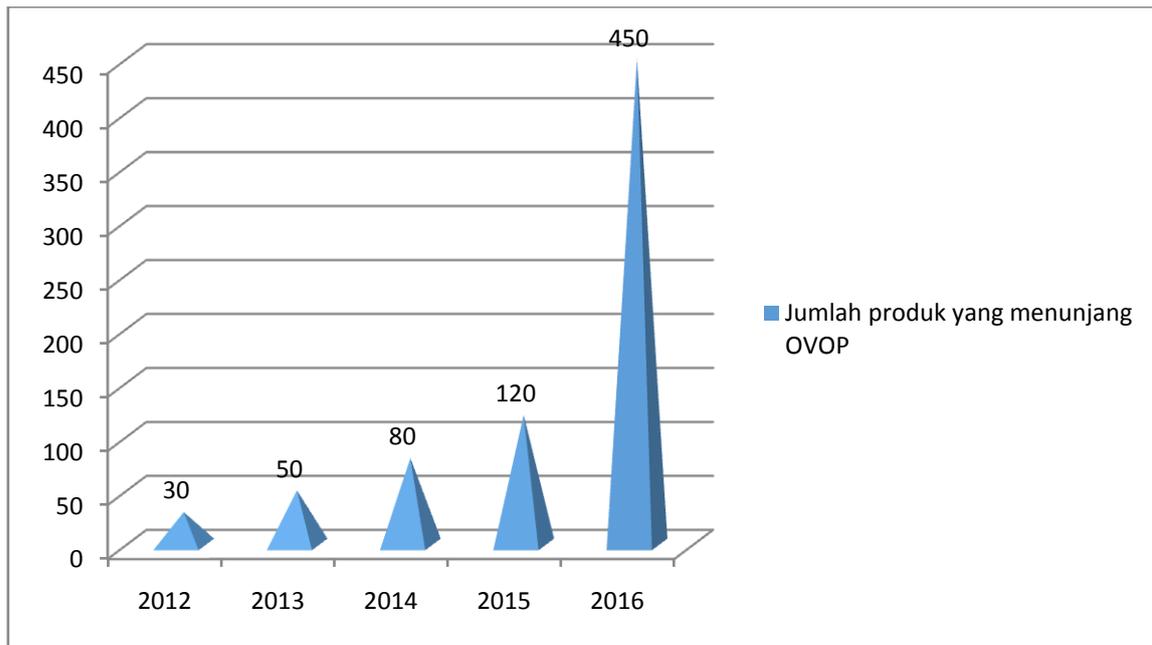
Sumber :Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017

Gambar 1.38

Grafik Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi Tahun 2012-2016

6.10.3 Jumlah Produk yang Menunjang Program One Village One Product

Kota Banda Aceh adalah daerah yang mempunyai produk unggulan yang menjadi ciri khas daerah. Salah satu cara untuk peningkatan dan pengembangan produk unggulan adalah melalui penetapan produk One Village One Product (OVOP). Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Banda Aceh secara konsisten dan fokus dalam pembinaan produk OVOP dengan melakukan kerjasama dengan pihak Akademisi dari Universitas Syiah Kuala melalui Pusat Ekonomi Kreatif Unsyiah, dari survey yang telah dilakukan di 90 Gampong di Kota Banda Aceh maka ditetapkan 36 Produk yang menjadi prioritas produk OVOP setelah dilakukan verifikasi dan pemetaan produk dari 435 produk hasil survey, berikut adalah grafik perkembangan jumlah produk yang menunjang OVOP di Kota Banda Aceh



Sumber :Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017

Gambar 1.39

Jumlah Produk yang menunjang OVOP di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

6.10.4 Jumlah Pasar yang Sudah Berfungsi Secara Optimal

Jumlah pasar di kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2017 sebanyak 16 pasar, jumlah pasar yang sudah berfungsi secara optimal 14 pasar, sementara ada 2 pasar yang belum berfungsi optimal yaitu pasar Lamgapang Ulee Kareng dan pasar terpadu Lampulo yang dibangun pada tahun 2016 dengan sumber dana APBN.

Pasar Kuliner Ulee Lheue yang dibangun dengan sumber dana APBN, sejak tahun 2010 sudah difungsikan sebagai wisata kuliner. Pasar Newton terdiri dari 2 bangunan gedung, gedung A dibangun atas bantuan dari dana Otsus, sudah difungsikan sebagai tempat wisata kuliner dan gedung B dibangun atas bantuan dana hibah Pertamina, khusus lantai 2 sudah dimanfaatkan menjadi kantor PDAM Kota Banda Aceh.

Pasar pusat kuliner dan souvenir di Pango dibangun atas bantuan dana Otsus sudah dimanfaatkan menjadi wisata kuliner dan souvenir pada tahun 2017.

Tabel 1.87

Nama Pasar di Kota Banda Aceh

No	NamaPasar	Pasar yang sudahberfungsi optimal						Pasar yang belumberfungsi					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pasar Aceh	V	V	V	V	V	V						
2	PasarGp. Baru	V	V	V	V	V	V						
3	PasarSeutui	V	V	V	V	V	V						
4	PasarPeuniti	V	V	V	V	V	V						
5	PasarKartini	V	V	V	V	V	V						
6	PasarIkan	V	V	V	V	V	V						
7	PasarDaging	V	V	V	V	V	V						
8	PasarBumbu	V	V	V	V	V	V						
9	PasarUnggas	V	V	V	V	V	V						
10	PasarNasabe	V	V	V	V	V	V						
11	Pasar Rex	V	V	V	V	V	V						
12	PasarUleeKareng							V	V	V	V	V	V
13	Pasar Newton					V	V			V	V		
14	PasarPusatKuliner dan Souvenir						V				V	V	
15	Pasar Kuliner Uleelheu	V	V	V	V	V	V						
16	PasarTerpaduLampulo											V	V

Sumber :Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2017

6.10.5 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Tabel 1.88
Jumlah Perusahaan Asuransi

Tahun	Jumlah Perusahaan Asuransi
2012	
2013	
2014	14
2015	8
2016	11
2017	*6

* S.d April 2017

Jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha asuransi tahun 2014 yang terdaftar sebanyak 14 perusahaan, tahun 2015 sebanyak 8 perusahaan, tahun 2016 sebanyak 11 perusahaan dan tahun 2017 yang terdaftar untuk bulan Januari s.d bulan April sebanyak 6 perusahaan pada DPMPTSP Kota Banda Aceh.

6.10.6 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 4% pada Pendapatan Asli Daerah. Usaha sektor restoran mengalami perkembangan kenaikan jumlah yaitu pada tahun 2012 terdapat 405 restoran/rumah makan/cafe dan meningkat setiap tahunnya sehingga pada tahun 2017 terdapat 551 restoran/rumah makan/cafe.

Tabel 1.89
Tabel Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	2017		
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi										
1	Restoran	26	2600	26	2600	23	2300	23	2300	25	2500	26	2600
2	Rumah Makan	107	5350	112	5600	147	7350	163	8150	166	8300	161	8050
3	Café	272	13600	276	13800	333	16650	345	17250	354	17500	364	18200
Jumlah		405	21550	414	22000	503	26300	531	27700	545	28300	551	28850

6.10.7 Jenis, Kelas dan Jumlah Hotel Penginapan

Pajak hotel juga berkontribusi sebesar 4% pada Pendapatan Asli Daerah, dengan perkembangan usaha sektor hotel dan restoran di Kota Banda Aceh juga berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah. PAD Banda Aceh mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan kenaikan rata-rata sebesar 27, 21% pertahun. Di tahun 2012 pendapatan asli daerah kota Banda Aceh sebesar Rp. 99.022.050.233 dan menjadi Rp. 129.170.160.562 di tahun 2013, Rp 171.777.275.448 di tahun 2014, Rp. 209.914.107.301 di tahun 2015 dan di tahun 2016 menjadi Rp. 258.591.409.670.

Pada tahun 2012 terdapat 42 hotel dan pada tahun 2017 jumlahnya bertambah menjadi 59 hotel. Dari segi jumlah usaha tidak terdapat kenaikan yang menonjol, namun para pengusaha hotel/penginapan lebih cenderung mengembangkan usaha dengan menambah fasilitas hotel/penginapan yaitu kamar dan tempat tidur serta fasilitas lainnya.

Tabel 1.90
 kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Banda Aceh

No	Uraian	2012			2013			2014			2015			2016			2017		
		Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur
1	Bintang 4	1	159	270	1	159	270	1	159	270	1	159	270	1	156	270	1	159	270
2	Bintang 3	3	302	513	3	302	513	3	302	513	3	302	513	3	513	513	3	302	513
3	Bintang 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bintang 1	7	280	476	8	320	544	9	360	612	11	440	748	11	440	748	11	440	748
5	Melati 3	8	200	240	9	225	270	9	225	270	10	250	300	11	275	330	14	350	420
6	Melati 2	5	175	315	5	175	315	5	175	315	5	175	315	5	175	315	5	175	315
7	Melati 1	6	240	432	6	240	432	7	280	540	8	320	576	8	320	576	8	320	576
8	Penginapan	12	240	480	14	280	560	15	300	600	16	320	640	17	340	680	17	340	680
Jumlah		42	1596	2726	46	1701	2904	49	1801	3120	54	1966	3362	56	2219	3432	59	2086	3522

7. PEMERINTAHAN, INVESTASI DAN DAYA SAING

7.1 Fokus Penunjang Urusan

7.2 Perencanaan Pembangunan

7.2.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJP, RPJM, dan RKPK Kota Banda Aceh

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan aspiratif dimaksudkan bahwa RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan mengacu kepada RPJP Daerah yang telah menyerap aspirasi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan serta merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh.

RPJM Kota Banda Aceh juga menjadi pedoman bagi SKPD di dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), yang selanjutnya, keduanya akan mengacu untuk menyusun Rencana Kinerja SKPD.

Selama periode 2012-2017 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal). Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kota Banda Aceh dalam periode tersebut sudah terakomodasi secara optimal.

7.3 Keuangan

7.3.1 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Banda Aceh memperoleh opini wajar tanpa pengecualian terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK. Opini dari BPK-RI merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu; (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) Kecukupan Pengungkapan, (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern.

Tabel Opini BPK Tahun 2012 - 2016

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Hal ini menunjukkan bahwa *UNQUALIFIED OPINION*(WAJAR TANPA PENGECUALIAN/WTP), yang diberikan oleh BPK-RI, dimana Auditor BPK-RI telah meyakini secara material bahwa, (a) penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh telah sesuai SAP (PP 24/2005), tidak ada salah saji material dan telah diungkapkan secara memadai, (b). Sistem pengendalian intern yang dibangun/diterapkan telah cukup memadai, sehingga dapat mengamankan harta dan kebijakan manajemen, (c). Semua transaksi yang dilakukan telah sesuai ketentuan yang berlaku (tidak ada temuan yang material yang mempengaruhi opini auditor).

7.3.2 Persentase SILPA

Tabel 1.91

Tabel Persentase SILPA Kota Banda Aceh

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Persentase SILPA	3 %	4 %	5 %	8 %	%

SiLPA Pemerintah Kota Banda Aceh setiap tahunnya terdiri atas sisa dana yang bersumber dari sisa kas pada BLUD, sisa kas dana Jaminan Pelayanan Kesehatan yang berada pada masing-masing puskesmas, sisa penerimaan zakat tidak seluruhnya disalurkan pada tahun anggaran berjalan, karena penyaluran zakat secara konsumtif disalurkan pada setiap bulan ramadhan, sisanya bahagian dari SiLPA tahun berjalan yang akan digunakan/dialurkan pada tahun anggaran berikutnya, dan sisa Dana transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat untuk pembayaran tambahan penghasilan guru PNSD tidak seluruhnya dapat direalisasikan, pembayaran hanya diberikan kepada guru-guru yang telah mendapatkan dan memiliki sertifikasi sesuai dengan Keputusan Kementerian Pendidikan RI.

7.3.3 Persentase SILPA Terhadap APBD

Rasio SiLPA Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap total belanja mengalami penurunan bila dibandingkan Rasio SiLPA dari lima tahun anggaran terhitung sejak Tahun Anggaran 2012 – 2016.

Tabel 1.92

Tabel Persentase SILPA Terhadap APBD

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Persentase SILPA Terhadap APBD	5 %	6 %	8 %	10 %	5 %

Dimana rasio SiLPA Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap total belanja tidak mengalami kecenderungan peningkatan, seperti untuk Tahun Anggaran 2016 rasionya sebesar 4,78 % mengalami penurunan sebesar 4,93 % dari Rasio Tahun Anggaran 2015 sebesar 9,71 %.

7.3.4 Persentase Belanja Pendidikan

Tabel 1.93

Tabel Persentase Belanja Pendidikan

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Persentase belanja pendidikan (20%)	42%	42%	39%	38%	35%

Persentase belanja pendidikan dari tahun 2012-2016 di kota Banda Aceh telah dialokasikan melebihi ketentuan minimal yaitu 20%, tetapi di tahun-tahun 2014-2016 alokasi anggaran pendidikan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan turunnya alokasi tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru dari pemerintah pusat dan juga disebabkan oleh banyaknya guru yang pensiun.

7.3.5 Persentase Belanja Kesehatan

Tabel 1.94

Tabel Persentase Belanja Kesehatan

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Persentase belanja kesehatan (10%)	10%	9%	11%	12%	13%

Belanja untuk bidang kesehatan pada APBD Pemko Banda Aceh dilakoasikan di Dinas Kesehatan dan RSUD Meuraxa. Peningkatan yang terjadi pada kurun waktu tahun 2014-2016 disebabkan oleh adanya penambahan pendapatan pada BLUD RSUD Meuraxa yang diiringi belanja pada BLUD tersebut juga menjadi meningkat.

7.3.6 Persentase Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Tabel 1.95

Tabel Persentase Belanja Langsung

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Persentase belanja langsung	36%	42%	48%	48%	46%

Alokasi belanja langsung yang diperuntukkan untuk belanja rutin dan juga untuk pembiayaan pembangunan kota dan untuk kepentingan masyarakat sebanyak 36-48% di tahun 2012 s/d 2016. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik terus meningkat juga menjadi penyebab dari kenaikan persentase alokasi belanja langsung.

Tabel 1.96

Tabel Persentase Belanja Tidak Langsung

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Persentase belanja tidak langsung	64%	58%	52%	52%	54%

Persentase belanja tidak langsung memiliki porsi yang besar dibandingkan belanja langsung di kota Banda Aceh, hal ini disebabkan oleh Belanja Tidak Langsung yang melingkupi Belanja pegawai yang cukup besar dan juga dialokasikan untuk kebutuhan Belanja Bunga, Belanja Hibah, Bansos, Belanja Bantuan Keuangan dan belanja tidak terduga .

7.3.7 Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa

Tabel 1.97

Tabel Persentase Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Persentase Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	2%	1%	1%	3%	7%

Persentase bagi hasil Kota Banda Aceh ke desa /gampong meliputi Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBN, Alokasi Dana Gampong yang berasal dari APBK Kota Banda Aceh, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banda Aceh.

Pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari 3% menjadi 7% , hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 72, yang memuat tentang pendapatan Desa yang berasal dari Alokasi APBN (ADD), Bagian Hasil pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah juga Alokasi Dana Desa (ADG) dengan ketentuan 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kota Banda Aceh dalam APBD setelah dikurangi DAK. Pada PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN memuat bahwa ADD

merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah untuk Desa yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

7.3.8 Penetapan APBD

Tabel 1.98

Tabel Penetapan APBD

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Penetapan APBD	Tepat waktu (26 Desember 2011)	Tepat waktu (21 Desember 2012)	Tepat waktu (23 Desember 2013)	Tepat waktu (30 Desember 2014)	Tepat waktu (29 Desember 2015)

Kota Banda Aceh setiap tahunnya dari 2012 s/d 2016 selalu berhasil untuk menetapkan APBD tepat waktu, hal ini menunjukkan sinkronisasi dan harmonisasi antara eksekutif dan yudikatif dalam proses perencanaan sampai dengan penetapan APBD.

7.3.9. Pengawasan

7.3.9 Persentase Tindak Lanjut Temuan

Penyelesaian Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari Pengawas Eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) dan Inspektorat Aceh, maupun Pengawas internal (Inspektorat Kota Banda Aceh) sangat tergantung pada keseriusan SKPK dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan.

Tabel 1.99

Jumlah Temuan BPK, Inspektorat Aceh dan Inspektorat Kota Banda Aceh Serta Penyelesaian TLHP Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah rekomendasi BPKRI	29	58	47	55	48
2	Jumlah penyelesaian	29	46	38	46	43
3	Ratio penyelesaian (%)	100	79	81	84	89
4	Jumlah rekomendasi Inspektorat Aceh	-	-	-	23	-
5	Jumlah penyelesaian	-	-	-	21	-
6	Ratio penyelesaian (%)	-	-	-	91	-
7	Jumlah rekomendasi Inspektorat kota	733	1210	803	714	864
8	Jumlah penyelesaian	672	1210	748	656	656
9	Ratio penyelesaian (%)	92	100	93	92	76

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh, 2017

Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2016 Inspektorat Aceh tidak melakukan pemeriksaan pada Pemerintah Kota Banda Aceh, pemeriksaan yang dilakukan tahun 2015 menghasilkan 23 rekomendasi, 21 penyelesaian dengan rasio 91 %.

Rekomendasi, penyelesaian dan rasio temuan BPK, Inspektorat Aceh dan Inspektorat Kota Banda Aceh Serta Penyelesaian TLHP Tahun 2012 – 2016 selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

7.4 Pemerintahan Umum

7.4.1 Nilai SAKIP Pemerintah Kota

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, memberi saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan melalui tahapan survey pendahuluan dan evaluasi atas implementasi SAKIP. Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.100

Tabel hasil Evaluasi SAKIP

No	Nilai Sakip	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %
1	AA	15,38	20,51	0	0	0
2	A	7,69	15,38	5,13	7,69	10,25
3	BB	0	0	0	15,38	15,38
4	B	28,20	17,94	51,28	5,12	15,38
5	CC	20,51	15,38	30,77	23,07	15,38
6	C	17,94	20,51	10,26	41,02	38,46
7	D	2,56	2,56	2,56	7,69	2,56

Pencapaian nilai SAKIP SKPD dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 masih harus ditingkatkan untuk memberikan manfaat sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong SKPD untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan dan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu, SAKIP tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

7.4.2 Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Pemerintah yang Transparan, Bersih dan Bebas dari Korupsi (KKN) serta tercapainya pelayanan Publik yang Prima. Kondisi tahun 2016 hasil penilaian mandiri oleh Tim penilai internal, SKPD yang telah mencanangkan zona integritas dan meraih predikat wilayah Bebas dari korupsi (WBK) sebanyak 3 (tiga) SKPD atau (1,17%) dari 39 SKPD yaitu RSUD Meuraxsa, Disduk Capil dan KPPTSP. SKPD yang telah mendapatkan predikat WBK dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.101

Tabel SKPD yang mendapat predikat WBK

No	Uraian	2012 SKPD	2013 SKPD	2014 SKPD	2015 SKPD	2016 SKPD
1	2	3	4	5	6	7
1	SKPD yang mendapat predikat WBK	0	5	4	1	3

Dalam hal ini harus lebih di tingkatkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk unit kerja / SKPD lainnya, yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas.

7.4.3 Kapabilitas APIP

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Model Peningkatan Kapabilitas APIP mengacu pada *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*, Level IA-CM Level 1 sampai dengan Level 5, Kota Banda Aceh tahun 2016 masih berada pada level 2 (dua) penuh (*Infrastructure*) yaitu APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

Tabel 1.102

Level Kapabilitas APIP

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Level Kapabilitas APIP	1	1	2 (dengan catatan)	2	2

Kondisi ini menggambarkan bahwa kondisi APIP Kota Banda Aceh harus lebih ditingkatkan sehingga mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

7.4.4 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Rasio jumlah pegawai dibandingkan dengan Jumlah Auditor dan P2UPD (Pejabat Pemeriksa Urusan Pemerintahan Daerah) mulai tahun 2012 sampai dengan 2016 berfluktuasi, pada tahun 2012 jumlah auditor 11 orang dan P2UPD 11 orang, tahun 2013 jumlah auditor tetap (11 orang) sementara P2UPD berkurang 1 orang. Pada tahun 2014 auditor bertambah 1 orang (kembali dari tugas belajar) sementara P2UPD juga berkurang 1 orang, pada tahun 2015 jumlah auditor berkurang 3 orang (9 orang) karena tugas belajar, P2UPD tetap 8 orang, pada tahun 2016 jumlah auditor menjadi 15 orang (3 orang kembali dari tugas belajar), sementara P2UPD masih tetap 8 orang.

Kebutuhan Auditor/P2UPD sampai tahun 2019 sesuai Instruksi Presiden dan dalam rangka mencapai level 3 kapabilitas APIP 40 orang (harus ditambah 17 orang).

Jumlah pegawai dan tingkat kompetensi aparatur pengawasan Tahun 2012 s.d. 2016 selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1.103

Jumlah Pegawai dan Tingkat Kompetensi Aparatur Pengawasandari Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pegawai	41	38	47	43	46
2	Jumlah Aditor dan P2UPD	Auditor : 11 P2UPD : 11	Auditor : 11 P2UPD : 10	Auditor : 12 P2UPD : 8	Auditor : 9 P2UPD : 8	Auditor : 15 P2UPD : 8
3	Ratio per-Tahun (%)	53	55	42.5	39.5	50

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh, 2017

7.4.5 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja merupakan aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas untuk menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan perda. Kondisi personil polisi Pamong Praja dari Tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel 1.105.

Pada tahun 2013 jumlah Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh berjumlah 155 orang, dengan jumlah penduduk pada saat itu sebanyak 249.282 jiwa maka rasio jumlah personil Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah per 10.000 penduduk adalah 6,22 dengan kata lain 6 personil Satpol PP dan WH untuk 10.000 penduduk.

Tabel 1.104

Tabel Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2012-2016 Kabupaten/ Kota

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah polisi pamong praja	139	155	215	204	206
2.	Jumlah penduduk	238.784	249.282	249.499	250.303	254.904
3.	Rasio Jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	5,84	6,22	8,62	8,15	8,08

Sedangkan pada tahun 2014 jumlah personil Satpol PP dan WH berjumlah 215 orang, dengan jumlah penduduk 249.499 jiwa dan rasio jumlah personil Satpol PP dan WH per 10.000 penduduk adalah 8,62. Pada tahun 2014 personil Satpol PP dan WH meningkat sehubungan dengan adanya penerimaan tenaga kontrak baru yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH dengan jumlah penduduk saat itu adalah 249.499 jiwa maka rasio jumlah personil Satpol PP dan WH per 10.000 penduduk adalah 8,62 dengan kata lain 9 personil Satpol PP dan WH untuk 10.000 Penduduk.

7.4.6 Jumlah Linmas Per Jumlah Penduduk

Kota Banda Aceh sebagai ibukota propinsi memiliki masyarakat dengan kultur budaya berbeda yang dipengaruhi oleh banyaknya pendatang dari luar daerah. Umumnya hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dimana ibukota propinsi dianggap lebih memberikan kesempatan dan lapangan kerja yang lebih besar. Selain faktor mencari kerja, terdapat sebagian orang yang memanfaatkan situasi dengan mengambil kesempatan melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tingkat kesenjangan sosial menjadi faktor dominan yang menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan di Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya mengantisipasi dan menjaga lingkungan dari gangguan ketertiban dan keamanan, merekrut Satuan Perlindungan Masyarakat dari setiap gampong yang bertugas membantu kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selain itu di setiap gampong dibangun pos Siskamling yang merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat. Sistem keamanan lingkungan atau Siskamling melibatkan unsur masyarakat, untuk melakukan pengawasan, terhadap keamanan dilingkungannya dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas.

Pemerataan anggota satuan linmas merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan ketrentaman masyarakat. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Adapun Rasio Jumlah Linmas sesuai tabel berikut.

Tabel 1.105

Rasio Jumlah Linmas Kota Banda Aceh Per 10.000 Penduduk Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Linmas	1,300	1,320	1400	0	0
2	Jumlah penduduk	238.784	249.282	249.499	250.303	254.904
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	54	57	52	0	0

Sumber: Kesbangpolinmas Kota Banda Aceh

7.4.7 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Gampong

Tabel 1.106

Rasio Jumlah Siskamling Per Kecamatan Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten/ Kota Banda Aceh

NO	Kecamatan	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jmlh sis Kam bling	Jmlh desa	Rasio	Jmlh siskam bling	jmlh desa	Rasio	Jmlh sis Kam bling	jmlh desa	Rasio	Jmlh siskam bling	jmlh desa	Rasio	Jmlh siskam bling	jmlh desa	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)	9	10	(11=9/10)	12	13	(14=12/13)	15	16	(17=15/16)
1	Meuraxa	29	16	1,8	28	16	1,7	29	16	1,8	29	16	1,8	29	16	1,8
2	Jaya Baru	23	9	2,5	21	9	2,3	23	9	2,5	23	9	2,5	23	9	2,5
3	Banda Raya	20	10	2,0	20	10	2,2	20	10	2,0	20	10	2,0	20	10	2,0
4	Baitur rahman	35	10	3,5	33	10	3,3	35	10	3,5	35	10	3,5	35	10	3,5
5	Lueng Bata	18	9	2,0	16	9	1,8	18	9	2,0	18	9	2,0	18	9	2,0
6	Kuta Alam	43	11	3,9	42	11	3,8	43	11	3,9	43	11	3,9	43	11	3,9
7	Kuta Raja	15	6	2,5	15	6	2,5	15	6	2,5	15	6	2,5	15	6	2,5
8	Syiah Kuala	32	10	3,2	30	10	3,0	32	10	3,2	32	10	3,2	32	10	3,2
9	Ulee Kareng	12	9	1,3	12	9	1,3	12	9	1,3	12	9	1,3	12	9	1,3
	Jumlah	227	90	2,5	217	90	2,2	227	90	2,5	227	90	2,5	227	90	2,5

Rasio jumlah siskambling merupakan perbandingan antara jumlah siskambling dengan jumlah gampong/desa. Data rasio siskambling Kota Banda Aceh Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 ditunjukkan pada tabel 1.107.

Berdasarkan tabel tersebut rasio jumlah siskamling per desa/gampong berdasarkan kecamatan terbesar 3,9 di Kecamatan Kuta Alam dan yang paling kecil sebesar 1,3 di Kecamatan Ulee Kareng.

7.5 Fokus Iklim Berinvestasi

7.6.1. Angka Kriminalitas

Tabel 1.107

Tabel Angka Kriminalitas di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2016

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kasus Narkoba	116	112	96	0	168
2	Jumlah kasus pembunuhan	0	1	0	1	2
3	Jumlah Kejahatan seksual	3	5	2	80	15
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	129	241	200	80	189
5	Jumlah Kasus pencurian	50	282	250	140	286
6	Jumlah Kasus Penipuan	75	155	100	141	175
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0	2	0
	Total	369	796	648	444	835
	Jumlah Penduduk	249.282	249.499	250.303	254.904	-
	Angka Kriminalitas	14	31	25	17	-
	Jumlah demonstrasi	80	124	130	75	-

Sumber Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

Dilihat dari perubahan angka kriminalitas maka terjadi penurunan yang akan berpengaruh pada kepercayaan investor untuk menginvestasikan modalnya di Kota Banda Aceh karena salah satu faktor yang mempengaruhi iklim investasi adalah tingkat kriminalitas.

Tabel 1.108

Kasus Narkoba di Kota Banda Aceh

Tahun	Ganja	Sabu	Ekstasi	Jumlah Kasus
2012	51	59	1	111
2013	36	74	0	110
2014	38	62	0	102
2015	24	72	0	96
2016	21	77	0	98
2018	23	44	0	67

Upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba yang berupa :

1. Sosialisasi kepada Masyarakat
2. Penyuluhan Kesekolah-sekolah pada upacara bendera Senin pagi
3. Razia kesekolah-sekolah dan tempat-tempat yang dicurigai

Kegiatan tersebut melibatkan unsur-unsur :

- a. Pomdan Iskandar Muda
- b. Polresta Banda Aceh
- c. Kajari Banda Aceh
- d. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
- e. Dinas Kesehatan
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
- g. Kantor Satpol PP dan WH
- h. Badan Kesbang Pol dan Linmas
- i. BNNP Aceh

7.6.2. Jumlah Demonstrasi

Tabel 1.109

Tabel Jumlah Demonstrasi

Uraian	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
Jumlah demonstrasi	80	124	130	75

7.6.3. Lama Proses Perizinan

Berdasarkan Perwal No. 27 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banda Aceh, lama proses perizinan beberapa izin pada kota Banda Aceh ditampilkan pada tabel 1.111.

Pelayanan perizinan berdasarkan SOP ini merupakan salah satu indikator yang akan dapat meningkatkan iklim investasi di Kota Banda Aceh. Dan kinerja pelayanan ini telah dilaksanakan dengan baik yang ditunjukkan dengan perolehan penghargaan-penghargaan yan berskala provinsi dan nasional di bidang pelayanan antara lain Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terbaik dari Pemerintah Aceh sejak tahun Tahun 2009 s.d 2012, Piala Citra Pelayanan Prima diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Tahun 2010, Investment Award bagi Nominasi Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal Kota Terbaik Tahun 2012, penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “A” (berdasarkan hasil evaluasi

terhadap 59 Kabupaten-Kota Role Model sesuai dengan KepMenPAN Nomor 191 Tahun 2016 tentang Penetapan 59 Kabupaten/Kota sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik).

Tabel 1.110

Lama Proses Perizinan Kota Banda Aceh

No	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Resmi (Rata-Rata Maks Rph)
1	SIUP	3 Jam s.d 1 hari kerja	12	-
2	TDP	3 Jam s.d 1 hari kerja	11	-
3	Izin Daftar Industri	3 Jam s.d 1 hari kerja	12	-
4	TDI	3 Jam s.d 1 hari kerja	12	-
5	IMB	6 Hari Kerja	15	Rp.2.250-Rp. 22.875,-
6	HO	1 s.d 7 hari kerja	14	Dibawah 1000m = 2.500/m 1000-2000 m= Rp. 2.000/m 2001-4000 m= Rp. 1.500/m Diatas 4000 m= 2.500/m

Sumber: DPMPTSP

7.6.4. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Tabel 1.111

Jumlah Perda yang mendukung Iklim Investasi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Perda Terkait Perizinan	17	0	0	1	1

Pada kondisi awal di tahun 2012 terdapat 21 perda yang mendukung iklim investasi untuk Banda Aceh. Penambahan perda baru hanya terdapat di tahun 2015 dan di tahun 2016 masing-masing sebanyak 1 perda.

7.6.5. Pengeanaan Pajak Daerah (Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah)

Tabel 1.112

Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang mendukung Iklim Investasi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pelayanan Perizinan	52	52	57	57	59
2	Layanan Perizinan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SIMSATU)	31	31	31	31	31
3	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal	9	9	9	9	9
4	Jumlah Jenis Pelayanan Bidang Penanaman Modal yang Diimplementasikan dalam SPIPISE	8	8	8	8	8
5	Layanan Perizinan melalui aplikasi Sistem Perizinan Online	-	-	10	10	10
6	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	1	1	1	1	1
7	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	8	8	8	8	8

Sumber: DPMPTSP, 2017

Jumlah pelayanan perizinan yang dijalankan di DPMPTSP dari 2012 sampai dengan 2017 meningkat dari 52 jenis menjadi 57 jenis, untuk jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal sebanyak 9 perizinan dan non perizinan (7 perizinan dan 2 non perizinan). Untuk pajak daerah terdiri atas 1 jenis izin yaitu izin reklame dan untuk retribusi daerah DPMPTSP menangani 8 perizinan yaitu Izin Gangguan, Izin Trayek, Izin usaha Angkutan Umum, Izin Usaha Angkutan Barang, IMB, Izin Galian Jalan, Kartu Pengawasan, Kartu Pengawasan Operasional, izin Insidental

7.6.6. Pembinaan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan internal bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan lancar, efektif dan efisien.

Jumlah objek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan setiap tahun anggaran sangat tergantung pada kemampuan keuangan Pemerintah Kota Banda aceh.

Jumlah pembinaan dan pengawasan serta jumlah objek pemeriksaan dan rasio pembinaan/objek Tahun 2012 s.d. 2016 selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1.113

Jumlah Pembinaan dan Pengawasan serta Jumlah Objek Pemeriksaan dan
Ratio Pembinaan/Objek dari Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pembinaan dan pengawasan	119	239	182	183	131
2	Jumlah anggaran pembinaan dan pengawasan	398.576.000	779.200.000	690.375.000	673.600.000	788.640.000
3	Jumlah objek pemeriksaan	257	257	257	257	257
4	Ratio pembinaan/objek (%)	46,30	92,99	70,81	71,20	50,97

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh

7.6.7. Sumber Daya Manusia

7.6.8. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun ditambah jumlah penduduk usia di atas 64 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun. Berdasarkan data BPS yang direkap oleh Dinas Tenaga Kerja seperti dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.114

Tabel Tingkat Ketergantungan

Tahun	0 – 15 Tahun	Di atas 64 Tahun	Jumlah Ketergantungan	Penduduk Usia 15-64 th	Persentase Ketergantungan
2014	61.674	5.916	67.590	188.081	35.94%
2015	61.436	6.138	67.574	189.512	35.65%

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk Kota Banda Aceh Tengah dari tahun 2012 sampai tahun 2015 menunjukkan angka perkembangan yang

menggembirakan, angka ketergantungan yang terjadi selama 5 tahun terakhir semakin mengecil sehingga pada tahun 2015 angka ketergantungan sebesar 35,65 persen artinya setiap 100 orang penduduk harus menanggung biaya hidup orang lain yang tidak produktif sebanyak 35,65 orang atau 36 orang.

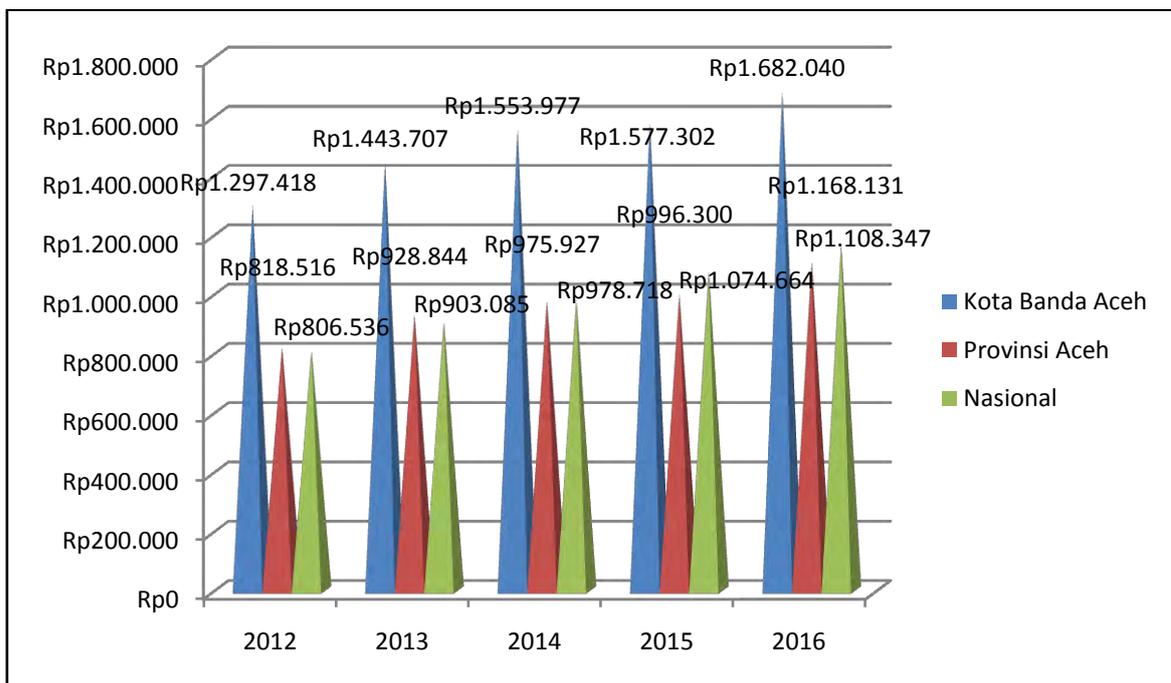
7.6 Aspek Daya Saing Daerah

7.6.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

7.6.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

PDRB penggunaan atau pengeluaran merupakan nilai pengeluaran atas penggunaan barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh berbagai golongan dalam masyarakat baik untuk memenuhi modal, stok, maupun ekspor dan impor.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional 2013 -2016

Gambar 1.40

Pengeluaran Perkapita per bulan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional pada Tahun 2012-2016

Rata-rata pengeluaran perkapita atau belanja rumah tangga selama sebulan di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan, tahun 2012 Rp. 1.297.418,- dan tahun 2016 Rp

1.682.040,-. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat Kota Banda Aceh semakin meningkat, bahkan melampaui rata-rata Provinsi Aceh (Tahun 2016 : Rp 1.108.347,-) dan Nasional (Rata-rata pengeluaran perkapita di daerah Perkotaan Tahun 2016 : Rp 1.168.131,-), juga mengindikasikan perekonomian di Kota Banda Aceh menjadi semakin baik. Pengeluaran perkapita per bulan kota Banda Aceh tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Gambar 1.40.

7.6.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

7.6.4 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Tabel 1.115

Rasio panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh Tahun 2013– 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Panjang Jalan (KM)	765,66	765,66	765,66	765,66	707,343
2.	Jumlah Kendaraan	9317	4895	5752	11001	-
3.	Rasio	0,082	0,156	0,133	0,070	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Rasio pelayanan angkutan jalan dihitung berdasarkan Panjang Jalan Kabupaten/Kota dibagi dengan Jumlah Kendaraan. Masih sangat rendahnya persentase pelayanan disebabkan oleh sedikitnya jaringan jalan kota yang dilayani angkutan umum dibandingkan dengan total jaringan jalan Nasional/Propinsi/Kota yang ada. Hal ini disebabkan antara lain oleh keterbatasan armada dan kurangnya potensi penumpang pada rute tertentu, sehingga mengakibatkan perusahaan pengelola angkutan umum hanya mengambil rute yang dinilai banyak potensi penumpangnya. Disamping itu, masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk berpergian, sehingga pengelola angkutan umum banyak mengalami kerugian akibat biaya operasional yang tidak sebanding, sehingga mengurangi/menutup usahanya.

7.6.5 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Dari tabel 1.1117 terlihat bahwa jumlah penumpang AKDP lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penumpang AKAP, hal ini karena jumlah angkutan AKDP lebih banyak dibandingkan dengan jumlah angkutan AKAP. Kenaikan jumlah penumpang ini disebabkan karena adanya peremajaan pada armada angkutan AKDP yang muncul setiap tahun dengan armada yang baru dan eksklusif. Sedangkan untuk AKAP masyarakat lebih memilih untuk menggunakan *alternative* alat transportasi yang lain seperti pesawat terbang.

Tabel 1.116

Tabel Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		Jlh Ang	Jlh pnp	Jlh Ang	Jlh pnp	Jlh Ang	Jlh pnp	Jlh Ang	Jlh pnp	Jlh Ang	Jlh pnp
1	AKDP	456	605.324	456	655.106	456	752.823	456	788.224	789	564.373
2	AKAP	286	336.597	286	352.749	286	457.777	286	458.982	157	262.053
	Jumlah	742	941.921	742	1.007.855	742	1.210.600	742	1.247.206	946	826.426
	Jumlah ang/pep X 100%	0,08%		0,08%		0,08%		0,08%		0,06%	

7.6.6 Jumlah Orang/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun

Tabel 1.117

Jumlah orang/ barang melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penumpang Bis (Terminal)	526.623	941.921	1.007.855	799.785	1.125.428
2	Jumlah Penumpang ASDP (Dermaga)	223.466	213.719	279.306	323.310	363.722
3	Total Jumlah Penumpang	724.857	1.165.387	1.221.574	1.079.091	1.448.738

Jumlah penumpang angkutan secara umum meningkat dari tahun 2012 - 2016, peningkatan terjadi karena masih ada kegiatan rehab rekon yang menjadi daya tarik bagi masyarakat luar untuk datang ke Banda Aceh terutama para pekerja yang terlibat langsung dengan proses rehab rekon. Sedangkan tahun 2015 terjadi penurunan penumpang pada terminal Bis karena menurunnya aktivitas rehab rekon dan masyarakat sudah banyak memiliki kendaraan pribadi untuk berpergian. Pada Tahun 2016 jumlah penumpang Bis kembali meningkat karena banyaknya perusahaan angkutan yang melakukan peremajaan armadanya (bis), sehingga menarik minat masyarakat untuk kembali menggunakan angkutan umum (bis) untuk bepergian keluar kota. Jumlah penumpang ASDP (Dermaga) pertumbuhannya relatif konstan.

BAB II

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, masih ada permasalahan baik eksternal maupun internal yang dihadapi Kota Banda Aceh. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Banda Aceh meliputi infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional, dan daya saing ekonomi daerah.

Permasalahan pembangunan daerah ini merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan. Permasalahan timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Pada bagian ini akan disampaikan berbagai permasalahan yang berguna untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terkait lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder lainnya.

Dalam dokumen RPJPD Kota Banda Aceh 2007-2027 telah diamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Banda Aceh setiap 5 (lima) tahun selama 4 (empat) periode RPJMD. Dalam dokumen RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Dengan adanya indikator dan target yang ditetapkan tersebut, maka menjadi sangat penting untuk mengetahui kondisi capaian sebagai data dasar bagi perencanaan menengah tahun 2017-2022.

Isu-isu strategis pembangunan Kota Banda Aceh dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Adapun isu-isu tersebut adalah:

1. *Syariat Islam*
2. *Stabilitas Ekonomi*
3. *Sistem transportasi dan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)*
4. *Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota*
5. *Bidang Kepariwisata dan Budaya*
6. *Peningkatan Kualitas Pendidikan*
7. *Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat*
8. *RTH dan Pencemaran Lingkungan*
9. *Pengelolaan Air Bersih*
10. *Mitigasi Bencana*
11. *Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Gender*
12. *Pengembangan Reformasi Birokrasi*
13. *Kepemudaan dan Olahraga*

Dari hasil indentifikasi permasalahan tersebut selanjutnya ditetapkan isu strategis yang salah satunya adalah kualitas lingkungan yang semakin menurun di wilayah Kota Banda Aceh. Aspek fisik-lingkungan yang menjadi isu pembangunan Kota Banda Aceh adalah berkaitan dengan (1) *Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota*; (2) *Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat*; (3) *RTH dan Pencemaran Lingkungan*; (4) *Pengelolaan Air Bersih*; dan (5) *Mitigasi Bencana*.

Isu isu lingkungan tersebut umumnya berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, pengarus utamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air.

Mengacu pada permasalahan dan isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2021 tersebut serta dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang diperoleh dari dialog-dialog atau pembahasan dalam forum-forum baik bersama masyarakat/LSM maupun dengan para pelaku usaha kegiatan, selanjutnya bersama dengan unsur Perguruan Tinggi dirumuskan tiga isu prioritas yang sesuai dengan kondisi permasalahan lingkungan hidup di wilayah Kota

Banda Aceh di tahun 2018. Isu Prioritas tersebut meliputi : 1) pencemaran air; 2) pencemaran udara; dan 3) ruang terbuka hijau.

2.1 PENCEMARAN AIR

Pada tahun 2016, ada 176 sumber pencemaran air yang telah di pantau pengelolaannya. Sebagian besar terdiri dari hotel, rumah sakit, restoran, SPBU, bengkel/shoroom dan lain-lain.

Tabel 2.1 Data Sumber Pencemaran Air Tahun 2016

No	JenisSumber	Jumlah	Satuan
1	Hotel	41	Buah
2	Rumahsakit/Klinik	47	Buah
3	Restauran/Rumahmakan	15	Buah
4	SPBU	12	Buah
5	Showroom/Bengkel	26	Buah
6	Laundry	2	Buah
7	Doorsmer	3	Buah
8	Apotek/Obat-obatan	9	Buah
9	Industri	8	Buah
10	DLL	13	Buah
Jumlah		176	Buah

Dari berbagai sumber pencemaran air yang telah dipantau, maka pada tahun 2018 pula dilakukan pengujian tingkat pencemaran air pada enam sungai yaitu sungai krueng aceh sebanyak 6 titik pantau dan sungai krung daroy sebanyak 6 titik pantau (Data pencemaran air 2016). Kedua sungai tersebut sudah disimpulkan cemar berat, sehingga perlu kedepan dilakukan upaya pencegahan pencemaran air dititik-titik sumber pencemaran.

1. Sungai Krueng Aceh

Tabel 2.2

Tingkat PencemaranAir Sungai Krueng Aceh Tahun 2016

No	TitikPantauPencemaran Air	Skor	Tingkat Pencemaran
1	Mutu Air Sungai Krueng Aceh SegmenLambaro	-17	Cemar Sedang
2	Mutu Air Sungai Krueng Aceh SegmenPango	-17	Cemar Sedang
3	Mutu Air Sungai Krueng Aceh SegmenPantepirak	-48	Cemar Berat

4	Mutu Air Sungai Krueng Aceh Segmen Jembatan Simpang Surabaya	-43	Cemar Berat
5	Mutu Air Sungai Krueng Aceh Segmen Jembatan Peunayong	-41	Cemar Berat
6	Mutu Air Sungai Krueng Aceh Segmen Gampong Jawa	-42	Cemar Berat
Total Rata2 Mutu Air di Sungai Krueng Aceh		-31	CEMAR BERAT

2. Sungai Krueng Daroy

Tabel 2.3

Tingkat Pencemaran Air Sungai Krueng Daroy Tahun 2016

No	Titik Pantau Pencemaran Air	Skor	Tingkat Pencemaran
1	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen GeuceKomplek	-15	Cemar Sedang
2	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen Lamlagang	-23	Cemar Berat
3	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen PutroePhang	-18	Cemar Sedang
4	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen Pendopo	-36	Cemar Berat
5	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen Peuniti	-25	Cemar Berat
6	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen POM	-27	Cemar Berat
Total Rata2 Mutu Air di Sungai Krueng Daroy		-36	Cemar Berat

Isu pencemaran air menjadi penting karena beragam tekanan diperoleh dari aktivitas ekonomi, sosial dan budaya yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berbagai factor yang menyebabkan penurunan kualitas air sehingga dianggap merupakan isu strategis dan menjadi bagian dari fokus Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

2.2 PENCEMARAN UDARA

Udara merupakan campuran berbagai macam komponen gas, yaitu nitrogen 78%, oksigen 21% dan karbondioksida 0,035%. Udara tergolong udara bersih adalah udara yang persentasinya masih seperti disebutkan di atas. Sumber pencemaran udara dapat dikategorikan atas sumber bergerak dan sumber tidak bergerak, yang meliputi berbagai sektor termasuk transportasi, industri, dan domestik. Kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang penting di daerah perkotaan. Kondisi emisi kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan kondisi pembakaran dalam mesin.

Pada pembakaran sempurna, emisi paling signifikan yang dihasilkan dari kendaraan bermotor berdasarkan massa adalah gas karbon dioksida (CO₂) dan uap air, namun kondisi ini jarang terjadi. Polutan yang dihasilkan kendaraan bermotor yang menggunakan BBM akan menghasilkan senyawa CO, HC, SO₂, NO₂, dan partikulat. Udara ambien yang dihirup oleh makhluk hidup dikenal dengan kualitas udara ambien merupakan hal pokok yang harus tetap dijaga kualitasnya, agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Udara yang tercemar mempunyai tingkat konsentrasi bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat lebih tinggi dari yang umumnya terdapat di lingkungan alam.

Kualitas udara merupakan isu global yang patut menjadi perhatian semua pihak, tidak terkecuali Pemerintah Kota Banda Aceh. Sebagai bagian dari penerima dampak pemanasan global, Pemko Banda Aceh melakukan pendataan dan pengukuran kualitas udara serta tingkat kebisingan. Dari hasil kegiatan tersebut terindikasi bahwa parameter tingkat kebisingan patut menjadi perhatian dalam penanganan perlindungan lingkungan hidup. Dibeberapa lokasi terindikasi parameter kualitas udara memiliki tren peningkatan sehingga patut menjadi perhatian dan penanganan sedini mungkin.

2.3 RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Tekanan yang dihadapi adalah pertumbuhan dan pengembangan kota yang memaksa terjadinya alih fungsi lahan terbuka dan lahan pertanian serta peternakan menjadi area perumahan dan bangunan pendukung aktivitas ekonomi warga. Regulasi-regulasi untuk menguatkan peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatur ruang terbuka hijau juga perlu dibuat, terutama regulasi terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang selektif, khususnya di beberapa kawasan seperti di Kecamatan Uleekareng, Banda Raya dan Jaya Baru.

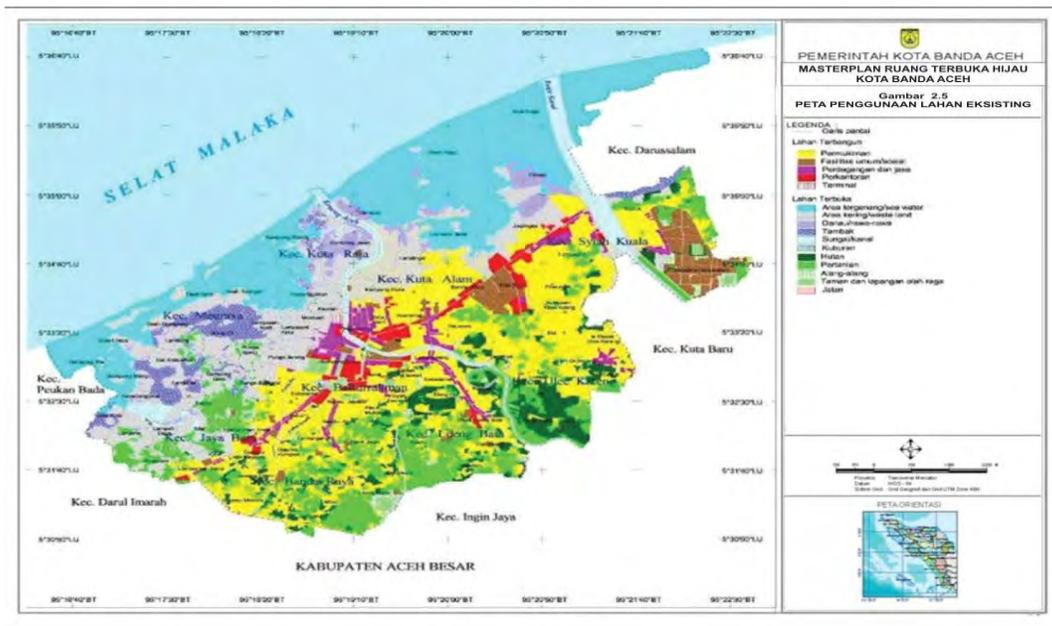
Isu ruang terbuka hijau dianggap strategis karena dalam upaya pencapaiannya tidaklah mudah mengingat tekanan dari perubahan pola ruang dan tata ruang sangatlah besar. Tekanan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan penggunaan energi, salah satunya adalah penggunaan energi listrik. Karakter tekanan yang diterima oleh fungsi lahan berasal dari perubahan fungsi dari sebelumnya kawasan terbuka berupa area pertanian, peternakan dan perkebunan, maka dalam perjalanannya beralih fungsi menjadi permukiman, pertokoan dan aktivitas penunjang ekonomi, sosial dan budaya.

Tabel 2.4 Penggunaan Energi Listrik

No	Jenis Pelanggan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bisnis	6.902.691	6.860.089	7.955.041	8.880.630	8.909.586
2	Industri	561.728	491.740	492.661	574.496	556.851
3	Publik	3.289.409	3.250.253	3.460.887	4.631.603	3.430.270
4	Perumahan	16.501.961	16.251.289	16.156.566	18.081.471	17.803.612
5	Sosial	2.643.388	3.009.349	2.818.199	3.408.934	3.245.264
6	Layanan Khusus	632.158	1.340.574	81.358	10.974	20.582
	Total	30.531.335	31.203.291	30.964.712	35.588.108	33.966.165

Sumber :Dokumen PLN (Pemakaian KWH)

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 disyaratkan bahwa luas RTH minimal sebesar 30% dari luaswilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi RTH Publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%.



Gambar2.1. Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kota Banda Aceh

BAB III
ANALISIS PRESSURE, STATE DAN RESPONSE ISU
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

3.1 KUALITAS AIR

3.1.1 Hasil Analisa *State, Pressure and Response* Pencemaran Air di Kota Banda Aceh

3.1.1.1 Analisis *State*

Penentuan status mutu air Kr. Aceh dilakukan dengan metode STORET dimana prinsip dari metode ini adalah membandingkan antara data kualitas air yang diambil secara series dan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya, guna menentukan status mutu air. Setelah ditentukan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata dari hasil analisis fisika-kimia-biologi air terhadap sampel air di 6 lokasi, kemudian dibandingkan dengan nilai persyaratan air pada Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001, maka diperoleh nilai untuk masing-masing lokasi (Segmen) dengan hasil sebagai berikut :

1. Segmen Jembatan Lambaro nilai -17 (Cemar Sedang);
2. Segmen Jembatan Pango nilai -17 (Cemar Sedang);
3. Segmen Jembatan Surabaya nilai -43 (Cemar Berat);
4. Segmen Jembatan Pante Pirak nilai -30 (Cemar Sedang);
5. Segmen Jembatan Peunayong nilai -42 (Cemar Berat); dan
6. Segmen Lampulo
7. Segmen Jembatan Keutapang
8. Segmen Fatahillah
9. Segmen Geuceu Komplek SMA 7
10. Segmen Jembatan Lamlagang
11. Segmen Jembatan Putro Phang
12. Segmen Jembatan Pendopo
13. Segmen Jembatan Peuniti
14. Segmen Jembatan POM
15. Segmen Jembatan Teuku Umar
16. Segmen Jembatan Tahu Solo
17. Segmen Jembatan SD 18
18. Segmen Jembatan RRI
19. Segmen Jembatan SD 2 Punge Jurong
20. Segmen Jembatan Lampaseh
21. Segmen Jembatan Lampaseh Ujong
22. Segmen Jembatan Soekarno Hatta
23. Segmen Jembatan Stadion Harapan Bangsa
24. Segmen Jembatan AMD

25. Segmen Jembatan Ateuk Jawo
26. Segmen Jembatan Gp. Ateuk Munjeng
27. Segmen Jembatan Gp. Ateuk Pahlawan
28. Segmen Jembatan Belakang Grand Aceh Swalayan
29. Segmen Jembatan Paksen Sp. Surabaya
30. Segmen Jembatan Lamteumen
31. Segmen Jembatan Asoe Nanggroe
32. Segmen Jembatan Kr. Tanjong – Kr. Aceh
33. Segmen Jembatan Kr. Lueng Paga – Kr. Aceh

Analisa *state and pressure* menunjukkan bahwa kondisi cemar berat tersebut berasal dari beberapa parameter air yaitu parameter BOD dan COD dimana upaya pengelolaannya fokus terhadap sumber pencemar, yaitu dari limbah domestik (rumah tangga) dan beberapa usaha kegiatan dari masyarakat.

Pemantauan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Banda Aceh dilakukan terhadap beberapa lokasi antara lain :

1. DAS Ruas Kr. Lueng Paga (Jembatan Ateuk Jawo, Jembatan Soekarno – Hatta, Jembatan Stadion Harapan Bangsa, Jembatan Jalan AMD, Jembatan Paksen Sp. Surabaya, Jembatan Belakang Grand Aceh, Jembatan Gp. Ateuk Munjeng, dan Jembatan Ateuk Pahlawan)
2. DAS Kr. Daroy (Jembatan Putroe Phang, Jembatan Peuniti, Jembatan Pendopo, Jembatan POM, Jembatan Keutapang, Jembatan Lamlagang-Seutui, Jembatan Geuceu Komplek)
3. DAS Kr. Aceh (Jembatan Peunayong, Jembatan Pante Pirak, Jembatan Sp. Surabaya, Jembatan Pango, Jembatan Lambaro, dan Lampulo)
4. DAS Kr. Doy (Jembatan Teuku Umar, Jembatan Fatahillah, Jembatan SD 18, Jembatan Tahu Solo, Jembatan Lampaseh Ujong, Jembatan Lampaseh, Jembatan Punge Jurong, dan Jembatan RRI)
5. DAS Kr. Neng (Jembatan Lamteumen dan Jembatan Asoe Nanggroe)
6. DAS lainnya (Pencampuran Kr. Lueng Paga – Kr. Aceh, Pencampuran Kr. Tanjong – Kr. Aceh, dan Air Sungai TPA Gp. Jawa))

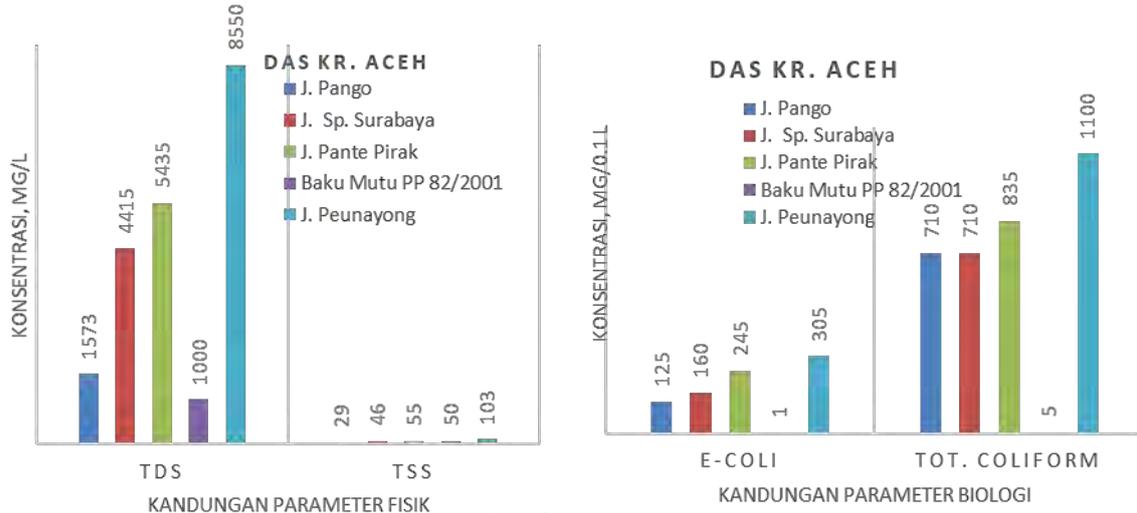
Kondisi dan profil dari kualitas air DAS di Kota Banda Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1. Kualitas air DAS Krueng Aceh.

Profil Parameter Fisik, Biologi Logam Berat dan Kimia DAS Kr. Aceh

DAS Krueng Aceh merupakan sungai terpanjang di Kota Banda Aceh. Sungai ini mengalir di sepanjang Kota Banda Aceh, melintasi wilayah pasar dan pemukiman padat penduduk. Di

sepanjang DAS dijumpai banyak aktivitas masyarakat, antara lain : industri, kegiatan pembangkit listrik, hotel, pasar, perumahan padat penduduk, dan industri rumah tangga. Hampir semua kegiatan tersebut menghasilkan limbah domestik yang dibuang melalui DAS yang ada di Kota Banda Aceh.

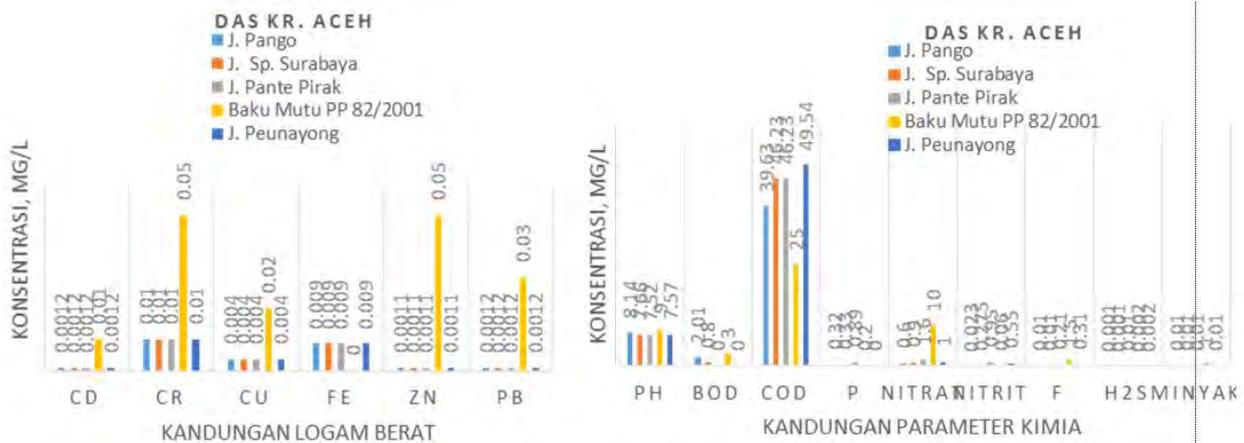


Gambar 3.1

Profil parameter fisik dan biologi DAS Kr. Aceh

Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air sungai yang ada di Kota Banda Aceh. Kualitas air DAS Krueng Aceh ini dipantau secara regular dan hasil pemantauan periode Oktober 2017. Pemantauan dilakukan pada 4 stasiun antara lain : Jembatan Pango, Jembatan Sp. Surabaya, Jembatan Pante Pirak, dan Jembatan Peunayong.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa beberapa parameter kualitas air DAS Kr. Aceh berada di atas baku mutu PP Nomor 82 tahun 2001 seperti TSS, TDS, nitrit, dan Phospor. Hal ini disebabkan air limbah domestik kegiatan di sekitar langsung dibuang ke dalam DAS Kr. Aceh. Penurunan kualitas air semakin ke arah hilir semakin besar, dimana terlihat terjadinya peningkatan parameter seperti TDS, TSS, dan nitrit pada bagian hilir DAS Kr. Aceh (Jembatan Pantee Pirak dan Jembatan Peunayong).



Gambar 3.2

Profil Kandungan Logam Berat dan Parameter Kimia DAS Kr. Aceh

Disepanjang DAS dijumpai banyak aktivitas masyarakat, antara lain : industri, kegiatan pembangkit listrik, hotel, pasar, perumahan padat penduduk, dan industri rumah tangga. Hampir semua kegiatan tersebut menghasilkan limbah domestik yang dibuang melalui DAS yang ada di Kota Banda Aceh. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air sungai yang ada di Kota Banda Aceh.

Profil Temperatur dan pH pada Air Sungai Kr. Aceh

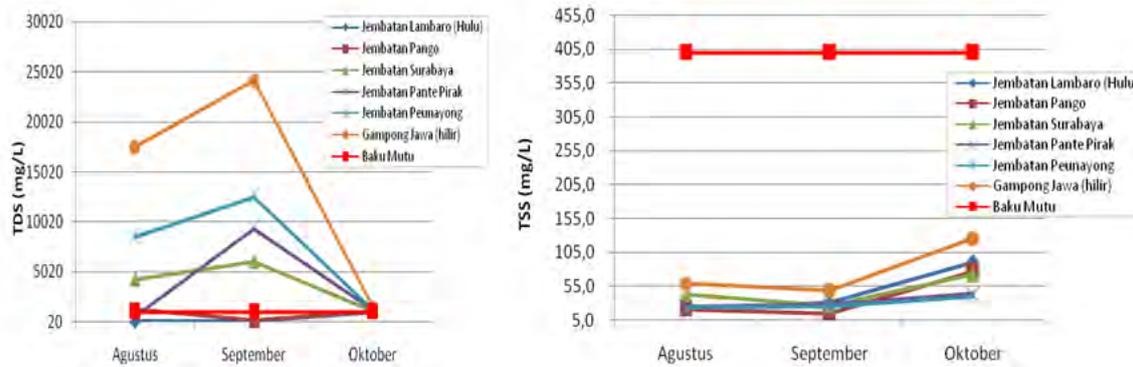
Temperatur dan pH mempengaruhi penerimaan masyarakat akan air dan dapat mempengaruhi reaksi kimia dalam pengelolaannya. Banyak tumbuhan dan hewan air yang sensitif terhadap pH yang bervariasi.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa temperatur air Kr. Aceh tidak jauh berbeda dan nilainya (25,6 – 31,50 °C) dan masih dalam katagori normal untuk air permukaan. Profil pH air Sungai Kr. Aceh menunjukkan bahwa pH dalam katagori netral dengan kisaran 7,23 – 8,01. Secara umum, pH masih berada dalam keadaan normal sehingga tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kehidupan tumbuhan dan biota air di sungai Kr. Aceh.

Profil TDS dan TSS pada Air Sungai Kr. Aceh

Pengukuran padatan tersuspensi (TSS) dilakukan untuk mengetahui besarnya material sediment ringan yang tersuspensi akibat pencucian tanah. Sedangkan muatan terendapkan adalah material sedimen yang lebih berat yang mengendap di sepanjang dasar aliran sungai. Kedua parameter secara keseluruhan dihitung sebagai total sedimen. Sementara padatan terlarut (TDS) merupakan ukuran dari jumlah material yang larut dalam air yang mewakili jumlah ion di dalam air. Air dengan TDS tinggi seringkali memiliki rasa yang buruk dan/atau kesadahan air tinggi, dan dapat mengakibatkan efek pencahayaan. Perubahan dalam konsentrasi TDS dapat berbahaya karena densitas air menentukan aliran

air masuk dan keluar dari sel-sel organisme. Namun, jika konsentrasi TDS terlalu tinggi atau terlalu rendah, pertumbuhan kehidupan banyak kehidupan air dapat dibatasi, dan kematian dapat terjadi. TDS dan TSS dalam konsentrasi tinggi juga dapat mengurangi kejernihan air, memberikan kontribusi pada penurunan fotosintesis, gabungan dengan senyawa beracun dan logam berat, dan menyebabkan peningkatan suhu air.



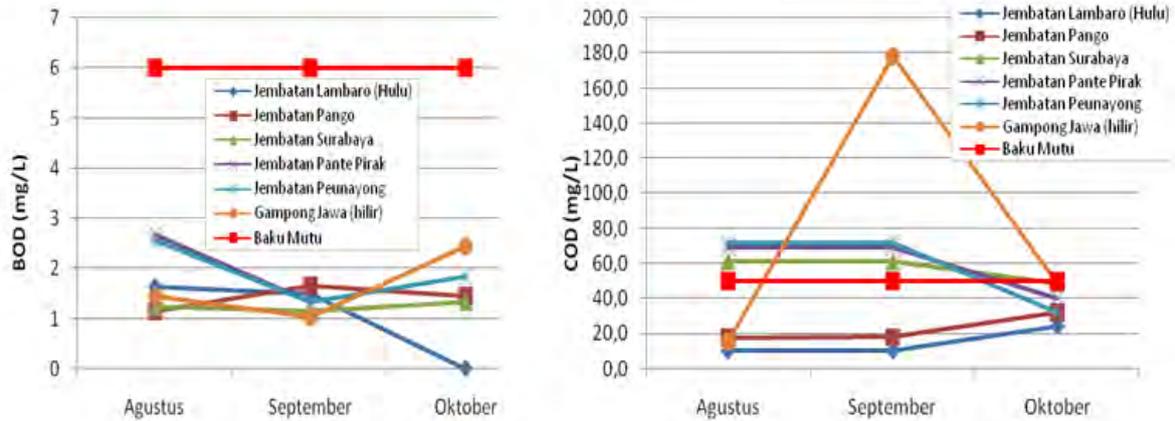
Gambar 3.3

Profil TDS dan TSS air Sungai Kr. Aceh

Profil TDS air Sungai Kr. Aceh diperlihatkan pada Gambar 3.3 menunjukkan bahwa TDS dengan kisaran 83,35 – 24.150 mg/L. Secara umum, TDS berada di atas baku mutu (baku mutu 1000 mg/L) dan akan memberikan dampak terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan air di Kr. Aceh, kecuali di Segmen Lambaro pada bulan Agustus dan September yang nilainya di bawah baku mutu lingkungan. TSS padatan tersuspensi pada air Kr. Aceh di semua segmen pengukuran ditemukan rendah yang berkisar antara 14,8 – 125,8 mg/L dengan nilai rata-rata 45,20 mg/L. Konsentrasi ini masih di bawah baku mutu (baku mutu 400 mg/L).

Profil BOD dan COD pada Air Sungai Kr. Aceh

BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan buangan dalam air. Jika konsumsi oksigen tinggi yang ditunjukkan dengan semakin kecilnya sisa oksigen terlarut, maka berarti kandungan bahan-bahan buangan yang membutuhkan oksigen tinggi (Fardiaz, 1992). Sementara COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Hasil analisa air menunjukkan bahwa di semua lokasi Sungai Kr. Aceh, nilai BOD pada air masih rendah dengan kisaran antara 1,03 – 2,67 mg/L dengan nilai rata-rata 1,61 mg/L.



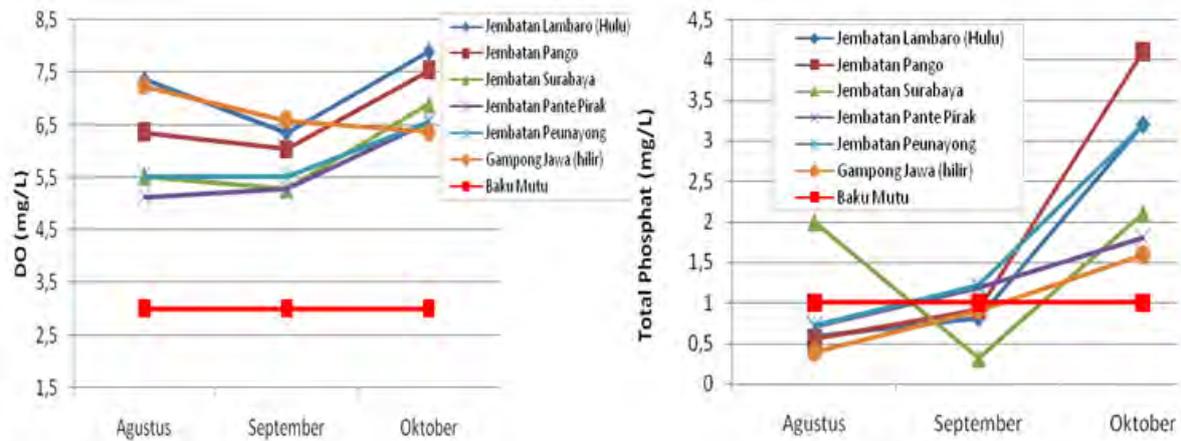
Gambar 3.4

Profil BOD dan COD air Sungai Kr. Aceh

Nilai BOD ditemukan berada di bawah baku mutu pada semua Segmen, sedangkan COD nilainya berkisar 10,3 – 178,4 mg/L dengan nilai rata-rata 49,89 mg/L. Konsentrasinya COD yang tinggi dan berada di atas baku mutu ditemukan pada beberapa segmen, seperti: Jembatan Simpang Surabaya, Jembatan Pante Pirak, dan Jembatan Peunayong pada pengukuran bulan Agustus dan September. Berdasarkan hasil ini diperoleh gambaran bahwa air Sungai Kr. Aceh telah tercemar dengan bahan organik, dibuktikan dengan tingginya nilai COD yang diukur, khususnya pada Segmen Jembatan Surabaya, Jembatan Pante Pirak, dan Jembatan Peunayong.

Profil DO dan Phosphat pada Air Sungai Kr. Aceh

Oksigen terlarut adalah suatu hal yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup dalam air tergantung dari kemampuan air untuk mempertahankan konsentrasi oksigen minimal yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Oksigen terlarut dalam air dapat berasal dari hasil proses fotosintesis tumbuhan air, dimana jumlahnya tidak tetap tergantung dari jumlah tumbuhannya dan dari atmosfer (udara) yang masuk ke dalam air dengan kecepatan terbatas. Konsentrasi oksigen terlarut dalam keadaan jenuh bervariasi tergantung dari suhu dan tekanan atmosfer. Semakin tinggi suhu air, semakin rendah tingkat kejenuhan. Hasil pengukuran diperoleh bahwa DO air sungai Kr. Aceh tinggi dan berada dalam kondisi normal perairan.



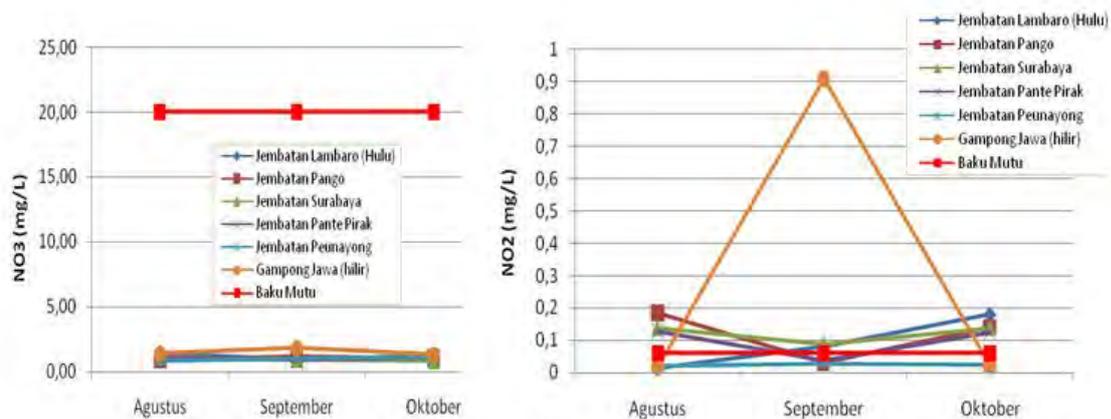
Gambar 3.5
Profil DO dan Total Phosphat air Sungai Kr. Aceh

Fosfat tidak memiliki daya racun, bahkan sebaliknya merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan makhluk hidup, namun keberadaan fosfat yang berlebihan pada badan air menyebabkan suatu fenomena yang disebut *eutrofikasi* (pengkayaan nutrisi). Sejatinya, eutrofikasi merupakan sebuah proses alamiah dimana danau mengalami penuaan secara bertahap dan menjadi lebih produktif bagi tumbuhnya biomassa. Diperlukan proses ribuan tahun untuk sampai pada kondisi eutrofik. Proses alamiah ini, oleh manusia dengan segala aktivitas modernnya, secara tidak disadari dipercepat menjadi dalam hitungan beberapa dekade atau bahkan beberapa tahun saja. Air dikatakan eutrofik jika konsentrasi total phosphorus (TP) dalam air berada dalam rentang 35-100 µg/L. Kondisi eutrofik sangat memungkinkan alga, tumbuhan air berukuran mikro untuk tumbuh berkembang biak dengan pesat. Hal ini bisa dikenali dengan warna air yang menjadi kehijauan, berbau tak sedap, dan kekeruhannya yang menjadi semakin meningkat. Banyaknya eceng gondok yang bertebaran di rawa-rawa dan danau-danau juga disebabkan fosfat yang sangat berlebihan ini. Tanaman dapat menghabiskan oksigen dalam sungai pada malam hari, dan dalam keadaan sedang mencerna (*digest*) pada siang hari pancaran sinar matahari ke dalam air akan berkurang, sehingga proses fotosintesis yang dapat menghasilkan oksigen juga berkurang. Makhluk hidup air seperti ikan dan spesies lainnya tidak bisa tumbuh dengan baik sehingga akhirnya mati. Hilangnya ikan dan hewan lainnya dalam mata rantai ekosistem air menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem air.

Permasalahan lainnya, *cyanobacteria* (*blue-green algae*) diketahui mengandung toksin sehingga membawa resiko kesehatan bagi manusia dan hewan. *Alga bloom* juga menyebabkan hilangnya nilai konservasi, estetika, rekreasi, dan pariwisata. Total phosphat pada air Kr. Aceh di semua segmen pengukuran ditemukan rendah yang berkisar antara 0,31 - 4,10 mg/L dengan nilai rata-rata 1,46 mg/L. Konsentrasi pada bulan Agustus dan September masih berada di bawah baku mutu, namun pada bulan Oktober, nilai phosphat berada di atas baku mutu pada semua segmen. Kondisi ini rentang terjadinya eutrofik.

Profil Nitrat (NO_3N) dan nitrit (NO_2N) pada Air Sungai Kr. Aceh

Nitrat dan Nitrit merupakan bagian dari siklus nitrogen berupa ion-ion anorganik alami. Aktifitas mikroba dalam air dapat menguraikan sampah yang mengandung nitrogen organik menjadi ammonia, kemudian dioksidasikan menjadi nitrit dan nitrat. Oleh karena nitrit dapat dengan mudah dioksidasikan menjadi nitrat dan senyawa ini adalah senyawa yang paling sering ditemukan di dalam air bawah tanah maupun air yang terdapat di permukaan.



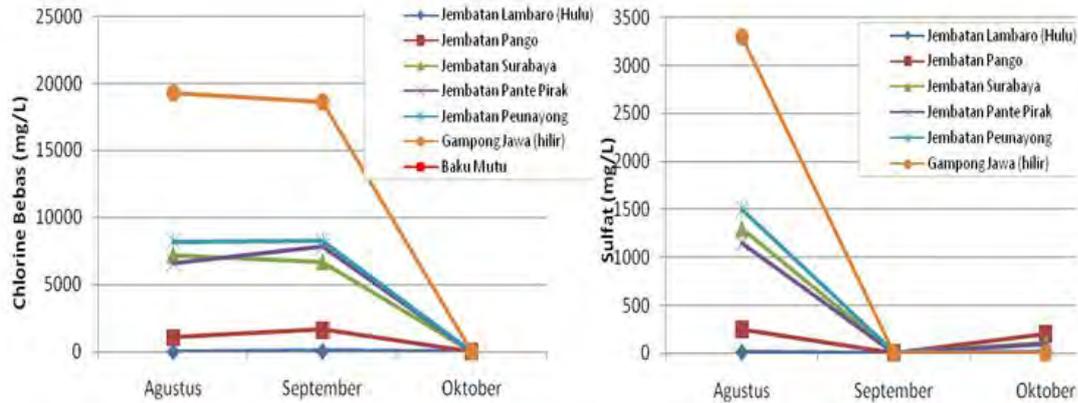
Gambar 3.6
Profil Nitrat dan Nitrit air Sungai Kr. Aceh

Pencemaran oleh pupuk nitrogen, termasuk ammonia anhidrat seperti juga sampah organik hewan dan manusia, dapat meningkatkan kadar nitrat di dalam air. Hasil pengukuran (Gambar 3.6), diperoleh bahwa konsentrasi nitrat air sungai Kr. Aceh rendah dan nilainya berada di bawah baku mutu lingkungan, sementara nitrit konsentrasinya tinggi dan nilainya berada di atas baku mutu lingkungan, kecuali pada segmen Jembatan Peunayong.

Berdasarkan hasil ini diperoleh gambaran bahwa air Kr. Aceh telah tercemar, terbukti dengan tingginya nilai nitrit yang diukur. Konsentrasi Nitrat pada air Kr. Aceh pada semua titik sampling (segmen), ditemukan rendah yang berkisar antara 0,80 – 1,80 mg/L dengan nilai rata-rata 1,11 mg/L. Konsentrasi ini masih berada di bawah baku mutu. Sementara itu, Konsentrasi Nitrit air Kr. Aceh pada semua segmen pengukuran ditemukan rendah yang berkisar antara 0,014 – 0,91 mg/L dengan nilai rata-rata 0,13 mg/L. Konsentrasi Nitrit ditemukan tinggi pada Segmen Jembatan Pango, Jembatan Surabaya, Jembatan Pante Pirak, dan Segmen Gampong Jawa.

Profil Klorida dan Sulfat pada Air Sungai Kr. Aceh

Klorida adalah suatu mayor anion anorganik yang terdapat diperairan alam. Pada umumnya klorida mudah larut di dalam air dan menimbulkan rasa asin. Sumber klorida di dalam air juga dapat berasal dari pelapukan batuan dan pencucian tanah, limbah industri dan limbah domestik. Hasil pengukuran (Gambar 1.28), diperoleh bahwa klorida dalam air sungai Kr. Aceh berkisar antara 1,3 – 3.300 mg/L dengan nilai rata-rata 443,13 mg/L.



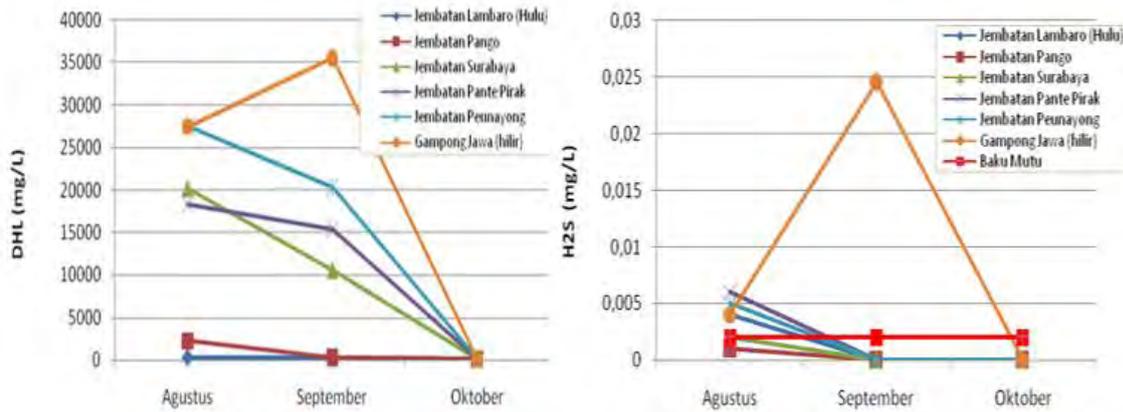
Gambar 3.7
Profil Klorida dan Sulfat air Sungai Kr. Aceh

Sulfat ($\text{SO}_4^{=}$) merupakan suatu bentuk oksidasi belerang yang mempunyai sifat stabil. Senyawa tersebut dapat dihasilkan dari proses oksidasi sulfur yang tereduksi oleh bakteri. Ion sulfat sangat mudah larut dalam air.

Sulfat dapat bersumber dari pencucian batuan yang mengandung sulfat seperti gipsum ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), hasil oksidasi zat organik, limbah industri dan air hujan yang berasal dari udara yang tercemar oleh hasil pembakaran bahan bakar fosil. Hasil pengukuran (Gambar 3.7), diperoleh bahwa Sulfat dalam air sungai Kr. Aceh berkisar antara 0 – 0,0246 mg/L dengan nilai rata-rata 0,003 mg/L.

Profil DHL dan H_2S pada Air Sungai Kr. Aceh

Daya Hantar Listrik (DHL) adalah sifat menghantarkan listrik dari air. Daya Hantar Listrik merupakan parameter yang menunjukkan kandungan ion dalam air dalam menghantarkan listrik. DHL bukan merupakan parameter yang relevan untuk mengukur polusi, akan tetapi dapat digunakan sebagai parameter untuk mengetahui tingkat keragaman dalam air (Indriatmoko dan Myra, 2005). Air yang banyak mengandung garam akan mempunyai DHL tinggi. Hasil pengukuran, diperoleh bahwa DHL dalam air Kr. Aceh berkisar antara 93,4 – 35.600 $\mu\text{mhos/cm}$ dengan nilai rata-rata 9.946 $\mu\text{mhos/cm}$.

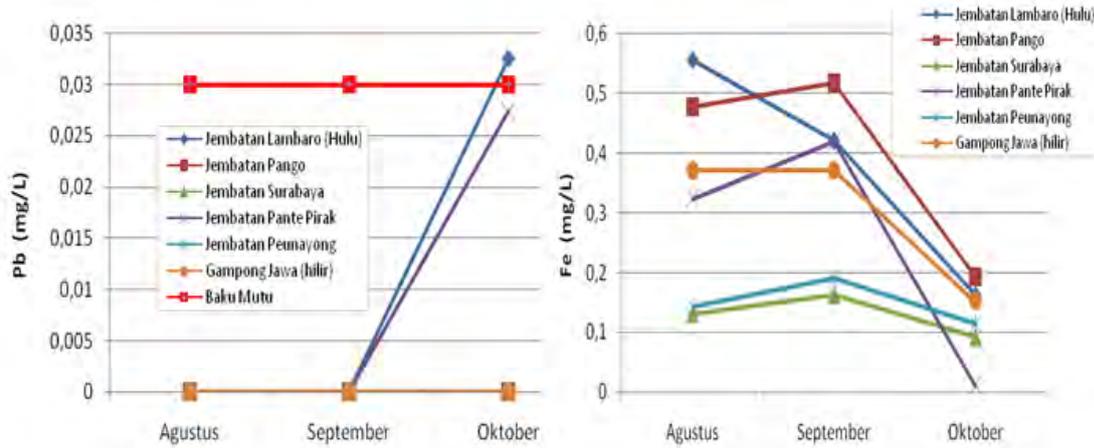


Gambar 3.8
 Profil DHL dan H₂S air Sungai Kr. Aceh

Gas H₂S terbentuk akibat adanya penguraian zat-zat organik oleh bakteri. Keberadaan bakteri Coliform di dalam air diasosiasikan dengan organisme penghasil hidrogen sulfide/H₂S. Nilai kandungan H₂S air Kr. Aceh berkisar antara 0 – 0,0246 mg/L dengan nilai rata-rata 0,003 mg/L dan rata-rata pada bulan Agustus berada di atas baku mutu yang ditetapkan pada setiap Segmen. Nilai parameter H₂S dijumpai tertinggi pada Segmen Jembatan Pante Pirak (0,006 mg/L), kemudian nilai ini menurun hingga tidak terdeteksi adanya gas H₂S di setiap segmen pada bulan September dan Oktober.

Profil Ion Pb dan Ion Fe pada Air Sungai Kr. Aceh

Unsur besi di dalam air terdapat dalam 2 (dua) bentuk yaitu Fe²⁺ dan Fe³⁺. Besi juga merupakan unsur yang banyak terdapat di perairan. Pada kondisi tereduksi di dalam air, maka Fe²⁺ banyak didapat, tetapi pada kondisi teroksidasi maka Fe³⁺ akan mengendap. Warna endapan Fe³⁺ adalah merah coklat dan hal ini dapat dilihat pada penampungan air atau pipa-pipa penyalur. Kelarutan besi akan meningkat sehubungan dengan menurunnya pH. Pelapukan beberapa jenis batuan antara lain pyrite (FeS₂) dan hematite (Fe₂O₃) merupakan sumber unsur di perairan. Sumber besi yang lain pada suatu perairan berasal dari limbah industri dan pembakaran batubara.



Gambar 3.9
Profil ion Pb dan ion Fe pada air Sungai Kr. Aceh

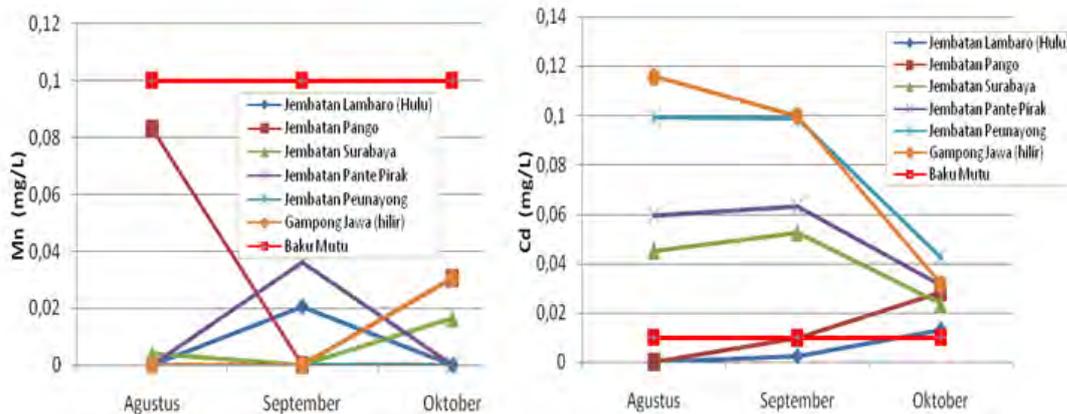
Hasil pengukuran (Gambar 3.9), diperoleh bahwa nilai kandungan ion Fe di air sungai Kr. Aceh berkisar antara 0,0114 – 0,5556 mg/L dengan nilai rata-rata 0,27 mg/L, sementara ion Pb ditemui dalam air sungai Kr. Aceh berkisar antara 0,00 – 0,0325 mg/L dengan nilai rata-rata 0,003 mg/L. Hasil ini menunjukkan bahwa kandungan ke dua ion logam ini berada di bawah baku mutu di setiap Segmen.

Profil Ion Cd dan Ion Mn pada Air Sungai Kr. Aceh

Logam Cd bersifat racun dan merugikan bagi semua organisme hidup, bahkan juga berbahaya untuk manusia. Kelarutan ion Cd dalam konsentrasi tertentu dapat membunuh biota perairan. Biota-biota yang tergolong udang-udangan (crustacea) akan mengalami kematian dalam selang waktu 24 - 504 jam bila terlarut logam atau persenyawaan Cd sebesar 0.005-0.15 ppm. Untuk biota-biota yang tergolong ke dalam serangga (insecta) akan mengalami kematian dalam selang waktu 24-672 jam bila terlarut logam Cd atau persenyawaan Cd sebesar 0.003-18.0 ppm. Sedangkan untuk biota-biota perairan yang tergolong ke dalam oligochaeta akan mengalami kematian dalam selang waktu 24-96 jam bila terlarut logam Cd atau persenyawaannya sebesar 0.0028-4.6 ppm (Palar, 1994). Berdasarkan hasil pemantauan (Gambar 3.10), ditemukan kandungan ion Cd pada Sungai Kr. Aceh sekitar 0,00 – 0,1158 mg/L dengan nilai rata-rata 0,0454 mg/L. Kandungan ion Cd pada air Sungai Kr. Aceh berada di atas baku mutu, terutama pada Segmen Jembatan Surabaya, Pante Pirak, Peunayong, dan Gampong Jawa.

Mangan (Mn) adalah logam berwarna abu – abu keperakan yang merupakan unsur pertama logam golongan VIIB, dengan berat atom 54.94 g/mol, nomor atom 25, berat jenis 7.43 g/cm³, dan mempunyai valensi 2, 4, dan 7 (selain 1, 3, 5, dan 6). Mangan digunakan dalam campuran baja, industri pigmen, las, pupuk, pestisida, keramik, elektronik, dan *alloy* (campuran beberapa logam dan bukan logam, terutama karbon), industri baterai, cat, dan zat tambahan pada makanan. Di alam jarang sekali berada dalam keadaan unsur. Umumnya berada dalam keadaan senyawa dengan berbagai macam valensi. Di dalam hubungannya dengan kualitas air yang sering dijumpai adalah senyawa mangan dengan valensi

2, valensi 4, dan valensi 6. Di dalam sistem air alami dan juga di dalam sistem pengolahan air, senyawa mangan dan besi berubah-ubah tergantung derajat keasaman (pH) air. Perubahan senyawa besi dan mangan di alam berdasarkan kondisi pH secara garis besar memperlihatkan bahwa di dalam sistem air alami pada kondisi reduksi, mangan dan juga besi pada umumnya mempunyai valensi dua yang larut dalam air.

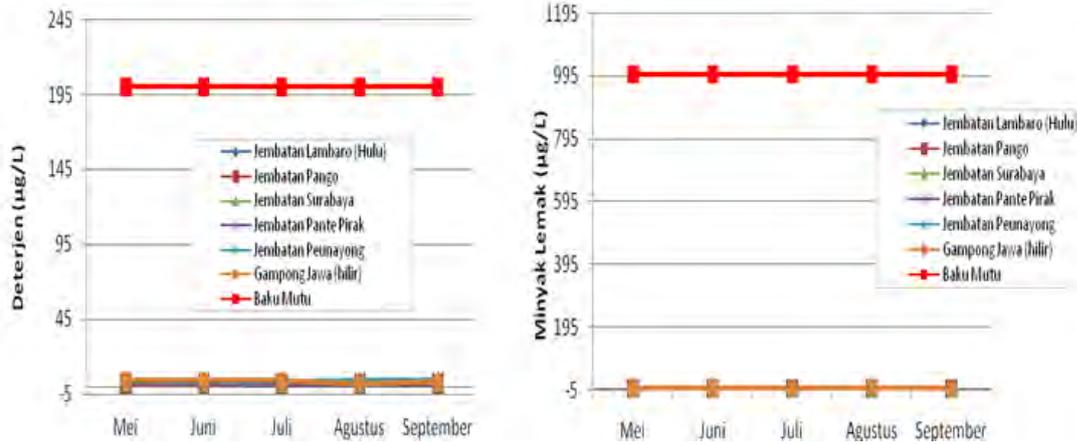


Gambar 3.10
Profil ion Mn dan ion Cd pada air Kr. Aceh

Profil Minyak dan Lemak pada Air Sungai Kr. Aceh

Oleh karena itu di dalam sistem pengolahan air, senyawa mangan dan besi valensi dua tersebut dengan berbagai cara dioksidasi menjadi senyawa yang memiliki valensi yang lebih tinggi yang tidak larut dalam air sehingga dapat dengan mudah dipisahkan secara fisik. Mangan di dalam senyawa $MnCO_3$, $Mn(OH)_2$ mempunyai valensi dua, zat tersebut relatif sulit larut dalam air, tetapi untuk senyawa Mn seperti garam $MnCl_2$, $MnSO_4$, $Mn(NO_3)_2$ mempunyai kelarutan yang besar di dalam air. Berdasarkan hasil pemantauan, ditemukan kandungan ion Mn pada Sungai Kr. Aceh sekitar 0,00 – 0,083 mg/L dengan nilai rata-rata 0,01 mg/L. Kandungan ion Mn pada air Sungai Kr. Aceh berada di bawah baku mutu untuk semua segmen.

Minyak lemak dapat ditemukan mengapung di atas permukaan air meskipun sebagian terdapat di bawah permukaan air. Minyak lemak merupakan senyawa ester dari turunan alkohol yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak sukar diuraikan oleh bakteri, namun dapat dihidrolisa oleh alkali sehingga membentuk senyawa sabun yang mudah larut. Keberadaan minyak lemak di atas permukaan air dapat merintangi proses biologi dalam air sehingga tidak terjadi fotosintesa. Berdasarkan hasil pemantauan, kandungan minyak lemak pada Sungai Kr. Aceh tidak dijumpai.

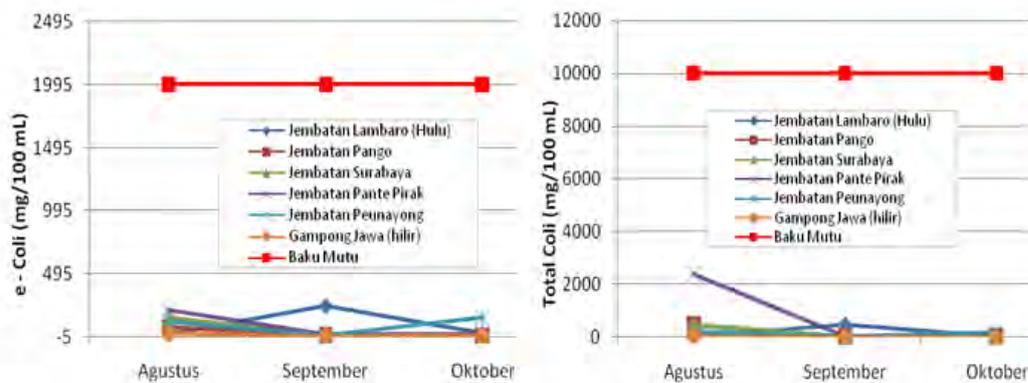


Gambar 3.11
 Profil kandungan deterjen dan minyak dan lemak pada air Sungai Kr. Aceh

Profil Kandungan Total Coliform dan e-coli pada Air Sungai Kr. Aceh

Hampir di setiap badan air terdapat bakteri, ada yang bersifat bermanfaat dan ada yang berbahaya bagi manusia (pathogen). Apabila tinja seseorang yang sakit mengandung bakteri pathogen dan masuk ke dalam badan air, maka bakteri tersebut akan hidup selama beberapa hari di dalam air sebelum mati.

Apabila air tersebut diminum, maka bakteri pathogen yang masih hidup akan masuk ke tubuh manusia, berkembang biak, dan menyebabkan timbulnya penyakit. Hasil pengukuran (Gambar 3.12), diperoleh bahwa e-Coli pada air sungai Kr. Aceh berada di bawah baku mutu dan ditemukan rata-rata 60,61 MPN/100 mL dengan nilai antara 4 – 240 MPN/100 mL. Sementara itu, total *E. coli* (Gambar 1.31) yang ditemukan pada air sungai Kr. Aceh antara 7 – 2400 MPN/100 mL dengan rata-rata 249,83 MPN/100 mL.



Gambar 3.12
 Profil kandungan e-coli dan total coliform pada air Sungai Kr. Aceh

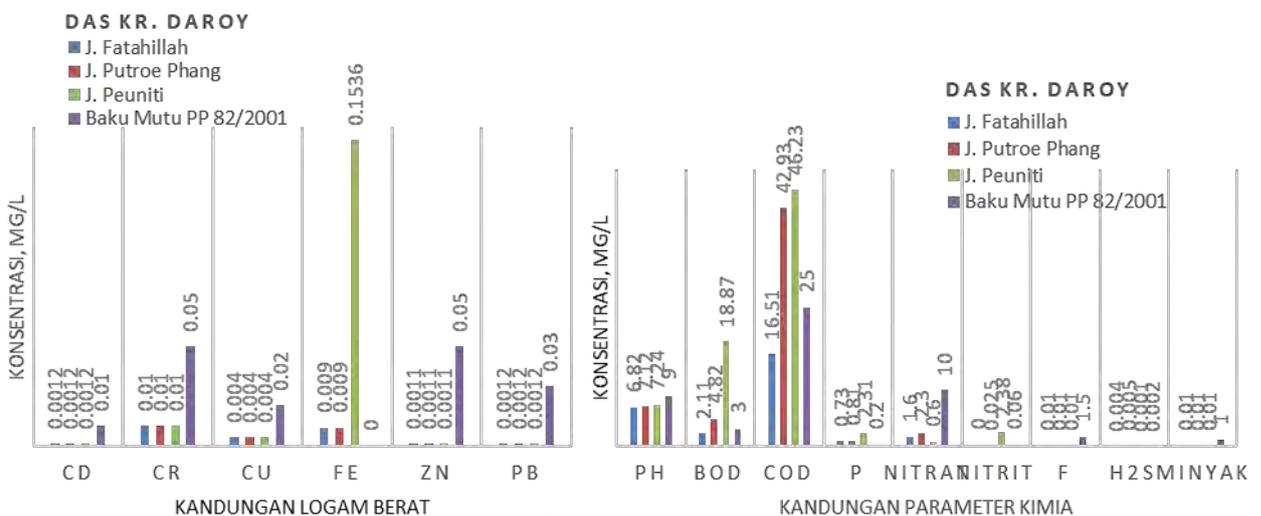
Penentuan status mutu air Kr. Aceh dilakukan dengan metode STORET dimana prinsip dari metode ini adalah membandingkan antara data kualitas air yang diambil secara series dan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya, guna menentukan status mutu air. Setelah ditentukan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata dari hasil analisis fisika-kimia-biologi air terhadap sampel air di 6 lokasi, kemudian dibandingkan dengan nilai persyaratan air pada Peraturan Pemerintah RI No.82 tahun 2001, maka diperoleh nilai untuk masing-masing lokasi (Segmen) dengan hasil sebagai berikut :

1. Segmen Jembatan Lambaro nilai -17 (Cemar Sedang);
2. Segmen Jembatan Pango nilai -17 (Cemar Sedang);
3. Segmen Jembatan Surabaya nilai -43 (Cemar Berat);
4. Segmen Jembatan Pante Pirak nilai -30 (Cemar Sedang);
5. Segmen Jembatan Peunayong nilai -42 (Cemar Berat); dan
6. Segmen Gampong Jawa nilai -36 (Cemar Berat).

2. Kualitas Air DAS Krueng Daroy,

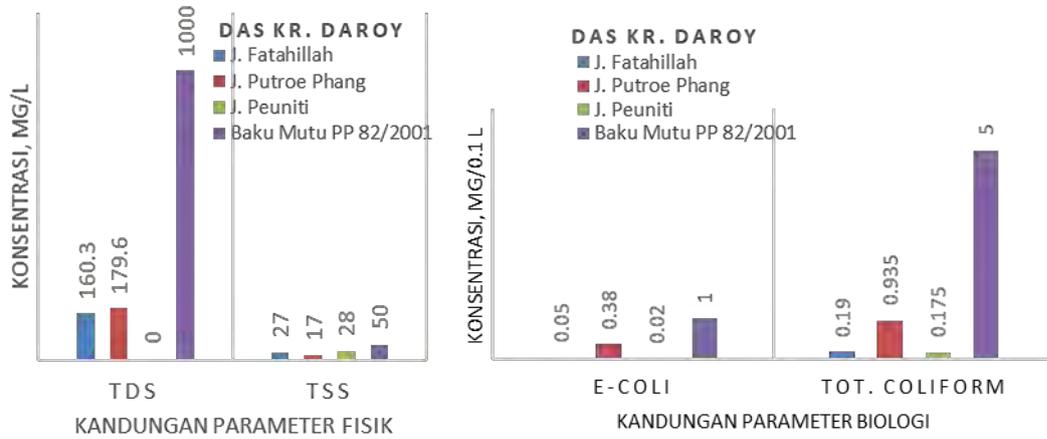
Profil Parameter Fisik, Biologi Logam Berat dan Kimia DAS Kr. Daroy Tahun 2017

DAS Kr. Daroy merupakan sungai yang mengalir dari Gunung Mata Ie, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar membelah Kota Banda Aceh dan bermuara di DAS Kr. Aceh pada ruas Gampong Peuniti. DAS ini memiliki panjang 6,3 km, Lebar Permukaan 17 m, dan kedalaman 2,2 m dengan debit rata-rata 111 m³/detik. Pemantauan ini dilakukan pada 3 Stasiun Pemantau di lokasi-lokasi yang terpilih tersebut adalah Jembatan Fatahillah, Jembatan Putroe Phang, dan Jembatan Peuniti. Di sepanjang DAS ini dijumpai banyak aktivitas masyarakat, antara lain : industri tahu, aktivitas pencucian kendaraan, perumahan padat penduduk, dan industri rumah tangga. Hampir semua kegiatan tersebut menghasilkan limbah domestik yang langsung dibuang melalui DAS ini.



Gambar 3.13
 Profil Kandungan Logam Berat dan Parameter Kimia DAS Kr. Daroy

Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air sungai yang ada di Kota Banda Aceh.

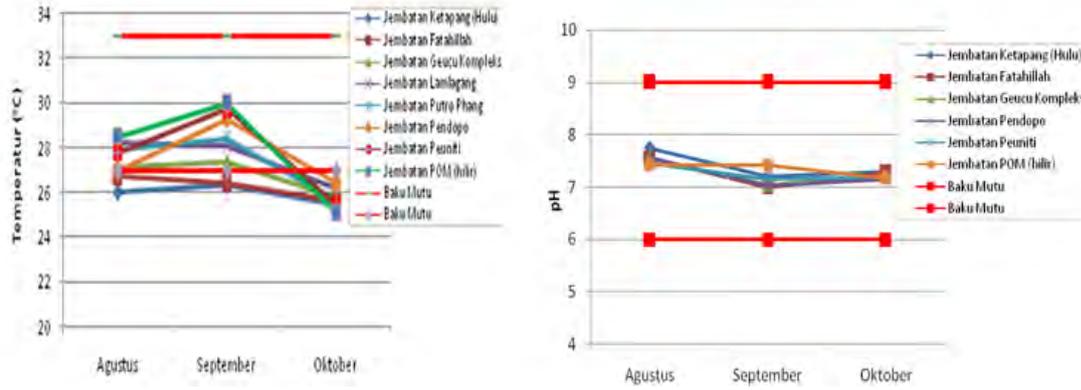


Gambar 3.14
Profil Parameter Fisik dan Biologi DAS Kr. Daroy

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa beberapa parameter kualitas air DAS Kr. Daroy berada di atas baku mutu PP Nomor 82 tahun 2001 seperti Nitrit, COD, BOD, nitrit, dan Phospor. Hal ini disebabkan air limbah domestic kegiatan di sekitar langsung dibuang ke dalam DAS Kr. Daroy.

Profil pH dan Temperatur pada Air Sungai Kr. Daroy

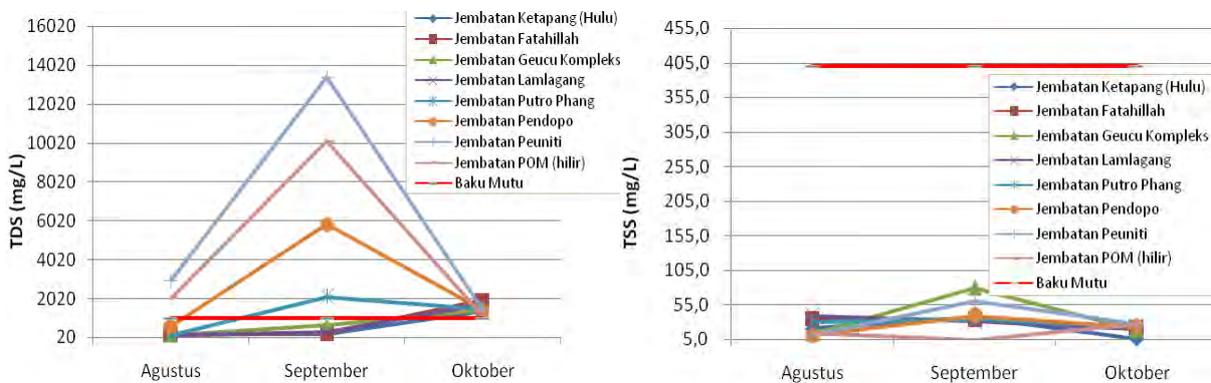
Temperatur dan pH mempengaruhi penerimaan masyarakat akan air dan dapat mempengaruhi reaksi kimia dalam pengelolaannya. Banyak tumbuhan dan hewan air yang sensitif terhadap pH yang bervariasi. Gambar 3.15 memperlihatkan profil temperatur air Sungai Kr. Daroy. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa temperatur air Kr. Daroy tidak jauh berbeda dan nilainya (25,1 – 30,0 °C) dan masih dalam katagori normal untuk air permukaan. Profil pH air Sungai Kr. Daroy diperlihatkan pada Gambar 1.36 menunjukkan bahwa pH dalam katagori netral dengan kisaran 6,99 – 7,75. Secara umum, pH masih berada dalam keadaan normal dan tidak akan memberikan dampak terhadap kehidupan tumbuhan dan biota air di sungai Kr. Daroy.



Gambar 3.15
 Profil temperatur dan pH air Sungai Kr. Daroy

Profil TDS dan TSS pada Air Sungai Kr. Daroy

Pengukuran padatan tersuspensi (TSS) dilakukan untuk mengetahui besarnya material sediment ringan yang tersuspensi akibat pencucian tanah. Sedangkan muatan terendapkan adalah material sedimen yang lebih berat yang mengendap di sepanjang dasar aliran sungai. Kedua parameter secara keseluruhan dihitung sebagai total sedimen. Sementara padatan terlarut (TDS) merupakan ukuran dari jumlah material yang larut dalam air yang mewakili jumlah ion di dalam air. Air dengan TDS tinggi seringkali memiliki rasa yang buruk dan/atau kesadahan air tinggi, dan dapat mengakibatkan efek pencahayaan. Perubahan dalam konsentrasi TDS dapat berbahaya karena densitas air menentukan aliran air masuk dan keluar dari sel-sel organisme. Namun, jika konsentrasi TDS terlalu tinggi atau terlalu rendah, pertumbuhan kehidupan banyak air dapat dibatasi, dan kematian dapat terjadi. TDS dan TSS dalam konsentrasi tinggi juga dapat mengurangi kejernihan air, memberikan kontribusi pada penurunan fotosintesis, gabungan dengan senyawa beracun dan logam berat, dan menyebabkan peningkatan suhu air.

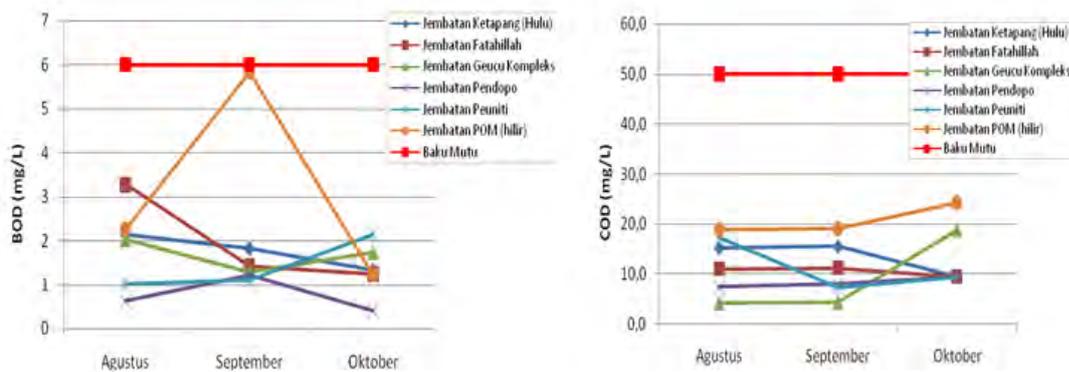


Gambar 3.16
 Profil TDS dan TSS air Sungai Kr. Daroy

Profil TDS air Sungai Kr. Daroy diperlihatkan pada Gambar 3.16 menunjukkan bahwa TDS dengan kisaran 125,9 – 13.400 mg/L. Secara umum, TDS berada di atas baku mutu (baku mutu 1000 mg/L) dan akan memberikan dampak terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan air di Kr. Daroy, kecuali di Segmen Keutapang, Fatahillah, dan Geuceu Kompleks pada bulan Agustus dan September yang nilainya di bawah baku mutu lingkungan. Jumlah TSS padatan tersuspensi pada air Kr. Daroy di semua segmen pengukuran ditemukan rendah yang berkisar antara 3,5 – 79,3 mg/L dengan nilai rata-rata 27,47 mg/L. Konsentrasi ini masih di bawah baku mutu (baku mutu 400 mg/L).

Profil BOD dan COD pada Air Sungai Kr. Daroy

BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan buangan dalam air. Jika konsumsi oksigen tinggi yang ditunjukkan dengan semakin kecilnya sisa oksigen terlarut, maka berarti kandungan bahan-bahan buangan yang membutuhkan oksigen tinggi (Fardiaz, 1992). Sementara COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air.



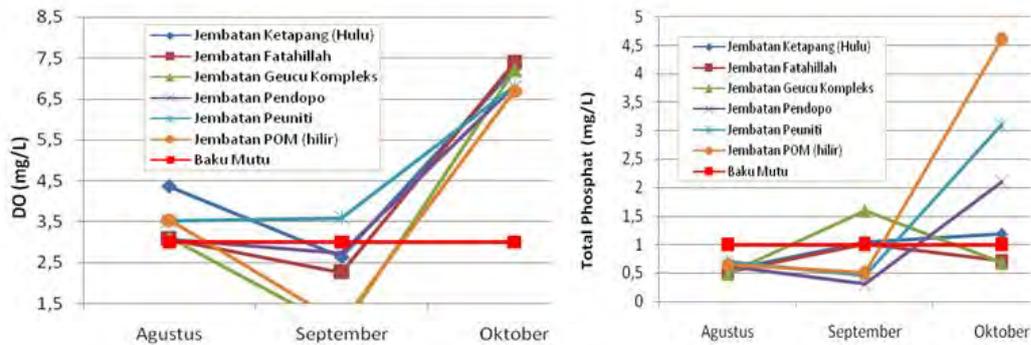
Gambar 3.17
Profil BOD dan COD DAS Kr. Daroy

Hasil analisa air menunjukkan bahwa pada semua lokasi Sungai Kr. Daroy, nilai BOD air masih tergolong rendah dengan kisaran antara 0,41 – 5,84 mg/L dengan nilai rata-rata 1,76 mg/L. Nilai BOD ditemukan berada di bawah baku mutu pada semua segmen, sedangkan nilai COD berkisar 3,60 – 24,20 mg/L dengan nilai rata-rata 11,51 mg/L yang konsentrasinya ditemukan juga berada di bawah baku mutu pada setiap segmen.

Profil DO dan Total Phosphat pada Air Sungai Kr. Daroy

Oksigen terlarut adalah suatu hal yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup dalam air tergantung dari kemampuan air untuk mempertahankan konsentrasi oksigen minimal yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Oksigen terlarut dalam air dapat berasal dari proses fotosintesis tanaman air, dimana jumlahnya berubah-ubah tergantung dari jumlah tanamannya dan dari atmosfer (udara) yang

masuk ke dalam air dengan kecepatan terbatas. Konsentrasi oksigen terlarut dalam keadaan jenuh bervariasi tergantung dari suhu dan tekanan atmosfer. Semakin tinggi suhu air, semakin rendah tingkat kejenuhannya. Hasil pengukuran (Gambar 1.39), diperoleh bahwa DO air sungai Kr. Daroy umumnya rendah pada bulan September, namun meningkat pada bulan Oktober dan nilainya berada di atas baku mutu nilai normal perairan.



Gambar 3.18
Profil DO dan Phosphat air Sungai Kr. Daroy

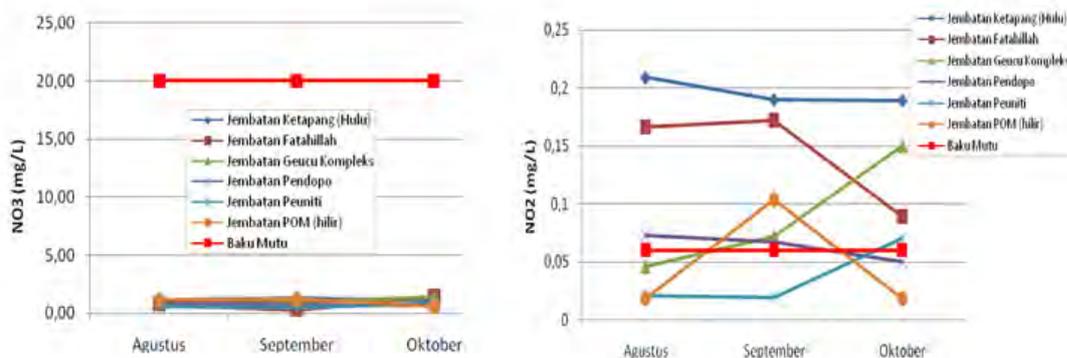
Fosfat tidak memiliki daya racun, bahkan sebaliknya merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan makhluk hidup. Namun demikian, keberadaan fosfat yang berlebihan pada badan air menyebabkan suatu fenomena yang disebut *eutrofikasi* (pengkayaan nutrisi). Sejatinya, eutrofikasi merupakan sebuah proses alamiah dimana danau mengalami penuaan secara bertahap dan menjadi lebih produktif bagi tumbuhnya biomassa. Proses *eutrofikasi* memerlukan waktu ribuan tahun untuk sampai pada kondisi eutrofik. Namun demikian, akibat aktivitas manusia secara tidak disadari proses alamiah ini, dapat dipercepat menjadi dalam hitungan beberapa dekade atau bahkan beberapa tahun saja. Badan air dikatakan pada kondisi eutrofik jika konsentrasi total phosphorus (TP) dalam air berada dalam rentang 35-100 µg/L. Dalam kondisi eutrofik sangat memungkinkan [alga](#), untuk tumbuh dan berkembang biak dengan pesat. Hal ini bisa dikenali dengan warna air yang menjadi kehijauan, berbau tak sedap, dan kekeruhannya yang menjadi semakin meningkat. Banyaknya eceng gondok yang bertebaran di rawa-rawa dan danau-danau juga disebabkan fosfat yang sangat berlebihan ini. Tanaman dapat menghabiskan oksigen dalam sungai pada malam hari ini, bila tanaman tersebut mati dan dalam keadaan sedang mencerna (*digest*) pada siang hari pancaran sinar matahari kedalam air akan berkurang, sehingga proses fotosintesis yang dapat menghasilkan oksigen juga berkurang. Makhluk hidup air seperti ikan dan spesies lainnya tidak bisa tumbuh dengan baik sehingga akhirnya mati. Hilangnya ikan dan hewan lainnya dalam mata rantai ekosistem air menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem air.

Permasalahan lainnya, *cyanobacteria* (*blue-green algae*) diketahui mengandung toksin sehingga membawa risiko kesehatan bagi manusia dan hewan. *Alga bloom* juga menyebabkan hilangnya nilai konservasi, estetika, rekreasional, dan pariwisata. Total Phospat pada air Kr. Daroy di semua segmen pengukuran ditemukan rendah yang berkisar antara 0,31 – 4,60 mg/L dengan nilai rata-rata 1,06 mg/L. Konsentrasi ini pada bulan Agustus dan September masih berada di bawah baku mutu, namun pada bulan Oktober, nilai phospat berada di atas baku mutu pada semua segmen. Kondisi ini rentang terjadinya eutrofik.

Profil Nitrat (NO_3^-N) dan nitrit (NO_2^-N) pada Air Sungai Kr. Daroy

Nitrat dan Nitrit merupakan bagian dari siklus nitrogen berupa ion-ion anorganik alami. Aktifitas mikroba dalam air dapat menguraikan sampah yang mengandung nitrogen organik menjadi ammonia, kemudian dioksidasikan menjadi nitrit dan nitrat. Oleh karena nitrit dapat dengan mudah dioksidasikan menjadi nitrat dan senyawa ini adalah senyawa yang paling sering ditemukan di dalam air bawah tanah maupun air yang terdapat di permukaan.

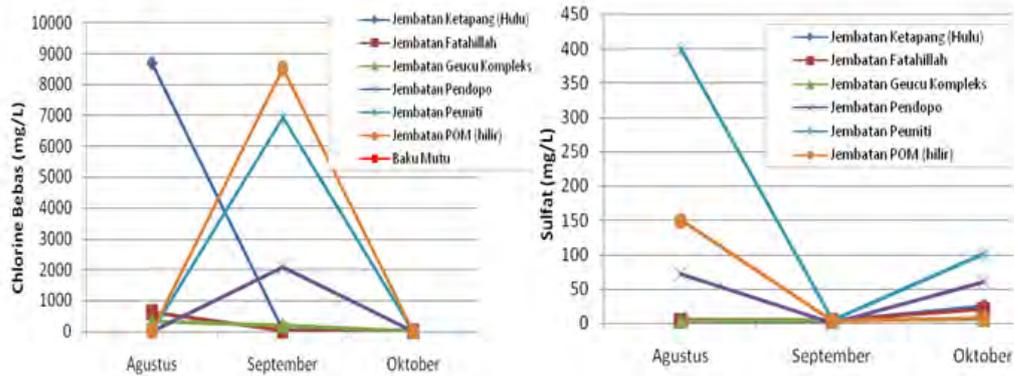
Pencemaran oleh pupuk nitrogen, termasuk ammonia anhidrat seperti juga sampah organik hewan dan manusia, dapat meningkatkan kadar nitrat di dalam air. Hasil pengukuran, diperoleh bahwa nitrat air sungai Kr. Daroy rendah dan nilainya di bawah baku mutu lingkungan, sementara nitrit nilainya tinggi dengan kecendrungan meningkat dan nilainya berada di atas baku mutu lingkungan. Berdasarkan hasil ini diperoleh gambaran bahwa air sungai Kr. Daroy telah tercemar terbukti dengan tingginya nilai nitrit yang diukur. Konsentrasi nitrat pada air Kr. Daroy di semua segmen pengukuran ditemukan rendah yang berkisar antara 0,30 – 1,90 mg/L dengan nilai rata-rata 1,03 mg/L. Konsentrasi ini masih berada di bawah baku mutu. Sementara itu, konsentrasi nitrit pada air Kr. Daroy berfluktuatif pada setiap segmen selama tiga bulan pengamatan. Konsentrasi nitrit ini umumnya berada di bawah baku mutu perairan pada bulan Agustus, dan cenderung meningkat pada bulan September dan Oktober, kecuali pada segmen Jembatan Ketapang dan Jembatan Fatahillah yang cenderung menurun, namun tetap berada di atas baku mutu perairan (Gambar 1.40).



Gambar 3.19
 Profil Nitrat dan Nitrit air Sungai Kr. Daroy

Profil Klorida dan Sulfat pada Air Sungai Kr. Daroy

Klorida adalah suatu mayor anion anorganik yang terdapat diperairan alam. Pada umumnya klorida mudah larut di dalam air dan menimbulkan rasa asin. Sumber klorida di dalam air juga dapat berasal dari pelapukan batuan dan pencucian tanah, limbah industri dan limbah domestik.

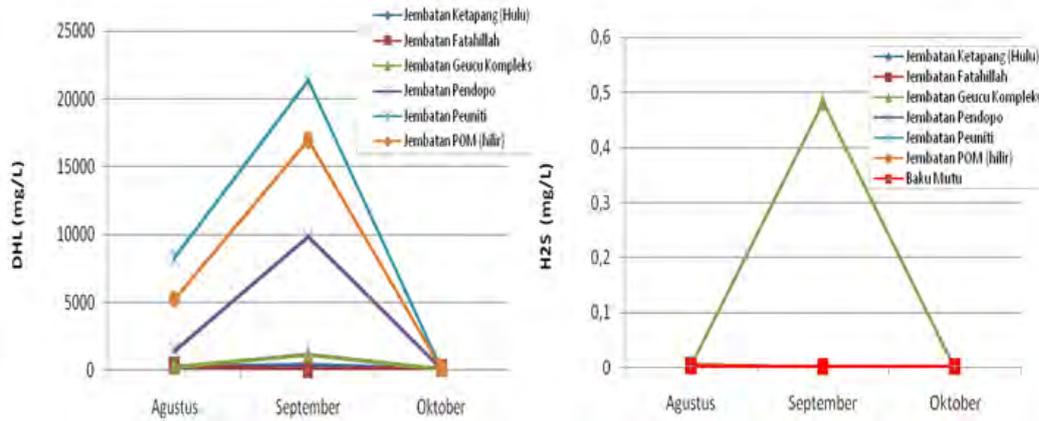


Gambar 3.20
Profil Klorida dan Sulfat air Sungai Kr. Daroy

Hasil pengukuran diperoleh bahwa klorida dalam air sungai Kr. Daroy berkisar antara 9,28 – 8.698 mg/L dengan nilai rata-rata 1.202 mg/L. Sulfat ($\text{SO}_4^{=}$) merupakan suatu bentuk oksidasi belerang yang mempunyai sifat stabil. Senyawa tersebut dapat dihasilkan dari proses oksidasi senyawa sulfur yang tereduksi oleh bakteri. Ion sulfat sangat mudah larut dalam air. Sulfat dapat bersumber dari pencucian batuan yang mengandung sulfat seperti gipsum ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), hasil oksidasi zat organik, limbah industri dan air hujan yang berasal dari udara yang tercemar oleh hasil pembakaran bahan bakar fosil. Hasil pengukuran (Gambar 1.41), diperoleh bahwa Sulfat dalam air sungai Kr. Daroy berkisar antara 0 – 400 mg/L dengan nilai rata-rata 37,96 mg/L.

Profil DHL dan H_2S pada Air Sungai Kr. Daroy

Daya Hantar Listrik (DHL) merupakan parameter yang menunjukkan kandungan ion dalam air sehingga suatu larutan mudah atau sukar dalam menghantarkan listrik. DHL bukan merupakan parameter yang relevan untuk mengukur polusi, akan tetapi dapat digunakan sebagai parameter untuk mengetahui tingkat keragaman dalam air (Indriatmoko dan Myra, 2005). Air yang banyak mengandung garam akan mempunyai DHL tinggi. Hasil pengukuran diperoleh bahwa DHL dalam air sungai Kr. Daroy berkisar antara 46,7 – 21.400 $\mu\text{mhos/cm}$ dengan nilai rata-rata 2.971 $\mu\text{mhos/cm}$.

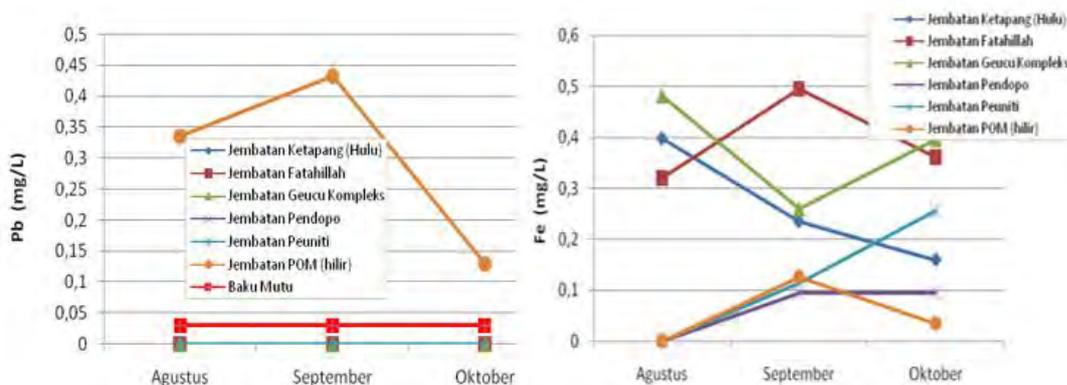


Gambar 3.21
 Profil DHL dan H₂S air Sungai Kr. Daroy

Gas H₂S terbentuk akibat adanya penguraian zat-zat organik oleh bakteri. Keberadaan bakteri Coliform di dalam air diasosiasikan dengan organisme penghasil hidrogen sulfide/H₂S. Nilai kandungan H₂S air sungai Kr. Daroy berkisar antara 0 – 0,482 mg/L dengan nilai rata-rata 0,02 mg/L dan pada semua segmen selama pengamatan nilainya berada di bawah baku mutu yang ditetapkan, kecuali pada segmen Jembatan Geuceu Kompleks, pada bulan September yang nilainya mencapai 0,482 mg/L dan berada di atas baku mutu yang ditetapkan.

Profil Ion Pb dan Ion Fe pada Air Sungai Kr. Daroy

Unsur besi di dalam air terdapat dalam 2 (dua) bentuk yaitu Fe²⁺ dan Fe³⁺. Besi juga merupakan unsur yang banyak terdapat di perairan. Pada kondisi tereduksi di dalam air, maka Fe²⁺ banyak didapat, tetapi pada kondisi teroksidasi maka Fe³⁺ akan mengendap. Warna endapan Fe³⁺ adalah merah coklat dan hal ini dapat dilihat pada penampungan air atau pipa-pipa penyalur. Kelarutan besi akan meningkat sehubungan dengan menurunnya pH.



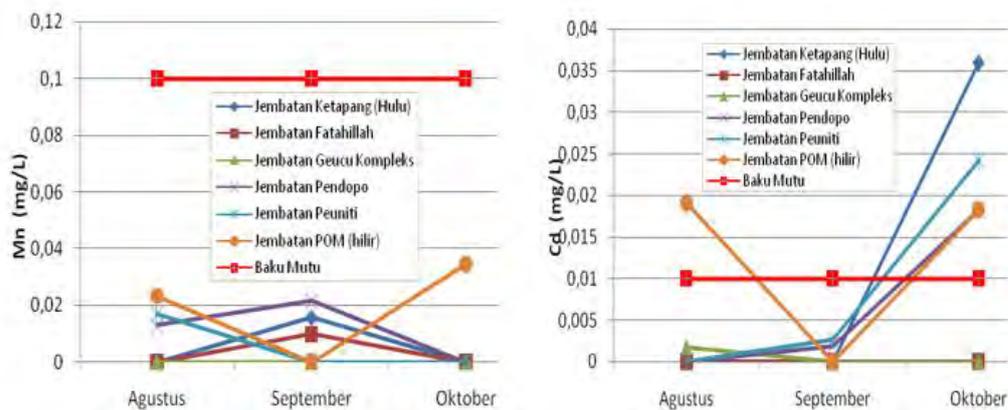
Gambar 3.22
 Profil ion Pb dan ion Fe pada air Kr. Daroy

Pelapukan beberapa jenis batuan antara lain pyrite (FeS_2) dan hematite (Fe_2O_3) merupakan sumber unsur di perairan. Sumber besi yang lain pada suatu perairan berasal dari limbah industri dan pembakaran batubara.

Hasil pengukuran diperoleh bahwa nilai kandungan ion Fe di air sungai Kr. Daroy berkisar antara 0,00 – 0,506 mg/L dengan nilai rata-rata 0,21 mg/L, sementara ion Pb ditemui dalam air sungai Kr. Daroy berkisar antara 0,00 – 0,433 mg/L dengan nilai rata-rata 0,06 mg/L. Hasil ini menunjukkan bahwa selama pengamatan kandungan ke dua ion logam ini berada di bawah baku mutu pada seluruh segmen, kecuali pada segmen Jembatan POM yang berada di atas baku mutu (Gambar 3.22).

Profil Ion Cd dan Ion Mn pada Air Sungai Kr. Daroy

Logam Cd bersifat racun dan merugikan bagi semua organisme hidup, bahkan juga berbahaya untuk manusia. Kelarutan ion Cd dalam konsentrasi tertentu dapat membunuh biota perairan. Biota-biota yang tergolong udang-udangan (crustacea) akan mengalami kematian dalam selang waktu 24 - 504 jam bila terlarut logam atau persenyawaan Cd sebesar 0.005-0.15 ppm. Untuk biota-biota yang tergolong ke dalam serangga (insecta) akan mengalami kematian dalam selang waktu 24-672 jam bila terlarut logam Cd atau persenyawaan Cd sebesar 0.003-18.0 ppm. Sedangkan untuk biota-biota perairan yang tergolong ke dalam oligochaeta akan mengalami kematian dalam selang waktu 24-96 jam bila terlarut logam Cd atau persenyawaannya sebesar 0.0028-4.6 ppm (Palar, 1994).



Gambar 3.23

Profil ion Mn dan ion Cd pada air Kr. Daroy

Berdasarkan hasil pemantauan selama tiga bulan (Agustus-3ktober) ditemukan kandungan ion Cd pada Sungai Kr. Daroy cenderung meningkat dari bulan Agustus sampai Oktober, kecuali pada segmen Jembatan POM di bulan September. Kandungan ion Cd di bulan Oktober pada semua segmen berada di atas baku mutu, kecuali pada segmen Jembatan Geucu Kompleks dan Jembatan Fatahillah (Gambar 3.23).

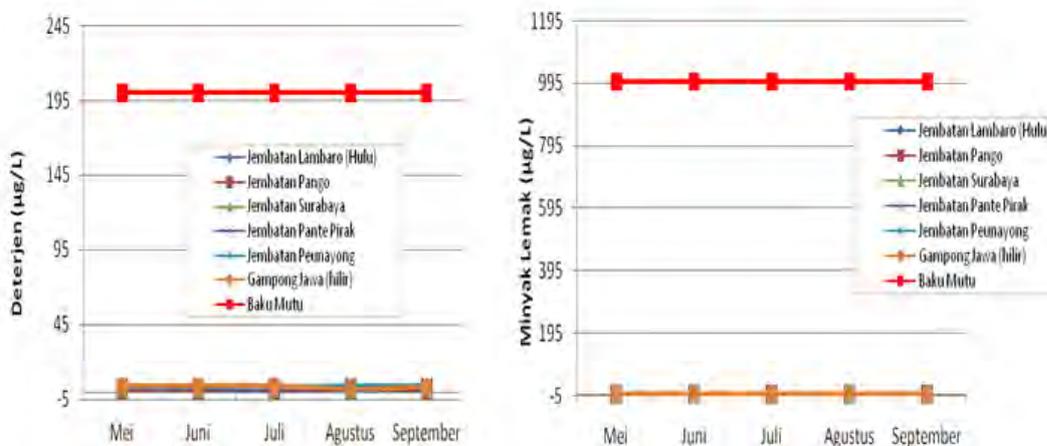
Mangan (Mn) adalah logam berwarna abu – abu keperakan. Mangan digunakan dalam campuran baja, industri pigmen, las, pupuk, pestisida, keramik, elektronik, dan *alloy* (campuran beberapa logam dan bukan logam, terutama karbon), industri baterai, cat, dan zat tambahan pada makanan. Di alam jarang sekali berada dalam keadaan unsur. Umumnya berada dalam keadaan senyawa dengan berbagai macam valensi. Di dalam hubungannya dengan kualitas air yang sering dijumpai adalah senyawa mangan dengan valensi 2, valensi 4, dan valensi 6.

Di dalam sistem air alami dan juga di dalam sistem pengolahan air, senyawa mangan dan besi berubah-ubah tergantung derajat keasaman (pH) air. Oleh karena itu di dalam sistem pengolahan air, senyawa mangan dan besi valensi dua tersebut dengan berbagai cara dioksidasi menjadi senyawa yang memiliki valensi yang lebih tinggi yang tidak larut dalam air sehingga dapat dengan mudah dipisahkan secara fisik. Mangan di dalam senyawa $MnCO_3$, $Mn(OH)_2$ mempunyai valensi dua, zat tersebut relatif sulit larut dalam air, tetapi untuk senyawa Mn seperti garam $MnCl_2$, $MnSO_4$, $Mn(NO_3)_2$ mempunyai kelarutan yang besar di dalam air.

Berdasarkan hasil pemantauan selama tiga bulan, ditemukan kandungan ion Mn pada semua segmen di Sungai Kr. Daroy berkisar 0,00 – 0,0346 mg/L dengan nilai rata-rata 0,01 mg/L. Kandungan ion Mn air Sungai Kr. Daroy pada semua segmen pemantauan berada di bawah baku mutu.

Profil Minyak dan Lemak pada Air Sungai Kr. Daroy

Minyak lemak dapat ditemukan mengapung di atas permukaan air meskipun sebagian terdapat di bawah permukaan air. Minyak lemak merupakan senyawa ester dari turunan alkohol yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak sukar diuraikan oleh bakteri, namun dapat dihidrolisa oleh alkali sehingga membentuk senyawa sabun yang mudah larut. Keberadaan minyak lemak di atas permukaan air dapat merintangi proses biologi dalam air sehingga tidak terjadi fotosintesa. Berdasarkan hasil pemantauan kandungan minyak lemak pada air Sungai Kr. Daroy tidak dijumpai.

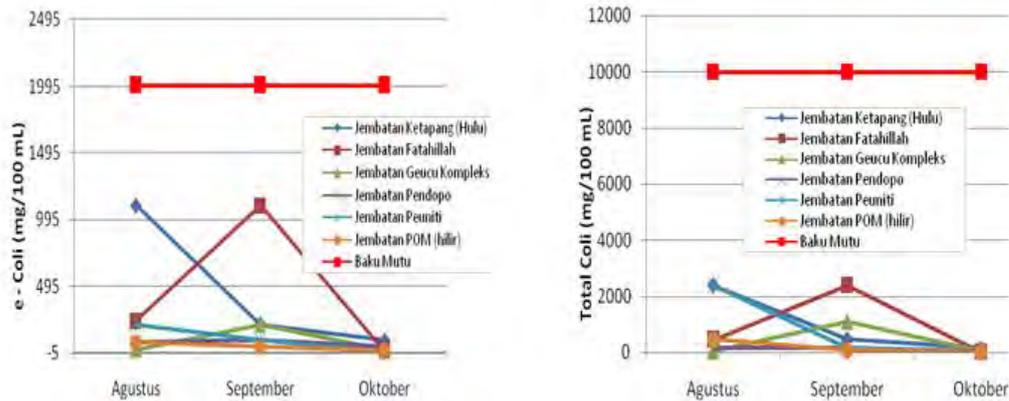


Gambar 3.24

Profil kandungan deterjen dan minyak lemak pada air Sungai Kr. Daroy

Profil Kandungan Total Coliform dan e-coli pada Air Sungai Kr. Daroy

Hampir di setiap badan air terdapat bakteri, ada yang bersifat bermanfaat dan ada yang berbahaya bagi manusia (pathogen). Apabila tinja seseorang yang sakit mengandung bakteri pathogen dan masuk ke dalam badan air, maka bakteri tersebut akan hidup selama beberapa hari di dalam air sebelum mati.



Gambar 3.25

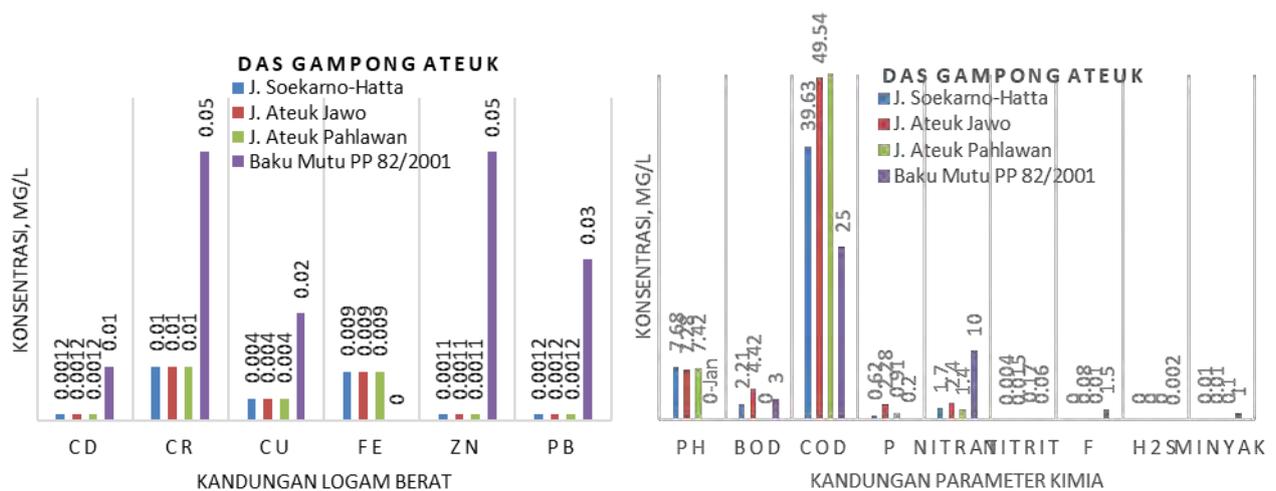
Profil kandungan e-coli dan total coliform pada air Sungai Kr. Daroy

3. Kualitas Air DAS Krueng Lueng Paga

Profil Parameter Fisik, Biologi Logam Berat dan Kimia DAS Kr. Lueng Paga

DAS Krueng Lueng Paga memiliki panjang 4,2 km merupakan sungai mengalir dari daerah Daroy Kameu, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar membelah Kota Banda Aceh dan bermuara di DAS Kr. Aceh pada ruas Gampong Surabaya. Sungai ini mengalir di sepanjang Kota Banda Aceh, melintasi wilayah pemukiman padat penduduk.

Di sepanjang DAS dijumpai banyak aktivitas masyarakat, antara lain : industry tahu, perumahan padat penduduk, dan industri rumah tangga. Hampir semua kegiatan tersebut menghasilkan limbah domestik yang dibuang melalui DAS ini. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air sungai yang ada di Kota Banda Aceh.



Gambar 3.26

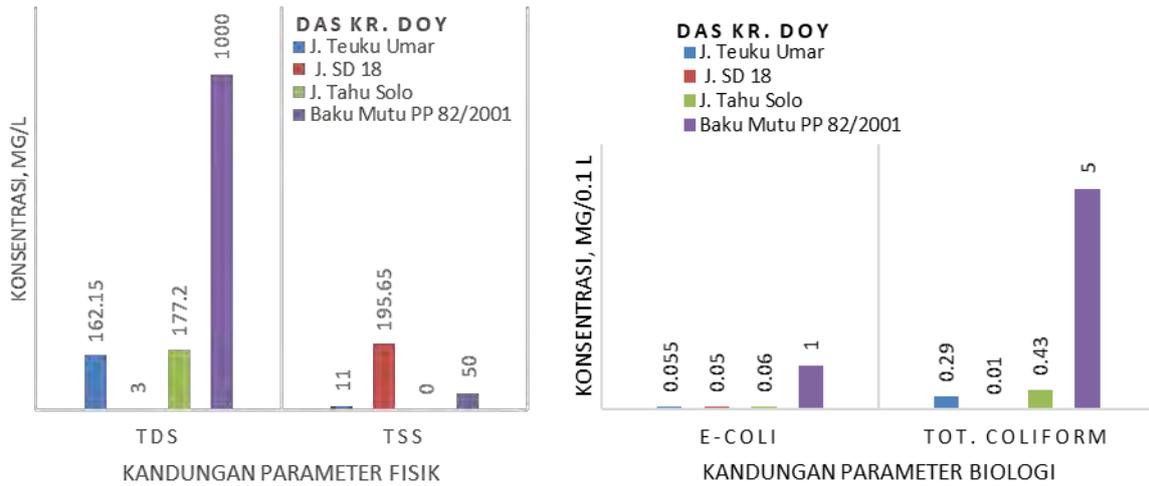
Profil kandungan logam berat dan parameter kimia DAS Krueng Lueng Paga

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa beberapa parameter kualitas air DAS Gampong Ateuk berada di atas baku mutu PP Nomor 82 tahun 2001 seperti TSS, COD, BOD, dan Phospor. Hal ini disebabkan air limbah domestic kegiatan di sekitar langsung dibuang ke dalam DAS Krueng Lueng Paga.

4. Kualitas Air DAS Krueng Doy

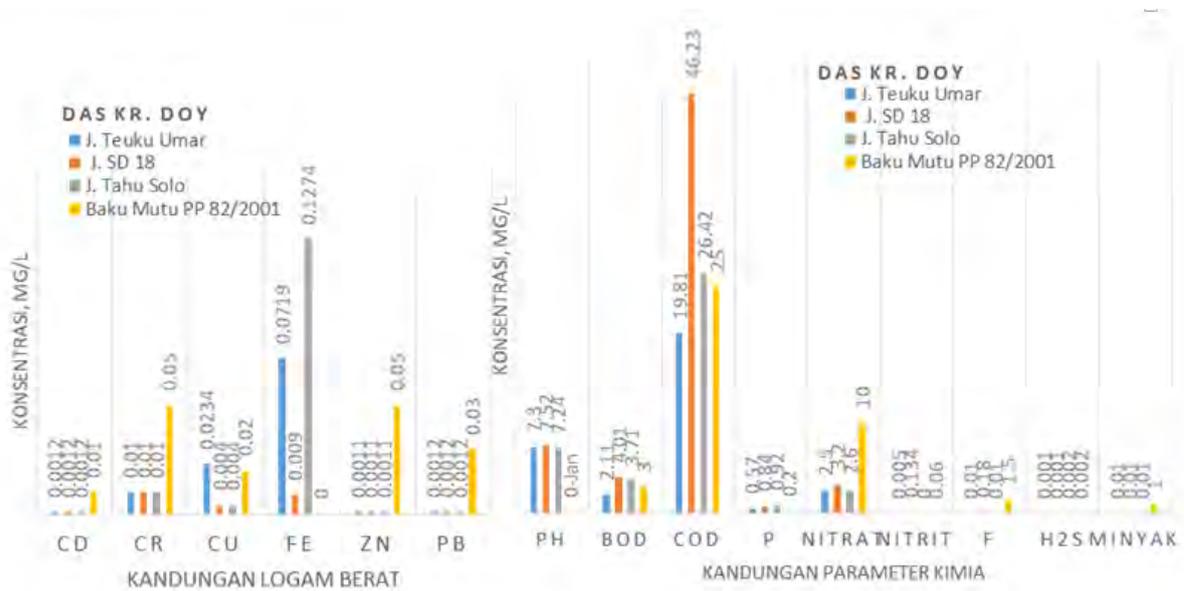
Profil Parameter Fisik, Biologi Logam Berat dan Kimia DAS Kr. Aceh

DAS Kr. Doy memiliki panjang 3,6 km merupakan sungai mengalir dari DAS Kr. Daroy membelah Kota Banda Aceh dan bermuara di daerah Gampong Lampaseh. Sungai ini mengalir di sepanjang Kota Banda Aceh, melintasi wilayah pemukiman padat penduduk. Di sepanjang DAS dijumpai banyak aktivitas masyarakat, antara lain : industry tahu, perumahan padat penduduk, dan industri rumah tangga. Hampir semua kegiatan tersebut menghasilkan limbah domestik yang dibuang melalui DAS ini. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air sungai yang ada di Kota Banda Aceh. Kualitas DAS Doy dipantau secara regular (pada Jembatan Teuku Umar, Jembatan SD 18, dan Jembatan Tahu Solo) dan hasil pemantauan bulan Oktober 2016 diilustrasikan pada Gambar 3.27 dan Gambar 3.28.



Gambar 3.27
 Profil parameter fisik dan biologi DAS Kr. Doy

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa beberapa parameter kualitas air DAS Kr. Doy berada di atas baku mutu PP Nomor 82 tahun 2001 seperti TSS, BOD, COD, nitrit, dan Phospor. Hal ini disebabkan air limbah domestic kegiatan di sekitar langsung dibuang ke dalam DAS Kr. Doy. Penurunan kualitas air semakin ke arah hilir semakin besar, dimana terlihat terjadinya peningkatan parameter seperti COD, BOD, dan nitrit pada bagian hilir DAS Kr. Doy (Jembatan Teuku Umar, Jembatan SD 18, dan Jembatan Tahu Solo).



Gambar 3.28
 Profil kandungan logam berat dan parameter kimia DAS Kr. Doy

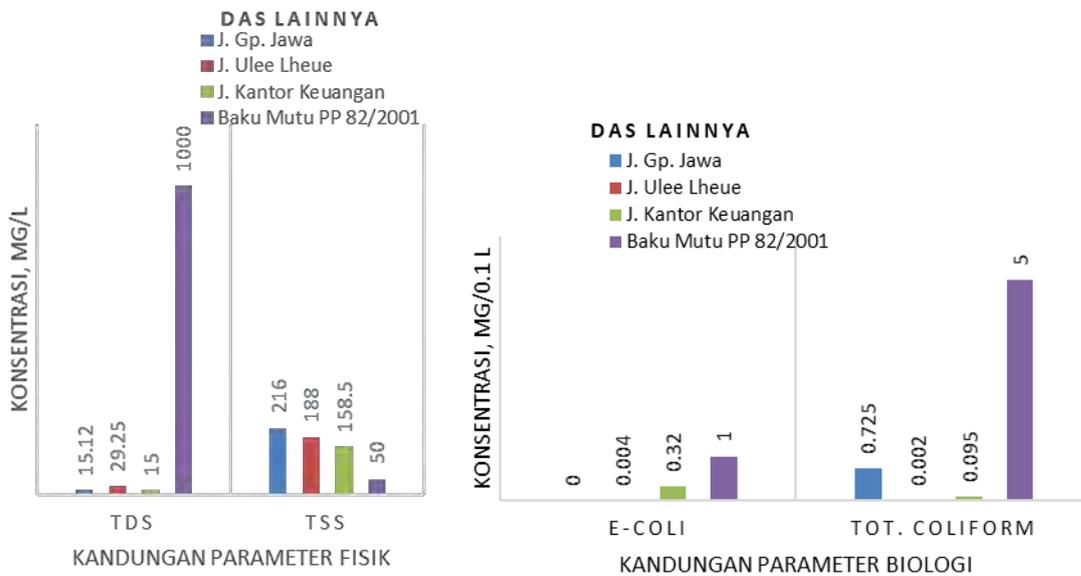
5. DAS Ruas Sungai di 3 Lokasi Lainnya di Kota Banda Aceh

Profil Parameter Fisik, Biologi Logam Berat dan Kimia DAS di 3 Lokasi

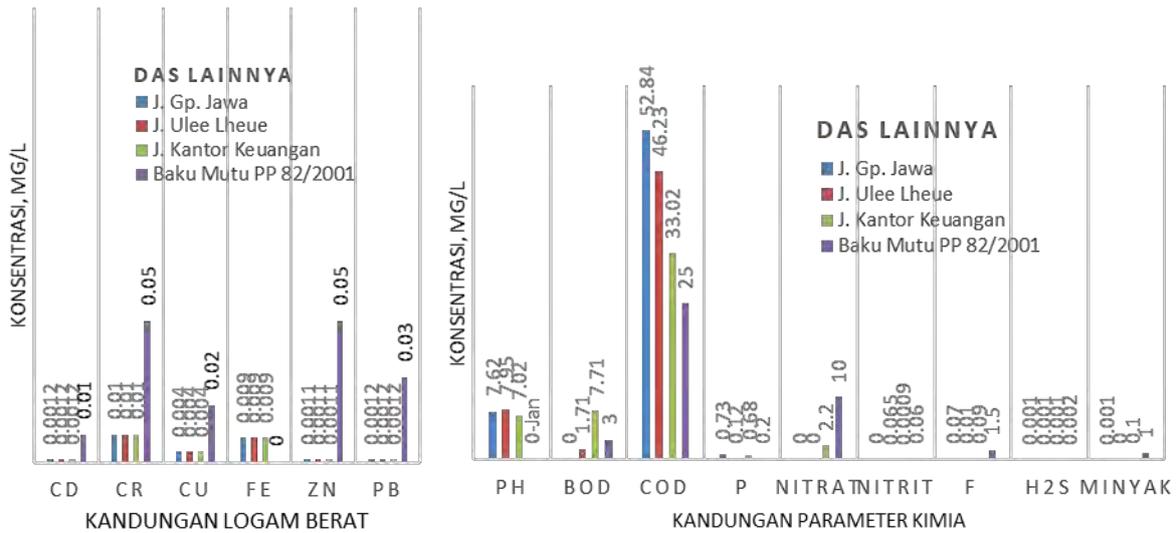
DAS Jembatan Kp. Jawa, Jembatan Ulee Lheue, dan Jembatan Kantor Keuangan merupakan sungai yang mengalir di Kota Banda Aceh yang menjadi lokasi pemantauan kualitas DAS di Kota Banda Aceh.

Lokasi ini terletak di sepanjang Kota Banda Aceh, yang di sekitarnya terdapat aktivitas pemukiman warga kota Banda Aceh yang kegiatan tersebut menghasilkan limbah domestik yang dibuang menuju DAS ini. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air sungai yang ada di Kota Banda Aceh. Kualitas DAS ini dipantau secara regular, seperti Jembatan Kp. Jawa, Jembatan Ulee Lheue, dan Jembatan Kantor Keuangan.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa beberapa parameter kualitas air DAS Kr. Doy berada di atas baku mutu PP Nomor 82 tahun 2001 seperti TSS, COD, nitrit, dan Phospor. Hal ini disebabkan air limbah domestic kegiatan di sekitar langsung dibuang ke dalam DAS ini.



Gambar 3.29
 Profil parameter fisik dan biologi DAS sungai di Banda Aceh



Gambar 3.30
 Profil kandungan logam berat dan parameter kimia DAS sungai di Banda Aceh

6. Kualitas Air TPA Kota Banda Aceh

Pemantauan kualitas air juga dilakukan terhadap air limbah di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terletak di Gampong Jawa. Berdasarkan analisis pada beberapa titik lokasi yaitu sumur pantau, kolam pengolahan lumpur tinja dan kolam lindi (*leachate*) diperoleh hasil bahwa air limbah yang akhirnya dibuang ke lingkungan setelah dilakukan pengelolaan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sehingga kualitas lingkungan di sekitar lokasi TPA dan IPLT sampai saat ini masih dalam kondisi aman.

Pada tahun 2015 TPA Kota Banda Aceh juga telah memanfaatkan gas yang berasal dari timbunan sampah. Saat ini gas metan tersebut telah dinikmati oleh lima rumah di sekitar TPA yang merupakan pekerja di TPA dan ditargetkan 60 rumah lainnya yang terdapat di Gampong Jawa, yang sedang dbangun instalasi penyalurannya, akan menikmati gas secara gratis, sebagai wujud kompensasi bagi warga sekitar TPA yang selama ini terkena dampak dari bau sampah itu sendiri. Selain itu TPA Gampong Jawa juga menghasilkan energi listrik sebesar 40 ribu watt yang berasal dari gas yang digunakan untuk menghidupi genset.

Pada lokasi yang sama di Gampong Jawa selain TPA terdapat juga IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) berada bersebelahan dengan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Dalam pengolahannya dilakukan dengan dua metode, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Untuk sistem terbuka terdiri dari dua *inhoff tank* berkapasitas masing-masing 50 m³ dan enam kolam penampungan, merupakan bantuan dari JICA pada tahun 2005. Untuk instalasi dengan sistem

tertutup merupakan bantuan dari Unicef yang dibangun pada tahun 2007. IIPLT merupakan tempat pengolahan kotoran manusia menjadi pupuk. Pupuk yang dihasilkan tersebut dimanfaatkan untuk taman kota dan RTH di Kota Banda Aceh. Bagi masyarakat yang mau memanfaatkan pupuk tersebut akan diberikan secara gratis.

3.1.1.2 Analisis *Pressure*

Urbanisasi dan pengembangan perkotaan memberi dampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Banda Aceh. Dari data statistic kependudukan Kota Banda Aceh, dimana sebelum peristiwa gempa bumi dan tsunami tahun 2004, jumlah penduduk sekitar 245.000 jiwa. Saat ini jumlah penduduk telah melampaui angka tersebut hanya dalam kurun waktu 13 tahun yaitu 250.000 jiwa.

Berikut adalah analisis *pressure* terhadap parameter air yang melampaui batas baku mutu:

1. Profil TDS air Sungai Kr. Aceh menunjukkan bahwa TDS dengan kisaran 83,35 – 24.150 mg/L. Secara umum, TDS berada di atas baku mutu (baku mutu 1000 mg/L) dan akan memberikan dampak terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan air di Kr. Aceh, kecuali di Segmen Lambaro pada bulan Agustus dan September yang nilainya di bawah baku mutu lingkungan. TSS padatan tersuspensi pada air Kr. Aceh di semua segmen pengukuran ditemukan rendah yang berkisar antara 14,8 – 125,8 mg/L dengan nilai rata-rata 45,20 mg/L.
2. Nilai BOD ditemukan berada di bawah baku mutu pada semua Segmen, sedangkan COD nilainya berkisar 10,3 – 178,4 mg/L dengan nilai rata-rata 49,89 mg/L. Konsentrasinya COD yang tinggi dan berada di atas baku mutu ditemukan pada beberapa segmen, seperti: Jembatan Simpang Surabaya, Jembatan Pante Pirak, dan Jembatan Peunayong pada pengukuran bulan Agustus dan September. Berdasarkan hasil ini diperoleh gambaran bahwa air Sungai Kr. Aceh telah tercemar dengan bahan organik, dibuktikan dengan tingginya nilai COD yang diukur, khususnya pada Segmen Jembatan Surabaya, Jembatan Pante Pirak, dan Jembatan Peunayong.
3. Total phospat pada air Kr. Aceh di semua segmen pengukuran ditemukan rendah yang berkisar antara 0,31 – 4,10 mg/L dengan nilai rata-rata 1,46 mg/L. Konsentrasi pada bulan Agustus dan September masih berada di bawah baku mutu, namun pada bulan Oktober, nilai phospat berada di atas baku mutu pada semua segmen. Kondisi ini rentang terjadinya eutrofik.
4. Nitrit konsentrasinya tinggi dan nilainya berada di atas baku mutu lingkungan, kecuali pada segmen Jembatan Peunayong.
5. Nilai kandungan H₂S air Kr. Aceh berkisar antara 0 – 0,0246 mg/L dengan nilai rata-rata 0,003 mg/L dan rata-rata pada bulan Agustus berada di atas baku mutu yang ditetapkan

pada setiap Segmen. Nilai parameter H₂S dijumpai tertinggi pada Segmen Jembatan Pante Pirak (0,006 mg/L), kemudian nilai ini menurun hingga tidak terdeteksi adanya gas H₂S di setiap segmen pada bulan September dan Oktober.

3.1.1.3 Analisis *Response*

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui instansi lingkungan hidup terus berupaya melakukan pencegahan terhadap pengrusakan dan pencemaran lingkungan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melaksanakan pemantauan terhadap setiap usaha/kegiatan berjalan dalam wilayah Kota Banda Aceh. Melalui Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup yang bersumber dari Dana APBK Kota Banda Aceh Tahun 2017, DLHK3 Banda Aceh mencoba untuk lebih intens dalam bidang pengawasan dengan menginventarisir setiap usaha/kegiatan dalam kepemilikan dokumen lingkungan hidup. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendeteksi sejauh mana dokumen Amdal ataupun UKL-UPL yang telah disusun dan dimiliki oleh pelaku usaha/kegiatan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dapat tercapai. Selama tahun 2017, kegiatan ini dilakukan tidak hanya terhadap usaha/kegiatan yang berada di wilayah Kota Banda Aceh yang telah memiliki Dokumen UKL-UPL namun bagi yang belum memiliki dokumen juga ikut dilakukan pengawasan dengan status yang masih aktif dan kegiatan usahanya masih berjalan. Pengawasan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana usaha/kegiatan ini melaksanakan pengelolaan dan pengendalian terhadap lingkungan tempat usahanya, dimana dalam pelaksanaannya, pengambilan dan pengumpulan data untuk masing-masing kegiatan dilakukan dengan cara yang sama.

Penegakan Hukum

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti membuat drainase, pembangunan jalan, hutan kota, dan ruang terbuka hijau. Berbagai langkah strategis tersebut ternyata tidak selalu berjalan mulus. Dalam pelaksanaannya, banyak masalah yang mencuat ke permukaan yang dapat menjadi kendala, salah satunya adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen lingkungan dan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya masih perlu ditingkatkan.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan kebijakan terhadap pelaku usaha dengan mewajibkan kepada setiap pemilik usaha/kegiatan diharuskan untuk membuat dokumen lingkungan hidup agar mendapatkan rekomendasi lingkungan yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bila hendak menjalankan usahanya tersebut. Begitu pula

halnya bila hendak memperpanjang atau memperbaharui izin kegiatan usahanya maka diperlukan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari kegiatan/usaha yang dijalankannya tersebut. Melalui kerjasama penegakan hukum dibidang perizinan, DPMPTSP melakukan penyeleksian terhadap pelaku usaha yang akan memperpanjang izin dimana pelaku usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan dan melakukan pelaporan terhadap pengelolaan lingkungannya akan diberikan perpanjangan izin usaha, sehingga dicapai pengendalian terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan dari sektor perizinan.

Banyak upaya dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah di atas, seperti sosialisasi akan pentingnya “menjaga lingkungan” pada warga kota, peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana. Dengan sosialisasi ini selain untuk menambah wawasan bagi masyarakat namun juga menumbuhkan kesadaran bahwa mereka dapat menyampaikan pendapat/keberatan melalui pengaduan kepada Pemerintah Kota bila terjadi pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan yang meresahkan.

Selain ketiga hal tersebut, hal penting lainnya yang dilakukan adalah mengaturnya dalam regulasi “qanun” atau peraturan daerah. Dengan diaturnya pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian limbah B3, dan pengendalian limbah cair dengan qanun, maka ketiga hal tersebut memiliki landasan hukum (asas legalitas) yang kuat. Qanun akan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengelola lingkungan hidup, pengendalian limbah B3, dan pengendalian limbah cair di Kota Banda Aceh ke arah yang lebih baik.

Menyikapi hal tersebut Kantor Lingkungan Hidup sebagai instansi yang menaungi bidang lingkungan merasa perlu untuk memiliki payung hukum yang secara khusus dihasilkan untuk mengatur tatanan lingkungan hidup dengan maksud dan tujuan terpenting adalah untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup di Kota Banda Aceh. Proses tersebut telah dirintis sejak tahun 2007 dimana pada saat itu masih bernama Bapedalda Kota Banda Aceh. Akhirnya pada akhir tahun 2008 telah diselesaikan 3 (tiga) naskah akademik dan 3 (tiga) draft rancangan qanun dan melalui Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2009 mengusulkan untuk diprioritaskan dalam daftar proleg (proses legislasi) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

Tiga naskah akademik dan tiga draft rancangan Qanun yang diusulkan tersebut adalah :

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup,
2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan
3. Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.

Tahapan prosesnya selanjutnya adalah menunggu waktu ketiga usulan draft rancangan qanun tersebut dibahas di DPRK Banda Aceh, sayangnya sampai saat ini pembahasan ketiga qanun tersebut masih belum dilakukan. Sehingga ada beberapa isi dari ketiga rancangan qanun tersebut bila dicermati maka perlu dilakukan revisi karena isinya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Produk hukum lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan bidang lingkungan yang telah dimiliki oleh Kota Banda Aceh adalah bidang pengelolaan persampahan Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu Qanun no 5 tahun 2003 tentang kebersihan dan keindahan dan Qanun no. 13 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Selain itu penetapan lokasi hutan kota yang diperkuat dengan Keputusan Walikota Nomor 261 tahun 2007.

3.2 KUALITAS UDARA

3.2.1 Hasil Analisa *State, Pressure and Response* Pencemaran Udara di Kota Banda Aceh

3.2.1.1 Analisis *State*

Pengukuran kualitas udara Kota Banda Aceh pada triwulan 1, 2 dan 3 dilaksanakan berdasarkan pengelompokan sumber munculnya zat pencemar pada 4 (empat) kawasan, yaitu kawasan transportasi, perkantoran, industri dan pemukiman. Parameter kualitas udara yang diukur antara lain Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen Oksida (NO₂), Carbon Monooksida (CO), dan *Total Suspended Particle (TSP)* dan hasilnya ditunjukkan dalam bentuk grafik.

Berikut akan dijabarkan grafik hasil pengukuran laboratorium terhadap kualitas udara pada kawasan transportasi, industri, perkantoran dan pemukiman.

D.1. Profil Kualitas Udara Pada Kawasan Transportasi

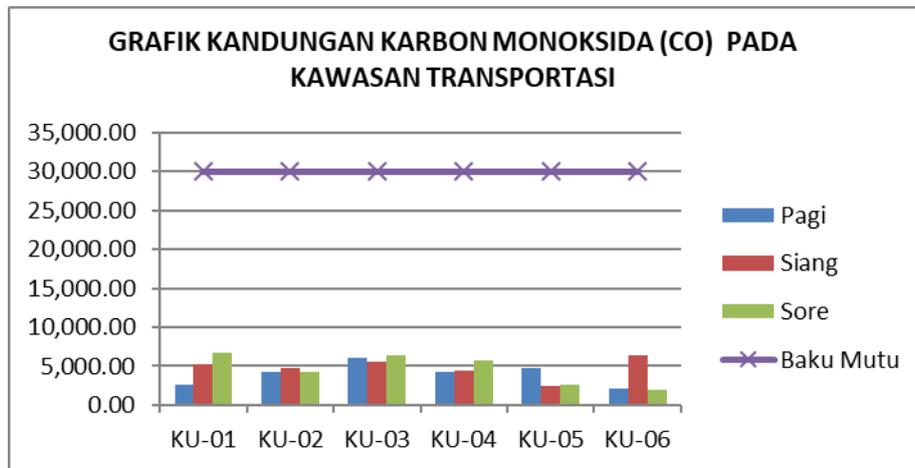
Pengukuran kualitas udara pada kawasan transportasi diwakili oleh enam titik, lokasi tersebut representatif untuk kawasan transportasi dimana memiliki ciri-ciri tingkat kepadatan lalu lintas yang relatif tinggi dan merupakan persimpangan strategis.

Lokasi pengambilan sampling pada beberapa kawasan transportasi adalah sebagai berikut:

1. Simpang Lima (KU-01)
2. Simpang Surabaya (KU-02)
3. Simpang Mesra (KU-03)
4. Depan Masjid Raya Baiturrahman (KU-04)
5. Dalam Area Terminal Batoh (KU-05)
6. Dalam Area Terminal Angkot Kedah (KU-06)

Profil Kandungan karbon monoksida (CO) pada kawasan transportasi

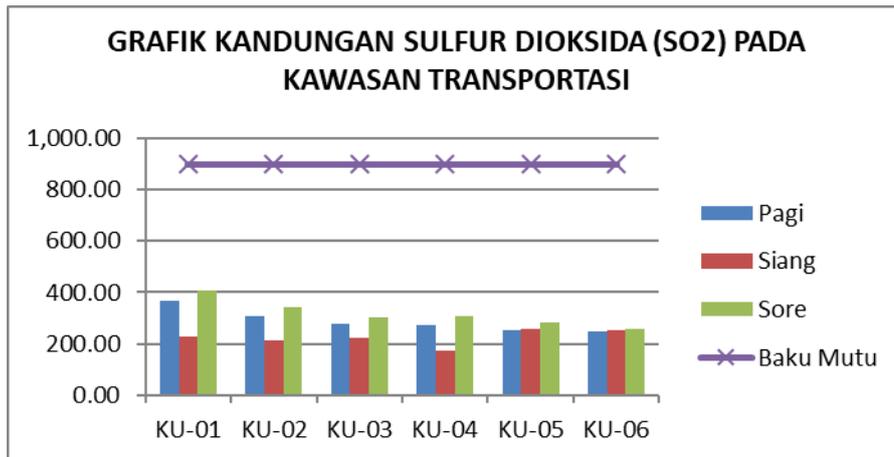
Dengan baku mutu sebesar 30.000 µg/Nm³ untuk parameter karbon monoksida (CO), maka konsentrasi CO pada semua titik sampling masih berada di bawah ambang baku mutu (Gambar 1.58). Hasil uji kualitas udara pada triwulan 1, 2 dan 3 terdeteksi bahwa lokasi simpang Mesra (KU-03) dengan waktu pengukuran pada sore hari memiliki konsentrasi tertinggi yaitu 6.75 µg/Nm³ dan terendah di dalam Area Terminal Keudah (KU-06) yaitu sebesar 2.04 µg/Nm³ dengan waktu pengukuran pada sore hari.



Gambar 3.31 Hasil uji laboratorium kualitas udara dengan parameter Karbon Monoksida (CO) pada kawasan transportasi

Profil Kandungan sulfur dioksida (SO₂) pada kawasan transportasi

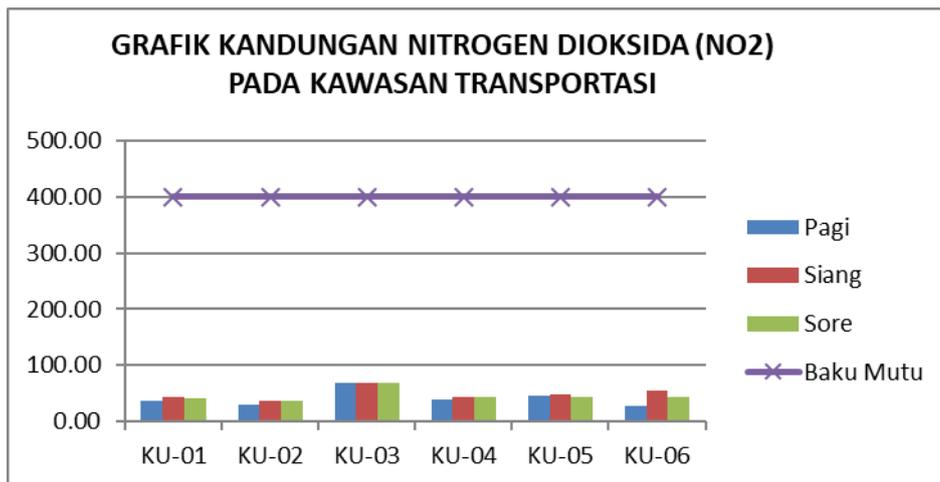
Baku mutu parameter sulfur dioksida (SO₂) adalah sebesar 900 µg/Nm³. Data pengukuran dan pengujian di laboratorium menunjukkan bahwa angka tertinggi sebesar 407,46 µg/Nm³ terdapat pada lokasi simpang lima (KU-01) dengan waktu pengukuran pada sore hari dan terendah di dalam Area Terminal Angkot Kedah (KU-04) yaitu 307,43 µg/Nm³ dengan waktu pengukuran pada siang hari (Gambar 3.32). Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh informasi bahwa situasi dalam terminal Keudah relatif sepi dan tidak banyak aktivitas, hal tersebut memungkinkan seluruh parameter pengukuran cenderung lebih rendah dari lokasi pengukuran lain.



Gambar 3.32
Hasil uji laboratorium kualitas udara dengan parameter sulfur dioksida (SO₂) pada kawasan transportasi

Profil Kandungan nitrogen oksida (NO₂) pada kawasan transportasi

Berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian laboratorium untuk parameter nitrogen oksida (NO₂) diperoleh data sebagaimana dipaparkan pada Gambar 3.33. Konsentrasi NO₂ pada seluruh lokasi sampling masih berada di bawah baku mutu (400 µg/Nm³) dimana lokasi dengan konsentrasi tertinggi adalah simpang Mesra (KU 03) yaitu sebesar 69,66 µg/Nm³ dengan waktu pengukuran pada sore hari. Sedangkan konsentrasi terendah adalah terminal Keudah (KU 06) yaitu sebesar 27,94 µg/Nm³ dengan waktu pengukuran pada pagi hari.



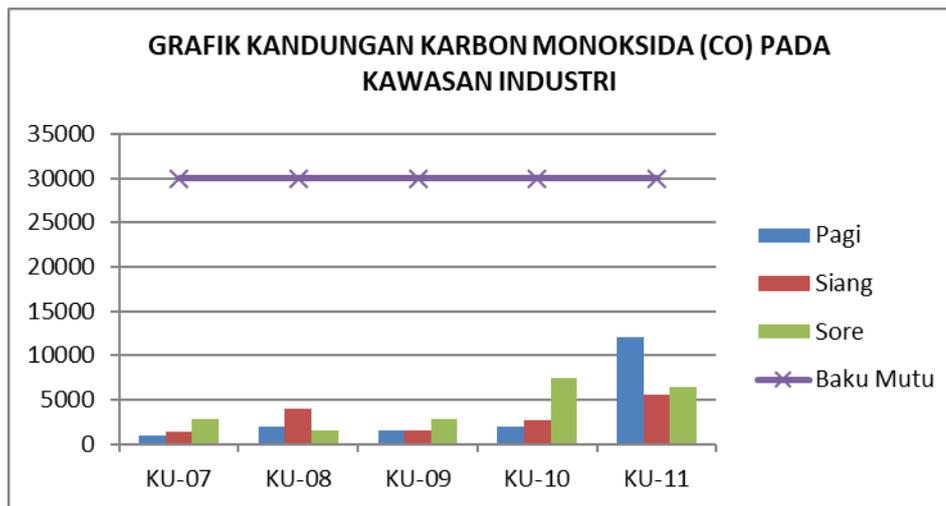
Gambar 3.33
Hasil uji laboratorium kualitas udara dengan parameter nitrogen dioksida (NO₂) pada kawasan transportasi

D.2. Profil Kualitas Udara Pada Kawasan Industri

Pengukuran kualitas udara pada kawasan transportasi diwakili oleh 5 (lima) titik, lokasi tersebut representatif untuk kawasan industri dengan ciri-ciri terdapat aktifitas pabrik dan jasa servis kendaraan. Hasil pengujian pada kawasan industri dengan mengangkat hasil uji laboratorium dan membandingkannya dengan baku mutu pada setiap parameternya, dengan rincian lokasi pengambilan sampling adalah sebagai berikut:

1. Belakang PLTD Lueng Bata - Gampong Pango Raya (KU-07)
2. Industri Tahu Solo - Gampong Punge Blang Cut (KU-08)
3. Industri Tahu Mandiri - Gampong Lampaseh Aceh (KU-09)
4. Industri Batu Bata - Gampong Iee Masen Kayee Adang (KU-10)
5. Sekitar Perbengkelan Jln. Twk. M. Daudsyah - Peunayong (KU-11)

Profil Kandungan carbon monoksida (CO) pada kawasan industri

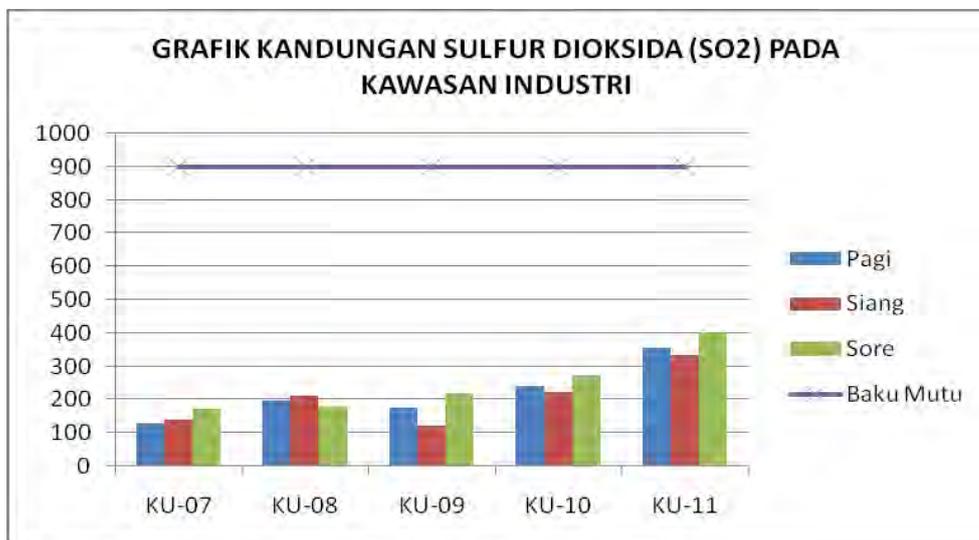


Gambar 3.34
Hasil uji laboratorium kualitas udara dengan parameter Carbon monoksida (CO) pada kawasan transportasi

Profil konsentrasi CO pada semua lokasi sampling pada kawasan industri dipaparkan pada Gambar 3.34. Dengan baku mutu CO sebesar 30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dapat diinformasikan bahwa berdasarkan hasil uji kualitas udara selama periode triwulan 1, 2 dan 3, kondisi CO masih berada di bawah baku mutu. Dapat dijelaskan bahwa lokasi sekitar perbengkelan Jln. Twk. M. Daudsyah - Peunayong (KU-11) memiliki konsentrasi tertinggi yaitu 12.024 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dengan waktu pengukuran pada pagi hari. Sedangkan lokasi sampling terendah adalah di belakang PLTD Lueng Bata - Gampong Pango Raya (KU-07) yaitu sebesar 916,1 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dengan waktu pengukuran pada pagi hari.

Profil Kandungan sulfur dioksida (SO₂) pada kawasan industri

Data konsentrasi SO₂ hasil analisa laboratorium menunjukkan bahwa semua lokasi sampling pada kawasan industri yang diwakili oleh 5 (lima) titik sampling masih berada dibawah baku mutu (900 µg/Nm³) sebagaimana dipaparkan pada Gambar 3.35. Konsentrasi SO₂ tertinggi tercatat pada lokasi sampling sekitar Perbengkelan Jln. Twk. M. Daudsyah - Peunayong (KU-11) yaitu sebesar 402,5 µg/Nm³ dengan waktu pengukuran pada sore hari. Sedangkan konsentrasi terendah tercatat di kawasan Industri Tahu Mandiri - Gampong Lampaseh Aceh (KU-09) yaitu sebesar 122,13 µg/Nm³ dengan waktu pengukuran pada siang hari.



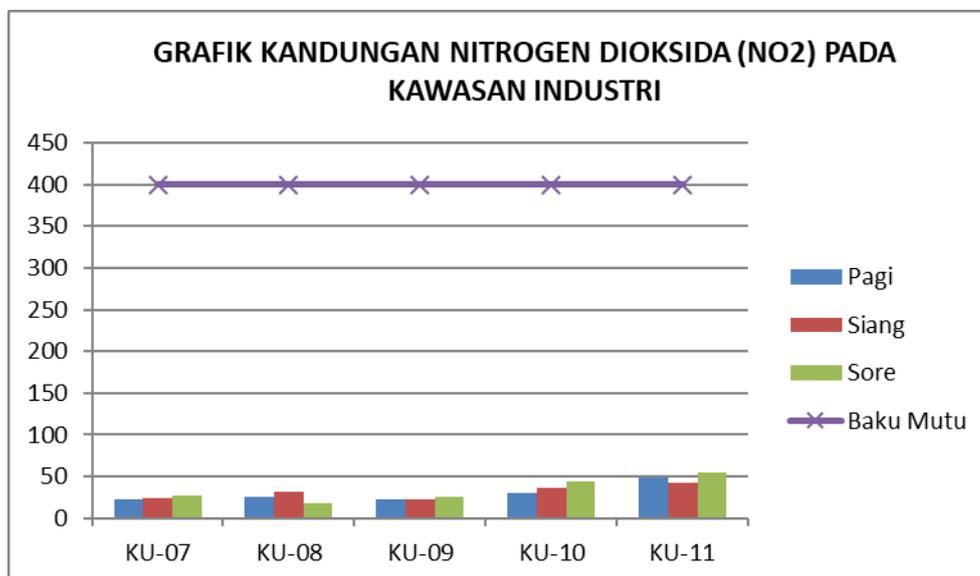
Gambar 3.35
Hasil uji laboratorium kualitas udara dengan parameter Sulfur dioksida (SO₂) pada kawasan industri

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh informasi bahwa situasi disekitar perbengkelan di jalan Twk. M. Daudsyah terdapat banyak perbengkelan roda 2 dan roda 4 yang aktif yang menghasilkan emisi gas buang. Hal tersebut mempengaruhi kualitas udara khususnya sulfur dioksida. Faktor lain yang juga diduga menjadi penyebab tingginya pencemaran udara pada lokasi tersebut adalah minimnya tanaman pelindung.

Profil Kandungan nitrogen oksida (NO₂) pada kawasan industri

Hasil pengukuran kandungan NO₂ dari sampel pada kawasan industri diperlihatkan pada Gambar 3.36 bahwa konsentrasi NO₂ tertinggi tercatat di sekitar perbengkelan Jln. Twk. M. Daudsyah-Peunayong (KU-11) yaitu sebesar 54,2 µg/Nm³ dengan waktu pengukuran pada sore hari, sedikit berbeda dengan waktu pengukuran pada pagi hari yaitu 49,16 µg/Nm³. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan saat pengambilan sampel udara bahwa pada kedua lokasi tersebut memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi.

Konsentrasi NO₂ rata-rata terendah terdapat pada lokasi sekitar industri Tahu Solo - Gampong Punge Blang Cut (KU-08) yaitu 18,25 µg/Nm³ dengan waktu pengukuran pada sore hari, dimana lokasi tersebut merupakan kawasan dengan laju mobilitas yang rendah dan terdapat banyak pohon pelindung disekitar lokasi usaha.



Gambar 3.36
Hasil uji laboratorium kualitas udara dengan parameter Nitrogen oksida (NO₂) pada kawasan industri

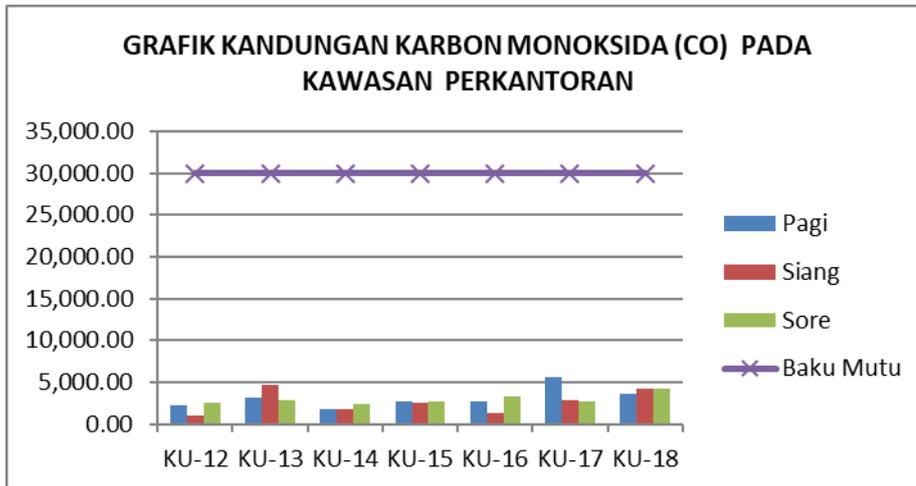
D.3. Profil Kualitas Udara Di Kawasan Perkantoran

Pengukuran kualitas udara pada kawasan perkantoran diwakili oleh tujuh titik, lokasi tersebut representatif untuk kawasan perkantoran. Berikut adalah titik lokasi pengukuran kualitas udara dan tingkat kebisingan pada kawasan perkantoran, yaitu:

1. Balai Kota (KU-12)
2. Jln. Sudirman (KU-13)
3. Persimpangan Rumah Sakit Meuraxa (KU-14)

4. Area Kantor Gubernur (KU-15)
5. Persimpangan BLUD RSUDZA (KU-16)
6. Persimpangan Jalan Cut Meutia (KU-17)
7. Persimpangan Kantor Bapedal Prov. Aceh (KU-18)

Profil Kandungan Karbon monoksida (CO) pada kawasan perkantoran



Gambar 3.37

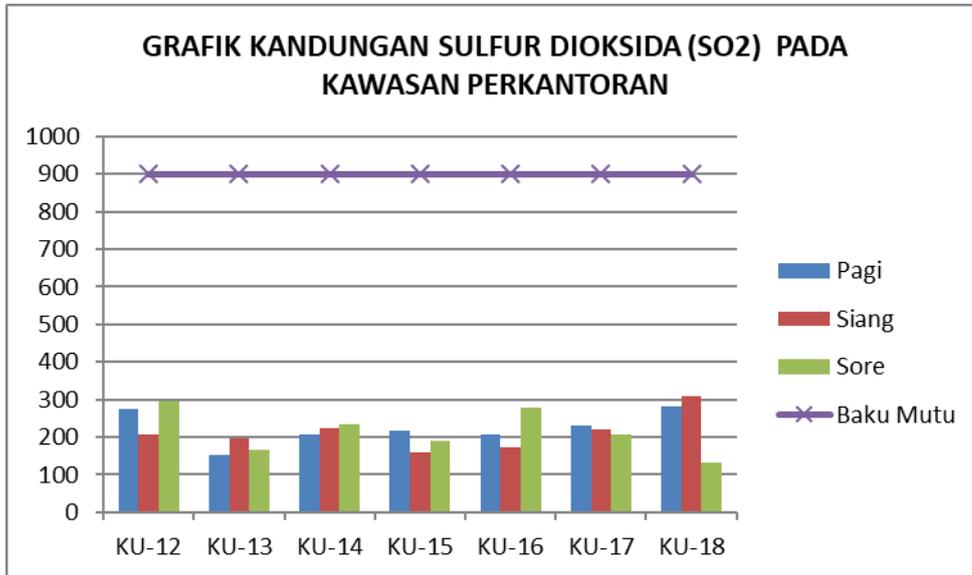
Hasil uji laboratorium kualitas udara dengan parameter Karbon monoksida (CO) pada kawasan perkantoran

Profil konsentrasi CO pada semua lokasi sampling pada kawasan perkantoran dipaparkan pada Gambar 3.37, yaitu lokasi dengan jumlah konsentrasi CO tertinggi terdeteksi di persimpangan kantor Bapedal Aceh (KU-18) yaitu sebesar 5.611,45 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dengan waktu pengukuran pada pagi hari, sedangkan lokasi dengan jumlah konsentrasi CO terendah adalah di kawasan Balaikota Banda Aceh yaitu 2.530,87 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dengan waktu pengukuran pada siang hari. Dengan baku mutu CO sebesar 30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ maka dapat diinformasikan bahwa berdasarkan hasil uji kualitas udara pada kawasan perkantoran selama periode triwulan 1, 2 dan 3, parameter CO masih berada dibawah baku mutu.

Profil Kandungan Sulfur dioksida (SO₂) pada kawasan perkantoran

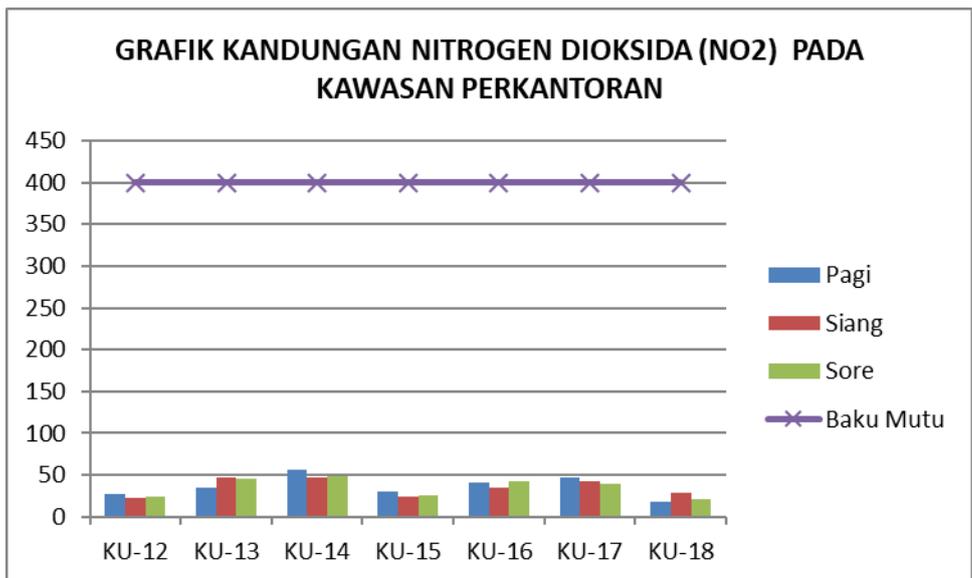
Data konsentrasi SO₂ hasil analisa laboratarium menunjukkan bahwa semua lokasi sampling pada kawasan perkantoran masih berada dibawah baku mutu (900 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$) sebagaimana dipaparkan pada Gambar 3.38. Konsentrasi SO₂ tertinggi tercatat pada lokasi persimpangan Kantor Bapedal Aceh (KU-18) yaitu sebesar 309,16 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dengan waktu pengukuran pada siang hari. Lokasi sampling adalah kawasan perkantoran dimana lokasi sampling merupakan akses keluar-masuk dari kantor DPR Aceh, Bapedal Aceh, Bappeda Aceh,

dan akses warga Gampong Laksana. Waktu pengukuran yang dilakukan pada siang hari menunjukkan gambaran bahwa peningkatan aktivitas perkantoran memberi kontribusi besar terhadap peningkatan konsentrasi SO_2 , berbeda dengan hasil pengukuran pada waktu sore hari yaitu sebesar $131,39 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Sedangkan konsentrasi SO_2 terendah tercatat di jalan Jend. Sudirman (KU-13) yaitu sebesar $153,57 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dengan waktu pengukuran pada pagi hari.



Gambar 3.38 Hasil uji laboratorium kualitas udara dengan parameter Sulfur dioksida (SO_2) pada kawasan perkantoran

Profil Kandungan Nitrogen oksida (NO_2) pada kawasan perkantoran



Gambar 3.39 Hasil uji laboratorium kualitas udara dengan parameter Nitrogen Oksida (NO_2) pada kawasan perkantoran

Hasil analisa kandungan NO₂ dari sampel pada kawasan perkantoran diperlihatkan pada Gambar 3.39, dimana 7 (tujuh) lokasi sampling tercatat masih dibawah baku mutu (400 µg/Nm³). Hasil pengukuran diperoleh data konsentrasi NO₂ yang tertinggi pada Persimpangan Rumah Sakit Meuraxa (KU-14) yaitu 56,36 µg/Nm³ dengan waktu pengukuran pada pagi hari. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan saat pengambilan sampel udara bahwa disekitar lokasi tersebut sedang berlangsung pekerjaan konstruksi gedung milik RSU Meuraxa dengan berbagai kendaraan berat melintas.

Lokasi pengukuran yang berdekatan dengan saluran drainase induk yang terbuka diduga memberi pengaruh terhadap peningkatan konsentrasi NO₂ dimana drainase tergenang oleh air limbah domestik, sehingga diduga menjadi penyebab peningkatan konsentrasi NO₂ karena terjadi penguapan terhadap unsur nitrogen.

Konsentrasi NO₂ terendah terdapat pada lokasi persimpangan Kantor Bapedal Aceh (KU-18) yaitu sebesar 17,47 µg/Nm³ dengan waktu pengukuran pada pagi hari.

D.4. Profil Kualitas Udara Di Kawasan Pemukiman

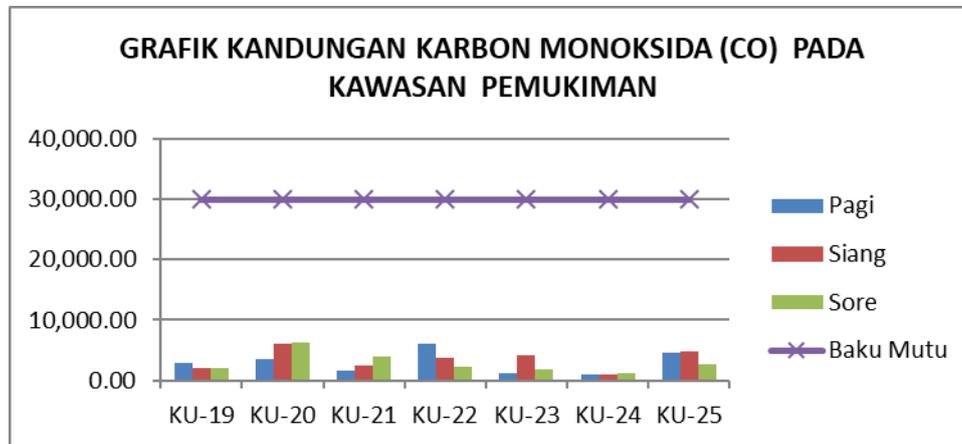
Pengukuran kualitas udara pada kawasan pemukiman diwakili oleh 7 (tujuh) titik, lokasi tersebut representatif untuk kawasan pemukiman. Data konsentrasi SO₂ hasil analisa laboratorium menunjukkan bahwa semua lokasi sampling pada kawasan pemukiman yang diwakili oleh 7 (tujuh) titik sampling masih berada dibawah baku mutu (900 µg/Nm³). Berikut akan dijabarkan hasil pengukuran kualitas udara dan membandingkannya dengan baku mutu kualitas udara pada kawasan pemukiman, dengan lokasi sampling adalah sebagai berikut:

1. Gampong Bandar Baru (Lampriet) (KU-19)
2. Gampong Lampineung (KU-20)
3. Gampong Laksana (KU-21)
4. Gampong Lueng Bata (KU-22)
5. Gampong Jawa (KU-23)
6. Gampong Mulia (KU-24)
7. Gampong Lampulo (KU-25)

Profil Kandungan Karbon monoksida (CO) pada kawasan permukiman

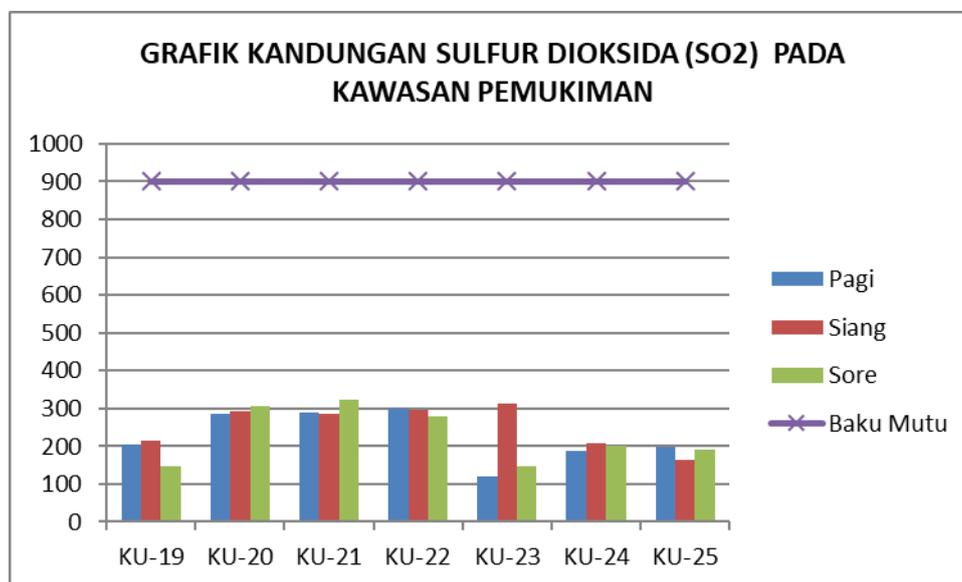
Profil konsentrasi CO pada kawasan pemukiman dipaparkan pada Gambar 3.40. Dengan baku mutu CO sebesar 30.000 µg/Nm³ dapat diinformasikan bahwa berdasarkan hasil uji kualitas udara selama periode triwulan 1, 2 dan 3, kondisi CO masih berada dibawah baku mutu.

Dapat dijelaskan bahwa lokasi Gampong Lampineung (KU-20) dengan waktu pengukuran pada sore hari memiliki konsentrasi tertinggi yaitu 6.298,56 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dan Gampong Mulia (KU-24) memiliki konsentrasi terendah yaitu sebesar 1.053,57 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dengan waktu pengukuran pada pagi hari.



Gambar 3.40
Hasil uji laboratorium kualitas udara dengan parameter Karbon monoksida (CO) pada kawasan pemukiman

Profil Kandungan Sulfur dioksida (SO₂) pada kawasan permukiman

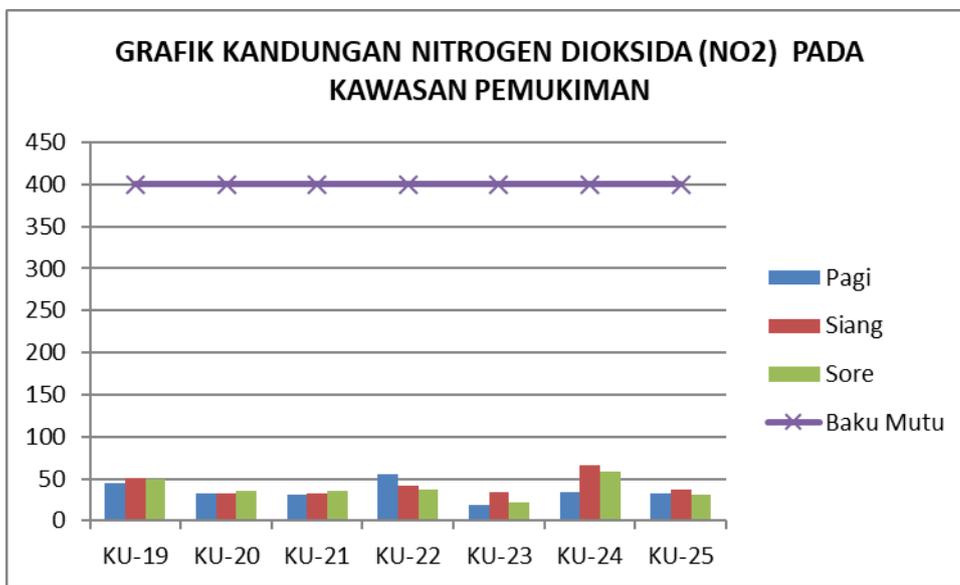


Gambar 3.41
Hasil uji laboratorium kualitas udara dengan parameter Sulfur Dioksida (SO₂) pada kawasan pemukiman

Konsentrasi SO₂ tertinggi tercatat pada lokasi sampling Gampong Laksana (KU-21) yaitu sebesar 321,27 µg/Nm³ dengan waktu pengukuran pada sore hari. Sedangkan konsentrasi terendah tercatat di Gampong Jawa (KU-23) yaitu sebesar 121,53 µg/Nm³ dengan waktu pengukuran pada pagi hari.

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh informasi bahwa situasi disekitar Gampong Laksana merupakan persimpangan strategis dengan tingkat mobilitas yang tinggi sebagai penghubung antara jalan Daud Beureueh dan jalan Pocut Baren serta beberapa Gampong. Hal tersebut mempengaruhi kualitas udara khususnya sulfur dioksida.

Profil Kandungan Nitrogen oksida (NO₂) pada kawasan perkantoran



Gambar 3.42 Hasil uji laboratorium kualitas udara dengan parameter Nitrogen oksida (NO₂) pada kawasan pemukiman

Berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian laboratorium untuk parameter nitrogen oksida (NO₂) diperoleh data sebagaimana dipaparkan pada Gambar 3.42. Konsentrasi NO₂ pada seluruh lokasi sampling untuk kawasan pemukiman masih berada dibawah baku mutu (400 µg/Nm³). Hasil pengukuran menunjukkan lokasi dengan konsentrasi NO₂ tertinggi adalah Gampong Mulia (KU-24) yaitu sebesar 65,67 µg/Nm³ dengan waktu pengukuran pada siang hari. Sedangkan konsentrasi terendah adalah Gampong Jawa (KU-23) yaitu sebesar 19,3 µg/Nm³ dengan waktu pengukuran pada pagi hari.

3.2.1.2 Analisis *Pressure*

Pertumbuhan penduduk dan bertambahnya kendaraan pribadi menjadi penyebab penurunan kualitas udara di Kota Banda Aceh. Hal tersebut merupakan satu sisi dari pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Adapun tekanan yang diterima oleh lingkungan hidup adalah:

1. Situasi disekitar perbengkelan di jalan Twk. M. Daudsyah terdapat banyak perbengkelan roda 2 dan roda 4 yang aktif yang menghasilkan emisi gas buang. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas udara khususnya sulfur dioksida.
2. Terjadinya penurunan kualitas udara, dimana terlampauinya ambang batas parameter tingkat kebisingan terhadap lokasi kawasan pemukiman, kawasan industry dan pusat bisnis, serta kawasan transportasi.

3.2.1.3 Analisis *Response*

Penegakan hukum melalui Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup yang bersumber dari Dana APBK Kota Banda Aceh Tahun 2016 dan 2017, DLHK3 Banda Aceh mencoba untuk lebih intens dalam bidang pengawasan dengan menginventarisir setiap usaha/kegiatan dalam kepemilikan dokumen lingkungan hidup. Kegiatan pengawasan yang mengarah kepada pelaku usaha/kegiatan sebagai kontributor pencemaran udara memberi dampak terhadap pengendalian pencemaran kualitas udara, sehingga turut memberi pengaruh kepada peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup disekitar usaha/kegiatannya.

Disamping itu, upaya tersebut juga diharapkan dapat mendeteksi sejauh mana dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan SPPL) yang telah disusun dan dimiliki oleh pelaku usaha/kegiatan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dapat tercapai.

Program khusus "Ayo Naik Bus" yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh memberi dampak simultan terhadap kualitas udara dan perilaku berkendara di Kota Banda Aceh. Perubahan pola berkendara menunjukkan berkurangnya volume kendaraan dijalanan, dimana jumlah pengguna bus Trans Kutaraja semakin meningkat dengan komposisi mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa.

Tabel 3.1

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Angkutan Umum	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jmlh	mlh KIR	%												
1	Mobil penumpang umum	572	264	46,15	545	273	50,09	121	257	106,2	80	91	56,88	95	71	37,37
2	Mobil bus	1,455	798	54,84	1,991	1022	51,33	1,046	1.740	83,17	1.050	1.651	78,62	1,187	1.756	73,97
3	Mobil barang	5,338	2868	53,72	6,781	3793	55,93	3,728	6.174	82,81	3.491	5.949	85,20	4.180	6.370	76,20
4	Kereta gandengan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kereta tempelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	7365	3930	53,36	9317	5088	54,61	4895	8171	83,46	4621	7691	83,22	5462	8197	75,04

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengendalian kualitas lingkungan adalah dengan penegakan aturan berlalu-lintas. Melalui Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh kegiatan KIR kendaraan bermotor terus dilakukan melalui sosialisasi dan operasi ketertiban angkutan umum/ razia bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan target akhir menjaga kualitas kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu-lintas dan menjaga kualitas udara.

3.3 RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

3.3.1 Hasil Analisa *State, Pressure and Response* Pencemaran Udara di Kota Banda Aceh

3.3.1.1 Analisa *State*

Pemerintah Kota Banda Aceh sangat berkomitmen melakukan upaya peningkatan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan perencanaan yang matang dan berkesinambungan. Perencanaan RTH merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan antar generasi, sehingga diharapkan dapat diperoleh arah, bentuk, fungsi, dan peran RTH pada masing-masing kawasan secara menyeluruh, baik dalam kedudukannya sebagai RTH alami berupa habitat liar alami maupun RTH non alami atau binaan. Pada prinsipnya perencanaan RTH disusun sebagai upaya untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan kota, sebagai upaya menjaga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara ruang terbangun dengan RTH.

Sejak tahun 2010 pertumbuhan RTH Kota Banda Aceh terus menjadi konsentrasi dalam masterplan dan seiring dengan pertumbuhan kota. Data pada Tabel 3.2 menunjukkan luasan RTH yang ada di Kota Banda Aceh tahun 2016.

Tabel 3.2.

Luas dan Komponen RTH Kota Banda Aceh Tahun 2018

NO	NAMA & LOKASI TAMAN	LUAS (m ²)	AREA	LUAS AREA (Ha)
1	2	3		4
I	TAMAN			
A	TAMAN KOTA			
1	Taman Sari dan Kids Rock		2.370,00	0,24
2	Taman Edukasi Tsunami		3.546,71	0,35
3	Taman Nursery Bustanussalatin		2.881,39	0,29
4	Taman Bermain Ulee-Lheu		5.312,25	0,53
5	Taman Lambung		28.565,86	2,86
6	Taman Wisata di Belakang Dinas Pariwisata		19.448,00	1,94
7	Taman Kolam Wisata Dinas Pariwisata Banda Aceh		12.766,92	1,28
8	Taman Pantai Cermin		74.771,51	7,48
B	TAMAN WISATA KULINER			
6	Taman Depan APK Keudah		651,66	0,07
7	Taman Tepi Pantai Sungai		2.422,71	0,24
8	Taman Simpang Mesra		565,53	0,06
C	TAMAN TUGU			
9	Taman Tugu Adipura		3.156,77	0,32
10	Taman Tugu BRI		1.237,05	0,12
11	Taman Tugu BI		261,52	0,03
12	Taman Tugu Prasasti Krueng Aceh (Depan Rest. Lamnyong)		692,77	0,07
13	Taman Tugu Bukopin		387,41	0,04
D	TAMAN SIMPANG/TEPI JALAN			
Ii	TAMAN SEPUTARAN SIMPANG LIMA			
14	Taman Pulau Jalan JL. Sri Ratu Safiatuddin		216,76	0,02
15	Taman Median Jalan Jl. Panglima Polem		1.603,15	0,16
16	Taman Depan Toko Galeri		444,28	0,04
17	Taman Pulau Jalan JL. Mayj. Hamzah Bendahara		309,73	0,03
18	Taman Simpang Pusri		1.178,00	0,12
19	Taman Pak Ali		226,44	0,02
Iii	TAMAN SEPUTARAN MESJID RAYA			
20	Taman Pulau Jalan Depan Mesjid Raya		436,90	0,04
21	Taman Pulau Jalan Depan Barata		146,81	0,01
22	Taman Samping Toko Simbun Sibreh		94,43	0,01
23	Taman Kaca		346,98	0,03
24	Taman BTPN		464,32	0,05
25	Taman Kelapa Sawit		1.581,26	0,16
Iiii	TAMAN SEPUTARAN SIMPANG EMPAT JAM			
26	Taman Tugu BNI	96,29		0,01
27	Taman Pulau Jalan Simpang Empat Jam		43,66	0
28	Taman Pulau Jalan JL. Teuku Umar		121,15	0,01
29	Taman PSSI		2.553,43	0,26
Iv	TAMAN SEPUTARAN SIMPANG SURABAYA			
30	Taman Pulau Jalan JL. Chik Ditiro		21,97	0
31	Taman Pulau Jalan JL. Imuem Lueng Bata		192,25	0,02
32	Taman Median Jalan T. Hasan Dek		941,36	0,09

V	TAMAN SEPUTARAN SIMPANG JAMBO TAPE		
33	Taman Pulau Jalan Jl. Syiah Kuala -T. Nyak Arief	219,84	0,02
34	Taman Pulau Jalan Jl. T. Hasan Dek - Moh. Daud Beureueh	61,87	0,01
35	Taman Pulau Jalan Jl. T. Nyak arief - Jl. T. Hasan Dek	348,52	0,03
Vi	TAMAN SEPUTARAN SIMPANG RATU SAFIATUDDIN		0
36	Taman Tugu Ratu Safiatuddin	1.166,80	0,12
37	Taman Pulau Jalan Jl. Ratu Safiatuddin	75,00	0,01
Vii	TAMAN SIMPANG MAN		
38	Taman Pulau Jalan Jl. Syiah Kuala - Jl. Pocut Baren (1)	67,84	0,01
39	Taman Pulau Jalan Jl. Pocut Baren - Jl. Syiah Kuala (1)	157,96	0,02
40	Taman Pulau Jalan Jl. Syiah Kuala - Jl. Pocut Baren (2)	92,60	0,01
41	Taman Pulau Jalan Jl. Pocut Baren - Jl. Syiah Kuala (2)	73,44	0,01
Viii	TAMAN SIMPANG JALAN ANGSA LUENG BATA		
42	Taman Simpang Lueng Bata (6 Titik)	1.800,00	0,18
iX	TAMAN PERSIMPANGAN LAINNYA		
43	Taman Simpang Jl. T. Nyak Makam dan Jl. T. Iskandar	361,58	0,04
44	Taman Simpang Ketapang	74,92	0,01
45	Taman Simpang Neusu	53,43	0,01
46	Taman Simpang Jl. Diponegoro dan Jl. Cut Mutia	67,60	0,01
47	Taman Simpang Jalan Dayah Glumpang	67,60	0,01
48	Taman Simpang Pasar Peunanyong	37,30	0
49	Taman Simpang Jl.Chik Ditiro dan Jl. Taman Makam Pahlawan	65,00	0,01
X	TAMAN TEPI JALAN IMUEM LUENG BATA		
50	Taman Depan Hotel Oasis	144,15	0,01
51	Taman Depan Perumahan PLN	104,85	0,01
52	Taman Depan Kantor GAPENSI	604,16	0,06
53	Taman Depan Kantor ASKRINDO	604,16	0,06
54	Taman Depan Gudang PLN	156,19	0,02
55	Taman Seberang Jalan Depan Kantor PAN	137,69	0,01
E	RTH BANTARAN SUNGAI		
56	Taman Bermain Lingke	12.544,39	1,25
57	Taman Asoi Nanggroe	2.252,00	0,23
58	RTH - Bantaran Sungai Alue Naga	1.838,02	0,18
59	RTH - Bantaran Sungai Krueng cut-Alue Naga	18.970,47	1,9
60	RTH - Bantaran Sungai Krueng Cut-Tibang(1)	1.189,28	0,12
61	RTH - Bantaran Sungai Krueng Cut-Tibang(2)	165,50	0,02
62	RTH - Bantaran Sungai Krueng Cut-Tibang(3)	396,86	0,04
63	RTH - Bantaran Sungai Krueng Cut-Tibang(4)	2.046,54	0,2
64	RTH - Bantaran Sungai Krueng Cut-Alue Naga(1)	3.612,55	0,36
65	RTH - Bantaran Sungai Krueng Doy-Belakang RTH POM	3.995,26	0,4
66	RTH - Bantaran Sungai Krueng Doy-Belakang RTH POM	1.117,58	0,11
67	RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh	28.948,32	2,89
68	RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh	2.096,46	0,21
69	RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh	2.368,22	0,24
70	RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh-Depan KODAM	9.102,98	0,91
71	RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh-(Penanyong-TPA)	20.190,04	2,02
72	RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh-(Beurawe-Pango)	104.184,80	10,42
73	RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh-(Lamsepueng)	67.629,31	6,76
74	RTH-Taman Tugu BPD	1.951,92	0,2
75	RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh-(Taman Tugu BPD)	15.028,51	1,5
76	RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh- (Pango Deah)	15.688,63	1,57

77	RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh-(Jl. S.T.A)	2.624,18	0,26
	SUB JUMLAH	494.541,55	49,47
II	HUTAN KOTA BANDA ACEH		
1	Hutan Kota Depan Mesjid Raya	1.847,85	0,18
2	Hutan Kota Depan POM	3.149,78	0,31
3	Taman Putroe Phang	24.245,54	2,42
4	Hutan Kota Makam Kherkhoff Pocut	74.500,00	7,45
5	Hutan Kota Simpang Tiga Mata'ie	930,69	0,09
6	Taman Jembatan Surabaya	2.236,36	0,22
7	Hutan Kota Ratu Safiatuddin	17.143,63	1,71
8	Bantaran Sungai Krueng Cut	50.380,56	5,04
9	Hutan Kota BNI Tibang	67.500,00	6,75
10	Hutan Kota Peulanggahan	25.868,88	2,59
11	Hutan Kota Rukoh	4.998,17	0,5
12	Hutan Kota Lamnyong	5.171,31	0,52
13	Hutan TPA	7.990,59	0,8
	SUB JUMLAH	85.963,36	28,58
III	LAPANGAN OLAH RAGA		
1	Lapangan Blangpadang	94.967,00	9,5
2	Lapangan Tugu Pelajar Unsyiah	53.978,00	5,4
3	Lapangan Olah Raga Unsyiah	28.216,00	2,82
4	Stadion H. Dimurthala	13.670,00	1,37
5	Lapangan Olah raga Neusu	12.671,00	1,27
	SUB JUMLAH	203.502,00	20,36
IV	JALUR HIJAU JALAN	5.480.000,00	548
	SUB JUMLAH	5.480.000,00	548,00
V	MAKAM		
1	Kuburan Kota Baro	6.650,00	0,67
2	Kuburan Keudah	12.400,00	1,24
3	Kuburan Beurawe	1.400,00	0,14
4	Kuburan Beurawe Dalam	2.480,00	0,25
5	Kuburan Pelanggahan	4.600,00	0,46
6	Kuburan Mulia	10.695,00	1,07
7	Kuburan Setui	6.400,00	0,64
8	Kuburan/Makam Massal Kampung Pande	1.995,00	0,2
9	Kuburan Massal Ulee Lheu	7.300,00	0,73
10	Kuburan Taman Bahagia	8.700,00	0,87
11	Kuburan Lingke	2.140,00	0,21
12	Kuburan Samping Asrama Haji	6.889,00	0,69
13	Tempat Pemakaman Umum 9 Kecamatan	8.135,80	0,81
	SUB JUMLAH	79.784,80	7,98
VI	RTH Telaga/Waduk/Boezem	145.700,00	14,57
	SUB JUMLAH	145.700,00	14,57
TOTAL LUAS RTH PUBLIK		6.689.491,71	809,654

3.3.1.2 Analisa *Pressure*

Luas RTH Publik Kota Banda Aceh sebesar 809,654 Ha atau 13,2% dari total luas wilayah Kota Banda Aceh. Dengan demikian luas RTH Publik di Kota Banda Aceh masih perlu dilakukan penambahan dan pengembangan. Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh terus berkomitmen

untuk melakukan peningkatan dan pembatasan perkembangan lahan non pertanian. Pemko Banda Aceh menyadari tidak mudah menumbuhkan RTH dengan terbatasnya lahan, namun upaya peningkatan ruang terbuka hijau dengan menambah koleksi flora dan peremajaan ruang terbuka hijau kini menjadi konsentrasi utama.

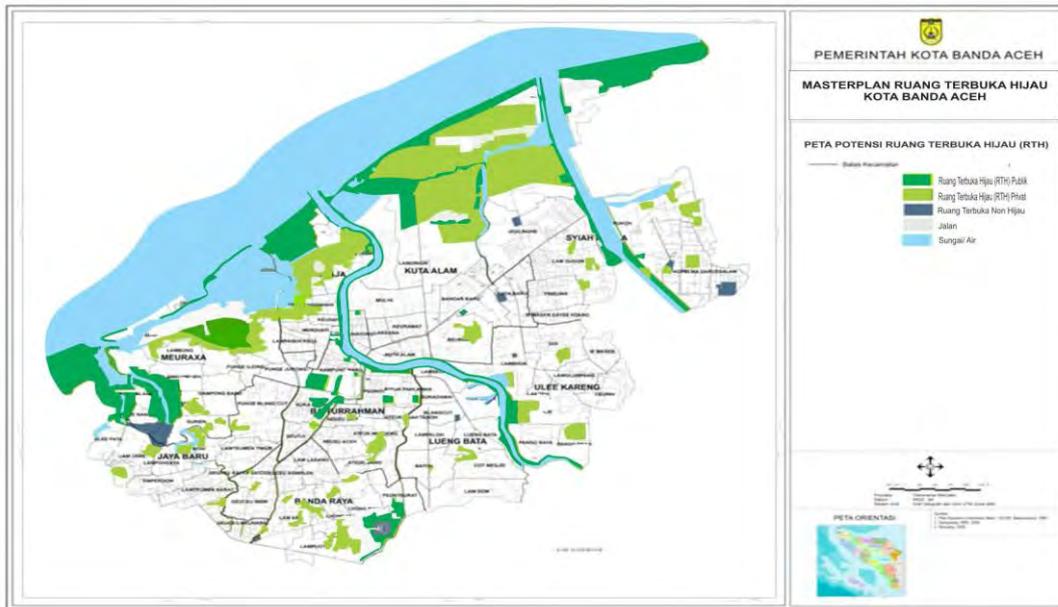
Tekanan yang dihadapi adalah pertumbuhan dan pengembangan kota yang memaksa terjadinya alih fungsi lahan terbuka dan lahan pertanian serta peternakan menjadi area perumahan dan bangunan pendukung aktivitas ekonomi warga. Regulasi-regulasi untuk menguatkan peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatur ruang terbuka hijau juga perlu dibuat, terutama regulasi terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang selektif, khususnya di beberapa kawasan seperti di Kecamatan Ulee kareng, Banda Raya dan Jaya Baru.

3.3.1.3 Analisa *Response*

Perencanaan terhadap RTH di Kota Banda Aceh telah disusun dalam bentuk Masterplan RTH Kota Banda Aceh. Perencanaan ini tersusun dalam kerangka indikasi program yang sistematis dan realistis dalam rangka implementasi RTRW Kota Banda Aceh dan pemenuhan amanat UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Beberapa program yang termuat di dalam Masterplan RTH Kota Banda Aceh ini adalah pemetaan RTH eksisting dan menetapkan rencana pembangunan RTH dalam periode 20 tahun sesuai RTRW Kota Banda Aceh, sekaligus sebagai dasar untuk penetapan lokasi-lokasi yang diprioritaskan perwujudannya. Hal ini sangat penting sebagai upaya alternatif meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dengan cara pengoptimalan fungsi ekologi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP).

Tahun 2017 Pemko Banda Aceh telah melakukan pembebasan lahan hutan mangrove seluas 20 ha untuk memperluas RTH Hutan Kota. Upaya tersebut diharapkan dapat terus menjaga tren peningkatan luasan RTH sebagaimana diamanatkan dalam UU No.26 Tahun 2007.

RTH Publik Kota Banda Aceh ada yang berbentuk *hub/core/area* berupa taman kota (taman wisata, taman edukasi, taman nurseri, taman tugu), hutan kota, hutan mangrove, lapangan olahraga dan makam, sedangkan yang berbentuk *link/corridor/jalur hijau* berupa pulau jalan dan jalur hijau, sepadan sungai, dan sepadan pantai. Sementara itu, RTH Privat terdiri dari RTH perkarangan dan RTH Pertanian Kota dan Tambak. Sesuai dengan masterplan RTH Kota Banda Aceh telah dilakukan pendataan untuk Penggunaan Luas RTH Eksisting dan Potensi RTH di Kota Banda Aceh.



Gambar 3.43.
Peta Potensi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Banda Aceh

Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum mempunyai fungsi yang sangat penting secara ekologis seperti memperbaiki dan menjaga iklim mikro, mengurangi polusi udara, menghasilkan oksigen, peresapan air, dan konservasi keanekaragaman hayati. Secara estetika RTH dapat dimanfaatkan sebagai tempat ekowisata, olah raga, dan bermain. Fungsi penting lainnya adalah sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kajian-kajian dan penelitian tentang berbagai aspek RTH di Kota Banda Aceh sudah banyak dan akan terus dilakukan. Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan yang terkait dengan RTH ini, dan saat ini salah seorang dosen dari Jurusan Biologi FMIPA, Universitas Syiah Kuala sedang mengkaji keterkaitan RTH Kota Banda Aceh dengan emisi gas karbon dan upaya pelestarian keragaman hayati untuk Disertasi Doktoralnya.

Kota Banda Aceh telah memiliki beberapa jenis RTH dengan fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Bentuk dan kondisi RTH di Kota Banda Aceh antara lain adalah sebagai berikut:

1. Taman Kota



Gambar 3.44 Taman Kota di Banda Aceh

Taman kota merupakan ruang di dalam kota yang secara estetika ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunanya. Selain itu, secara ekologis taman kota difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, dan habitat berbagai flora dan fauna. Secara sosiologis, taman kota juga berperan sebagai sarana pengembangan budaya kota, pendidikan, dan pusat kegiatan kemasyarakatan.

Kota Banda Aceh mempunyai beberapa taman kota diantaranya: Taman Sari, Taman Nurseri Bustanussalatin, Taman Adipura, Taman Cagar Budaya Putroe Phang di Kecamatan Baiturrahman, Taman Edukasi Tsunami di Kecamatan Jaya Baru, Taman Tepi Kali di Kecamatan Kuta Alam dan taman-taman kecil lainnya berupa pulau jalan serta taman sudut jalan.

2. Hutan Kota

Hutan Kota merupakan suatu hamparan lahan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang bervariasi, serasi dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat dengan luas minimal sebesar 0,25 ha, dalam satu hamparan yang kompak (hamparan yang menyatu). Hutan Kota mempunyai beberapa fungsi ekologis seperti memperbaiki dan menjaga iklim mikro, menyaring polusi, menyerap gas karbon monoksida hasil pembakaran kendaraan bermotor dan rumah tangga, menghasilkan oksigen, peresapan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Secara estetika hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata alam, rekreasi, olah raga, dan bermain. Tidak hanya itu, hutan kota juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat

pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian plasma nutfah, dan budidaya hasil hutan bukan kayu



Gambar 3.45. Taman Kota di Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala

Hutan kota di Kota Banda Aceh terdapat di beberapa tempat, seperti Hutan Kota di depan Mesjid Raya Baiturrahman, Hutan Kota di samping POMDAM, dan Sisi Barat Kanal Krueng Aceh yang luasnya rata-rata kurang 0,25 ha. Luas yang demikian belum memenuhi syarat sebagai hutan kota. Hutan kota yang cukup memenuhi syarat sebagai hutan kota terdapat di Kecamatan Syiah Kuala (Desa Tibang) dengan luas 12,8 Ha, hutan kota di Kecamatan Baiturrahman seluas 7,38 Ha (Desa Kampung Baru dan Suka Ramai) dan Kecamatan Kuta Alam dan Kuta Raja masing-masing seluas 2,71 Ha dan 2,30 Ha.

Penelitian tentang keragaman hayati (vegetasi, burung dan kupu-kupu) yang terdapat di hutan kota Desa Tibang sudah dilakukan oleh beberapa dosen dan mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala. Vegetasi yang terdapat di hutan kota ini ada yang berasal dari luar Aceh yang merupakan sumbangan dari berbagai instansi pemerintah dan swasta. Tercatat sebanyak 30 jenis kupu-kupu dari tujuh familia hidup dan berkembang di hutan ini. Selain itu hutan kota di Desa Tibang ini juga menjadi tempat untuk beberapa jenis burung migrant.

3. RTH Jalur Hijau Jalan

Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman perdu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kiri-kanan jalan dan median jalan. RTH jalur pengaman jalan terdiri dari RTH jalur pejalan kaki, taman pulau jalan yang terletak di tengah persimpangan jalan, dan taman sudut jalan yang berada di sisi persimpangan jalan. RTH Jalur Hijau Jalan ini juga mempunyai peran yang hampir sama baik secara ekologis dan estetika dengan hutan kota. Jalur hijau jalan ini sangat penting bagi keselamatan pejalan kaki perlindungan dari hujan dan sengatan matahari. Selain itu, akar pepohonan dapat menyerap

dan menyimpan air hujan sebagai cadangan air tanah dan dapat menetralsisir limbah yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan.



Gambar 3.46 Kondisi Jalur Hijau di beberapa ruas jalan Kota Banda Aceh

RTH jalur hijau jalan di Kota Banda Aceh berada hampir di setiap kawasan Kota Banda Aceh, terutama pada jalan-jalan utama di pusat kota seperti di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah, Jalan Daud Beureuh, Jalan T. Nyak Arief, Jalan Teuku Umar, Jalan Tjut Nyak Dhien, Jalan tdk. Chik DiTiro, Jalan Tgk. Imuem Lueng Bata, Jalan Panglima Nyak Makam dan beberapa ruas jalan lainnya (Gambar 3.5). Sebagian jalur hijau tersebut sudah tertata dengan baik dan sesuai dengan fungsinya. Jenis vegetasi yang ditanam pada jalur hijau jalan ini sangat bervariasi yang terdiri dari vegetasi pohon kayu, perdu/semak dan penutup tanah. Sebahagian jalur hijau jalan dipasang *paving block* dan ditanam pohon ditengahnya, sehingga terkesan sebagai pulau-pulau jalan. RTH Jalur hijau jalan terluas terdapat di Kecamatan Syiah Kuala dengan luas 10,91 Ha, disusul dengan Kecamatan Lueng Bata seluas 7,98 Ha.

4. RTH Jalur Hijau Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, mengamankan aliran sungai, dan dikembangkan sebagai area penghijauan. Fungsi lain dari sempadan adalah untuk menyerap aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana alam serta ekowisata.

Krueng Aceh merupakan sungai terbesar dan terpanjang yang membelah Kota Banda Aceh, disamping itu juga di Kota Banda Aceh terdapat sungai-sungai kecil seperti Krueng Daroy, Krueng Cut, Krueng Doy, Krueng Neng dan Krueng Lueng Paga. Sempadan sungai yang sudah ditata menjadi RTH yaitu pada Krueng Aceh, dan Krueng Daroy, sebagian Krueng Neng dan Krueng Luengpaga. Sesuai dengan masterplan RTH Kota Banda Aceh, beberapa sempadan

sungai yang belum dibenahi akan terus bangun dan ditata dengan baik agar peran dan fungsi sempadan sungai ini benar-benar terwujud.



Gambar 3.47 RTH Jalur Hijau Sempadan Sungai di Kota Banda Aceh

Hasil survey menunjukkan bahwa RTH Sempadan Sungai terbesar terdapat di Kecamatan Syiah Kuala seluas 48,02 Ha, disusul selanjutnya oleh Kecamatan Banda Raya seluas 19,77 Ha dan Kecamatan Kuta Raja seluas 16,84 Ha. Kawasan RTH Sempadan Sungai tersempit terdapat di Kecamatan Jaya Baru dengan luas hanya 2,23 Ha. Luas RTH sempadan sungai ini akan terus bertambah sesuai dengan masterplan yang sudah dibuat oleh Pemko Banda Aceh. Gambar 3.6 berikut adalah beberapa contoh RTH sempadan sungai yang sudah dibangun dan dikelola oleh Pemko Banda Aceh.

5. RTH Jalur Hijau Sempadan Pantai

RTH sempadan pantai ini umumnya ditumbuhi oleh vegetasi mangrove yang sangat unik tergantung pada kondisi lingkungan fisik kimia di sekitarnya. Secara fisik, RTH Sempadan Pantai ini berfungsi sebagai batas dari pantai, kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan di sekitarnya. Sementara itu fungsi ekologis dari sempadan pantai ini adalah untuk penyerap aliran air, perlindungan habitat, pemijahan dan tempat membesarnya berbagai fauna laut dan estuari serta perlindungan dari bencana alam.

Sesuai dengan letak secara geografis dan topografi Kota Banda Aceh, jalur hijau sempadan pantai di Kota Banda Aceh terletak pada kawasan pesisir utara di Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Syiah Kuala. Kawasan sempadan ini umumnya yang ditumbuhi vegetasi mangrove dan nipah pada areal yang berbatasan langsung dengan pantai, sementara itu kawasan daratannya ditumbuhi oleh kelapa dan cemara. Penataan dan revegetasi kawasan sempadan pantai terus dilakukan sejak tahun 2006, khususnya kawasan yang parah terkena bencana tsunami.

Saat ini revegetasi sudah menampakkan hasil yang sangat signifikan, yaitu dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis vegetasi mangrove. Kawasan-kawasan sempadan

pantai yang dulu hancur akibat tsunami, saat ini telah berubah menjadi kawasan hutan mangrove yang sangat indah. Dampak positif dari bertumbuhnya hutan mangrove ini tentu juga terlihat pada berkembangnya fauna-fauna estuaria seperti kepiting bakau, udang, ikan bandeng dan lain-lain.



Gambar 3.48 RTH Jalur Hijau Sempadan Pantai di Kota Banda Aceh

6. RTH Lapangan Olah Raga

Lapangan olahraga merupakan lapangan yang dibangun untuk menampung berbagai aktifitas olahraga seperti sepak bola, voli, atletik, dan golf serta sarana-sarana penunjangnya. Fungsi lapangan olahraga adalah sebagai sarana wadah interaksi dan olahraga, tempat sosialisasi, bermain, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya.

RTH Lapangan olah raga yang terdapat di kota Banda Aceh antara lain Lapangan Blang Padang, Lapangan Jasdam Neusu, Stadion Lampinueng, Stadion Harapan Bangsa, Lapangan Tugu Darussalam, dan beberapa lapangan bola kaki yang terdapat di tiap-tiap kecamatan di Kota Banda Aceh.



Gambar 3.49 RTH Lapangan Olah Raga di Kota Banda Aceh

Lapangan Blang Padang merupakan RTH yang luas, dan dimanfaatkan sebagai tempat warga Kota Banda Aceh berolah raga setiap pagi dan sore hari. Selain itu lapangan ini juga sering digunakan untuk shalat dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), upacara memperingati hari besar nasional, pameran pembangunan dan pertunjukan musik. Di taman ini juga terdapat replika pesawat Seulawah Air yang merupakan cikal bakal Garuda Indonesia Airways. Sebelah barat dari lapangan ini terdapat Museum Tsunami Aceh.

Dalam lima tahun terakhir ini, Lapangan Blang Padang juga menjadi lokasi tujuan kuliner Kota Banda Aceh. Bagi para warga yang sudah selesai melakukan olah raga pada pagi atau petang hari, biasanya beristirahat sejenak di pojok kawasan Lapangan Blang Padang sambil menikmati kuliner.

7. RTH Pemakaman

RTH Pemakaman secara umum merupakan salah satu fasilitas publik yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. RTH ini juga mempunyai fungsi ekologis yang tak kalah pentingnya yaitu sebagai daerah resapan air, tempat hidup dan berbiaknya berbagai fauna terrestrial, penghasil oksigen dan paru-paru kota, karena pada kawasan ini biasanya juga memiliki lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan. RTH pemakaman yang sudah lama biasanya memiliki vegetasi yang lebih banyak dan dengan ukuran yang sudah besar, sehingga mampu menghasilkan oksigen yang lebih banyak.

RTH Pemakaman di Kota Banda Aceh antara lain Taman Pemakaman Serdadu Belanda (*Kherkhoff*) yang masuk kedalam kawasan Cagar Budaya, Taman Makam Pahlawan di Kecamatan Baiturrahman, Komplek Makam Raja Dikandang di Kecamatan Kura Raja, Kuburan Massal Tsunami Ulee Lheu di Kecamatan Meuraxa dan Kuburan Umum lainnya yang terdapat pada tiap-tiap kelurahan di masing-masing Kecamatan di Kota Banda Aceh (Gambar 3.8).

Taman Pemakaman Serdadu Belanda (*Kherkhoff*) dan Kuburan Massal Tsunami Ulee Lheu juga menjadi tujuan wisatawan tertentu untuk melihat sejarah dan kejadian-kejadian masa lalu. Kedua lokasi RTH pemakaman ini dijaga dan dirawat dengan baik, sehingga juga menjadi lokasi yang cantik dan bersih.



Gambar 3.50 Beberapa RTH Pemakaman di Kota Banda Aceh

8. RTH Perkarangan Rumah

RTH Perkarangan Rumah merupakan lahan di luar bangunan yang luasnya disesuaikan dengan KDB (Koefisien Dasar Bangunan). RTH Perkarangan di Kota Banda Aceh umumnya terdapat pada rumah-rumah dengan luas lahan di atas 300 m², sedangkan pada rumah-rumah dengan lahan 100 m² sampai dengan 300 m², umumnya tidak mengikuti ketentuan KDB yang ditetapkan.

RTH Perkarangan Rumah pada prinsipnya juga dapat menyumbang menghasilkan oksigen karena pada umumnya pekarangan rumah warga selalu ditanami oleh tumbuhan buah atau tanaman hias. Umumnya tanaman buah yang terdapat di pekarangan rumah warga adalah mangga, jambu air, dan sirsak. Selanjutnya tanaman hias yang banyak dijumpai adalah bougenvile dan asoka.

9. RTH Halaman Perkantoran, Gedung Komersial, Masjid dan Sekolah.

RTH halaman perkantoran dan gedung komersial merupakan taman yang lebih kecil dan diperuntukan bagi populasi dan kegiatan terbatas, biasanya digunakan untuk kegiatan upacara, olah raga, sirkulasi udara dan sebagai elemen estetika. RTH halaman di lingkungan perkantoran dan bangunan komersial umumnya belum cukup tersedia, sedangkan di lingkungan sekolah lebih banyak berupa ruang terbuka non hijau. Beberapa instansi dan masjid yang memiliki lahan cukup luas diantaranya di Kompleks Kantor Gubernur Aceh, Kompleks Dinas Pertanian

Aceh, Kompleks Polda Aceh, Kompleks Universitas Syiah Kuala, Kompleks IAIN Ar-Raniry, Politeknik Aceh Pango Raya, Kompleks RSUD Zainal Abidin Banda Aceh dan beberapa instansi lainnya. Selanjutnya Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Jamik Lueng Bata, Masjid Jamik Baitus Salihin Ulee Kareng, Masjid Teuku Umar Setui dan beberapa masjid lainnya.

10. RTH Pertanian Kota.

Kegiatan pertanian tentunya membutuhkan lahan yang cukup luas, sehingga kegiatan ini jarang ditemukan di kawasan pusat kota yang cenderung kepada kegiatan perdagangan dan jasa. Di Kota Banda Aceh kegiatan pertanian masih terdapat pada beberapa wilayah pinggiran kota, antara lain di Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Jaya Baru dan Kecamatan Banda Raya. Kegiatan utamanya berupa budidaya tanaman pangan, hortikultura, kebun campuran, dan kolam ikan yang dikelola oleh masyarakat setempat.

RTH Pertanian di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun semakin berkurang karena beralih fungsi menjadi kawasan terbangun, terutama berubah menjadi kawasan perumahan, perdagangan dan aneka jasa lainnya. Dengan banyaknya ruas jalan yang dibuka maka makin cepat lahan pertanian tersebut di konversi menjadi kawasan permukiman dan perdagangan.

LEGALITAS RTH DAN CAPAIAN PERLUASAN RTH

Dalam rangka menjaga luasan RTH yang telah dimiliki, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan status lahan RTH (secara bertahap) menjadi kawasan lindung dan melarang pengalihan fungsi terhadap RTH tersebut, hal tersebut akan memberi kepastian hukum terhadap masa depan RTH dan dokumen pendukung RTRW Kota Banda Aceh.

Bila dilihat capaian setiap tahunnya, maka penambahan luas RTH relatif mengalami peningkatan hanya pada. Peningkatan tersebut disertai dengan penambahan beberapa lokasi RTH seperti RTH Lambung, RTH Krueng Neng, RTH Ceurih, RTH Taman Hijau Lamjame dan RTH Gampong Pie.

Tabel 3.3
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

No	Jenis RTH Publik	Luas (Ha) 2012	Luas (Ha) 2013	Luas (Ha) 2014	Luas (Ha) 2015	Luas (Ha) 2016
1	RTH Taman dan Jalur Hijau	553.6	568.6	580.7	584.10.00	584.10.00
2	RTH Hutan kota	24.43.00	25.96	27.54.00	29.93	29.93
3	RTH Makam	25.89	26.56.00	27.58.00	27.57.00	27.57.00
4	RTH Lapangan dan Stadion	51.99	55.31.00	60.34.00	60.24.00	60.24.00
5	RTH Tepian Air	72.57.00	92.52.00	107.97	107.97	107.97
Jumlah luasan RTH Total		728.48.00	768.95	804.13.00	809.81	809.81
Luas Kota Banda Aceh		6136.00.00	6136.00.00	6136.00.00	6136.00.00	6136.00.00
Presentase luas RTH terhadap Luas Kota Banda Aceh		11,87	12.53	13.11	13.2	13.2

Selain pencapaian luas, dibawah Dinas Lingkungan Hidup juga memelihara dan menangani pemeliharaan RTH publik dengan pencapaian di tahun 2018 sebagai berikut

Tabel 3.4
Tabel Pemeliharaan dan Penanganan RTH

Sasaran	No	Indikator Kinerja			%
		Uraian	Target	Realisasi	
Bertambahnya areal Ruang terbuka hijau (RTH) yang hijau, bersih, indah dan nyaman di Kota Banda Aceh guna mendukung kepariwisataan	1	Jumlah pohon yang ditanam	1000 pohon/batang	1.322 pohon/batang	132,2
	2	Jumlah RTH yang terpelihara dengan baik	15 lokasi	22 lokasi	106,1

Penanaman Tanaman Hias dan Penghijauan tiap tahun dilakukan untuk meningkatkan keindahan dan menciptakan kota yang teduh. Tahun 2018, penanaman tanaman hias banyak ditanam di beberapa median jalan dan taman pulau jalan, sedangkan penanaman pohon banyak dilakukan di Hutan Kota BNI Tibang dan Gampong Beurawe (jenis pohon matoa) kerjasama dengan Geuchik Gampong Beurawe.

Pemeliharaan taman dan RTH lainnya menjadi prioritas dalam menentukan keberhasilan untuk menciptakan RTH yang bersih, indah dan nyaman. Pada tahun 2018, meningkatnya jumlah pemeliharaan taman sebanyak 17 lokasi yaitu : Taman Krueng Neng, RTH Lambung, Taman Gampong pie, Median Jl. Sultan Alaidin Mansursyah, Taman median Jalan Chik Ditiro, Taman Median Daud Beure'euh, Taman Median T. Nyak Arief, Taman Median Jl. P. Nyak Makam dan taman median lainnya.

Penanaman pohon di tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan 1000 pohon, namun meningkat lebih dari target sebesar 400 pohon. Perbandingan penanaman pohon 2017 dan 2018 mengalami penurunan aktivitas menanam disebabkan karena lahan tanam di RTH semakin berkurang.

Lokasi Pemeliharaan Taman di Tahun 2018 meningkat 17 lokasi dari tahun sebelumnya (tahun 2017). Peningkatan itu disebabkan karena sebagian besar median jalan yang biasanya tidak dipelihara oleh Bidang Pertamanan dan Hutan, mulai 2018 telah dipelihara karena sudah dibangun taman median sebagai jalur hijau jalan yang telah ditanami tanaman hias.

Dari segi teknis, tingkat pemeliharaan setiap taman berbeda-beda kualitasnya karena jumlah pekerja masing-masing zona taman masih terbatas. Hal ini diprediksikan akan menjadi kendala yang besar karena di satu sisi Kota Banda Aceh ingin memperindah kota melalui memperbanyak pembangunan taman di setiap segmen jalur dan titik wisata namun di sisi lain tidak belum maksimalnya jumlah pekerja untuk melaksanakan pemeliharaan optimal.

BAB IV

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

Kota Banda Aceh merupakan sebuah kota dengan capaian pertumbuhan kawasan terbangun yang cukup tinggi. Pertumbuhan ini secara tidak langsung juga akan diikuti oleh tingkat pemenuhan kebutuhan sumber daya bagi masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penggunaan sumber daya alam haruslah selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Hal ini hanya akan tercapai melalui program kerja pengelolaan lingkungan yang terencana dan didukung oleh upaya pelaksanaan kegiatan dengan proses monitoring dan evaluasi sehingga akan mendukung pengkajian terhadap program-program pengembangan kerja yang baru.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi kepala daerah terpilih dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berlaku selama 5 (lima tahun). Untuk menyusun visi tersebut, antara lain kepala daerah terpilih harus berpedoman kepada dokumen perencanaan makro (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dalam rangka sinkronisasi sasaran pokok dan arah kebijakannya. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Aceh, maka Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai Syariah”. Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Atas dasar itu, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Aceh, maka Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai Syariah”.

Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Inovasi dibidang lingkungan hidup yang terus dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan kota Banda Aceh adalah:

1. Meningkatkan kualitas layanan Angkutan umum Bus Trans Kutaraja, sehingga program khusus Ayo Naik Bus bagi anak sekolah dan masyarakat dapat berkesinambungan
2. Mengaktifkan kegiatan bank Sampah di setiap desa
3. Menciptakan taman-taman yang juga bisa untuk olahraga dengan fasilitas olahraga yang terbuat dari material yang kuat dan tahan lama.
4. Memanfaatkan gas metan TPA Gampong Jawa sebagai bahan bakar bagi kegiatan 60 rumah tangga disekitar TPS
5. Car Free Day yang dilakukan pada setiap hari minggu pukul 07.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB yang melibatkan masyarakat sekitar 2000 warga kota dengan berbagai kegiatan olah raga dan kemasyarakatan
6. Mewajibkan setiap toko untuk membuat penghijauan minimal didepan tokonya
7. Taman Sri Ratu Safiatuddin bisa dijadikan taman dengan menanam banyak pohon dan membuat kolam mini yang bisa digunakan anak-anak balita untuk bermain disore hari
8. Menanam pohon Flamboyant di salah satu ruas jalan utama tapi semua pohon Flamboyant saat mekar sangat indah sudah mirip Sakura
9. Mencabut izin berjualan di Blang padang karena sangat mengganggu keindahan kota
10. Pedagang kaki lima disediakan berjualan di jalan khusus yang beroperasi pk 5-10 malam
11. Membuat peraturan bagi pemusnah sawah di sekitar Ule kareng
12. Mengambil tindakan untuk pengusaha yang menghancurkan tanaman Mangrove di syiah kuala.
13. Melakukan rehabilitasi lingkungan pasar peunayong
14. Meminjam lahan terbiar menjadi taman kota
15. Membuat desa budaya kota banda Aceh

16. Melaksanakan program Adiwiyata dan Duta Lingkungan setiap tahun dengan hasil meningkatnya jumlah peserta lomba dan tingkat kesadaran siswa sekolah
17. Merintis Gampong Iklim dalam program PROKLIM yang dibina oleh DLHK3 dan DLHK Provinsi Aceh
18. Keikutsertaan Kota Banda Aceh dalam program Kota Layak Anak sebagai bagian dari pendidikan dan kelayakan lingkungan hidup bagi anak
19. Membuat persyaratan taman khusus bagi seluruh kantor dinas di Kota Banda Aceh
20. Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah melalui (1) pola kemitraan dengan Gampong, dan (2) waste collecting point (WCP) di beberapa Gampong

A. Rehabilitasi Lingkungan

Kota Hijau (*Green City*) merupakan gelar yang diimpikan dari warga kota Banda Aceh setelah mendapat gelar penghargaan sebagai juara I nasional di bidang penataan ruang. Untuk merealisasikan impian tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% dari luas wilayah Kota. Pemko Banda Aceh terus memacu diri melakukan program-program penghijauan dalam rangka mempercepat terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Hijau (*Green City*). Walikota Banda Aceh, bertekad untuk terus berupaya menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang saat ini baru mencapai 18% sehingga mencapai 30% sesuai dengan amanat undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Upaya tersebut harus didukung oleh seluruh warga kota. Namun mengingat berkurangnya lahan karena penambahan pemukiman, usaha tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan cita-cita semata, tetapi saatnya perlu didukung oleh beberapa program nyata yang akan sangat membantu.

Beberapa program yang harus dilakukan antara lain :

1. Adanya peraturan khusus pembatasan pengeluaran IMB yang berhubungan dengan penghilangan lahan,
2. Melakukan upaya maksimal pemanfaatan median jalan sebagai jalur hijau yang dipenuhi berbagai tanaman yang berperan ganda sebagai keindahan dan penyerap polusi dan penyedia oksigen bagi warga kota,
3. Optimalisasi fungsi lahan hijau yang harus dikerjakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah kota.

Persoalan yang terus diminimalisir adalah bidang penataan kota melalui penataan bangunan-bangunan liar yang ada di sekitar kawasan yang dilarang. Pertumbuhan bangunan liar di Kota Banda Aceh kini mulai berkurang, sehingga diharapkan dapat mengatasi salah satu permasalahan lingkungan hidup dan tata ruang yang selama ini dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Upaya sosialisasi pengembangan Kota Banda Aceh sebagai *Green City* telah dilakukan. Saat ini Kota Banda Aceh adalah salah-satu dari 60 kota di Indonesia yang diproyeksikan oleh Kementerian PU untuk menjalankan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Program ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PU terkait keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan cepat merampungkan regulasi tentang RTRW (Qanun nomor 4 tahun 2009 Pemko Banda Aceh). Konsep kota hijau yang diterapkan Kota Banda Aceh adalah metafora dari sebuah kota secara berkelanjutan yang meliputi delapan atribut, yakni:

1. Perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan,
2. Memiliki ketersediaan ruang terbuka hijau,
3. Konsumsi energi yang efisien,
4. Pengelolaan air yang efektif,
5. Pengelolaan limbah dengan prinsip 3R,
6. Bangunan hemat energi atau bangunan hijau,
7. Penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan, dan
8. Peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau.

Saat ini Kota Banda Aceh baru memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 18% dari sekitar 59.360 Ha luas wilayahnya. Namun pemerintah juga menyadari, keterbatasan lahan yang tersedia dan nilai harga tanah yang terus meningkat sehingga untuk memiliki RTH sesuai dengan ketentuan akan sulit dicapai, mengingat dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk biaya pembebasan/ganti rugi lahan yang nantinya akan digunakan untuk hutan/taman kota. Hal inilah yang masih menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Banda Aceh pada saat ini untuk dapat merealisasikan dan mewujudkan keinginannya tersebut.

Salah satu penambahan keterbatasan dan kurangnya lahan yang dimiliki pemerintah untuk membuat RTH telah dieliminir oleh masyarakat (terus meningkat secara kuantitatif) dengan cara membuat taman-taman kecil di halaman rumahnya bagi yang memiliki perkarangan luas, atau menanam bunga/pohon di dalam pot bagi rumah yang terbatas lahannya. Penanaman bunga/pohon ini dapat dilakukan dimana saja baik di lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja. Sehingga di setiap tempat akan terlihat kehijauan baik itu di lokasi perumahan, perkantoran, sekolah, kawasan perdagangan/jasa, dan tempat-tempat fasilitas pelayanan publik.

Pasca tsunami, kota Banda Aceh telah berhasil melakukan rehabilitasi lingkungan terutama untuk ruang terbuka hijau. Beberapa hal yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui jajarannya dan juga bekerjasama dengan pihak lain adalah:

1. Restorasi ekosistem pesisir pantai;
2. Hutan pesisir/penanaman pohon bakau pada kawasan sekitar pantai;
3. Penetapan kawasan hutan kota;
4. Pemantauan kegiatan-kegiatan yang akan berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan;
5. Pembuatan taman-taman kota; dan
6. Penghijauan dan penataan pada daerah bantaran/sempadan sungai.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk tersedianya RTH di Kota Banda Aceh seperti pembuatan dan rehabilitasi taman kota, hutan kota, hutan mangrove dan daerah bantaran sungai yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh dan adanya RTH alami yang berasal dari lahan-lahan perkarangan/kebun masyarakat, lapangan olahraga, sungai dan pertanian. Dalam rangka memelihara kawasan hijau serta ruang terbuka hijau, Pemko Banda Aceh telah menetapkan beberapa lokasi dan kawasan sebagai wilayah/tempat yang dilindungi dengan surat keputusan sebagai kawasan lindung. Hal tersebut dianggap penting sebagai langkah hukum dalam melindungi kawasan hijau dimasa yang akan datang. Hal tersebut juga didukung melalui penetapan dalam RTRW Kota Banda Aceh.

Kegiatan peremajaan jalur hijau serta penanaman pohon merupakan kegiatan berkesinambungan dan berkelanjutan yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Diharapkan dengan bertambahnya jumlah pepohonan di Kota Banda Aceh akan dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi dampak dari pemanasan global pada saat ini.

Selain itu, tujuan dan fungsi utama dari pepohonan ini sendiri adalah berguna sebagai penghijauan, mencegah dan mengatasi pencemaran udara, tertanggulangnya kelimpahan air di waktu musim hujan pada daerah-daerah tertentu, memberikan keindahan dan menciptakan keseimbangan serta keserasian lingkungan fisik Kota Banda Aceh. Jumlah pohon yang telah ditanami pada tahun 2018 oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam realisasi penghijauan sebesar 1.322 pohon/batang (132%) dari target 1000 pohon/batang. Sedangkan target pemeliharaan RTH tahun 2017 adalah 115 lokasi dengan pencapaian 122 lokasi (106%).



Gambar 4.1

Ruang terbuka hijau di Balng Padang Kota Banda Aceh

Dukungan warga kota Banda Aceh sangat diharapkan dalam upaya pencegahan terjadinya penurunan kualitas lingkungan Kota Banda Aceh dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam pendirian bangunan. Disamping itu pihak legislatif Kota Banda Aceh terus mendukung upaya yang dilakukan pemerintah kota dengan melahirkan undang-undang penataan kota yang lebih jelas dan berkualitas.



Gambar 4.2

Dukungan masyarakat oleh Mahasiswa dalam menanam Mangrove

Perencanaan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memiliki Ruang Terbuka Hijau sebanyak 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat dari luas telah dilakukan termasuk dengan melakukan kerjasama serta mengajak semua unsur dari berbagai kalangan baik dari kalangan swasta, aktivis/LSM untuk terlibat dalam pengadaan taman kota dan penanaman pohon, serta dukungan dan partisipasi masyarakat juga sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan ini.



Gambar 4.3

RTH publik Taman Putroe Phang Kota Banda Aceh

B. Pengawasan Analisis mengenai dampak lingkungan

Sebagian besar perkotaan di Indonesia dihadapkan dengan tingginya jumlah penduduk dan diikuti dengan banyaknya permasalahan lingkungan. Peningkatan jumlah usaha/kegiatan berimplikasi pada meningkatnya pencemaran air, udara dan kebisingan. Limbah dan sampah sisa aktivitas industri yang yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan pemandangan yang “tidak menarik”, bau, mencemari air tanah dan menyebabkan berbagai penyakit. Menjamurnya usaha/kegiatan berbagai sektor yang notabene adalah mesin ekonomi, ternyata tidak didukung dengan upaya yang sepadan untuk melindungi lingkungan.

Peningkatan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi, sosial dan pembangunan yang terjadi saat ini tentu saja memberikan dampak positif bagi perkembangan Kota Banda Aceh, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa setiap perkembangan sektor ekonomi selalu diiringi dengan tekanan berat terhadap lingkungan, yang barangkali sebagian masyarakat masih menganggap sebagai sebuah kewajiban. Namun wajarkah jika tekanan terhadap lingkungan tersebut kemudian membawa kerugian yang lebih besar dari pendapatan ekonomi yang dihasilkan?

Setiap usaha/kegiatan mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem pendukung kehidupan menjadi rusak hingga pada gilirannya akan menjadi *boomerang* dan merusak tatanan hasil pencapaian, hingga akhirnya manusia pula yang akan menanggung biaya pemulihannya. Tentu sangat disayangkan jika usaha dan kegiatan tersebut kemudian menjadi bagian dari siklus degradasi lingkungan dan penurunan kualitas hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak penting wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Selanjutnya untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL). Untuk pelaksanaan semuanya telah diatur dalam bentuk peraturan masing-masing.

Prinsip pembangunan di Indonesia termasuk di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan strategi pengelolaan lingkungan yang sistematis dan terencana sebagai upaya

mencegah, mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan agar mutu lingkungan dapat terpelihara dan bahkan ditingkatkan kualitasnya. Upaya tersebut dimulai dari pengaturan tata ruang, minimasi limbah, pengelolaan limbah, rehabilitasi lingkungan sampai kepada upaya pemantauan dan pengawasan.

C. Peran Serta Masyarakat

Pengelolaan lingkungan hidup tidak akan maksimal bila hanya berharap pada pemerintah semata, namun partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Partisipasi dari masyarakat terlihat dengan banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup berada di Kota Banda Aceh. Tentunya ini menjadi nilai tersendiri bagi Kota Banda Aceh, karena keberadaan LSM ini merupakan mitra pemerintah yang dapat bersama-sama ikut memperhatikan dan berupaya menanggulangi permasalahan lingkungan hidup yang muncul selama ini.

Beberapa jenis penghargaan yang telah diterima oleh masyarakat dan Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan betapa besarnya partisipasi dari masyarakat. Piala Adipura yang telah diraih selama 9 kali dan bahkan pada tahun 2014 telah masuk dalam nominasi peraih penghargaan Adipura Kencana. Kota Banda Aceh sejak tahun 2013 hingga saat ini selalu menerima penghargaan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk Kualitas Udara Terbaik pada Program Langit Biru untuk Kategori Kota Sedang.

Untuk menjaga agar kualitas udara di Kota Banda Aceh tetap terjaga dengan baik, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mencoba menerapkan beberapa upaya, diantaranya menerapkan *Car Free Day* di sepanjang jalan Tgk. Daud Beureueh pada setiap Hari Minggu pagi dari pukul 08.00 – 10.00 wib, dan telah menerapkan peraturan pengalihan pemakaian bahan bakar dari premium menjadi pertalite/pertamax terhadap kendaraan/mobil dinas. Tahun ini telah dibangun beberapa halte bus dan beroperasinya Trans Kutaraja dari Pusat Kota/terminal menuju ke berbagai jurusan/koridor, sebagai upaya untuk menggalakkan kembali pemakaian transportasi umum di kalangan masyarakat sehingga dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi yang diharapkan akan dapat mengurai kemacetan dan mengurangi polusi/pencemaran udara.

Penghargaan lain yang juga diterima oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah Sekolah Adiwiyata Nasional yaitu SMTI Negeri Banda Aceh. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari peran serta masyarakat, kesadaran untuk menjaga lingkungan dalam masyarakat agar dapat terus ditingkatkan.

Selain itu kesadaran dan pemahaman masyarakat secara perlahan mulai tumbuh, hal ini terlihat sebagian masyarakat walaupun belum seluruhnya, telah mengikuti himbuan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Kesadaran untuk menjaga kebersihan di tempat dan fasilitas umum sudah semakin membaik. Sosialisasi kepada sekolah-sekolah mengenai program Sekolah Adiwiyata juga disambut antusias oleh pihak sekolah, terbukti dari tingkat partisipasi sekolah yang terus meningkat setiap tahunnya,



Gambar4.4.

Sosialisasi Program Adiwiyata

Beberapa warga pernah menyurati langsung ke Pemerintah Kota Banda Aceh terkait permasalahan lingkungan yang dirasakannya. Komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menata lingkungan dibuktikan dengan menanggapi dan langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut dengan mengirimkan Tim dari pemerintah kota yang terdiri dari beberapa unsur instansi terkait termasuk salah satunya dari unsur DLHK3.

D. Kelembagaan

Dinas Lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota (DLHK3) adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang pemerintah Kota Banda Aceh dibidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok dan fungsi DLHK3 Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota adalah:

- a. penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota;
- b. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk rencana dan program Kota;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota;
- d. pengelolaan Kehati Kota;
- e. penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- f. pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam wilayah Kota;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Kota;
- h. penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berada di Kota;
- i. peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berada di Kota;

- j. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kota;
- k. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kota;
- l. penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- m. pengelolaan sampah;
- n. penerbitan pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
- o. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

BAB V

PENUTUP

Permasalahan pembangunan daerah ini merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan. Permasalahan timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, masih ada permasalahan baik eksternal maupun internal yang dihadapi Kota Banda Aceh. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Banda Aceh meliputi infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional, dan daya saing ekonomi daerah.

Dalam dokumen RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Dengan adanya indikator dan target yang ditetapkan tersebut, maka menjadi sangat penting untuk mengetahui kondisi capaian sebagai data dasar bagi perencanaan menengah tahun 2017-2022.

Isu-isu strategis pembangunan Kota Banda Aceh dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah. Terdapat 13 isu strategis yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan, empat diantaranya adalah *Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota; RTH dan Pencemaran Lingkungan; Pengelolaan Air Bersih; serta Mitigasi Bencana*. Hal tersebut merupakan isu strategis dibidang lingkungan hidup yang menjadi perhatian di tahun 2018 oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Isu-isu lingkungan tersebut umumnya berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, pengarus utamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagiseluruhsektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air.

Mengacu pada permasalahan dan isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021 tersebut serta dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang diperoleh dari dialog-dialog atau pembahasan dalam forum-forum baik bersama masyarakat/LSM maupun dengan para pelaku usaha kegiatan, selanjutnya bersama dengan unsur Perguruan Tinggi dirumuskan tiga isu prioritas yang sesuai dengan kondisi permasalahan lingkungan hidup di wilayah Kota Banda Aceh di tahun 2018. Isu Prioritas tersebut meliputi : 1) pencemaran air; 2) pencemaran udara; serta 3) ruang terbuka hijau.

5.1 Pencemaran Air

Urbanisasi dan pengembangan perkotaan memberi dampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Banda Aceh. Beban lingkungan hidup berasal dari aktivitas pembangunan dan masyarakat dari sektor ekonomi, sosial dan budaya yang terindikasi melalui kualitas air permukaan di Kota Banda Aceh.

Melalui pemantauan rutin yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup (DLHK3), terdeteksi tingkat pencemaran di badan air melalui penentuan status mutu air sungai. Penentuan status mutu air Kr. Aceh dilakukan dengan metode STORET dimana prinsip dari metode ini adalah membandingkan antara data kualitas air yang diambil secara series dan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya, guna menentukan status mutu air. Setelah ditentukan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata dari hasil analisis fisika-kimia-biologi air terhadap sampel air di 6 lokasi, kemudian dibandingkan dengan nilai persyaratan air pada Peraturan Pemerintah RI No.82 tahun 2001, maka diperoleh nilai untuk masing-masing lokasi (Segmen) dengan hasil sebagai berikut:

1. Segmen Jembatan Lambaronilai -17 (CemarSedang);
2. Segmen Jembatan Pango nilai -17 (CemarSedang);
3. Segmen Jembatan Surabaya nilai -43 (CemarBerat);
4. Segmen Jembatan PantePirak nilai -30 (CemarSedang);
5. Segmen Jembatan Peunayong nilai -42 (CemarBerat); dan
6. Segmen Gampong Jawa nilai -36 (CemarBerat).

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui instansi lingkungan hidup terus berupaya melakukan pencegahan terhadap pengrusakan dan pencemaran lingkungan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melaksanakan pemantauan terhadap setiap

usaha/kegiatan berjalan dalam wilayah Kota Banda Aceh. Melalui Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup yang bersumber dari Dana APBK Kota Banda Aceh Tahun 2017, DLHK3 Banda Aceh mencoba untuk lebih intens dalam bidang pengawasan dengan menginventarisir setiap usaha/kegiatan dalam kepemilikan dokumen lingkungan hidup. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendeteksi sejauh mana dokumen Amdal ataupun UKL-UPL yang telah disusun dan dimiliki oleh pelaku usaha/kegiatan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dapat tercapai. Selama tahun 2018, kegiatan ini dilakukan tidak hanya terhadap usaha/kegiatan yang berada di wilayah Kota Banda Aceh yang telah memiliki Dokumen UKL-UPL namun bagi yang belum memiliki dokumen juga ikut dilakukan pengawasan dengan status yang masih aktif dan kegiatan usahanya masih berjalan. Pengawasan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana usaha/kegiatan ini melaksanakan pengelolaan dan pengendalian terhadap lingkungan tempat usahanya, dimana dalam pelaksanaannya, pengambilan dan pengumpulan data untuk masing-masing kegiatan dilakukan dengan cara yang sama.

5.2 Pencemaran Udara

Pencemaran kualitas udara merupakan ancaman global yang saat ini menjadi perhatian semua negara. Kualitas udara diperkotaan umumnya berasal dari usaha dan kegiatan yang menunjang aktivitas ekonomi dari masyarakat, serta dari kendaraan bermotor sebagai sumber pencemar bergerak. Pencemaran kualitas udara di Kota Banda Aceh masih tergolong rendah, namun demikian patut diwaspadai untuk masa yang akan datang dimana terindikasi terdapat tren peningkatan pencemaran udara dan kebisingan di kawasan transportasi, perkantoran, dan pemukiman.

Pengukuran kualitas udara Kota Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan pengelompokan sumber munculnya zat pencemar pada 4 (empat) kawasan, yaitu kawasan transportasi, perkantoran, industri dan pemukiman. Parameter kualitas udara yang diukur antara lain Sulfur Dioksida (SO_2), Nitrogen Oksida (NO_2), Carbon Monooksida (CO), dan *Total Suspended Particle* (TSP) dan parameter kebisingan.

Hasil analisa *pressure* berdasarkan data pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh DLHK3, terdapat tekanan dan indikasi tingkat pencemaran kualitas udara dan kebisingan, adapuntekanantersebutadalah:

1. Situasi disekitar perbengkelan di jalan Twk. M. Daudsyah terdapat banyak perbengkelan roda 2 dan roda 4 yang aktif yang menghasilkan emisi gas buang. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas udara khususnya sulfur dioksida.
2. Terjadinyapenurunankualitasudara, dimanaterlampauinyaambangbatas parameter tingkatkebisinganterhadaplokasikawasanpemukiman, kawasan industry danpusatbisnis, sertakawasantransportasi.

Penegakan hukum melalui Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup yang bersumber dari Dana APBK Kota Banda Aceh Tahun 2017 dan 2018, DLHK3 Banda Aceh mencoba untuk lebih intens dalam bidang pengawasan dengan menginventarisir setiap usaha/kegiatan dalam kepemilikan dokumen lingkungan hidup. Kegiatan pengawasan yang mengarah kepada pelaku usaha/kegiatan sebagai kontributor pencemaran udara memberi dampak terhadap pengendalian pencemaran kualitas udara, sehingga turut memberi pengaruh kepada peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup disekitar usaha/kegiatannya.

Disamping itu, upaya tersebut juga diharapkan dapat mendeteksi sejauh mana dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan SPPL) yang telah disusun dan dimiliki oleh pelaku usaha/kegiatan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dapat tercapai.

Program khusus "Ayo Naik Bus" yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh memberi dampak simultan terhadap kualitas udara dan perilaku berkendara di Kota Banda Aceh. Perubahan pola berkendara menunjukkan berkurangnya volume kendaraan dijalanan, dimana jumlah pengguna bus Trans Kutaraja semakin meningkat dengan komposisi mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengendalian kualitas lingkungan adalah dengan penegakan aturan berlalu-lintas. Melalui Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh kegiatan KIR kendaraan bermotor terus dilakukan melalui sosialisasi dan operasi ketertiban angkutan umum/ razia bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan target akhir menjaga kualitas kendaraan bermotor yang beroperasi di

wilayah Kota Banda Aceh, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu-lintas dan menjaga kualitas udara.

5.3 Ruang Terbuka Hijau

Pada prinsipnya perencanaan RTH disusun sebagai upaya untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan kota, sebagai upaya menjaga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara ruang terbangun dengan RTH.

Sejak tahun 2010 pertumbuhan RTH Kota Banda Aceh terus menjadi konsentrasi dalam masterplan dan seiring dengan pertumbuhan kota.

Luas RTH Publik Kota Banda Aceh sebesar 809,654 Ha atau 13,2% dari total luas wilayah Kota Banda Aceh. Dengan demikian luas RTH Publik di Kota Banda Aceh masih perlu dilakukan penambahan dan pengembangan. Pemko Banda Aceh menyadari tidak mudah menumbuhkan RTH dengan terbatasnya lahan, namun upaya peningkatan ruang terbuka hijau dengan menambah koleksi flora dan peremajaan ruang terbuka hijau kini menjadi konsentrasi utama.

Tekanan yang dihadapi adalah pertumbuhan dan pengembangan kota yang memaksa terjadinya alih fungsi lahan terbuka dan lahan pertanian serta peternakan menjadi area perumahan dan bangunan pendukung aktivitas ekonomi warga. Regulasi-regulasi untuk menguatkan peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatur ruang terbuka hijau juga perlu dibuat, terutama regulasi terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang selektif, khususnya di beberapa kawasan seperti di Kecamatan Ulee Kareng, Banda Raya dan Jaya Baru.

Perencanaan terhadap RTH di Kota Banda Aceh telah disusun dalam bentuk Masterplan RTH Kota Banda Aceh. Perencanaan ini tersusun dalam kerangka indikasi program yang sistematis dan realistis dalam rangka implementasi RTRW Kota Banda Aceh dan pemenuhan amanat UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Beberapa program yang termuat di dalam Masterplan RTH Kota Banda Aceh ini adalah pemetaan RTH eksisting dan menetapkan rencana pembangunan RTH dalam periode 20 tahun sesuai RTRW Kota Banda Aceh, sekaligus sebagai dasar untuk penetapan lokasi-lokasi yang diprioritaskan perwujudannya. Hal ini sangat penting sebagai upaya alternatif meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dengan cara pengoptimalan fungsi ekologi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP).

Tahun 2018 Pemko Banda Aceh telah melakukan pembebasan lahan hutan mangrove seluas 20 ha untuk memperluas RTH Hutan Kota. Upaya tersebut diharapkan dapat terus menjaga tren peningkatan luasan RTH sebagaimana diamanatkan dalam UU No.26 Tahun 2007.

RTH Publik Kota Banda Aceh ada yang berbentuk *hub/core/area* berupa taman kota (taman wisata, taman edukasi, taman nurseri, taman tugu), hutan kota, hutan mangrove, lapangan olah raga dan makam, sedangkan yang berbentuk *link/corridor/jalurhijau* berupa pulau jalan dan jalur hijau, sepadan sungai, dan sempadan pantai. Sementara itu, RTH Privat terdiri dari RTH perkarangan dan RTH Pertanian Kota dan Tambak. Sesuai dengan masterplan RTH Kota Banda Aceh telah dilakukan pendataan untuk Penggunaan Luas RTH Eksisting dan Potensi RTH di Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Banda Aceh Dalam Angka, 2016-2018

Pengenalan Kepada Pencemaran Udara,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022, 2017, Pemerintah Kota Banda Aceh

Ning Purnomohadi, 2006, RTH Unsur Utama

LAMPIRAN TABEL DATA UTAMA

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH**

Tabel 1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya di Kota Banda Aceh Tahun 2018

Nama Kawasan				Luas Kawasan (Ha)	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung		25,36	-	-	-	-
		2. Kawasan Bergambut	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3. Kawasan Resapan Air	-	-	-	-	-	-
Kawasan Perlindungan Setempat		1. Sempadan Pantai		209,05	-	-	-	-
		2. Sempadan Sungai		107,48	-	-	-	-
		3. Kawasan Sekitar Danau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		4. Ruang Terbuka Hijau		845,04	-	-	-	-
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya		1. Kawasan Suaka Alam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau	Bakau Hutan Kota Tibang	11,4	N/A	N/A	N/A	N/A
			Pesisir Pantai	32,23	N/A	N/A	N/A	N/A
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Hutan Kota Tibang	49,63	-	-	-	-
Kawasan Rawan Bencana		1. Kawasan Rawan Tanah Longsor	-	-	-	-	-	
		2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang	-	-	-	-	-	
		3. Kawasan Rawan Banjir	-	-	-	-	-	
Kawasan Lindung Geologi	1. Kawasan Cagar Alam	i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

		ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2. Kawasan Rawan Bencana	i. Kawasan Rawan Rawan Letusan Gunung Berani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi	-	-	-	-	-
		iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah	-	-	-	-	-
		iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		v. Kawasan Rawan Tsunami	-	-	-	-	-
		vi. Kawasan Rawan Abrasi	-	-	-	-	-
		vii. Kawasan Rawan Gas Beracun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	i. Kawasan Imbuan Air Tanah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ii. Sempadan Mata Air	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kawasan Lindung Lainnya	1. Cagar Biosfir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2. Ramsar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3. Taman Buru	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5. Kawasan Pengungsian Satwa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6. Terumbu Karang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kawasan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-

Sumber :

- Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banda Aceh
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh
- Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meuraxa	-	0,0	13,1	-	-	254
2	Jaya baru	-	1,0	33,4	-	-	12
3	Banda Raya	-	14,0	17,0	-	-	7
4	Baiturrahman	-	0,0	11,0	-	-	5
5	Lueng Bata	-	7,0	10,2	-	-	12
6	Kuta Alam	-	0,0	6,8	-	-	183
7	Kuta Raja	-	0,0	0,0	-	-	66
8	Syiah Kuala	-	7,0	19,0	-	-	224
9	Ulee Kareng	-	42,0	90,0	-	-	49
TOTAL			71	200,50	-	-	812

Sumber : Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

Tabel 3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi Dan Status di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	N/A
2.	Hutan Lindung	25,36
3.	Taman Nasional	N/A
4.	Taman Wisata Alam	9.5
	-Taman Kota	14.97
	- Taman Wisata Kuliner	0.37
	- Taman Tugu	0.58
	- Taman Simpang/Tepi Jalan	33.55
	A. Taman Seputaran Simpang Lima	0.39
	B. Taman Seputaran Mesjid Raya	0.3
	C. Taman Seputaran Simpang Empat Jam	0.28
	D. Taman Seputaran Simpang Surabaya	0.11
	E. Taman Seputaran Simpang Jambo Tape	0.06
	F. Taman Seputaran Simpang Ratu Safiatuddin	0.13
	G. Taman Simpang MAN	0.05
	H. Taman Simpang Jalan Angsa Lueng Bata	0.18
	I. Taman Persimpangan Lainnya	0.09
	J. Taman Tepi Jalan Imuem Lueng Bata	0.17
	K. RTH Bantaran Sungai	31.79
5.	Taman Buru	N/A
6.	Cagar Alam	N/A
7.	Suaka Margasatwa	N/A
8.	Taman Hutan Raya	N/A
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	N/A
2.	Hutan Hak/ Hutan Rakyat	N/A
3.	Hutan Kota	28.60
	-Hutan Kota Depan Mesjid Raya	0.18
	-Hutan Kota Depan POM	0.31
	-Taman Putroe Phang	2.42
	-Hutan Kota Makam Kherkhoff Pocut	7.45
	-Hutan Kota Simpang Tiga Mata'ie	0.09
	-Taman Jembatan Surabaya	0.22
	-Hutan Kota Ratu Safiatuddin	1.71
	-Bantaran Sungai Krueng Cut	5.04
	-Hutan Kota BNI Tibang	6.75
	-Hutan Kota Peulanggahan	2.59
	-Hutan Kota Rukoh	0.50
	-Hutan Kota Lamnyong	0.52
	-Hutan TPA	0.80
4.	Taman Hutan Raya	N/A
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	N/A

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 4. Keadaan Flora dan Fauna di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No.	Golongan	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	TidakLindungi
1.	1	2	3	4	5	6	7
1.	Hewan menyusui	1.	1.				
		2.	2.				
		3.	3.				
		dst	dst				
2.	Burung	1.	1.				
		2.	2.				
		3.	3.				
		dst	dst				
3.	Reptil	1.	1.				
		2.	2.				
		3.	3.				
4.	Amphibi	1.	1.				
		2.	2.				
		3.	3.				
		dst	dst				
5.	Ikan	1.	1.				
		2.	2.				
		3.	3.				
		dst	dst				
6.	Keong	1.	1.				
		2.	2.				
		3.	3.				
		dst	dst				
7.	Serangga	1.	1.				

		2.	2.				
		3.	3.				
		dst	dst				
8.	Tumbuh-tumbuhan	1.	1.				
		2.	2.				
		3.	3.				
		dst	dst				

Keterangan :

Sumber :

Tabel 5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa Yang ditangkarkan
1	2	3	4

Sumber :

Keterangan :

Tabel 6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Kecamatan	Kritis				Sangat Kritis				Penyebab Lahan Kritis
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meuraxa	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-
2	Baiturrahman	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-
3	Kuta Alam	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-
4	Ulee Kareng	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-
5	Jaya Baru	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-
6	Banda Raya	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-
7	Lueng Bata	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-
8	Syiah Kuala	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-
9	Kuta Raja	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-

Keterangan : Tidak Ada Komponen

Tabel 7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/200) (mm/10 tahun)	Besaran Erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/ Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	< 20 cm	0,2-1,3	N/A	N/A
2	20- < 50cm	1,3- < 4	N/A	N/A
3	50- < 100 cm	4,0- < 9,0	N/A	N/A
4	100 - 150 cm	9,0 - 12	N/A	N/A
5	> 150 cm	> 12	N/A	N/A

Keterangan : Tidak Ada Komponen pengukuran, karena alasan topografi Kota Banda Aceh

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi / Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Ketebalan Solum	< 20 cm	Nama Lokasi	Hasil	Status
			1. Gp. Lamgugop	19,5	Kritis
			2. Gp. Jeulengke 1	49	Tidak
			3. Gp. Jeulengke 2	5	Tidak
			4. Gp. Tibang 1	23	Tidak
			5. Gp. Tibang 2	30	Tidak
			6. Gp. Deah Raya	35	Tidak
			7. Gp. Alue Naga	25	Tidak
			8. Gp. Keudah	15	Tidak
			9. Gp. Pande	33	Tidak
			10. Gp. Lamdingin	20	Tidak
			11. Gp. Gampong Jawa	35	Tidak
			12. Gp. Lambaro Slep	25	Tidak
			13. Gp. Lambung	30	Tidak
			14. Gp. Deah Baro	35	Tidak
			15. Gp. Pie	35	Tidak
			16. Gp. Asoi Nanggroe	40	Tidak
			17. Gp. Peulanggahan	60	Tidak
			18. Gp. Kampung Baru	30	Tidak
			19. Gp. Kuta Alam	35	Tidak
			20. Gp. Kopelma Darussalam	40	Tidak
			21. Gp. Lamgugop 2	45	Tidak
			22. Gp. Peurada	30	Tidak
			23. Gp. Bandar Baru	40	Tidak
			24. Gp. Lhong Raya	30	Tidak
			25. Gp. Batoh	35	Tidak
			26. Gp. Lambhuk	30	Tidak
			27. Gp. Pango Raya	25	Tidak
			28. Gp. Lueng Bata	23	Tidak
			29. Gp. Cot Masjid	25	Tidak
			30. Gp. Lamdom	30	Tidak
			31. Gp. Peunyerat	40	Tidak
			32. Gp. Ateuk Munjeng	40	Tidak
			33. Gp. Lam Lagang	30	Tidak
			34. Gp. Lampoh Daya	40	Tidak
			35. Gp. Lamjamee	40	Tidak
36. Gp. Punge Blang Cut	40	Tidak			
2	Kebutaan Permukaan	> 40 %	Nama Lokasi	Hasil	Status
			1. Gp. Lamgugop	0	Tidak
			2. Gp. Jeulengke 1	0	Tidak
			3. Gp. Jeulengke 2	5	Tidak
			4. Gp. Tibang 1	60	Kritis
			5. Gp. Tibang 2	5	Tidak
			6. Gp. Deah Raya	20	Tidak
			7. Gp. Alue Naga	15	Tidak
			8. Gp. Keudah	5	Tidak
			9. Gp. Pande	65	Kritis
			10. Gp. Lamdingin	5	Tidak
			11. Gp. Gampong Jawa	80	Kritis
			12. Gp. Lambaro Slep	70	Kritis
			13. Gp. Lambung	45	Tidak
			14. Gp. Deah Baro	0	Tidak
			15. Gp. Pie	2	Tidak
			16. Gp. Asoi Nanggroe	0	Tidak
			17. Gp. Peulanggahan	5	Tidak
			18. Gp. Kampung Baru	30	Tidak
			19. Gp. Kuta Alam	30	Kritis
			20. Gp. Kopelma Darussalam	0	Tidak
			21. Gp. Lamgugop 2	45	Kritis
			22. Gp. Peurada	70	Kritis
			23. Gp. Bandar Baru	2	Tidak
			24. Gp. Lhong Raya	1	Tidak
			25. Gp. Batoh	1	Tidak
			26. Gp. Lambhuk	0	Tidak
			27. Gp. Pango Raya	0	Tidak
			28. Gp. Lueng Bata	0	Tidak
			29. Gp. Cot Masjid	23	Tidak
			30. Gp. Lamdom	40	Tidak
			31. Gp. Peunyerat	80	Kritis
			32. Gp. Ateuk Munjeng	80	Kritis
			33. Gp. Lam Lagang	5	Tidak
			34. Gp. Lampoh Daya	80	Kritis
			35. Gp. Lamjamee	70	Kritis
36. Gp. Punge Blang Cut	5	Tidak			
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % Koloid:	Nama Lokasi	Hasil	Status
			1. Gp. Lamgugop	55	Tidak
			2. Gp. Jeulengke 1	50	Tidak
			3. Gp. Jeulengke 2	28	Tidak
			4. Gp. Tibang 1	7	Kritis
			5. Gp. Tibang 2	8,0	Kritis
			6. Gp. Deah Raya	5,0	Kritis
			7. Gp. Alue Naga	50,0	Tidak
			8. Gp. Keudah	63,0	Tidak
			9. Gp. Pande	28,0	Tidak
			10. Gp. Lamdingin	78,0	Tidak
			11. Gp. Gampong Jawa	43,0	Tidak
			12. Gp. Lambaro Slep	78,0	Tidak
			13. Gp. Lambung	38,0	Tidak
			14. Gp. Deah Baro	35,0	Tidak
			15. Gp. Pie	33,0	Tidak
			16. Gp. Asoi Nanggroe	45,0	Tidak
			17. Gp. Peulanggahan	80,0	Tidak
			18. Gp. Kampung Baru	33,0	Tidak
			19. Gp. Kuta Alam	24,0	Tidak
			20. Gp. Kopelma Darussalam	15,0	Kritis
			21. Gp. Lamgugop 2	73,0	Tidak
			22. Gp. Peurada	64,0	Tidak
			23. Gp. Bandar Baru	37,0	Tidak
			24. Gp. Lhong Raya	32,0	Tidak
			25. Gp. Batoh	37,0	Tidak
			26. Gp. Lambhuk	29,0	Tidak
			27. Gp. Pango Raya	52,0	Tidak
			28. Gp. Lueng Bata	43,0	Tidak
			29. Gp. Cot Masjid	48,0	Tidak
			30. Gp. Lamdom	25,0	Tidak
			31. Gp. Peunyerat	80	Kritis
			32. Gp. Ateuk Munjeng	80	Kritis
			33. Gp. Lam Lagang	20,0	Tidak
			34. Gp. Lampoh Daya	10,0	Kritis
			35. Gp. Lamjamee	22,0	Tidak
36. Gp. Punge Blang Cut	37,0	Kritis			
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % Pasir Kuaristik	Nama Lokasi	Hasil	Status
			1. Gp. Lamgugop	-	-
			2. Gp. Jeulengke 1	-	-
			3. Gp. Jeulengke 2	-	-
			4. Gp. Tibang 1	-	-
			5. Gp. Tibang 2	-	-
			6. Gp. Deah Raya	-	-
			7. Gp. Alue Naga	-	-
			8. Gp. Keudah	-	-
			9. Gp. Pande	-	-
			10. Gp. Lamdingin	-	-
			11. Gp. Gampong Jawa	-	-
			12. Gp. Lambaro Slep	-	-
			13. Gp. Lambung	-	-
			14. Gp. Deah Baro	-	-
			15. Gp. Pie	-	-
			16. Gp. Asoi Nanggroe	-	-
			17. Gp. Peulanggahan	-	-
			18. Gp. Kampung Baru	-	-
			19. Gp. Kuta Alam	-	-
			20. Gp. Kopelma Darussalam	-	-
			21. Gp. Lamgugop 2	-	-
			22. Gp. Peurada	-	-
			23. Gp. Bandar Baru	-	-
			24. Gp. Lhong Raya	-	-
			25. Gp. Batoh	-	-
			26. Gp. Lambhuk	-	-
			27. Gp. Pango Raya	-	-
			28. Gp. Lueng Bata	-	-
			29. Gp. Cot Masjid	-	-
			30. Gp. Lamdom	-	-
			31. Gp. Peunyerat	-	-
			32. Gp. Ateuk Munjeng	-	-
			33. Gp. Lam Lagang	-	-
			34. Gp. Lampoh Daya	-	-
			35. Gp. Lamjamee	-	-
36. Gp. Punge Blang Cut	-	-			
4	Berat Isi	> 1,4 g / cm ³	Nama Lokasi	Hasil	Status
			1. Gp. Lamgugop	1.403	Tidak
			2. Gp. Jeulengke 1	2.055	Kritis
			3. Gp. Jeulengke 2	1.948	Kritis
			4. Gp. Tibang 1	1.507	Kritis
			5. Gp. Tibang 2	2.069	Kritis
			6. Gp. Deah Raya	2.080	Kritis
			7. Gp. Alue Naga	2.188	Kritis
			8. Gp. Keudah	2.050	Kritis
			9. Gp. Pande	2.390	Kritis
			10. Gp. Lamdingin	2.045	Kritis
			11. Gp. Gampong Jawa	1.980	Kritis
			12. Gp. Lambaro Slep	2.121	Kritis
			13. Gp. Lambung	1.982	Kritis
			14. Gp. Deah Baro	1.323	Tidak
			15. Gp. Pie	1.527	Kritis
			16. Gp. Asoi Nanggroe	0.935	Tidak
			17. Gp. Peulanggahan	1.527	Kritis
			18. Gp. Kampung Baru	2.446	Kritis
			19. Gp. Kuta Alam	1.458	Kritis
			20. Gp. Kopelma Darussalam	1.539	Kritis
			21. Gp. Lamgugop 2	2.181	Kritis
			22. Gp. Peurada	2.020	Kritis
			23. Gp. Bandar Baru	1.857	Kritis
			24. Gp. Lhong Raya	1.922	Kritis
			25. Gp. Batoh	2.259	Kritis
			26. Gp. Lambhuk	1.808	Kritis
			27. Gp. Pango Raya	1.794	Kritis
			28. Gp. Lueng Bata	1.608	Kritis
			29. Gp. Cot Masjid	1.777	Kritis
			30. Gp. Lamdom	2.203	Kritis
			31. Gp. Peunyerat	2.237	Kritis
			32. Gp. Ateuk Munjeng	2.223	Kritis
			33. Gp. Lam Lagang	1.698	Kritis
			34. Gp. Lampoh Daya	1.612	Kritis
			35. Gp. Lamjamee	1.425	Tidak
36. Gp. Punge Blang Cut	1.537	Tidak			
5	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	Nama Lokasi	Hasil	Status
			1. Gp. Lamgugop	34.740	Tidak
			2. Gp. Jeulengke 1	57.500	Tidak
			3. Gp. Jeulengke 2	30.880	Tidak
			4. Gp. Tibang 1	30.510	Tidak
			5. Gp. Tibang 2	34.240	Tidak
			6. Gp. Deah Raya	36.780	Tidak
			7. Gp. Alue Naga	43.200	Tidak
			8. Gp. Keudah	56.000	Tidak
			9. Gp. Pande	45.000	Tidak
			10. Gp. Lamdingin	32.570	Tidak
			11. Gp. Gampong Jawa	36.800	Tidak
			12. Gp. Lambaro Slep	30.950	Tidak
			13. Gp. Lambung	32.880	Tidak
			14. Gp. Deah Baro	50.870	Tidak
			15. Gp. Pie	41.350	Tidak
			16. Gp. Asoi Nanggroe	43.350	Tidak
			17. Gp. Peulanggahan	42.560	Tidak
			18. Gp. Kampung Baru	49.800	Tidak
			19. Gp. Kuta Alam	40.670	Tidak
			20. Gp. Kopelma Darussalam	38.500	Tidak
			21. Gp. Lamgugop 2	48.770	Tidak
			22. Gp. Peurada	36.210	Tidak
			23. Gp. Bandar Baru	41.230	Tidak
			24. Gp. Lhong Raya	65.700	Tidak
			25. Gp. Batoh	37.900	Tidak
			26. Gp. Lambhuk	30.650	Tidak
			27. Gp. Pango Raya	47.890	Tidak
			28. Gp. Lueng Bata	30.980	Tidak
			29. Gp. Cot Masjid	38.610	Tidak
			30. Gp. Lamdom	38.510	Tidak
			31. Gp. Peunyerat	37.090	Tidak
			32. Gp. Ateuk Munjeng	37.870	Tidak
			33. Gp. Lam Lagang	38.800	Tidak
			34. Gp. Lampoh Daya	29.950	Kritis
			35. Gp. Lamjamee	34.600	Tidak
36. Gp. Punge Blang Cut	41.780	Tidak			
6	Derajat Peluasan Air	< 0,7 cm / jam ; > 8,0	Nama Lokasi	Hasil	Status
			1. Gp. Lamgugop	2,52	Tidak
			2. Gp. Jeulengke 1	3,96	Tidak
			3. Gp. Jeulengke 2	8,28	Kritis
			4. Gp. Tibang 1	0,36	Kritis
			5. Gp. Tibang 2	0,72	Kritis
			6. Gp. Deah Raya	11,16	Kritis
			7. Gp. Alue Naga	64,80	Kritis
			8. Gp. Keudah	13,32	Kritis
			9. Gp. Pande	270,00	Kritis
			10. Gp. Lamdingin	15,54	Kritis
			11. Gp. Gampong Jawa	144,00	Kritis
			12. Gp. Lambaro Slep	19,44	Kritis
			13. Gp. Lambung	118,80	Kritis
			14. Gp. Deah Baro	50,4	Kritis
			15. Gp. Pie	180,00	Kritis
			16. Gp. Asoi Nanggroe	7,2	Tidak
			17. Gp. Peulanggahan	28,8	Tidak
			18. Gp. Kampung Baru	2,52	Tidak
			19. Gp. Kuta Alam	4,68	Tidak
			20. Gp. Kopelma Darussalam	2,16	Tidak
			21. Gp. Lamgugop 2	1,44	Tidak
			22. Gp. Peurada	0,12	Kritis
			23. Gp. Bandar Baru	1,08	Tidak
			24. Gp. Lhong Raya	29,88	Kritis
			25. Gp. Batoh	29,88	Kritis
			26. Gp. Lambhuk	0,72	Tidak
			27. Gp. Pango Raya	3,96	Tidak
			28. Gp. Lueng Bata	8,64	Kritis
			29. Gp. Cot Masjid	0,36	Kritis
			30. Gp. Lamdom	0,36	Kritis
			31. Gp. Peunyerat	439,2	Kritis
			32. Gp. Ateuk Munjeng	126,00	Kritis
			33. Gp. Lam Lagang	159,12	Kritis
			34. Gp. Lampoh Daya	2,88	Tidak
			35. Gp. Lamjamee	576,00	Kritis
36. Gp. Punge Blang Cut	2,52	Tidak			
7	pH (H2O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	Nama Lokasi	Hasil	Status
			1. Gp. Lamgugop	6,0	Tidak
			2. Gp. Jeulengke 1	6,1	Tidak
			3. Gp. Jeulengke 2	6,0	Tidak
			4. Gp. Tibang 1	5,7	Tidak
			5. Gp. Tibang 2	4,5	Tidak
			6. Gp. Deah Raya	4,8	Tidak
			7. Gp. Alue Naga	6,5	Tidak
			8. Gp. Keudah	5,8	Tidak
			9. Gp. Pande	5,8	Tidak
			10. Gp. Lamdingin	5,8	Tidak
			11. Gp. Gampong Jawa	4,0	Kritis
			12. Gp. Lambaro Slep	4,8	Tidak
			13. Gp. Lambung	5,9	Tidak
			14. Gp. Deah Baro	6,2	Tidak
			15. Gp. Pie	5,5	Tidak
			16. Gp. Asoi Nanggroe	4,7	Tidak
			17. Gp. Peulanggahan	6,0	Tidak
			18. Gp. Kampung Baru	5,8	Tidak
			19. Gp. Kuta Alam	5,2	Tidak
			20. Gp. Kopelma Darussalam	5,2	Tidak
			21. Gp. Lamgugop 2	5,6	Tidak
			22. Gp. Peurada	5,8	Tidak
			23. Gp. Bandar Baru	5,8	Tidak
			24. Gp. Lhong Raya	6,5	Tidak
			25. Gp. Batoh	5,0	Tidak
			26. Gp. Lambhuk	5,9	Tidak
			27. Gp. Pango Raya	6,0	Tidak
			28. Gp. Lueng Bata	5,5	Tidak
			29. Gp. Cot Masjid	5,4	Tidak
			30. Gp. Lamdom	6,2	Tidak
			31. Gp. Peunyerat	6,6	Tidak
			32. Gp. Ateuk Munjeng	5,0	Tidak
			33. Gp. Lam Lagang	6,2	Tidak
			34. Gp. Lampoh Daya	6,8	Tidak
			35. Gp. Lamjamee	5,9	Tidak
36. Gp. Punge Blang Cut	6,0	Tidak			
8	Daya Hantar Listrik / DHLK	> 4,0 mS / cm	Nama Lokasi	Hasil	Status
			1. Gp. Lamgugop	0,055	Tidak
			2. Gp. Jeulengke 1	0,045	Tidak
			3. Gp. Jeulengke 2	0,046	Tidak
			4. Gp. Tibang 1	0,043	Tidak
			5. Gp. Tibang 2	0,603	Tidak
			6. Gp. Deah Raya	0,060	Tidak
			7. Gp. Alue Naga	0,397	Tidak
			8. Gp. Keudah	0,237	Tidak
			9. Gp. Pande	0,311	Tidak
			10. Gp. Lamdingin	0,156	Tidak
			11. Gp. Gampong Jawa	0,912	Tidak
			12. Gp. Lambaro Slep		

Tabel-9 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah Di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan		Melebihi / Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	Subsistensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm / tahun untuk ketebalan gambut ≥ 3 m atau 10 % / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m	Nama Lokasi	Hasil	
			1. Gp. Deah Raya	-	-
			2. Gp. Tibang	-	-
			3. Gp. Tibang 2	-	-
			4. Gp. Tibang 3	-	-
			5. Gp. Lamgugop	-	-
			6. Gp. Jeulingke	-	-
			7. Gp. Alue Naga	-	-
			8. Gp. Alue Naga 2	-	-
			9. Gp. Lambaro Skep	-	-
			10. Gp. Lambaro Skep 2	-	-
			11. Gp. Lamdingin	-	-
			12. Gp. Gampong Jawa	-	-
			13. Gp. Gampong Pande	-	-
			14. Gp. Merduati	-	-
			15. Gp. Lampaseh Aceh	-	-
			16. Gp. Alue Deah Teungoh	-	-
			17. Gp. Lambung	-	-
			18. Gp. Deah Glumpang	-	-
			19. Gp. Pie	-	-
			20. Gp. Lambhuk	-	-
			21. Gp. Lueng Bata 1	-	-
			22. Gp. Lueng Bata 2	-	-
			23. Gp. Lamdom	-	-
			24. Gp. Lamcot	-	-
			25. Gp. Ateuk Jawo	-	-
			26. Gp. Ateuk Munjeng	-	-
			27. Gp. Kampung Baru	-	-
			28. Gp. Mibo	-	-
			29. Gp. Lampoh Daya	-	-
			30. Gp. Lamjamee	-	-
			31. Gp. Surien	-	-
			32. Gp. Cot Lamkuweueh	-	-
			33. Gp. Deah Baro	-	-
			34. Gp. Lamteumen Timur	-	-
			35. Gp. Batoh	-	-
			36. Gp. Lampuot	-	-
			Nama Lokasi	Hasil	
			1. Gp. Deah Raya	-	-
			2. Gp. Tibang	-	-
			3. Gp. Tibang 2	-	-
			4. Gp. Tibang 3	-	-
			5. Gp. Lamgugop	-	-
			6. Gp. Jeulingke	-	-

2	Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan pH ≤ 2,5	7. Gp. Alue Naga	-	-			
			8. Gp. Alue Naga 2	-	-			
			9. Gp. Lambaro Skep	-	-			
			10. Gp. Lambaro Skep 2	-	-			
			11. Gp. Lamdingin	-	-			
			12. Gp. Gampong Jawa	-	-			
			13. Gp. Gampong Pande	-	-			
			14. Gp. Merduati	-	-			
			15. Gp. Lampaseh Aceh	-	-			
			16. Gp. Alue Deah Teungoh	-	-			
			17. Gp. Lambung	-	-			
			18. Gp. Deah Glumpang	-	-			
			19. Gp. Pie	-	-			
			20. Gp. Lambhuk	-	-			
			21. Gp. Lueng Bata 1	-	-			
			22. Gp. Lueng Bata 2	-	-			
			23. Gp. Lamdom	-	-			
			24. Gp. Lamcot	-	-			
			25. Gp. Ateuk Jawo	-	-			
			26. Gp. Ateuk Munjeng	-	-			
			27. Gp. Kampung Baru	-	-			
			28. Gp. Mibo	-	-			
			29. Gp. Lampoh Daya	-	-			
			30. Gp. Lamjamee	-	-			
			31. Gp. Surien	-	-			
			32. Gp. Cot Lamkuweueh	-	-			
			33. Gp. Deah Baro	-	-			
			34. Gp. Lamteumen Timur	-	-			
			35. Gp. Batoh	-	-			
			36. Gp. Lampuot	-	-			
			3.A	Kedalaman Air Tanah dangkal	> 25 cm	Nama Lokasi	Hasil	
						1. Gp. Deah Raya	40	Melebihi
						2. Gp. Tibang	20	Tidak
						3. Gp. Tibang 2	10	Tidak
						4. Gp. Tibang 3	>100	Melebihi
						5. Gp. Lamgugop	35	Melebihi
						6. Gp. Jeulingke	>100	Melebihi
7. Gp. Alue Naga	>100	Melebihi						
8. Gp. Alue Naga 2	>100	Melebihi						
9. Gp. Lambaro Skep	>100	Melebihi						
10. Gp. Lambaro Skep 2	38	Melebihi						
11. Gp. Lamdingin	30	Melebihi						
12. Gp. Gampong Jawa	>100	Melebihi						
13. Gp. Gampong Pande	33	Melebihi						
14. Gp. Merduati	18	Tidak						
15. Gp. Lampaseh Aceh	13	Tidak						
16. Gp. Alue Deah Teungoh	45	Melebihi						
17. Gp. Lambung	>100	Melebihi						
18. Gp. Deah Glumpang	>100	Melebihi						
19. Gp. Pie	>100	Melebihi						

20. Gp. Lambhuk	>100	Melebihi
21. Gp. Lueng Bata 1	6	Tidak
22. Gp. Lueng Bata 2	>100	Melebihi
23. Gp. Lamdom	26	Tidak
24. Gp. Lamcot	>100	Melebihi
25. Gp. Ateuk Jawo	54	Melebihi
26. Gp. Ateuk Munjeng	15	Tidak
27. Gp. Kampung Baru	>100	Melebihi
28. Gp. Mibo	46	Melebihi
29. Gp. Lampoh Daya	>100	Melebihi
30. Gp. Lamjamee	14	Tidak
31. Gp. Surien	42	Melebihi
32. Gp. Cot Lamkuweueh	>100	Melebihi
33. Gp. Deah Baro	8	Tidak
34. Gp. Lamteumen Timur	10	Tidak
35. Gp. Batoh	57	Melebihi
36. Gp. Lampuot	30	Melebihi

Keterangan : tanda **tu** pada hasil uji dapat diartikan nilai hasil uji tidak terdeteksi oleh alat (dibawah nilai limit alat uji)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase tutupan (%)	Kerapatan (pohon / Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hutan Mangrove Tibang	11,4	0,014	0,17
2	Kawasan Hutan Bakau BNA	32,23	20,59	0,13
3	Kecamatan			
	Banda Raya	N/A	N/A	N/A
	Ulee Kareng	N/A	N/A	N/A
	Kuta Alam	12,5	70	3300
	Jaya Baru	12,5	70	3300
	Baiturrahman	N/A	N/A	N/A
	Syiah Kuala	216,5	80	3300
	Lueng Bata	N/A	N/A	N/A
	Kuta Raja	129	70	3300
	Meuraxa	167,5	80	3300
	Total	650,5	370	16.500

Sumber :

- Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh
- Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Tabel 11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A

Keterangan : Tidak ada komponen disebabkan tidak ada objek yang dimaksud

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Kota	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan : Tidak ada Komponen

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 13. Luas Perubahan Penggunaan lahan di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Jenis Penggunaan	Luas Tutupan (Ha)		Sumber Perubahan
		Lama	Baru	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Permukiman	1283,06	1921,44	-
2	Industri	-	-	-
3	Perkebunan	-	-	-
4	Pertambangan	N/A	N/A	N/A
5	Sawah	40,07	32,49	-
6	Pertanian Lahan Kering	-	-	-
7	Perikanan Darat	562,68	447,82	-
8	Lainnya (sebutkan)	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Tabel 14. Jenis Pemanfaatan Lahan di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tambang	N/A	Besar	N/A	N/A
			Menengah	N/A	N/A
			Kecil	N/A	N/A
			Rakyat	N/A	N/A
2	Perkebunan	-	Besar	N/A	N/A
			Menengah	N/A	N/A
			Kecil	N/A	N/A
			Rakyat	-	-
3	Pertanian	-	Besar	N/A	N/A
			Menengah	N/A	N/A
			Kecil	N/A	N/A
			Rakyat	-	-
4	Pemanfaatan Hutan	-	Besar	N/A	N/A
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	N/A	N/A

Keterangan : Tidak ada Komponen

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Izin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan : Tidak ada areal pertambangan di Kota Banda Aceh

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Kota	Penghijauan			Reboisasi		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (Batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (Batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kota Banda Aceh	1,000	-	1,322	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 17. Luas dan Kerusakan Lahan Gambut di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No.	Kab/kota/kec	Luas (Ha)	kedalaman (M)	Prosentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
1	2	3	4	5	6
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan : Tidak ada areal lahan gambut di Kota Banda Aceh

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 18 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5
1	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan : Tidak ada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu di Kota Banda Aceh

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 19. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No.	Provinsi/Kab/Kota	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5

Keterangan :

Sumber :

Tabel 20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No.	Nama Spesies	Bagian-bagian yang diperdagangkan	Status menurut CITES
1	2	3	4

Keterangan :

Sumber :

Tabel 21. Jumlah dan Ijin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No.	Jenis IUPJLWA							SK
	Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan : Tidak ada komponen

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 22. Kualitas Air Sumur di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

Halaman 1

No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO 3 sebagai N (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	sumur pantau II TPA Gp. Jawa	15-Agust-18	30,8	-	-	7,89	4,01	48,04	5,59	0,5	2,0
2	Sumur Pantau I TPA Gp. Jawa	16-Okt-18	29,9	-	-	7,83	2,11	27,74	3,03	-	2,8
3	Sumur Pantau II TPA. Gp. Jawa	16-Okt-18	28,7	-	-	7,82	2,31	46,24	5,63	-	1,2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 22. Kualitas Air Sumur di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

NH3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)	Kadmiu m(mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,02	-	-	-	-	-	<0,0012#)	0,01	-	<0,009#)	<0,0012#)	<0,002#)	-
<0,0001#)	-	-	-	-	-	<0,0012#)	0,01	-	<0,009#)	<0,0012#)	<0,002#)	-
0,05	-	-	-	-	-	<0,0012#)	0,01	-	<0,009#)	<0,0012#)	<0,002#)	-

Tabel 22. Kualitas Air Sumur di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

Halaman 3

Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Flourida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)	Belerang sebagai H2S (mg/L)	Fecal coliform (jml/100 ml)	Total coliform (jml/100 ml)	Gross- A (bql/L)	Gross- B (bql/L)
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
<0,0011#)	833,08	0,001	0,31	0,11	160,0	0,03	-	13	19	-	-
<0,0011#)	4.085,97	0,001	1,33	0,010	10	0,02	-	67	110	-	-
<0,0011#)	12.017,55	0,001	1,29	0,026	1,0	0,03	-	23	52	-	-

Tabel 23. Kualitas Air Laut di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Nama Lokasi	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau
			Lintang	Bujur			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
1	Muara Ulee Lheue	15-Agust-18	095°17'07,08"	05°33'26,60"	Dermaga Jembatan Ulee Lheue	2	Tidak Berbau
2	Dermaga Lampulo	15-Agust-18	095°19'08,84"	05°35'10,81"	Air Laut Dermaga Lampulo	2	Tidak Berbau
3	Muara Krueng Aceh	15-Agust-18	095°18'50,39"	05°34'59,50"	Air Laut Muara Krueng Aceh	3,5	Tidak Berbau
4	Muara Alue Naga	15-Agust-18	095°20'51,58"	05°36'08,15"	Air Laut Muara Alue Naga	4	Tidak Berbau

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 23. Kualitas Air Laut di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

Halaman 2

Kecerahan (NTU)	Kekeruhan (TCU)	TSS (mg/L)	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)	pH	Salinitas (‰)	DO (mg/L)	BOD 5 (mg/L)	COD (mg/L)	Amonia total (mg/L)
(8)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4	0,265	11,67	Nihil	Nihil	29,5	7,98	17,3	7,58	0,8	53,38	0,07
3	4,83	141,0	Nihil	Nihil	30,1	7,98	26,6	7,58	0,8	74,73	0,08
4	3,6	59,0	Nihil	Nihil	30,0	7,94	-	7,67	1,20	56,93	0,05
4	0,905	87,0	Nihil	Nihil	30,3	7,91	25,5	7,39	1,0	58,71	0,15

Tabel 23. Kualitas Air Laut di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

NO₂- N m(mg/L)	NO₃- N (mg/L)	PO₄-P (mg/L)	Sianida (CN-) (mg/L)	Sulfida (H₂S) (mg/L)	Klor (mg/L)	Minyak Bumi (mg/L)	Fenol (mg/L)	Pestisida(mg/ L)	PCB (mg/L)
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0,007	1,0	0,1	<0,001#)	0,270	-	-	<0,001#)	-	-
10,5	82,5	0,15	<0,001#)	0,279	-	-	<0,001#)	-	-
0,006	0,8	0,40	<0,001#)	0,256	-	-	<0,001#)	-	-
0,008	1,1	0,40	<0,001#)	0,288	-	-	<0,001#)	-	-

Tabel 24. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	BMKG Aceh (Blang Bintang Aceh Besar)	259	73	113	15	135	23	31	47	127	40	147	136
Total		259	73	113	15	135	23	31	47	127	40	147	136

Sumber : BMKG Aceh

Tabel 25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Kota	Mata Air	Ledeng	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kota Banda Aceh		7,78%	0,00%	0,00%	0,00%	92,22%	0,00%
Total			7,78%	0,00%	0,00%	0,00%	92,22%	0,00%

Sumber : BPS Aceh

Tabel 26. Kualitas Air Hujan di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

Waktu Pemantauan		pH	DHL	SO ₄	NO ₃	Cr	NH ₄	Na	Ca ²⁺	Mg ²⁺
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Januari		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret		-	-	-	-	-	-	-	-	-
April		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus		-	-	-	-	-	-	-	-	-
September		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	Gp. Punge	8,22	0,0313	1,0	<0,1#)	0,0723	-	2.344	6.553	1.265
	Gp. Ulee Kareng	7,79	0,1221	3,0	0,3	0,1265	-	1.357	2.236	0,1346
	Gp. Lamteumen Timur	8,29	0,0728	1,0	<0,1#)	0,1549	-	1.236	2.570	0,1590
	Gp. Prada	7,75	0,1637	7,0	0,7	<0,00001#)	-	2.626	4.587	0,466
November		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 27. Kondisi Sungai di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ / dtk)	Debit Min (m ³ / dtk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Krueng Aceh	723,6	70	60	4,0	1.275	-
2	Krueng Neng	5,3	17	11	3,1	52	-
3	Krueng Daroy	6,3	17	11	3,2	111	-
4	Krueng Doy	3,6	18	12	3,0	26	-
5	Krueng Cut	9,5	15	10	3,0	6	-
6	Krueng Lueng Paga	4,2	18	12	3,0	86	-
7	Krueng Tanjong	3,3	30	22	3,7	190	-
8	Krueng Geunasen	8,0	10	7	3,5	42	-
9	Krueng Kon Keumeh	-	18	-	-	-	-
10	Krueng titi Panyang	-	17	-	-	-	-

Sumber :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh

Tabel 28. Kondisi Danau/Waduk/Embung di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m3)
(1)	(2)	(3)	(4)
	N/A	N/A	N/A

Keterangan : Tidak ada komponen disebabkan tidak ada objek yang dimaksud

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 29. Kualitas Air Sungai di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)
			Lintang	Bujur	
(1)	(2)	(3)			(4)
1.	Kr. Lueng Paga	Jembatan Gp. Ateuk Jawo	095°19'32,17"	05°32'15,75"	28-Agust-18
		Jembatan Jl Soekarno-Hatta	095°19'13,93"	05°30'00,03"	28-Agust-18
		Jembatan Stadion Harapan Bangsa	095°19'22,11"	05°31'07'09"	28-Agust-18
		Jembatan Jalan AMD	095°18'33,18"	05°31'56,61"	28-Agust-18
		Jembatan Pak Sen Sp. Surabaya	095°19'41,13"	05°33'03,82"	28-Agust-18
		Jembatan Belakang Grand Aceh	095°19'45,04"	05°32'55,38"	28-Agust-18
		Jembatan Gp. Ateuk Pahlawan	095°19'42,95"	05°32'43,31"	28-Agust-18
		Jembatan Gp. Ateuk Munjeng	095°19'37,27"	05°32'30,19"	28-Agust-18
2.	Kr. Doy	Jembatan Teuku Umar	095°18'30,78"	05°32'16,44"	28-Agust-18
		Jembatan Fatahillah	095°18'27,49"	05°31'56,79"	28-Agust-18
		Jembatan SD 18	095°18'31,59"	05°32'41,13"	28-Agust-18
		Jembatan Tahu Solo	095°18'31,86"	05°32'34,84"	28-Agust-18
		Jembatan Lampaseh Ujong	095°18'29,95"	05°33'39,33"	28-Agust-18
		Jembatan Lampaseh	095°18'30,56"	05°33'33,94"	28-Agust-18
		Jembatan Punge Jurong	095°18'37,9"	05°33'06,9"	28-Agust-18
		Jembatan RRI	095°18'31,59"	05°32'56,97"	28-Agust-18
		Jembatan Putroe Phang	095°19'01,32"	05°32'47,24"	28-Agust-18
		Jembatan Peuniti	095°19'14,35"	05°33'04,95"	28-Agust-18

3.	Kr. Daroy	Jembatan Pendopo	095°19'10,40"	05°32'48,99"	28-Agust-18
		Jembatan POM	095°19'15,00"	05°33'11,77"	28-Agust-18
		Jembatan Keutapang	095°18'13,8"	05°32'06,89"	28-Agust-18
		Jembatan Lamlagang-Seutui	095°18'46,01"	05°32'23,29"	28-Agust-18
		Jembatan Geuceu Komplek	095°18'29,24"	05°32'06,89"	28-Agust-18
4.	Kr. Aceh	Jembatan Peunayong	095°19'05,38"	05°33'37,69"	28-Agust-18
		Jembatan Pante Pirak	095°19'14,37"	05°33'44,36"	28-Agust-18
		Jembatan Simpang Surabaya	095°19'50,04"	05°33'07,14"	28-Agust-18
		Jembatan Pango	095°20'52,79"	05°32'07,14"	28-Agust-18
		Jembatan Lambaro	095°21' 34,75"	05°30' 33, 03"	28-Agust-18
		Lampulo	095°19'02,94"	05°34'48,34"	28-Agust-18
5.	Kr. Neng	Jembatan Lamteumen	095°18'02,21"	05°31'56,09"	28-Agust-18
		Jembatan Asoe Nanggroe	095°17'08,5"	05°32'32,8"	28-Agust-18
6.	Pencampuran antara 2 Sungai	Pencampuran Kr. Lueng Paga- Kr. Aceh	095°19'40,01"	05°33'08,08"	28-Agust-18
		Pencampuran Kr. Tanjong- Kr. Aceh	095°20'39,37"	05°32'04,51"	28-Agust-18
		Air Sungai TPA Gp. Jawa	095°18'52,68"	05°34'39,20"	29 Agustus 2018

Keterangan : #) batas pembacaan alat uji

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)
(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
33,6	7,41	0,36	164,1	15,0	8,21	1,81	40,92	0,007	1,7
31,0	7,11	0,587	13,5	7,0	4,91	1,0	35,58	0,008	1,1
33,9	7,14	0,407	183,5	11,0	5,46	1,81	39,14	0,008	1,1
34,5	7,35	0,374	10,4	21,0	7,1	3,41	40,92	0,006	1,3
32,0	7,28	0,543	1609	7,0	4,5	1,41	35,58	0,006	2,3
32,4	7,22	0,486	219	7,0	4,2	8,23	40,92	0,005	2,0
32,8	7,08	0,444	198,9	75,0	4,99	3,58	37,56	0,012	2,3
32,8	6,84	0,406	182,8	7,0	7,1	9,59	39,14	0,01	2,1
28,0	7,32	0,232	7,5	361,0	5,54	1,51	30,25	0,01	0,9
27,9	6,75	0,0225	267	5,0	6,03	1,20	320,02	0,007	0,8
29,3	7,01	0,25	113,2	17,0	5,49	3,11	32,02	0,006	0,8
29,3	6,51	0,247	265	21,0	5,48	1,2	33,8	0,008	1,1
27,6	7,6	0,3	136,4	81,0	4,32	0,8	37,36	0,009	1,4
27,8	7,25	0,289	128,5	75,0	3,8	1,71	39,14	0,009	1,3
27,8	7,16	0,309	135,9	13,0	4,13	3,31	40,92	0,006	1,1
28,7	7,02	0,251	114,3	5,0	4,99	1,51	48,92	0,008	1,1
29,3	7,14	0,29	115,9	11,0	1,5	2,61	33,80	0,008	1,5
28,0	7,55	3,18	32,5	9,0	3,29	1,51	33,80	0,239	1,4

29,7	7,23	0,307	135,1	11,0	0,91	5,07	35,58	0,008	1,5
29,6	7,71	8,47	4530	51,0	4,98	2,31	33,8	0,006	0,5
28,9	7,35	0,228	8,3	5,0	6,86	1,0	28,47	0,006	1,9
28,8	7,34	0,388	148,5	5,0	2,3	5,62	30,25	0,009	2,9
27,5	7,32	0,232	104,9	50,0	5,69	2,31	32,02	0,006	1,0
28,5	7,72	18,36	10.530	136,0	5,87	2,41	56,93	0,14	0,9
29,0	7,78	11,16	115,9	115,0	5,16	1,2	23,12	0,185	1,0
30,1	7,41	4,14	2.1520	25,0	6,26	0,8	21,35	0,005	0,5
32,3	7,54	1.752	27,5	9,0	5,58	3,21	19,51	0,007	0,8
33,9	8,2	0,322	123,0	9,0	7,98	3,11	19,51	0,009	0,7
27,8	7,57	21,55	11,760	153,0	6,03	0,8	64,05	0,174	1,0
31,7	6,93	0,662	301	7,0	0,47	14,1	53,38	0,118	4,0
30,2	7,5	4,31	296	23,0	9,45	2,56	55,15	0,278	1,5
31,6	7,26	0,794	364	326,0	4,95	2,66	119,21	0,008	0,7
30,9	8,01	2.143	1015	9,0	6,18	1,51	64,05	0,126	0,7
33,9 °C	7,77	40,1	23.100	78,34	7,53	1,51	92,52	0,04	1,0

NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)-Klorida	T-P (mg/L)	Fenol (mg/L)	Minyak dan Lemak (mg/L)	Detergen (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
-	<0,01#)	-	0,011	<0,01#)	0,024	100	250	<0,001#)	0,005
-	0,04	-	0,009	0,2	0,093	110	555	<0,001#)	<0,001#)
-	<0,01#)	-	0,032	0,2	0,020	305	875	<0,001#)	0,007
-	<0,01#)	-	0,009	<0,01#)	0,014	100	445	<0,001#)	0,006
-	0,01	-	0,031	0,2	0,021	300	900	0,001	0,002
-	<0,01#)	-	0,025	0,2	<0,01#)	170	330	0,004	0,007
-	<0,01#)	-	0,023	0,2	0,025	185	710	0,001	0,024
-	<0,01#)	-	0,017	0,2	0,022	150	400	<0,001#)	0,006
-	0,02	-	0,028	0,2	0,019	150,0	250	0,001	0,004
-	0,02	-	0,032	<0,01#)	0,024	200	300	0,001	<0,001#)
-	<0,01#)	-	0,021	0,2	0,074	100	150	<0,001#)	0,014
-	0,02	-	0,092	0,4	0,020	55	425	0,001	0,002
-	<0,01#)	-	0,022	0,2	0,092	200	300	0,001	0,005
-	0,03	-	0,017	0,2	0,019	100	150	<0,001#)	0,004
-	<0,01#)	-	0,015	0,2	0,028	155	380	<0,001#)	0,005
-	0,02	-	0,018	<0,01#)	0,042	200	200	<0,001#)	0,003
-	0,01	-	0,013	0,2	0,024	165	430	0,043	0,004
-	<0,01#)	-	0,017	<0,1#)	0,020	150	900	0,001	0,012

-	0,03	-	0,005	0,2	0,043	25	150	<0,001#)	0,004
-	<0,01#)	-	0,018	<0,1#)	0,060	20	300	<0,001#)	0,044
-	0,03	-	0,056	0,2	0,032	255	1160	0,001	0,004
	20,01	-	0,009	<0,1#)	0,019	150	250	<0,001#)	0,005
-	0,01	-	0,051	<0,01#)	0,006	170	330	0,001	<0,001#)
-	0,01	-	0,028	0,2	0,032	190	290	0,001	0,126
-	<0,01#)	-	0,019	<0,1#)	0,06	100	450	<0,001#)	0,053
-	<0,01#)	-	0,024	0,2	0,076	100	150	<0,001#)	0,033
-	0,05	-	0,018	0,2	0,036	30	190	<0,001#)	0,003
-	0,03	-	0,013	0,2	<0,01#)	100	150	<0,001#)	0,001
-	0,02	-	0,008	0,2	0,040	100	450	0,004	0,118
-	<0,01#)	-	0,014	0,2	0,018	250	570	<0,001#)	0,008
-	0,01	-	0,004	<0,1#)	0,037	570	800	<0,001#)	0,402
-	<0,01#)	-	0,007	0,2	<0,01#)	100	250	0,001	0,022
-	0,05	-	0,025	0,2	0,027	175	845	0,001	0,002
0,37	<0,01#)	-	0,068	0,2	-	10	35	0,001	-

Tabel 30. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Nama	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Danau.....		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Danau.....		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Situ....		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Situ....		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Embung....		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Embung....		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan : Tidak ada komponen disebabkan tidak ada objek dimaksud

Tabel 31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Kota	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Baiturrahman	8.474	7.974	-	-	-
2	Kuta Alam	13.507	11.445	-	-	-
3	Meuraxa	5.653	4.685	-	-	-
4	Syiah Kuala	10.442	8.288	-	-	-
5	Lueng Bata	6.233	5.754	-	-	-
6	Kuta Raja	3.426	3.184	-	-	-
7	Banda Raya	5.336	5.288	-	-	-
8	Jaya Baru	6.328	5.827	-	-	-
9	Ulee Kareng	5.889	5.731	-	-	-
TOTAL			58.176			

Sumber : BPS Aceh

Tabel 32. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan Di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Kecamatan	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Baiturrahman	3515	3396	949	1199	1655	1783	6357	5074	564	1250	1670	1826	211	143	25	10
2	Kuta Alam	5135	4878	1217	1342	2134	2197	8578	6548	976	1601	2794	2778	422	290	44	18
3	Meuraxa	3306	2953	574	547	1130	1101	4091	3352	403	658	884	858	92	54	5	2
4	Syiah Kuala	3739	3692	1082	1178	1460	1495	5406	4642	822	1163	2932	2998	708	440	151	47
5	Lueng Bata	2679	2694	836	928	1373	1404	4703	3785	497	719	1384	1442	204	114	20	8
6	Kuta Raja	1724	1699	412	404	730	692	2794	2185	221	365	529	483	44	40	6	2
7	Banda Raya	2795	2661	723	941	1171	1320	4088	3533	455	741	1547	1512	257	127	22	12
8	Jaya Baru	3325	2995	631	781	1176	1270	5133	3935	516	882	1353	1406	178	90	12	8
9	Ulee Kareng	2887	2815	843	1061	1368	1320	4298	3384	544	1064	1676	1746	267	167	21	9
Jumlah		29105	27783	7267	8381	12197	12582	45448	36438	4998	8443	14769	15049	2383	1465	306	116

Keterangan :

L = Laki-Laki

P = Perempuan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Tabel 33. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)
Penyakit Rawat Jalan		
1	Common Cold	22141
2	Hypertensi	14316
3	ISPA	12372
4	Penyakit pada sistem jaringan otot dan jaringan pengikat	5937
5	Dispepsia	3205
6	Diabetes Militus (DM)	3945
7	Penyakit lain pada saluran pernafasan atas	3217
8	Penyakit Lambung	6710
9	Penyakit Kulit Alergi	5672
10	DM Type II	1978
Total		79.493
Penyakit Rujukan		
1	Diabetes Militus (DM)	2022
2	Kelainan Reflaksi	1833
3	Hypersensitive Heart Disease (HHD)	1762
4	Penyakit Mata	1014
5	Hypertensi	938
6	Diabetes Militus Insulin (IDDM)	3000
7	Stroke	504
8	Scizoprenia	380
9	Pulpitis	1847
10	Low Back Pain	272
Total		13.572

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Tabel 34. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Prosentase Rumah Tangga Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meuraxa	-	8.935	26.807
Total		-	8.935	26.807

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Tabel 35. Volume Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m3/hari)	Volume Limbah Cair (m3/hari)	Volume Limbah B3 Padat (m3/hari)	Volume Limbah B3 Cair (m3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Bergerak	-	-	-	-	-	-
	b. Tidak Bergerak :						
1	Puskesmas	Padat	-	-	0.01	5.1194 kg/hari	-
2	Rumah Sakit	Padat	-	-	0.3	0.705 kg/hari	-
3	Incenerator RSUD dr. Zainoel Abidin	Padat	-	-	-	351.327 kg/hari	-
4	Sumber Pencemar dari Luar RSUD dr. Zainoel ----- - RS Pertamedika - Rumah Sakit Jiwa - RS Harapan Bunda - RS Prince Nayef - RS Ibu dan Anak - RS Tgk Fakinah - RS Cempaka Az-Zahra - Puskesmas Lhoknga - RS Puskesmas Baitussalam - UPTD Puskesmas Meuraxa - Natasha Skin Clinic Center - Klinik Ginjal Nadhira - Klinik Anugrah Ayah Bunda - Naila Skin Center Banda Aceh	Padat	-	-	-	18.987 kg/hari	-
5	Catcher)						5.92 m3/ Hari

Keterangan : Untuk Sumber Pencemaran Bergerak, tidak dilakukan pengujian dan penelitian

Sumber :

- Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
- RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh

Tabel 36. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)											
1	BMKG Aceh (Blang Bintang Aceh Besar)	25,7	26,3	26,2	26,6	27,5	27,7	28,3	27,1	26,6	26,6	26,1	26
TOTAL		25,7	26,3	26,2	26,6	27,5	27,7	28,3	27,1	26,6	26,6	26,1	26

Sumber : Stasiun Klimatologi BMKG Indrapuri (Aceh Besar)

Tabel 37. Kualitas Udara Ambien di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

Lokasi	Lama Pengukuran	SO ₂ (µg/Nm ³)	CO (µg/Nm)	NO ₂ (µg/Nm ³)	O ₃ (µg/Nm ³)	HC (µg/Nm ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kawasan Transportasi Sp. Surabaya	1 jam	100,56	1741,84	28,65	-	-
Kawasan Transportasi Sp. Mesra	1 jam	93,88	1005,48	22,42	-	-
Kawasan Transportasi Sp. Lima	1 jam	103,14	1867,81	31,22	-	-
Kawasan Transportasi DLHK3	1 jam	110,53	2097,99	33,97	-	-
Kawasan Transportasi Sp. 7 Ulee Kareng	1 jam	116,23	2140,36	36,39	-	-
Kawasan Transportasi Depan Masjid Raya	1 jam	94,26	1101,67	20,18	-	-
Kawasan Transportasi Dalam Area Terminal AKAP Batoh	1 jam	42,67	518,77	9,87	-	-
Kawasan Transportasi Sp. Empat Taman Sari	1 jam	105,39	1296,35	27,13	-	-
Kawasan Transportasi Sp. Empat Jambotapeh	1 jam	92,61	1126,87	29,21	-	-
Kawasan Industri Jln. Twk Daud Syah	1 jam	113,61	1147,48	32,87	-	-
Kawasan Industri Depan PLTD Lueng Bata	1 jam	92,37	940,21	13,47	-	-
Kawasan Industri TPI Lampulo	1 jam	52,89	688,26	10,1	-	-
Kawasan Industri TPA Gp. Jawa	1 jam	58,95	547,41	9,44	-	-
Kawasan Industri Tahu Solo Gp. Punge Blang Cut	1 jam	59,27	405,39	9,37	-	-
Kawasan Industri Tahu Mandiri Gp. Lampaseh	1 jam	55,87	482,12	11,23	-	-

Lokasi	Lama Pengukuran	SO ₂ (µg/Nm ³)	CO (µg/Nm)	NO ₂ (µg/Nm ³)	O ₃ (µg/Nm ³)	HC (µg/Nm ³)
Kawasan Industri PT Bintang Perkasa Indah Motors (Mitsubishi)		95.39	897.83	11.96		
Kawasan Perkantoran Balai Kota	1 jam	60,39	736,35	10,44	-	-
Kawasan Perkantoran BLUD RSUD Zainoel Abidin	1 jam	61,37	854,31	14,69	-	-
Kawasan Perkantoran Persimpangan RS Meuraxa	1 jam	89,82	1021,51	17,75	-	-
Kawasan Permukiman Lampaseh	1 jam	65,62	803,92	11,84	-	-
Kawasan Permukiman Gp. Kopelma Darussalam	1 jam	65,53	977,99	12,19	-	-
Area Lingkungan Sekitar PLTD Lueng Bata (Desa Pango Davah)	-	<23.82	572.60	21.88	47.30	57.69
Area Lingkungan Sekitar PLTD Lueng Bata (Desa Pango Rava)	-	<23.82	572.60	21.40	38.30	24.96
Area Lingkungan Sekitar PLTD Lueng Bata (Desa Lueng Bata)	-	<23.82	664.21	18.80	37.80	77.40
Area Lingkungan Sekitar PLTD Lueng Bata (Desa Cot Mesiid)	-	<23.82	664.21	16.80	28.80	29.76
RSUD dr. Zainoel Abidin Ruangan Bedah Sentral	-	< 26	106,30	15,75	-	-
RSUD dr. Zainoel Abidin Ruangan Nabawi - 1	-	< 26	122,50	18,11	-	-
RSUD dr. Zainoel Abidin Ruangan ICU	-	< 26	107,26	14,63	-	-
RSUD dr. Zainoel Abidin Ruangan Geulima - 2	-	< 26	115,39	20,71	-	-
RSUD dr. Zainoel Abidin Ruangan Pav. Geurutee - 2	-	< 26	126,69	22,46	-	-
RSUD dr. Zainoel Abidin Ruangan Jeumpa -1	-	< 26	131,70	23,15	-	-
RSUD dr. Zainoel Abidin Ruangan Talasemia	-	< 26	109,22	14,09	-	-

Lokasi	Lama Pengukuran	SO ₂ (µg/Nm ³)	CO (µg/Nm)	NO ₂ (µg/Nm ³)	O ₃ (µg/Nm ³)	HC (µg/Nm ³)
RSUD dr. Zainoel Abidin Ruangan Hemodealisa	-	< 26	118,52	16,33	-	-
RSUD dr. Zainoel Abidin Ruangan Depo Kemoterapi	-	< 26	145,39	27,14	-	-
RSUD dr. Zainoel Abidin Ruangan Paru Terpadu	-	< 26	146,07	28,53	-	-
RSUD dr. Zainoel Abidin Ruangan Paru Terpadu	-	< 26	146,07	28,53	-	-
RSUD dr. Zainoel Abidin Ruangan Raudha - 3	-	< 26	108.62	16.51	-	-
RSUD dr. Zainoel Abidin Ruangan Raudha - 6	-	< 26	96.75	17.41	-	-
RSUD dr. Zainoel Abidin Ruangan Mina - 2	-	< 26	121.33	15.38	-	-
RSUD dr. Zainoel Abidin Ruangan Aqsha - 3	-	< 26	110.46	16.29	-	-
RHCU RSUD dr. Zainoel Abidin	-	< 26	125.62	18.07	-	-

Sumber :

- Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh
- PLTD Lueng Bata
- RSUD dr. Zainoel Abidin
- PT Bintang Indah Perkasa Motor (Mitsubishi)

PM10 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	PM2,5 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	TSP ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Pb ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Dustfall ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Total Fluorides Sebagai F ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Fluor Index ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Khlorine dan Khlorine Dioksida ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Sulphat Index ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		98,92	0,42	-	-	-	-	-
		174,19	0,47	-	-	-	-	-
		81,72	0,56	-	-	-	-	-
		180,64	0,62	-	-	-	-	-
		172,04	0,55	-	-	-	-	-
		88,17	0,31	-	-	-	-	-
		19,35	0,03	-	-	-	-	-
		92,47	0,38	-	-	-	-	-
		83,87	0,33	-	-	-	-	-
		103,22	0,39	-	-	-	-	-
		62,36	0,29	-	-	-	-	-
		43,01	0,03	-	-	-	-	-
		55,91	0,04	-	-	-	-	-
		64,51	0,07	-	-	-	-	-
		12,91	0,08	-	-	-	-	-

Tabel 38. Penggunaan Bahan Bakar di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Industri :											
1.	Kimia Dasar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Mesin dan Logam dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Industri Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Aneka Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Rumah Tangga :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Kendaraan :											
1.	Mobil Beban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
2.	Penumpang Pribadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Penumpang Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	3
4.	Bus Besar Pribadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
5.	Bus Besar Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
6.	Bus Kecil Pribadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
7.	Bus Kecil Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,382
8.	Truk Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,798
9.	Truk Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,211	1,792
10.	Roda Tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
11.	Roda Dua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Data yang digunakan adalah data tahun 2015 (untuk penggunaan bensin dan solar)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Tabel 39. Penjualan Kendaraan Bermotor di Kota Banda Aceh

Tahun 2018

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mobil Beban	-	-	-	
2	Penumpang Pribadi	-	-	-	
3	Penumpang Umum	-	-	-	
4	Bus Besar Pribadi	-	-	-	
5	Bus Besar Umum	-	-	-	
6	Bus Kecil Pribadi	-	-	-	
7	Bus Kecil Umum	-	-	-	
8	Truk Besar	-	-	-	
9	Truk Kecil	-	-	-	
10	Roda Tiga	-	-	-	
11	Roda Dua	-	-	-	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Tabel 40. Tabel Perubahan Ruas Jalan di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Jenis Jalan	Panjang Jalan 2 tahun terakhir (Km)	
		2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Jalan Bebas Hambatan	N/A	N/A
2.	Jalan Raya	-	-
3.	Jalan Sedang	-	-
4.	Jalan Kecil	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

34	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Tower Telekomunikasi Tower Roof Top Pole Site Name MC Pasar Aceh 7 (Site ID NAD 150)	Ruly Praptomo Asset Management and Maintenance PT Quattro International	GM Of
35	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pengoperasian Tower Telekomunikasi Pole Antena (PJU Kamufase) Site Name MC Pasar Aceh 2 (Site ID NAD 145)	Ruly Praptomo Asset Management and Maintenance PT Quattro International	GM Of
36	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pengoperasian Tower Telekomunikasi Pole Antena (PJU Kamufase) Site Name MC Pasar Aceh 4 (Site ID NAD 147)	Ruly Praptomo Asset Management and Maintenance PT Quattro International	GM Of
37	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pengoperasian Tower Telekomunikasi Pole Antena (PJU Kamufase) Site Name MC Pasar Aceh 5 (Site ID NAD 148)	Ruly Praptomo Asset Management and Maintenance PT Quattro International	GM Of
38	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pengoperasian Tower Telekomunikasi Pole Antena (PJU Kamufase) Site Name Paviliun Seulawah (Site ID NAD 121)	Ruly Praptomo Asset Management and Maintenance PT Quattro International	GM Of
39	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pengoperasian Tower Roof Top Pole Site Name MC Laksana 3 (Site ID NAD 221)	Ruly Praptomo Asset Management and Maintenance PT Quattro International	GM Of
40	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Tower Telekomunikasi Pole Antena (PJU Kamufase) Site Name MC Laksana 2 (Site ID NAD 211)	Ruly Praptomo Asset Management and Maintenance PT Quattro International	GM Of
41	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Tower Telekomunikasi Pole Antena (PJU Kamufase) Site Name Kuta Alam 2 (Site ID NAD 096)	Ruly Praptomo Asset Management and Maintenance PT Quattro International	GM Of
42	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pengoperasian Hotel Wisata	Elvyani Direktur Hotel Wisata	
43	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pengoperasian Tower Site Name MC Beurawe 2	Ruly Praptomo Asset Management and Maintenance PT Quattro International	GM Of
44	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pengoperasian Tower Telekomunikasi Jl. Alue Blang Lorong Amanda No.7 Gp. Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman Kota	Indra Sahputra, M. Sc Coordinator Project	
45	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pengoperasian Tower Telekomunikasi Jln. Syiah Kuala Lr. Nyak Makam Dusun Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota	Indra Sahputra, M. Sc Coordinator Project	
46	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pengoperasian Tower Telekomunikasi Jln. Rama Setia Dusun Sejahtera Desa Deah glumpang Kecamatan Meuraxa	Indra Sahputra, M. Sc Coordinator Project	
47	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pengoperasian Tower Telekomunikasi Jln. Sawah Gampong Surien Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	Indra Sahputra, M. Sc Coordinator Project	
48	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pengoperasian Tower Telekomunikasi Dusun Jambu Air Gampong Pie Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	Indra Sahputra, M. Sc Coordinator Project	
49	DPLH	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pengoperasian PT. Dunia Barusa (perbengkelan dan Penjualan Mobil/Showroom)	H. Muhammad Hanafiah Dirut PT. Dunia Barusa	
50	DPLH	Rekomendasi atas Perubahan Nama untuk Kegiatan Swiss-Belhotel menjadi Hotel Hermes	Sofyan Bachtiar DirutHotel Hermes	
51	DPLH	Rekomendasi atasDPLH Kegiatan Pengoperasian Wisma Moris	Zulfikri Pimpinan Wisma Moris	

Tabel 42. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3 di Kota banda Aceh Tahun 2018

No	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	CV. Amindy Barokah	Pengangkutan limbah B3	Pengumpulan	013.PJ/HKM.00.01/LB3/KITSBU/2015, Tanggal 1 April 2015
2	Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati	Pelayanan Kesehatan	Penyimpanan Sementara	SK Walikota Nomor : 514 Tahun 2017 Tanggal : 28 Desember 2017
3	Rumah Sakit Harapan Bunda	Pelayanan Kesehatan	Penyimpanan Sementara	SK Walikota Nomor : 515 Tahun 2017 Tanggal : 28 Desember 2017
4	PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sementara Bagian Utara Sektor Pembangkitan Nagan Raya Pusat Listrik Lueng Bata Banda Aceh	Pembangkit Listrik	Penyimpanan Sementara	SK Walikota Nomor : 256 Tahun 2018 Tanggal : 30 Mei 2018

Sumber : Dinas Lingkungan hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 43. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) di Kota Banda Aceh) Tahun 2018

No	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hotel Medan	Senin / 5 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
2	Hotel Prapat	Senin / 5 Februari 2018	Belum ada dokumen
3	Hotel Wisata	Senin / 5 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
4	Hotel Sulthan	Senin / 5 Februari 2018	Dokumen sudah ada
5	Wisma Kartini	Senin / 5 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
6	Hotel 61	Selasa / 6 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
7	Hotel Diana	Selasa / 6 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
8	Wisma Kuta Alam	Selasa / 6 Februari 2018	Belum ada dokumen
9	Hotel Grand Penamas	Selasa / 6 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
10	Mars Hotel	selasa / 6 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
11	Sei Hotel	Kamis / 8 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
12	Hotel Aceh Barat	Kamis / 8 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
13	Siwah Hotel	Kamis / 8 Februari 2018	Belum ada dokumen
14	Hotel 88	Kamis / 8 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
15	Wisma Laksana 28 A-B	Senin / 12 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
16	Hotel Kuala Nanggroe	Senin / 12 Februari 2018	Belum ada dokumen
17	Hotel Madinah	Senin / 12 Februari 2018	Belum ada dokumen
18	Hotel Kuala Radja	Senin / 12 Februari 2018	Belum ada dokumen
19	Wisma Andalas	Selasa / 13 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
20	Wisma lampriet	Selasa / 13 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
21	Hotel Keumala	Selasa / 13 Februari 2018	Belum ada dokumen
22	Hotel Grand Lambhuk	Selasa / 13 Februari 2018	Belum ada dokumen
23	Hotel Aldila	Selasa / 13 Februari 2018	Belum ada dokumen
24	Hotel Palembang	Senin / 19 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
25	Hotel Kyriad Muraya	Senin / 19 Februari 2018	Belum ada dokumen
26	Hotel Intan	Senin / 19 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
27	Hotel Poma	Senin / 19 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
28	Hotel Al - Hanifi	Senin / 19 Februari 2018	Belum ada dokumen
29	Grand Aceh Hotel (G1)	Selasa / 20 Februari 2018	Belum ada dokumen
30	Grand Aceh Hotel (G2)	Selasa / 20 Februari 2018	Belum ada dokumen
31	Ring Road Hotel	Selasa / 20 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
32	Al- Fatih Hotel	Selasa / 20 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
33	Hotel Grand Arabia	Rabu / 28 Februari 2018	Belum ada dokumen
34	Hotel Hip Hop	Rabu / 28 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
35	Hotel Grand Permata Hati	Rabu / 28 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
36	Hotel Seventen	Rabu / 28 Februari 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
37	Hotel Dakka	Kamis / 01 Maret 2018	Belum ada dokumen
38	Wisma Mentari	Kamis / 01 Maret 2018	Belum ada dokumen
39	Hotel Syariah Lingke	Kamis / 01 Maret 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
40	Hotel Lammyong	Kamis / 01 Maret 2018	Belum ada dokumen
41	Hotel Tayyiba	Kamis / 01 Maret 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
42	Hotel Hermes Palace	Selasa / 06 Maret 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
43	Hotel Oasis	Selasa / 06 Maret 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
44	Hotel Grand Nanggroe	Selasa / 06 Maret 2018	Belum ada dokumen
45	Hotel Rasamala Indah	Selasa / 06 Maret 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
46	PT. Dunia Barusa	Kamis / 08 Maret 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
47	PT. Astra Internasional, Tbk	Kamis / 08 Maret 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
48	KFC Lammyong	Selasa / 13 Maret 2018	Belum ada dokumen
49	Hadrah Hotel	Selasa / 13 Maret 2018	Belum ada dokumen
50	KFC Lamdom	Selasa / 13 Maret 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
51	Medali Motor	Selasa / 13 Maret 2018	Belum ada dokumen
52	PT. Sabena Honda Sukadamai	Kamis / 22 Maret 2018	Belum ada dokumen
53	Wisma Nusa Cendana	Kamis / 22 Maret 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
54	Suzuki SMG Peunayong	Selasa / 27 Maret 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
55	PT. Capela Dinamik Nusantara Peunayong	Selasa / 27 Maret 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
56	PT. Capela Dinamik Nusantara Lampriet	Selasa / 27 Maret 2018	Belum ada dokumen
57	Yamaha Alfa Sorpii	Selasa / 27 Maret 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
58	Klinik Bunda Thamrin	Kamis / 29 Maret 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
59	Tara Klinik	Kamis / 29 Maret 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
60	Klinik Meurasi Batoh	Kamis / 29 Maret 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
61	Hotel A Yani	Kamis / 12 April 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
62	Hotel Mulana	Selasa / 18 April 2017	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
63	Hotel Hijrah INN	Selasa / 18 April 2017	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
64	KFC Sp. Lima	Senin / 16 April 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
65	Pizza Hut	Senin / 16 April 2018	Belum ada dokumen
66	Canai Mamak KL	Senin / 16 April 2018	Belum ada dokumen
67	De Mawar Hotel	Selasa / 17 April 2018	Belum ada dokumen
68	Cristal Guest House	Selasa / 17 April 2018	Belum ada dokumen
69	Hotel Lammyong	Rabu / 25 April 2018	Belum ada dokumen
70	Wongsolo	Rabu / 25 April 2018	Dokumen sudah ada (SPPL)
71	Hotel Mita Mulia	Rabu / 25 April 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
72	Penginapan Nelis	Kamis / 26 April 2018	Belum ada dokumen
73	Hotel Angrek	Kamis / 26 April 2018	Belum ada dokumen
74	Wong Solo Jasdum	Selasa / 8 Mei 2018	Belum ada dokumen
75	Serba Jadi Bakery	Selasa / 8 Mei 2018	Belum ada dokumen
76	Restoran Bunda	Rabu / 9 Mei 2018	Belum ada dokumen
77	Ayam Bakar KQ5	Rabu / 9 Mei 2018	Belum ada dokumen
78	Wisma Permata Hati	Senin / 14 Mei 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
79	PT. Bintang Indah Permata Motor	Senin / 14 Mei 2018	Belum ada dokumen
80	Premier Dorsmeer	Senin / 14 Mei 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
81	Family Oil	Selasa / 14 Mei 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
82	Apotik Kimia Farma Tepi Kali	Selasa / 22 Mei 2018	Dokumen sudah ada (SPPL)
83	Apotik Kimia Farma Lampasah	Selasa / 22 Mei 2018	Dokumen sudah ada (SPPL)
84	Hery Home Stay	Rabu / 23 Mei 2018	Belum ada dokumen
85	Apotik Kimia Farma 92 Peunayong	Rabu / 23 Mei 2018	Dokumen sudah ada (SPPL)
86	PT. Kimia Farma Batoh	Kamis / 24 Mei 2018	Dokumen sudah ada (SPPL)
87	Apotik Kimia Farma Lueng Batu	Kamis / 24 Mei 2018	Dokumen sudah ada (SPPL)
88	Apotik Kimia Farma Keuramat	Senin / 27 Mei 2018	Belum ada dokumen
89	PT. Cempaka Lima Utama Apotik	Senin / 27 Mei 2018	Belum ada dokumen
90	PT. Kimia Farma Mibo	Rabu / 30 Mei 2018	Belum ada dokumen
91	Apotik Cempaka Lima	Rabu / 30 Mei 2018	Belum ada dokumen
92	SPBU Gp. Mulia	Rabu 25 Juli 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
93	SPBU Kuta Alam	Rabu / 25 Juli 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
94	SPBU Lambhuk	Kamis / 26 Juli 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
95	SPBU Lueng Bata	Kamis / 26 Juli 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
96	SPBU Jeulingga	Senin / 30 Juli 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
97	SPBU Lammyong	Senin / 30 Juli 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
98	SPBU Sp. Jam	Selasa / 31 Juli 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
99	SPBU Batoh	Selasa / 31 Juli 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
100	SPBU Sp. Dodik	Rabu / 1 Agustus 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
101	SPBU Meuraxa	Rabu / 1 Agustus 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
102	Hotel Kyriad Muraya	Rabu / 08 Agustus 2018	Belum ada dokumen
103	Hotel Aceh Barat	Rabu / 08 Agustus 2018	Belum ada dokumen
104	Hotel Grand Aceh Landom	Rabu / 08 Agustus 2018	Belum ada dokumen
105	Siwah Medica Center	Kamis / 30 Agustus 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
106	Bako Gajah	Kamis / 30 Agustus 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
107	Guest House Lamprit	Kamis / 30 Agustus 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
108	Hotel Siwah	Jum'at / 31 Agustus 2018	Belum ada dokumen
109	RS. Meutia	Jum'at / 31 Agustus 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
110	Hotel Dakka	Jum'at / 31 Agustus 2018	Belum ada dokumen
111	Hotel Al - Hanifi	Senin / 03 September 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
112	Hotel Kuala Radja	Senin / 03 September 2018	Belum ada dokumen
113	Hotel Madinah	Senin / 03 September 2018	Belum ada dokumen
114	Hotel Kuta Alam	Selasa / 04 September 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
115	Hotel Diana	Selasa / 04 September 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
116	Hotel Panemas 2	Selasa / 04 September 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
117	Yamaha Alfa Sorpii	Selasa / 02 Oktober 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
118	Banda Bakery	Selasa / 02 Oktober 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
119	Mars Hotel	Rabu / 03 Oktober 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
120	Hadrah Hotel	Rabu / 03 Oktober 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
121	Lab. Bunda Tamrin	Kamis / 04 Oktober 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
122	PT. Honda Sabeena	Kamis / 04 Oktober 2018	Belum ada dokumen
123	Kimia Farma Batoh	Senin / 08 Oktober 2018	Belum ada dokumen
124	Klinik Meurasi Batoh	Senin / 08 Oktober 2018	Dokumen sudah ada
125	Kimia Farma Peunayong	Selasa / 09 Oktober 2018	Belum ada dokumen
126	Kimia Farma Lampasah	Selasa / 09 Oktober 2018	Dokumen sudah ada
127	CK Steel	Rabu / 10 Oktober 2018	Dokumen sudah ada
128	Apotik Cempaka Lima	Rabu / 10 Oktober 2018	Belum ada dokumen
129	Premier Dorsmeer	Kamis / 11 Oktober 2018	Belum ada dokumen
130	Arena Ban	Kamis / 11 Oktober 2018	Belum ada dokumen
131	Hotel Syariah Lingke	Senin / 15 Oktober 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
132	Hotel Mentari Lingke	Senin / 15 Oktober 2018	Belum ada dokumen
133	Chep N Clean	Rabu / 17 Oktober 2018	Belum ada dokumen
134	Hotel Kuala Nanggroe	Rabu / 17 Oktober 2018	Belum ada dokumen
135	Tara Klinik	Kamis / 18 Oktober 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
136	Klinik Humaira	Kamis / 18 Oktober 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
137	Hotel Hijrah INN	Selasa / 23 Oktober 2018	Belum ada dokumen
138	Apotik Indah	Selasa / 23 Oktober 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
139	Hotel Dakka	Kamis / 25 Oktober 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
140	Losmen Raya	Kamis / 25 Oktober 2018	Belum ada dokumen
141	KFC Batoh	Kamis / 1 Oktober 2018	Dokumen sudah ada
142	Medali Motor	Kamis / 1 Oktober 2018	Belum ada dokumen
143	Hotel Rasamala Indah	Senin / 5 November 2018	Dokumen sudah ada
144	Capella Dinamik Nusantara	Senin / 5 November 2018	Belum ada dokumen
145	Serba Jadi Bakery	Selasa / 6 November 2018	Belum ada dokumen
146	Family Oil	Selasa / 6 November 2018	Belum ada dokumen
147	Hotel Mita Mulia	Kamis / 8 November 2018	Belum ada dokumen
148	Apotik Kimia Farma Tepi Kali	Kamis / 8 November 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
149	Hery Home Stay	Selasa / 13 November 2018	Belum ada dokumen
150	Apotik Kimia Farma Gp. Keuramat	Selasa / 13 November 2018	Belum ada dokumen
151	Dermaga Kuliner	Kamis / 15 November 2018	Belum ada dokumen
152	Grand Aceh Kuliner	Kamis / 15 November 2018	Belum ada dokumen
153	Honda Nusantara Surya Sakti	Senin / 19 November 2018	Belum ada dokumen
154	RM. Dapur Minang	Senin / 19 November 2018	Belum ada dokumen
155	RM. Mulia Minang	Kamis / 22 November 2018	Belum ada dokumen
156	RM. Faiz	Kamis / 22 November 2018	Belum ada dokumen
157	Penginapan Mulia	Senin / 26 November 2018	Belum ada dokumen
158	Nusantara Indah	Senin / 26 November 2018	Belum ada dokumen
159	Apotik Kimia Farma Ulee Kareng	Rabu / 28 November 2018	Dokumen sudah ada
160	Bengkel Space	Rabu / 28 November 2018	Dokumen sudah ada
161	Bako Gajah	Kamis / 29 November 2018	Dokumen sudah ada
162	Mbak Moel Lammyong	Kamis / 29 November 2018	Belum ada dokumen
163	Zara Dorsmeer	Jum'at / 30 November 2018	Belum ada dokumen
164	Hotel Al - Fatih	Jum'at / 30 November 2018	Belum ada dokumen
165	Sulthan Hotel	Senin / 03 Desember 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
166	Hotel Panemas 2	Senin / 03 Desember 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
167	Sei Hotel	Selasa / 04 Desember 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
168	Hotel Kuala Radja	Selasa / 04 Desember 2018	Belum ada dokumen
169	Hotel Madinah	Rabu / 05 Desember 2018	Belum ada dokumen
170	Hotel El - Hanifi	Rabu / 05 Desember 2018	Belum ada dokumen
171	Hotel Intan	Kamis / 06 Desember 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
172	Hotel Hip Hop	Kamis / 06 Desember 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
173	Hotel Grand Arabia	Jum'at / 07 Desember 2018	Belum ada dokumen
174	Hotel Grand Permata Hati	Jum'at / 07 Desember 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
175	PT. Capella Dinamik Nusantara	Senin / 10 Desember 2018	Dokumen sudah ada
176	Bread Boy Bakery	Senin / 10 Desember 2018	Dokumen sudah ada
177	Baker King	Selasa / 11 Desember 2018	Belum ada dokumen
178	Hotel A. Yani	Selasa / 11 Desember 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
179	Hotel Mulana	Rabu / 12 Desember 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
180	Wong Solo Jasdum	Rabu / 12 Desember 2018	Belum ada dokumen
181	Kimia Farma Lueng Bata	Kamis / 13 Desember 2018	Belum ada dokumen
182	Kimia Farma Batoh	Kamis / 13 Desember 2018	Belum ada dokumen
183	PT. Astra Internasional, Tbk	Jum'at / 14 Desember 2018	Dokumen sudah ada, Belum mengirimkan laporan periodik
184	Hotel Grand Arabia	Jum'at / 14 Desember 2018	Belum ada dokumen

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 44. Bencana Banjir, Korban dan Kerugian di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Kecamatan	Total Area Terendam (Ha)	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
			Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Baiturrahman	-	-	-	-
2	Luengbata	1,2	-	-	-
3	Kuta Alam	4,4	-	-	-
4	Jaya Baru	-	-	-	-
5	Banda Raya	-	-	-	-
6	Meuraxa	-	-	-	-
7	Kutartaja	-	-	-	-
8	Syiah Kuala	-	-	-	-
9	Ulee Kareng	-	-	-	-
Total		5,6	-	-	-

Sumber : BPBD Kota Banda Aceh

Tabel 45. Bencana Kekeringan, Luas, dan Kerugian di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Kecamatan	Total Area (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Banda Raya	0	-
2	Ulee Kareng	17	-
3	Lueng Bata	3	-
4	Jaya Baru	0	-
Total		20	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh

Tabel 46. Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas, dan Kerugian di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Total Area (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Banda Aceh	N/A	N/A

Keterangan : Tidak ada komponen dikarenakan tidak ada objek dimaksud

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 47. Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, Kerugian
Di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana	Jumlah Korban Meninggal (jiwa)	Perkiraan Kerugian (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Meuraxa	N/A	N/A	N/A
2	Jaya Baru	N/A	N/A	N/A
3	Banda Raya	N/A	N/A	N/A
4	Baiturrahman	N/A	N/A	N/A
5	Lueng Bata	N/A	N/A	N/A
6	Kuta Alam	N/A	N/A	N/A
7	Kuta Raja	N/A	N/A	N/A
8	Syiah Kuala	N/A	N/A	N/A
9	Ulee Kareng	N/A	N/A	N/A
Total		N/A	N/A	N/A

Keterangan : Tidak ada komponen dikarenakan tidak ada objek dimaksud

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh

Tabel 48. Luas wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (km2)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk(%)	Kepadatan Penduduk(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Baiturrahman	4,54	36.721	-	8.088
2	Kuta Alam	10,05	51.614	-	5.136
3	Meuraxa	7,26	19.770	-	2.723
4	Syiah Kuala	14,24	37.193	-	2.612
5	Lueng Bata	5,34	25.607	-	4.795
6	Kuta Raja	5,21	13.365	-	2.565
7	Banda Raya	4,79	23.919	-	4.994
8	Jaya Baru	3,78	25.503	-	6.747
9	Ulee Kareng	6,15	26.221	-	4.264
Total		61,36	259913		4.236

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Tabel 49. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kota Banda Aceh Tahun 2018

No.	Propinsi/Kota/Kab	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (M3)	Volume Eksisting (M3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Banda Aceh	TPA Kota Banda Aceh	Control Landfill	23,3	5,5	780

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 50. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Per Hari di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Kota	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (Kg/Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Banda Aceh	259913	194935

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel. 51 Jumlah Bank Sampah Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset/Bulan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bank Sampah Gema Bersatu	No. 04 Tahun 2018	229,5	Aktif	Gampong Ateuk Pahlawan	4	80	773.000
2	Bank Sampah Mitra	No. 14 Tahun 2018	167	Aktif	Gampong Kota Baru	4	38	512.000
3	Bank Sampah Subur Makmur	No.29 Tahun 2018	523	Aktif	Kota Banda Aceh	4	264	1.005.000
4	Bank Sampah Lambung Lestari	No. 70 Tahun 2016	1.023	Aktif	Gampong Lambung dan sekitarnya	6	60	1.925.000
5	Bank Sampah Sadar Mandiri	No. 59/VIII/LB-MRX/BA2015	9.151	Aktif	Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar	6	127	25.500.000
6	Bank Sampah BPTP Family	No. 65 Tahun 2004	85	Aktif	Komplek BPTP	4	26	220.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Aceh

Tabel 52. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kompos Skala Kawasan	Gp. Ilie Ule Kareng	DLHK3
2	Kompos ITF	Gp. Jawa Banda Aceh	DLHK3
3	Daur Ulang Sampah Plastik	Gp. Panteriek Banda Aceh	DLHK3
4	Bank Sampah	Gp. Ateuk Pahlawan, Gp. Kota Baru, Gp. Panteriek	Masyarakat
5	TPS 3R	Gp. Surien dan Gp. Lambung	Masyarakat
6	Kegiatan WCP (Waste Collecting Point)	Gp. Alue Deah Teungoh, Gp. Deah Glumpang dan Gp. Seutui	Masyarakat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 53. Status Pengaduan Masyarakat di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Proses Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masyarakat (Perseorangan)	Masalah Tumpukan Sampah dan Limbah Pembuangan air pada Hotel Kuala Radja dan Rumah Masyarakat Sekitar Hotel	Sudah di surati oleh Dinas DLHK3 Kepada Hotel Terkait dan Penduduk Setempat
2	Masyarakat (Perseorangan)	Pencemaran limbah yang dilakukan oleh Rumah Pemotongan Hewan yang berlokasi di Gampong Pande dan Gampong Jawa	Sudah diselesaikan dan ditindaklanjuti
3	Masyarakat (Perseorangan)	Pencemaran Lingkungan terhadap Sungai Krueng Daroy (Taman Putroe Phang) berupa air sungai yang berwarna hijau Pekat dan menimbulkan bau yang menyengat	Sudah melakukan peninjauan lapangan dan sudah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi terkait pengujian Kualitas Air dengan BARISTAND INDUSTRI Banda Aceh
4	Masyarakat	Menolak Pembangunan Rumah Sakit yang berlokasi di Ule Sagoe Ujung Blang/ Lorong E Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Sudah melakukan Verifikasi ke lapangan
5	Masyarakat	Laporan masyarakat terkait semburan gas yang berada di Gampong Alue Naga Dusun Kutaran	Sudah melakukan Verifikasi lapangan dan sudah ditindaklanjuti dengan meminta PT. PLN untuk melakukan pemeriksaan kondisi peralatan listrik pada rumah tersebut.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 54. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Islamic Relief Indonesia	-	Setui Banda Aceh Telp.0651-44519
2	Flora Fauna International (FFI)	-	Jl. Cumi-cumi No. 15 Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh 2321 Telp.0651-7406686 Fax.0651-23260 www.ffi.or.id
3	Yayasan Gajah Sumatera (YAGASU)	-	Jl. Tgk. Dianjong Peulanggahan Banda Aceh
4	World Wide Fund for a Living Planet (WWF)	-	Jl. Alue Blang Lr. Alamanda No.9 Neusu Aceh Banda Aceh 23244 Telp.0651-635189, 636190 Fax 0651-635192 www.wwf.or.id
5	Yayasan Leuser International (YLI)	-	Jl. Tgk. Syech Abdulrauf No.8 Unsyiah Darussalam Banda Aceh Telp.0651-7555900 Fax 0651-7551440, Email : yli-nad@leuserfoundation.org, www.walhiaceh.org
6	WALHI	-	Jl. Tgk.Main Lr.Krueng Do II No.26 Gp.Lambhuk Ulee Kareng Banda Aceh Telp.0651-21183 Fax.0651-21184 www.walhiaceh.org
7	Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	Jl. Tgk.Imum Lueng Bata No.46 Banda Aceh
8	Muslim Aid	-	Jl.Tgk.Bintara Pineung No.27 Gp.Pineung Banda Aceh Telp.0651-7562938 Fax.0651-7561443 www.muslimaid-id.org or www.muslimaid.or.id
9	Transparan-cy International Indonesia (TII)	-	Jl.Tgk.Chik Dipineung II No.26 Kompleks Villa Citra Lampineung Banda Aceh
10	IKAPALA	-	Banda Aceh
11	CI	-	www.conservation.org or www.conservation.or.id
12	Institut Green Aceh (IGA)	-	
13	Forum Lingkungan Hidup (FLH) Aceh	-	Jl. Cut Makmun Lr.Blang Ujong No.9 Beurawe Banda Aceh
14	Yayasan Kreatif Usaha Mandiri Alami (KUMALA) Cabang Aceh	-	Jl. Utama No.10 Darussalam Gp.Rukoh Kec.Syiah Kuala Banda Aceh Telp.08159263187 - 08126584415
15	Wetland International Indonesia Programme (WIIP)	-	Banda Aceh
16	Forum Orang Utan Aceh (FOR A)	-	Banda Aceh
17	FORUM LSM ACEH	-	Jl. T.Iskandar No.56, Gp.Lambhuk Kec.Ulee Kareng Banda Aceh Telp.+62-651 636011 Fax.+62-651 636011 Email : forumsmaceh@yahoo.com Website : http://www.forumsmaceh.org

18	Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA)	-	Jl.Tandi Lr.T.Aji No.5 Neusu Aceh Banda Aceh 23244, email: secretariat@kuala.or.id, jaring.kuala@gmail.com Website: http://www.kuala.or.id/, http://kualanews.wordpress.com
19	Yayasan Lembaga Ekosistem Basah (LEBah)	-	Banda Aceh
20	Koordinator Kampanye Sahabat Laut (SALUT)	-	Banda Aceh
21	Yayasan Ekosistem Aceh (YEA)	-	Banda Aceh
22	Pusat Gerakan dan Advokasi Rakyat (PUGAR)	-	Jl.Syiah Kuala No.8 Jambo Tape Banda Aceh Gp.Bandar Baru, Kec.Kuta Alam, Banda Aceh
23	Forum Studi Kependudukan & Lingkungan Hidup (FORSIKAL)	-	Jl.Chik Muhammad Thayeb Peurelak No.60 Bandar Baru Banda Aceh 23126 Telp.0651-23614 Fax 0651-23633
24	Aceh Climate Change Initiative (ACCI)	-	Unsyiah-Darussalam Banda Aceh
25	Aceh Ocean Coral	-	Jl.Geuce Menara VIII, Lr.Cempaka No.2 Banda Aceh Phone:0651-40518 Email: contac@acehoceancoral.org, website: www.acehoceancoral.org
26	WETLANDS	-	Jl. Teladan I No.24 Garot Keutapang Banda Aceh
27	MAPALA Leuser Unsyiah	-	Banda Aceh
28	Konservasi dan Pesisir Pantai	-	Banda Aceh
29	YAPENA	-	Lamteumen-Banda Aceh

Sumber : Bapedal Aceh

Tabel 55. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Doktor (S3)	N/A	N/A	N/A
2	Master (S2)	5	4	9
3	Sarjana (S1)	10	8	18
4	Diploma (D3/D4)	2	-	2
5	SLTA	14	5	19
Jumlah				48

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 56. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah Mengikuti Diklat di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Nama Instansi	Jenis Kegiatan/Usaha			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	N/A	N/A	N/A	1	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 57. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Banda Aceh	Adipura	Presiden RI	2018
2	SDN 24 Kota Banda Aceh	Juara Pertama Sekolah Ramah Lingkungan Tk. SD/Madrasah Ibtidaiyah se-	Walikota Banda Aceh	2018
3	SDN 27 Kota Banda Aceh	Juara Kedua Sekolah Ramah Lingkungan Tk. SD/Madrasah Ibtidaiyah se-	Walikota Banda Aceh	2018
4	SDN 2 Kota Banda Aceh	Juara Ketiga Sekolah Ramah Lingkungan Tk. SD/Madrasah Ibtidaiyah se-	Walikota Banda Aceh	2018
5	SMPN 19 Kota Banda Aceh	Juara Pertama Sekolah Ramah Lingkungan Tk. SMP/Madrasah Tsanawiyah	Walikota Banda Aceh	2018
6	SMPN 4 Kota Banda Aceh	Juara Kedua Sekolah Ramah Lingkungan Tk. SMP/Madrasah Tsanawiyah	Walikota Banda Aceh	2018
7	SMPN 17 Kota Banda Aceh	Juara Ketiga Sekolah Ramah Lingkungan Tk. SMP/Madrasah Tsanawiyah	Walikota Banda Aceh	2018
8	SMAN 4 Kota Banda Aceh	Juara Pertama Sekolah Ramah Lingkungan Tk. SMA/Madrasah Aliyah se-	Walikota Banda Aceh	2018
9	SMAN 12 Banda Aceh	Juara Kedua Sekolah Ramah Lingkungan Tk. SMA/Madrasah Aliyah se-	Walikota Banda Aceh	2018
10	SMAN 10 Kota Banda Aceh	Juara Ketiga Sekolah Ramah Lingkungan Tk. SMA/Madrasah Aliyah se-	Walikota Banda Aceh	2018
12	DayahInshafuddin	Juara Pertama Dayah Ramah Lingkungan se-Kota Banda Aceh	Walikota Banda Aceh	2018
13	Dayah Babun Najah	Juara Kedua Dayah Ramah Lingkungan se-Kota Banda Aceh	Walikota Banda Aceh	2018
14	Dayah Al Ishlah Al Aziziyah	Juara Kedua Dayah Ramah Lingkungan se-Kota Banda Aceh		2018
15	Disa Mastura	Juara Kedua Inong Duta Lingkungan (SMAN 10 Banda Aceh) se Provinsi Aceh	Gubernur Aceh	2018
16	M. Saeef Seena	Juara I Agam Duta Lingkungan (SMAN 10 Banda Aceh) se Kota Banda Aceh	Walikota Banda Aceh	2018

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 58. Kegiatan/ Program Yang Diinisiasi Masyarakat di Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sosialisasi pengelolaan sampah	DLHK3	Warga Sekolah	Februari s/d Nopember
2	Sosialisasi masyarakat di kawasan sekitar bantaran sungai	DLHK3	Masyarakat	April, Mei, Juli
3	Sosialisasi Pemilahan sampah sistem WCP	DLHK3	Masyarakat	Juni s/d Desember
4	Sosialisasi pemilahan sampah kepada masyarakat, warung makan dan café	DLHK3	Masyarakat	Juli
5	Sosialisasi pemilahan sampah (volunteer) di tempat/event publik	Komunitas SAHI	Masyarakat	Maret s/d Nopember
6	Sosialisasi pembinaan dan pengembangan bank sampah	DLHK3	Masyarakat	Maret s/d Nopember
7	Sosialisasi penegakan hukum pada kawasan bebas sampah	DLHK3	Masyarakat kawasan pilot	Agustus s/d Desember

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 59. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PERTANIAN (Kehutanan dan Perikanan)	126.329,3	135.264,6	142.701,5	154.320,8	160.081,9
	a. Pertanian Sempit	-	-	-	-	-
	- Tanaman Bahan Makanan	-	-	-	-	-
	- Tanaman Perkebunan	-	-	-	-	-
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	-	-	-	-	-
	b. Kehutanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	c. Perikanan	-	-	-	-	-
2.	Pertambangan dan Penggalian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Industri Pengolahan	262.640,8	283.696,6	311.350,1	334.262,3	375.763,7
4a.	Listrik dan Gas	32.502,3	35.781,5	39.747,9	47.729,5	57.299,5
4b.	Air Bersih, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.440,7	11.639,5	14.253,8	18.900,1	21.375,0
5.	Bangunan (Konstruksi)	958.082,6	960.238,1	1.103.743,6	1.579.485,3	1.094.651,6
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.827.199,8	3.059.382,8	3.191.290,0	3.375.398,8	3.615.352,7
7a.	Pengangkutan (Transportasi dan Pergudangan)	1.948.671,9	2.072.370,4	1.986.734,7	1.782.087,7	1.779.691,3
7b.	Komunikasi dan Informasi	972.578,2	999.810,2	956.943,1	957.348,4	972.007,0
8a.	Keuangan dan Asuransi	389.608,8	395.006,6	422.800,0	458.551,1	505.978,1
8b.	Persewaan (Real Estate)	700.447,4	830.077,6	970.979,0	1.081.187,3	1.289.289,1
8c.	Jasa Perusahaan	288.493,0	321.106,6	337.943,9	373.078,6	403.150,5
9a.	Jasa Pendidikan	659.443,4	715.857,0	797.814,8	922.468,1	1.043.561,4
9b.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	432.781,4	488.777,1	524.726,2	580.124,4	634.540,7
9c.	Jasa-Jasa Lain	201.303,2	225.282,7	246.029,5	278.334,1	313.068,2
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	9.810.522,8	10.534.291,3	11.047.058,1	11.943.276,5	12.265.810,7
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	9.778.020,5	10.498.509,8	11.007.310,2	11.895.547,0	12.208.511,2

Keterangan :

- Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah
- Pemisahan pada Point 4 disesuaikan dengan Buku Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2018 dikarenakan Pada Buku Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2018 tersebut Parameter (uraian) tidak digabung nilainya.
- Untuk Point 7,8 dan 9 Berlaku sama seperti Poin 4 diatas.

Sumber :

- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh
- Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Tabel 60. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kota Banda Aceh
Tahun : 2018

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PERTANIAN (Kehutanan dan Perikanan)	115.843,20	118.948,40	123.626,90	128.549,50	128.550,50
	a. Pertanian Sempit	-	-	-	-	-
	- Tanaman Bahan Makanan	-	-	-	-	-
	- Tanaman Perkebunan	-	-	-	-	-
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	-	-	-	-	-
	b. Kehutanan	-	-	-	-	-
	c. Perikanan	-	-	-	-	-
2.	Pertambangan dan Penggalian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Industri Pengolahan	241.926,10	254.139,00	261.177,80	273.469,20	290.764,30
4a.	Listrik dan Gas	38.164,40	40.952,50	44.403,10	51.470,90	55.029,20
4b.	Air Bersih, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.843,80	10.615,10	11.367,70	12.827,20	13.485,10
5.	Bangunan (Konstruksi)	874.894,3	874.192,1	999.391,6	1.408.789,0	959.615,8
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.559.857,3	2.672.562,1	2.763.488,9	2.814.397,3	2.933.498,2
7a.	Pengangkutan (Transportasi dan Pergudangan)	1.782.819,3	1.807.892,5	1.806.657,4	1.715.846,2	1.757.196,8
7b.	Komunikasi dan Informasi	1.030.141,2	1.093.525,3	1.094.387,4	1.105.564,2	130.418,5
8a.	Keuangan dan Asuransi	322.832,4	311.750,4	320.281,1	338.953,8	357.925,4
8b.	Persewaan (Real Estate)	638.269,6	692.403,3	761.613,4	838.247,5	953.265,6
8c.	Jasa Perusahaan	254.111,0	270.352,6	284.812,4	310.573,7	323.968,2
9a.	Jasa Pendidikan	624.101,7	660.937,6	708.918,9	756.390,9	824.337,6
9b.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	384.899,8	415.021,1	446.064,3	478.954,7	522.854,3
9c.	Jasa-Jasa Lain	192.874,6	205.760,1	222.826,8	238.331,1	262.020,2
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	9.070.578,7	9.429.052,1	9.849.017,7	10.472.365,2	9.512.929,7
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	9.032.414,3	9.388.099,6	9.804.614,6	10.420.894,3	9.457.900,5

Keterangan :

- Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan dalam Juta Rupiah
- Pemisahan pada Point 4 disesuaikan dengan Buku Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2018 dikarenakan Pada Buku
- Untuk Point 7,8 dan 9 Berlaku sama seperti Poin 4 diatas.

Sumber :

- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh
- Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Tabel 61. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Kota Banda Aceh
 Tahun 2018

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
dst				

Keterangan :

Sumber :

Tabel 62. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	APBK	Dinas Lingkungan Hidup. Kebersihan dan Keindahan Kota		
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
		a. Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah	103.247.000	121.750.000
		b. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	136.351.557	130.649.000
		b. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	-	354.925.000
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
		a. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	19.894.000	17.640.000
		b. Pengukuran Kualitas Udara	-	123.334.000
		c. Pengukuran Kualitas Tanah	-	156.112.500
		d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3	-	41.704.000
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
		a. Penyusunan Program Pengembangan RTH	-	118.200.000
		b. Pemeliharaan RTH	-	3.829.299.700
		a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Hutan Kota	-	265.000.000
		a. Pengelolaan Pembibitan	-	205.878.000
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		

	a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5.927.557.682	1.707.950.000
	b. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	635.626.500	1.066.020.000
	c. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengolahan Persampahan	74.480.000	143.205.600
	d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengolahan Persampahan	773.853.896	326.912.100
	e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	38.950.000	81.989.750
	f. Pembersihan Sedimen dan Sampah Khusus	89.325.000	202.275.000
	g. Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA	1.578.099.000	1.530.625.000
	h. Pengembangan Pengelolaan 3R	-	140.937.168
	i. Sosialisasi Kebersihan dan Penerapan Hukum	-	339.120.000
	j. Sosialisasi Kebersihan dan Penerapan Hukum	-	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota		
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	8.312.445.466	
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9.719.660.250	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/ Air Limbah	10.984.055.100	
	Dinas Kesehatan Kota	106.000.000	252.000.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	106.393.900	
	Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	176.100.000	
	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	351.300.000	
	Total	39.133.339.351	11.155.526.818

Keterangan :

Sumber :

- Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh
- Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Banda Aceh
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Dinas Kesehatan

Tabel 63. Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak	
	Pajak Hotel	Rp 14.305.630.548
	Pajak Restoran	Rp 12.319.832.203
	Pajak Hiburan	Rp 342.342.011
	Pajak Reklame	Rp 4.454.518.718
	Pajak Penerangan Jalan	Rp 26.112.869.953
	Pajak Parkir	Rp 741.459.739
2	Retribusi	Rp 2.037.751.730
3	Laba BUMD	-
4	Pendapatan lainnya yang sah	
	Penerimaan jasa giro	Rp 309.245.032
	Pendapatan bunga deposito	Rp 10.188.070.283
	Jumlah	Rp 70.811.720.217

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh

Tabel 64. Inovasi Pengelolaan LH Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018

No.	Kota	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Banda Aceh	Firolisis	Pengolahan sampah kemasan plastik menjadi bahan bakar minyak	DLHK3 2018
2	Kota Banda Aceh	Lapangan Pengangkutan Sampah Berbasis Website	Metode pengangkutan sampah menggunakan sistem yang terkoneksi dengan jaringan internet	AMPL 2015
3	Kota Banda Aceh	Top 99 Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik)	IPLT Terkelola Warga Bahagia	Sinovik Award 2015
4	Kota Banda Aceh	Top 99 Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik)	IPLT dan Hutan Kota BNI Tibang	Sinovik Award 2015
5	Kota Banda Aceh	IMP	Pengelolaan RTH dan Air Limbah	IMP 2014

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh 2018

Tabel 65. Pelestarian Kearifan Lokal LH Kota Banda Aceh
Tahun 2018

No.	Kab/kota/kec	Bentuk Kearifan Lokal	Nama Kearifan Lokal	Deskripsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan :

Sumber :



WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 403 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI BAGIAN DARI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan yang bersih, sehat, serasi, seimbang, dan alami guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sangat dibutuhkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam wilayah Kota Banda Aceh, yang berfungsi sebagai paru-paru kota, sarana rekreasi dan tempat bermain bagi warga kota.
- b. bahwa untuk terselenggaranya pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau dengan baik, tertib, dan berkelanjutan, dipandang perlu menetapkan kawasan Ceurih, Tibang, Pelanggahan, Taman Hijau, sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara;
2. Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1983 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lokasi-lokasi Ruang Terbuka Hijau yang menjadi bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ceurih dengan luas \pm 2,2 Ha
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tibang dengan luas \pm 2 Ha
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Peulanggahan dengan luas \pm 2.5 Ha
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Hijau dengan Luas \pm 1160 m²
5. Ruang Terbuka Hujau (RTH) Taman Lamjame dengan luas \pm 4 Ha

KEDUA : Lokasi-lokasi sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, merupakan lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus dikembangkan dan dipelihara oleh instansi teknis dengan mempedomani kriteria Ruang Terbuka Hijau yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 08 Desember 2014 M

15 Shafar 1436 H





WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 230 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU LAMBUNG SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan yang bersih, sehat, serasi, seimbang, dan alami guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sangat dibutuhkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam wilayah Kota Banda Aceh, yang berfungsi sebagai paru-paru kota, sarana rekreasi dan bermain bagi warga kota;
 - b. bahwa untuk terselenggaranya pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau dengan baik, tertib, dan berkelanjutan, dipandang perlu menetapkan kawasan Ruang Terbuka Hijau Lambung sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;

P

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU : Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Lambung sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh.
- KEDUA : Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan lokasi Ruang Terbuka Hijau yang harus dikembangkan dan dipelihara oleh instansi teknis dengan mempedomani kriteria Ruang Terbuka Hijau yang berlaku:
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 4 Juli 2012 M

14 SYA'BAN 1433 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH, 


T. SAIFUDDIN. T.A



WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 231 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN HUTAN KOTA TIBANG SEBAGAI HUTAN KOTA KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH ,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan yang bersih, sehat, serasi, seimbang, dan alami untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sangat dibutuhkan keberadaan Hutan Kota dalam wilayah Kota Banda Aceh, yang berfungsi sebagai paru-paru kota, sarana rekreasi dan bermain bagi warga kota;
 - b. bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan dan pemeliharaan Hutan Kota dengan baik, tertib, dan berkelanjutan, dipandang perlu menetapkan kawasan Hutan Kota Kawasan Tibang sebagai Hutan Kota Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU** : Hutan Kota Kawasan Tibang sebagai Hutan Kota Kota Banda Aceh.
- KEDUA** : Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Hutan Kota yang harus dikembangkan dan dipelihara oleh instansi teknis dengan mempedomani kriteria Hutan Kota yang berlaku:
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal : 4 Juli 2012 M

14 SYA'BAN 1433 H





WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 256 Tahun 2017

TENTANG
PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI
HUTAN KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas udara dan lingkungan, dan mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, serasi, seimbang dan alami, membutuhkan adanya Hutan Kota dalam wilayah Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan sarana rekreasi bagi warga kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk kepentingan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas Hutan Kota, dipandang perlu menetapkan ruang terbuka hijau sebagai Hutan Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam keputusan;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan lokasi-lokasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai Hutan Kota dalam wilayah Kota Banda Aceh:
- a. Ruang Terbuka Hijau Taman Krueng Neng, Gampong Lamjamee, Kecamatan Jaya Baru seluas 1,5 Ha;
 - b. Ruang Terbuka Hijau Titi Panyang, Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala seluas 3,8 Ha; dan
 - c. Ruang Terbuka Hijau Kota Gampong Pande I dan Gampong Pande II, Kecamatan Kuta Raja dengan luas 1,19 Ha.
- KEDUA** : Peta Lokasi Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Lokasi Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan lokasi Hutan Kota yang harus dilestarikan pemeliharannya oleh instansi teknis dengan mempedomani kriteria Hutan Kota yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Juni 2017 M
13 Ramadhan 1438 H



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH

Nomor : 256 Tahun 2017
Tanggal : 8 Juni 2017 M
13 Ramadhan 1438 H

Penetapan Ruang Terbuka Hijau Sebagai
Hutan Kota Banda Aceh

NO	NAMA RTH	LOKASI	LUAS
1	Hutan Kota Taman Krueng Neng	Gp. Lamjamee Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh	1,5 Ha
2	Hutan Kota Titi Panyang	Gp. Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	3,8 Ha
3	Hutan Kota Gampong Pande I dan II	Gp. Pande Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh	1,19 Ha

WALIKOTA BANDA ACEH,

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL



WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 261 TAHUN 2007

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN LOKASI HUTAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- bahwa dalam upaya menghadapi tantangan kualitas udara dan lingkungan yang cenderung semakin menurun sebagai akibat meningkatnya aktifitas perkotaan, sedangkan di sisi lain kondisi lingkungan yang bersih, sehat, serasi, seimbang, dan alami wajib dipelihara, dilestarikan, dan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, oleh karenanya sangat dibutuhkan keberadaan Hutan Kota dalam wilayah Kota Banda Aceh, yang berfungsi sebagai paru-paru kota, dan sarana rekreasi bagi warga kota;
 - bahwa untuk terseenggaranya pengadaan dan pembangunan sarana Hutan Kota dimaksud dengan baik, tertib, dan berkelanjutan, perlu menunjuk dan menetapkan beberapa lokasi taman kota yang telah ada dan lokasi baru sesuai dengan rencana tata ruang kota, sebagai Lokasi Hutan Kota;
 - bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 - Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2002 - 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan lokasi-lokasi untuk pembuatan dan pembangunan Hutan Kota dalam wilayah Kota Banda Aceh, yaitu sebagai berikut :

1. Lokasi Taman Depan Masjid Raya, di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman;
2. Lokasi Taman Jembatan POM (ujung selatan jembatan Pante Perak), di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman;
3. Lokasi Taman Putro Phang, di Kelurahan Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman;
4. Lokasi Komplek Perkuburan Kher Khoff, di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman;
5. Lokasi Taman Simpang Tiga (Depan Kantor Dinas Prasarana Wilayah Provinsi NAD), di Gampong Geuccu Kaye Jato, Kecamatan Banda Raya.
6. Lokasi Taman Jembatan Surabaya (Lahan Eks. Kantor Pemadam/PDAM), di Kelurahan Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam;
7. Lokasi Sebagian Taman Sri Ratu Safiatuddin (bagian selatan taman), di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala;
8. Lokasi Sisi Barat Kanal Banjir Krueng Aceh/Lamnyong, di Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala.

KEDUA : Lokasi-lokasi sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, merupakan lokasi Hutan Kota yang harus dilestarikan pemeliharannya oleh instansi teknis dengan mempedomani kriteria hutan kota yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Juli 2007 M
 11 Rajab 1428 H

WALIKOTA BANDA ACEH, *by*

Mawardy Nurdin
MAWARDY NURDIN



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA

Jalan Pocut Baren No. 30 Telp. (0651) 31217 Fax. (0651) 21019
BANDA ACEH - 23122

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 67 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN SEMINAR LAPORAN STATUS LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tenaga Ahli pada Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 dengan suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Tahun 2018;
14. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah pada dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Memberikan arahan dan masukan terhadap penyusunan SLHD.
 b. Melakukan analisa terhadap data primer dan sekunder menggunakan persamaan dan metode yang sesuai dengan hasil yang diinginkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBK Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Banda Aceh.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 MEI 2018 M
21 SYA'BAN 1439 H

 Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Keindahan
Kota Banda Aceh 



Drs. T. SAMSUAR, M.Si
Pembina Utama Muda 
Nip. 19660327 198603 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Banda Aceh;
2. Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh;
4. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kota Banda Aceh;
5. Kabag. Umum Setda kota Banda Aceh;
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh;
7. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh;
8. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
9. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan
Kota Banda Aceh

NOMOR : 67 TAHUN 2018

TANGGAL : 7 MEI 2018 M

21 SYA'BAN 1439 H

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA AHLI KEGIATAN PENYUSUNAN DAN
SEMINAR LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018

NO	NAMA/NIP	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Rini Safitri, M.Si Nip. 19700425 199512 2 001	Fakultas MIPA Unsyiah Jurusan Fisika	Ketua
2.	Dr. Ir. Muhammad Zaki, M.Sc Nip. 19650307 199203 1 003	Fakultas Teknik Unsyiah Jurusan Teknik Kimia	Sekretaris
3.	DR. Suwarno, M.Si Nip. 19690516 199303 1 001	Fakultas MIPA Unsyiah Jurusan Biologi	Anggota

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Keindahan
Kota Banda Aceh



Drs. T. SAMSUAR, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19660327 198603 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA

Jalan Pocut Baren No. 30 Telp. (0651) 31217 Fax. (0651) 21019
BANDA ACEH - 23122

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 23 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENYUSUN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2018 dengan suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Tahun 2018;
10. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 yang Selanjutnya disebut "Tim Teknis Penyusun SLHD" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Penyusun SLHD mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan;
 - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan hingga terselesainya penyusunan SLHD;
 - c. memberikan arahan terhadap penyusunan SLHD sesuai dengan format yang ditentukan;
 - d. merumuskan isu-isu lingkungan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan sampling dan uji laboratorium dan
 - f. menyusun SLHD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Penyusun SLHD bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Banda Aceh.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Mei 2018 M
28 Sya'ban 1439 H

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kebersihan Dan Keindahan
Kota Banda Aceh



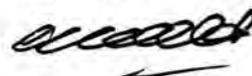
Drs. T. SAMSUAR, M.Si
Pembina utama muda
Nip. 19660327 198603 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan
Keindahan Kota Banda Aceh
NOMOR : 83 TAHUN 2018
TANGGAL : 14 MEI 2018 M
28 SYA'BAN 1439 H

SUSUNAN PERSONALIA
TIM TEKNIS PENYUSUN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA/NIP	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. T. Samsuar, M.Si Nip. 19660327 198603 1 003	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Ketua
2.	Cut Safarina Yulianti, ST. MM, MT Nip. 19770215 200112 2 002	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Sekretaris
3.	Adi Winata, ST Nip. 19781227 200604 1 004	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Anggota
4.	Suwarni, ST Nip. 19711120 200604 2 002	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Anggota
5.	Zulfan Effendi, SE. Ak Nip. 19770930 200312 1 002	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Anggota
6.	Nursetyati Wahyuningtyas, ST Nip. 19761121 200604 2 003	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Anggota
7.	Zulkifli, S. Si Nip. 19771331 200504 1 003	Bappeda Kota Banda Aceh	Anggota
8.	T. Azwardi Mumanda	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Anggota
9.	Khairunisak Dara Lajuna	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Anggota

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kebersihan Dan Keindahan
Kota Banda Aceh



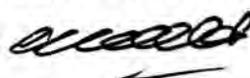
Drs. T. SAMSUAR, M.Si
Pembina utama muda
Nip. 19660327 198603 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan
Keindahan Kota Banda Aceh
NOMOR : 83 TAHUN 2018
TANGGAL : 14 MEI 2018 M
28 SYA'BAN 1439 H

SUSUNAN PERSONALIA
TIM TEKNIS PENYUSUN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA/NIP	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. T. Samsuar, M.Si Nip. 19660327 198603 1 003	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Ketua
2.	Cut Safarina Yulianti, ST. MM, MT Nip. 19770215 200112 2 002	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Sekretaris
3.	Adi Winata, ST Nip. 19781227 200604 1 004	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Anggota
4.	Suwarni,ST Nip. 19711120 200604 2 002	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Anggota
5.	Zulfan Effendi, SE. Ak Nip. 19770930 200312 1 002	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Anggota
6.	Nursetyati Wahyuningtyas, ST Nip. 19761121 200604 2 003	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Anggota
7.	Zulkifli, S. Si Nip. 19771331 200504 1 003	Bappeda Kota Banda Aceh	Anggota
8.	T. Azwardi Mumanda	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Anggota
9.	Khairunisak Dara Lajuna	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Anggota

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kebersihan Dan Keindahan
Kota Banda Aceh



Drs. T. SAMSUAR, M.Si
Pembina utama muda
Nip. 19660327 198603 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA

Jalan Pocut Baren No. 30 Telp. (0651) 31217 Fax. (0651) 21019
BANDA ACEH - 23122

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 68 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENGOLAH/ANALISA DATA
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN SEMINAR LAPORAN STATUS LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Tenaga Pengolah/Analisa Data pada Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 dengan suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Tahun 2018;
14. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Pengolah/Analisa Data kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pengolah/Analisa Data mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima hasil kumpulan data dari Tim Pengumpul Data.
 - b. Melakukan pengolahan data baik primer maupun sekunder.
 - c. Menyusun/menulis laporan SLHD.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengolah/Analisa Data bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBK Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Banda Aceh.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Mei 2018 M
21 Sya'ban 1439 H

 Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Keindahan
Kota Banda Aceh 



Drs. T. SAMSUAR, M.Si
Pembina Utama Muda 
Nip. 19660327 198603 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Banda Aceh;
2. Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh;
4. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kota Banda Aceh;
5. Kabag. Umum Setda kota Banda Aceh;
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh;
7. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh;
8. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
9. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan
Keindahan Kota Banda Aceh
NOMOR : 68 THN 2018
TANGGAL : 7 MEI 2018 M
21 SYAHAN 1439 H

SUSUNAN PENGOLAH/ANALISA DATA KEGIATAN PENYUSUNAN DAN
SEMINAR LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018

NO	NAMA/NIP	INSTANSI
1.	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng Nip. 19670101 199303 1 004 Penata Tk.I, III/d	Fakultas Teknik Unsyiah Jurusan Teknik Kimia

 Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Keindahan
Kota Banda Aceh



Drs. T. SAMSUAR, M.Si
Pembina Utam Muda
Nip. 19660327 198603 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA

Jalan Pocut Baren No. 30 Telp. (0651) 31217 Fax. (0651) 21019
BANDA ACEH - 23122

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR : **66** TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENGUMPUL DATA SEKUNDER
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN SEMINAR LAPORAN STATUS LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Tenaga Pengumpul Data Sekunder pada Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 dengan suatu Keputusan;
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Tahun 2018;
14. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Pengumpul Data Sekunder pada kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengumpul Data Sekunder mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas/instansi terkait di Kota Banda Aceh dalam rangka pengumpulan data.
- b. Menyerahkan hasil pengumpulan data SLHD kepada Pengolah/Analisa Data.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengumpul Data Sekunder bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBK Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Banda Aceh.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 MEI 2018 M
21 SYA'BAN 1439 H

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Keindahan
Kota Banda Aceh



Drs. T. SAMSUAR, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19660327 198603 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Banda Aceh;
2. Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh;
4. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kota Banda Aceh;
5. Kabag. Umum Setda kota Banda Aceh;
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh;
7. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh;
8. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
9. Pertinggal.

**Notulensi Rapat Awal Kegiatan Penyusunan dan Seminar
Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)/Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
Kota Banda Aceh Tahun 2018**

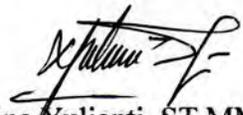
Hari/Tanggal rapat : Jumat/ 20 April 2018
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Lantai III Gedung DLHK3
Peserta : Daftar Terlampir

Hasil diskusi dari rapat dapat diringkas sebagai berikut :

- Membentuk tim/menyusun personel/anggota yang terlibat dalam tim SLHD.
- Tim yang dibentuk terdiri atas Tim Teknis, Tenaga Ahli, Pengolah/Analisa Data, dan Pengumpul Data yang dikoordinir oleh PPTK SLHD.
- Pembentukan Tim dan uraian tugasnya akan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh
- Menyiapkan segala kebutuhan administrasi yang diperlukan.
- Diharapkan tim yang terbentuk dapat bekerjasama dalam mendukung suksesnya kegiatan.

Demikian, ringkasan hasil diskusi rapat ini dibuat untuk dapat menjadi bahan seperlunya.

Banda Aceh, 20 April 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

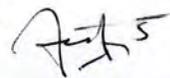
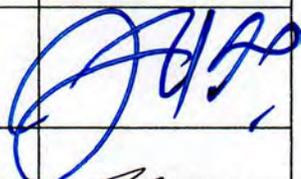

Cut Safarina Yulianti, ST,MM,MT
Nip. 19770215 200112 2 002

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat / 20 April 2018

Tempat : Aula Lantai III DLHK3

Acara : Rapat Awal Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah

No.	Nama	Institusi / Lembaga	Tanda Tangan
1.	CUT SAFARINA Y	DLHK3	
2.	SUWARNI	DLHK3	
3.	ZULFAN EFFENDI	DLHK3	
4.	Nur Setyati W.	DLHK3	
5.	T. Azwardy M.	DLHK3	
6.	Alam Permadi	DLHK3	
7.	Sara Mance	DLHK3	
8.	Acti Winata	DLHK3	
9.	Khairunnisak Dara Lajuna	DLHK3	
10.			

Dokumentasi Rapat Awal Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan SLHD/IKPLHD
Tahun 2018
Tanggal : 20 April 2018



**Notulensi Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan
Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)/ Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Banda Aceh Tahun 2018**

Hari / Tanggal : Kamis / 12 Juli 2018
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Lantai III Gedung DLHK3
Peserta : (Daftar hadir terlampir)

Hasil Rapat :

1. Pertemuan difokuskan pada pembahasan tentang pengambilan sampling di lapangan dan akan bekerjasama dengan Baristand Industri Banda Aceh.
2. Menentukan beberapa titik lokasi sampling dengan mengacu kepada lokasi sampling pada tahun lalu dan disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia.
3. Pengujian/Sampling untuk tahun 2018 ditetapkan sebanyak 61 (enam puluh satu) titik lokasi sampling, yaitu : pengujian kualitas udara sebanyak 20 (dua puluh) titik sampling dan pengujian kualitas air sebanyak 41 (empat puluh satu) titik sampling.
4. Kegiatan sampling akan dilakukan secepat mungkin namun harus disesuaikan dengan cuaca agar hasil yang didapat maksimal.
5. Diupayakan sampling dilakukan pada bulan Agustus 2018 dan seterusnya mengikuti yang telah disepakati sesuai dengan pertimbangan teknis dan kebutuhan.
6. Waktu pelaksanaan dan lokasi sampling akan ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi cuaca.

Demikian, ringkasan hasil diskusi rapat ini dibuat untuk dapat menjadi bahan seperlunya.

Banda Aceh, 12 Juli 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



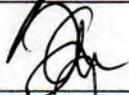
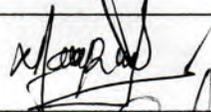
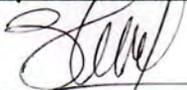
Cut Safarina Yulianti, ST,MM,MT
Nip. 19770215 200112 2 002

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis /12 Juli 2018

Tempat : Aula lantai III DLHK3

Acara : Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah

No.	Nama	Institusi /Lembaga	Tanda Tangan
1.	Nur Setyati W.	DLHK3	
2.	CUT SAFARINA Y	DLHK3	
3.	Adi Winata	DLHK3	
4.	T. AWARDY M	DLHK3	
5.	Nasrizal	DLHK3	
6.	ERNA MASNIARTI	DLHK3	
7.	A. Elia Nova	DLHK3	
8.	Alam Permadi	DLHK3	
9.	Jana Nance GA	DLHK3	
10.	Khairunnisak Dara Lajuna	DLHK3	
11.	SUWARNI	DLHK3	
12.	ZULFAN EFFENDI	DLHK3	
13.			
14.			
15.			

Dokumentasi Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan SLHD/IKPLHD
Tahun 2018
Tanggal : 12 Juli 2018



**Notulensi Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan
Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)/ Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Banda Aceh Tahun 2018**

Hari / Tanggal : Senin / 27 Agustus 2018
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Aula Lantai III Gedung DLHK3
Peserta : (Daftar hadir terlampir)

Hasil Rapat :

1. Menginput dan menginventarisir data-data sekunder dari beberapa sumber data yang ada, baik yang dikirim oleh instansi terkait maupun dari data-data dokumen lingkungan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
2. Sampling untuk pengujian kualitas udara dan pengulangan sampling untuk air direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2018.
3. Draft laporan SLHD agar dapat dikirim via email (*soft copy*) kepada seluruh tim yang terlibat, khususnya tenaga ahli agar perbaikan dan masukan dapat langsung diberikan.

Demikian, ringkasan hasil diskusi rapat ini dibuat untuk dapat menjadi bahan seperlunya.

Banda Aceh, 27 Agustus 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

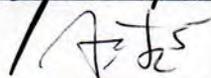
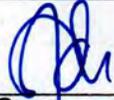
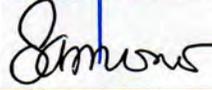
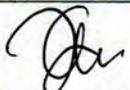
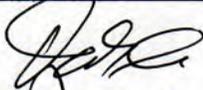
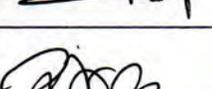
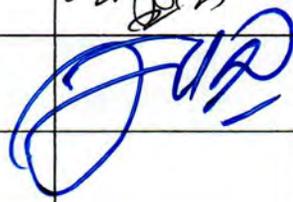

Cut Safarina Yulianti, ST,MM,MT
Nip. 19770215 200112 2 002

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin / 27 Agustus 2018

Tempat : Aula Lantai III DLHK3

Acara : Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup

No.	Nama	Institusi / Lembaga	Tanda Tangan
1.	Rini Safitri, M.Si	Tenaga Ahli	
2.	CUT SAFARINA Y	DLHK3	
3.	SUWARNI	DLHK3	
4.	SUHENDRAYATNA	Tenaga Ahli	
5.	Suwarno	Tenaga Ahli	
6.	Adi Winata	DLHK3	
7.	Nur Setyati W.	DLHK3	
8.	Muhammad Zaki	Tenaga Ahli	
9.	Khairunnisak Dara Lajuna	DLHK3	
10.	T. Azwardy M.	DLHK3	
11.	Sara Mance	DLHK3	
12.	Alan Permadi	DLHK3	
13.	A. ELIA NOVA	DLHK3	
14.	ZULFAN EFFENDI	DLHK3	
15.			

Dokumentasi Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan SLHD/IKPLHD
Tahun 2018
Tanggal : 27 Agustus 2018



**Notulensi Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan
Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)/ Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Banda Aceh Tahun 2018**

Hari / Tanggal : Kamis / 27 September 2018
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Aula Lantai III Gedung DLHK3
Peserta : (Daftar hadir terlampir)

Hasil Rapat :

1. Menginput data-data sekunder yang dikirim oleh instansi/SKPD ke dalam tabel dan disesuaikan dengan format yang ada untuk buku DATA SLHD.
2. Hal-hal terkait mengenai data yang dianggap masih kurang untuk diisikan ke dalam tabel, yaitu :
 - Untuk data transportasi dapat diusahakan melalui Dinas Perhubungan ataupun Satlantas jika memungkinkan.
 - Untuk tabel nihil juga tetap dinarasikan sebagai data pembanding.
 - Untuk data mengenai premium mungkin dapat diperoleh melalui Pertamina sebagai penyalur BBM ataupun dari Satlantas atau dinas pendapatan berdasarkan banyaknya jumlah kendaraan yang terdata wajib pajak
3. Pengecekan kembali semua data-data yang telah diinput untuk dapat dinarasikan dalam buku laporan.
4. Penyusunan laporan dapat langsung dibuat draft sesuai dengan sistematika dari buku panduan yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Selanjutnya draft laporan tersebut dapat dikirim via email kepada seluruh tim teknis dan tenaga ahli.

6. Hasil koreksi dan perbaikan serta masukan akan dikirim ulang oleh tim teknis dan tenaga ahli via email atau dijemput dan dapat langsung dilakukan revisi.

Demikian, ringkasan hasil diskusi rapat ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

Banda Aceh, 27 September 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Cut Safarina Yulianti, ST,MM,MT
Nip. 19770215 200112 2 002

Dokumentasi Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan SLHD/IKPLHD
Tahun 2018
Tanggal : 27 September 2018



**Notulensi Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan
Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)/ Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Banda Aceh Tahun 2018**

Hari / Tanggal : Rabu / 12 September 2018
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Aula Lantai III Gedung DLHK3
Peserta : (Daftar hadir terlampir)

Hasil Rapat :

1. Data yang telah diinput baik data sekunder dan data primer dapat dikirim ulang melalui email masing-masing Tim Teknis dan Tenaga Ahli untuk dilakukan koreksian.
2. Diharapkan kepada tenaga ahli untuk dapat melakukan analisa terhadap data tersebut sesuai dengan persamaan dan metode yang ada.
3. Hasil perbaikan dan masukan agar dapat dikirim kembali kepada email PPTK SLHD.
4. Penyusunan laporan SLHD berikut buku data harus sesuai dengan format yang diberikan oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup agar nilai yang didapat dapat maksimal.
5. Bahwa laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) sekarang berganti nama menjadi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).

Demikian, ringkasan hasil diskusi rapat ini dibuat untuk dapat menjadi bahan seperlunya.

Banda Aceh, 12 September 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

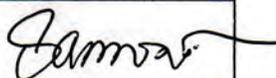
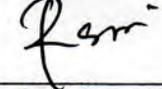
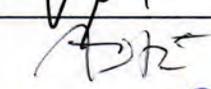
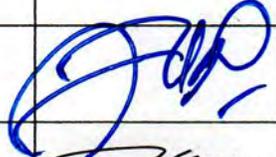
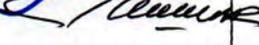

Cut Safarina Yulianti, ST,MM,MT
Nip. 19770215 200112 2 002

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu/12 September 2018

Tempat : Aula Lantai II DLHK3

Acara : Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup

No.	Nama	Institusi /Lembaga	Tanda Tangan
1.	SUWARNO	TENAGA AHLI	
2.	CUT SAFARINA Y	DLHK3	
3.	Adi Winata	DLHK3	
4.	Rini Safitri, M.Si	Tenaga Ahli	
5.	Muhammad Zaki	Tenaga Ahli	
6.	Alam Permadi	DLHK3	
7.	Sariz Mance	DLHK3	
8.	T. Awwardy M.	DLHK3	
9.	Suharta Yatra	Tenaga Ahli	
10.	SUWARNI	DLHK3	
11.	ZULFAN EFFENDI	DLHK3	
12.	Nur Setyati W.	DLHK3	
13.	Khairunnisak Darz Lajuna	DLHK3	
14.	A. Elia Nova	DLHK3	
15.			

Dokumentasi Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan SLHD/IKPLHD
Tahun 2018
Tanggal : 12 September 2018



**Notulensi Rapat Pembahasan Tugas Tim Teknis dan Tenaga Ahli
Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD)/ Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
Kota Banda Aceh Tahun 2018**

Hari / Tanggal : Senin/ 4 Juni 2018
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Lantai III Gedung DLHK3
Peserta : (Daftar hadir terlampir)

Hasil Rapat meliputi:

1. Penjelasan Tugas Tim Teknis dan Tenaga Ahli SLHD Tahun 2018
2. Untuk Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data SLHD dapat dilakukan dengan cara berikut ini:
 - Dalam pelaksanaan tugasnya tim teknis akan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan untuk mendapatkan data primer maupun sekunder yang dibutuhkan
 - Data tersebut selanjutnya akan dianalisa oleh Tenaga Ahli menggunakan persamaan dan metode yang sesuai dengan hasil yang diinginkan dan Tenaga Ahli akan memberikan hasil penelitian dan informasi tentang SLHD
 - Tim Teknis akan mengkoordinasikan pelaksanaan sampling dan uji laboratorium
 - Tim teknis juga akan mengawasi pelaksanaan kegiatan hingga selesainya penyusunan laporan SLHD
 - Tim Teknis dan Tenaga Ahli saling berkoordinasi dalam memberikan arahan dan masukan terhadap penyusunan SLHD sesuai dengan format yang ditentukan dan merumuskan isu-isu lingkungan yang terjadi dalam laporan SLHD

3. Menyiapkan surat permintaan data sekunder kepada seluruh SKPD terkait dengan pendataan yang diperlukan.

Demikian, ringkasan hasil diskusi rapat ini dibuat untuk dapat menjadi bahan seperlunya.

Banda Aceh, 4 Juni 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Cut Safarina Yulianti, ST,MM,MT
Nip. 19770215 200112 2 002

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin / 4 Juni 2018

Tempat : Aula DLHK3

Acara : Pembahasan Tugas Tim Teknis & Tenaga Ahli SLHD

No.	Nama	Institusi /Lembaga	Tanda Tangan
1.	Nur Setrati W.	DLHK3	
2.	CUT SAFARIANA Y	DLHK3	
3.	Zulpan EFFENDI	DLHK3	
4.	Rini Sapti, M.Si	Tenaga Ahli	
5.	SUWARNI	DLHK3	
6.	A. Elia Nova	DLHK3	
7.	NASRIBAL	DLHK3	
8.	Adi Winata	DLHK3	
9.	SUHENDRAYATNA	Tenaga Ahli	
10.	T. Awardy M.	DLHK3	
11.	MUHAMMAD ZAKI	Tenaga Ahli	
12.	Alan Permadi	DLHK3	
13.	Sara Mance	DLHK3	
14.	SUWARNO	Tenaga Ahli	
15.	Khairunnisak Dara Lajuna	DLHK3	

Dokumentasi Rapat Pembahasan Tugas Tim Teknis Dan Tenaga Ahli Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan SLHD/IKPLHD Tahun 2018
Tanggal : 4 Juni 2018



**Notulensi Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan
Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)/ Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Banda Aceh Tahun 2018**

Hari / Tanggal : Kamis / 27 September 2018
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Aula Lantai III Gedung DLHK3
Peserta : (Daftar hadir terlampir)

Hasil Rapat :

1. Menginput data-data sekunder yang dikirim oleh instansi/SKPD ke dalam tabel dan disesuaikan dengan format yang ada untuk buku DATA SLHD.
2. Hal-hal terkait mengenai data yang dianggap masih kurang untuk diisikan ke dalam tabel, yaitu :
 - Untuk data transportasi dapat diusahakan melalui Dinas Perhubungan ataupun Satlantas jika memungkinkan.
 - Untuk tabel nihil juga tetap dinarasikan sebagai data pembanding.
 - Untuk data mengenai premium mungkin dapat diperoleh melalui Pertamina sebagai penyalur BBM ataupun dari Satlantas atau dinas pendapatan berdasarkan banyaknya jumlah kendaraan yang terdata wajib pajak
3. Pengecekan kembali semua data-data yang telah diinput untuk dapat dinarasikan dalam buku laporan.
4. Penyusunan laporan dapat langsung dibuat draft sesuai dengan sistematika dari buku panduan yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Selanjutnya draft laporan tersebut dapat dikirim via email kepada seluruh tim teknis dan tenaga ahli.

6. Hasil koreksi dan perbaikan serta masukan akan dikirim ulang oleh tim teknis dan tenaga ahli via email atau dijemput dan dapat langsung dilakukan revisi.

Demikian, ringkasan hasil diskusi rapat ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

Banda Aceh, 27 September 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



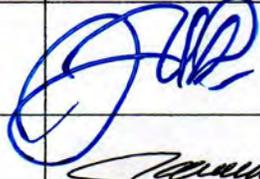
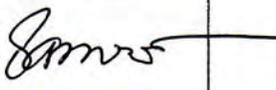
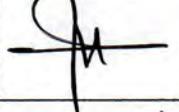
Cut Safarina Yulianti, ST,MM,MT
Nip. 19770215 200112 2 002

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis / 27 September 2018

Tempat : Aula Lantai III DLHK3

Acara : Rapat Kegiatan penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup

No.	Nama	Institusi /Lembaga	Tanda Tangan
1.	CUT SAFARINA Y	DLHK3	
2.	SUWARNI	DLHK3	
3.	Suhendra yatra	Tenaga Ahli	
4.	Muhammad Zaki	Tenaga Ahli	
5.	ZUFAN EFFENDI	DLHK3	
6.	Nur Setyati W.	DLHK3	
7.	SUWARNO	TENAGA AHLI	
8.	Khairunnisak Dara Lajuna	DLHK3	
9.	T. Awwady M.	DLHK3	
10.	Atam Permadi	DLHK3	
11.	Sara Mance	DLHK3	
12.	Adi Winata	DLHK3	
13.	Rini Safatri, N. si	Tenaga Ahli	

**Notulensi Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan
Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)/ Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Banda Aceh Tahun 2018**

Hari / Tanggal : Kamis / 4 Oktober 2018
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Aula Lantai III Gedung DLHK3
Peserta : (Daftar hadir terlampir)

Hasil Rapat :

1. Pengulangan sampling untuk pengukuran kualitas air akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018
2. Pembahasan mengenai penyusunan laporan IKPLHD dan melakukan koreksi atas draft yang telah disusun.
3. Beberapa hal yang perlu diingat oleh tim penyusun laporan IKPLHD berkaitan dengan penilaian yang akan dilakukan terhadap Buku Ringkasan Eksekutif IKPLHD dan Laporan IKPLHD adalah:
 - Buku Ringkasan Eksekutif IKPLHD memiliki nilai lebih besar dibanding buku Laporan dalam penilaian Penyusunan Laporan IKPLHD, yaitu 80% untuk Buku DATA dan 20% untuk buku LAPORAN
 - Dalam pengisian Buku Ringkasan Eksekutif IKPLHD disesuaikan dengan format yang telah ada, tabel tersebut tidak boleh ditambah atau dikurangi isinya
 - Bila ada data tambahan boleh dibuat tabel lain sebagai tabel pendukung dari tabel utama yang telah ditetapkan.
 - Penulisan sumber data harus selalu dicantumkan dan jelas, jika tidak dibuat sumber data maka data tersebut akan bernilai nol.

- Data dapat diambil/dipakai dari data 3 (tiga) tahun terakhir.

Demikian, ringkasan hasil diskusi rapat ini dibuat untuk dapat menjadi bahan seperlunya.

Banda Aceh, 4 Oktober 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Cut Safarina Yulianti, ST,MM,MT

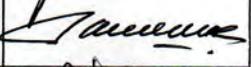
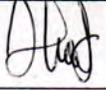
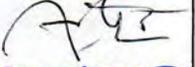
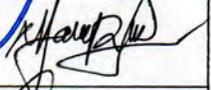
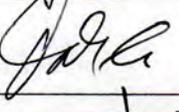
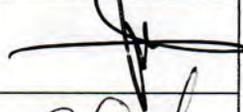
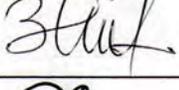
Nip. 19770215 200112 2 002

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis / 4 Oktober 2018

Tempat : Aula lantai III DLHK3

Acara : Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup

No.	Nama	Institusi /Lembaga	Tanda Tangan
1.	CUT SAFARINA Y	DLHK3	
2.	Nur Setyati W.	DLHK3	
3.	HADI AKRAM	DLHK3	
4.	SUWARNI	DLHK3	
5.	ZULFAN EFFENDI	DLHK3	
6.	MASRIZAL	DLHK3	
7.	Khairunnisak Dara Lajuna	DLHK3	
8.	Alan Permedi	DLHK3	
9.	Sara Nance	DLHK3	
10.	T. Awwaly M	DLHK3	
11.	ERNA MASNIARTI	"	
12.	Adi Winata	DLHK3	
13.	A. Eli'a Novia	DLHK3	
14.			
15.			

**Notulensi Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan
Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)/ Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Banda Aceh Tahun 2018**

Hari / Tanggal : Selasa / 16 Oktober 2018
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Aula lantai III Gedung DLHK3
Peserta : (Daftar hadir terlampir)

Hasil Rapat :

1. Pembahasan mengenai penyusunan/penulisan LAPORAN SLHD
2. Bab Pendahuluan berisikan tentang isu utama dari Propinsi/kabupaten/kota, disebutkan pula alasan memilih isu tersebut, dan analisa SPR (*State, Presure, Respon*) yaitu tentang kondisi, tekanan, respon dari isu tersebut serta upaya dari stakeholder dalam penanganannya.
3. Analisa data tabel dalam buku laporan boleh pakai data lain tetapi yang sesuai dengan substansi yang diminta

Demikian, ringkasan hasil diskusi rapat ini dibuat untuk dapat menjadi bahan seperlunya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



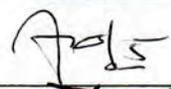
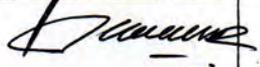
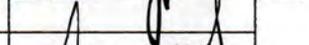
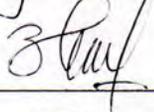
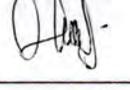
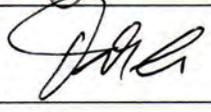
Cut Safarina Yulianti, ST,MM,MT
Nip. 19770215 200112 2 002

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa/ 16 Oktober 2018

Tempat : Aula Lantai III DLHK3

Acara : Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup

No.	Nama	Institusi /Lembaga	Tanda Tangan
1.	Suwarni	DLHK3	
2.	CUT SAFARINA Y	DLHK3	
3.	Nur Setyati W.	DLHK3	
4.	ZUPAN EFFENDI		
5.	P. Arwardy M.	DLHK3	
6.	MASRIZAL	DLHK3	
7.	ERNA MASWIARTI	DLHK3	
8.	A. Elia Nova	DLHK3	
9.	HADI AKRAM	DLHK3	
10.	Alan Perumadi	DLHK3	
11.	Sara Mance	DLHK3	
12.	MARHAMAH	"	
13.	MIKSALMINA	DLHK3	
14.	Adi Winata		
15.	Khairunnisak Dara Laguna		

**Notulensi Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan
Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)/ Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Banda Aceh Tahun 2018**

Hari / Tanggal : Senin / 29 Oktober 2018
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Aula lantai III Gedung DLHK3
Peserta : (Daftar hadir terlampir)

Hasil Rapat :

1. Penulisan Laporan SLHD ditargetkan selesai pada akhir bulan November 2018, bila bisa dipercepat akan lebih baik dan bila masih ada revisi yang dianggap perlu untuk dilakukan maka masih dapat dilakukan sebelum laporan dikirim ke Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), karena waktu pengiriman laporan selambat-lambatnya diterima oleh pusat pada bulan Maret 2015.
2. Mengingat laporan sudah disusun oleh masing-masing personel/anggota penyusun laporan SLHD maka pada akhir penulisan laporan SLHD diperlukan *editor*, yang bertugas untuk menyelaraskan bahasa dari masing-masing personel penyusun laporan SLHD sehingga isi dari LAPORAN SLHD menjadi satu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan
3. Pengecekan kembali laporan dari masing-masing personel tim penyusun, memberikan masukan dan input data-data terkini yang perlu *diupdate*.
4. Tenaga ahli diharapkan dapat memberikan masukan secara intens/terus menerus terhadap hasil analisa dan kompilasi data yang telah dilakukan baik secara pribadi maupun tim.

Demikian, ringkasan hasil diskusi rapat ini dibuat untuk dapat menjadi bahan seperlunya.

Banda Aceh, 29 Oktober 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

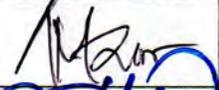
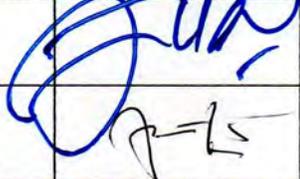
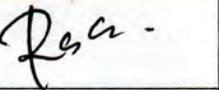
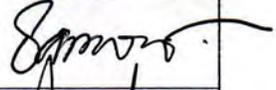
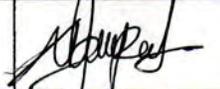
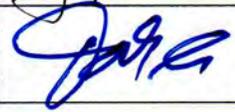

Cut Safarina Yulianti, ST,MM,MT
Nip. 19770215 200112 2 002

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin/29 Oktober 2018

Tempat : Aula Lantai III DLHK3

Acara : Rapat kegiatan penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup

No.	Nama	Institusi /Lembaga	Tanda Tangan
1.	CUT SAFARINA Y	DLHK3	
2.	Muhammad Zaki	Tenaga Ahli	
3.	Zulfan Effendi		
4.	Suwarni	DLHK3	
5.	Rini Safitri, M.Si	Tenaga Ahli	
6.	Nur Setyati W.	DLHK3	
7.	T. AWARDY M	DLHK3	
8.	Suhendra yatra	Tenaga Ahli	
9.	A. Elia Nova	DLHK3	
10.	Alam Permadi	DLHK3	
11.	Sara Mance	DLHK3	
12.	Adi Winata		
13.	SUWARNO	TENAGA AHLI	
14.	NASRIZAL		
15.	Khairunnisak Darz L		

**Notulensi Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan
Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)/ Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Banda Aceh Tahun 2018**

Hari / Tanggal : Selasa / 13 November 2018
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Aula lantai III Gedung DLHK3
Peserta : (Daftar hadir terlampir)

Hasil Rapat :

1. Finalisasi penyusunan Laporan SLHD
2. Mengedit tulisan-tulisan yang salah dalam pengetikan
3. Melakukan pengecekan kembali apakah semua sudah sesuai dengan yang diharapkan
4. Mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk cetak buku data dan laporan, namun sebelum pencetakan agar dapat dipastikan bahwa kedua buku siap untuk dicetak khususnya substansi isi dari buku data dan buku laporan.
5. Menyiapkan semua bahan administrasi yang diperlukan untuk amprahan keuangan
6. Pencetakan Laporan

Demikian, ringkasan hasil diskusi rapat ini dibuat untuk dapat menjadi bahan seperlunya.

Banda Aceh, 13 November 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



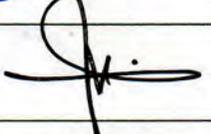
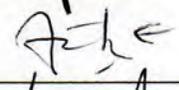
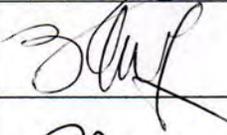
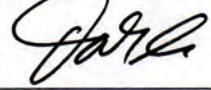
Cut Safarina Yulianti, ST,MM,MT
Nip. 19770215 200112 2 002

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa/ 13 November 2018

Tempat : Aula lantai III DLHK3

Acara : Rapat Kegiatan Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup

No.	Nama	Institusi /Lembaga	Tanda Tangan
1.	CUT SAFARINDA Y	DLHK3	
2.	Adi winata		
3.	ZULFAN EFFENDI		
4.	Nun Setyati W.	DLHK3	
5.	T. Awwady M	DLHK3	
6.	Suwarni	DLHK3	
7.	YASRIZAL		
8.	ERNA MASNIAZTI	DLHK3	
9.	A. Elia Nava	DLHK3	
10.	Khairunnisak Darz Lajuna		
11.	HADI AKRAM	DLHK3	
12.	MARTHAMAH	DLHK3	
13.	MIKSALMINA	- " -	
14.	Alam Permedi	DLHK3	
15.	Sarza Mance	DLHK3	